Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
DI SUKADANA





DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG

Nomor : [illegible]/LHP/XVIII.BLP/05/2025
Tanggal : [illegible] Mei 2025

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
DI SUKADANA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan ini memuat:

a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN... 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN..... 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Nugraha Bagus Widiarsa, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. RNA-1556

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Arus Kas (LAK);
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasaran pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keungan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberi komentar tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. **Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 55 hari, terdiri dari pemeriksaan interim selama 25 hari mulai 17 Februari s.d. 13 Maret 2025 dan pemeriksaan terinci selama 30 hari mulai tanggal 9 April s.d. 8 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 8/ST/XVIII.BLP/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 41/ST/XVIII.BLP/03/2025 tanggal 27 Maret 2025.

8. **Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2024

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (g) Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukadana, 23 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ELLY SITI NURYAMAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 yang merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, sehat, akuntabel dan transparan

Dalam Laporan Keuangan ini disajikan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dimana realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau sebesar 94,46% dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00 Realisasi belanja adalah sebesar Rp2.309.190.574.317.60 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp2.559.987.749.455.00.

Menurut Neraca per 31 Desember 2024 jumlah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.430.842.669.030,81 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.237.938.166.408,95 terdapat kenaikan sebesar Rp192.904.502.621,86 atau 8,62%.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan informasi lengkap dan detail terhadap hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan dan menguraikan kebijakan akuntansi serta pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kabupaten Lampung Timur.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Keuangan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun yang akan datang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak- pihak yang berkepentingan.

Mei 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR

HJ. SRI NURYAMAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN ii

SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

DAFTAR TABEL ix

LAPORAN REALISASI ANGGARAN x

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH xi

NERACA xii

LAPORAN OPERASIONAL xiii

LAPORAN ARUS KAS xiv

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xv

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 16

1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan 17

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan 18

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ... 20

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD. 21

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 21

2.2 Gambaran Ekonomi Makro 27

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 36

2.4 Strategi Pencapaian 40

2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 41

2.6 Mandatory Spending 43

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 46

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 46

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 53 46

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 54

	4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	54
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan...	54
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..	55
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang	56
	Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	56
BAB V	PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN	64
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	64
	5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).....	153
	5.3 Neraca.....	154
	5.4 Laporan Operasional.....	195
	5.5 Laporan Arus Kas.....	225
	5.6 Laporan Perubahan Ekuitas.....	231
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... ..	235
	6.1 Kegiatan Pokok Entitas.....	235
	6.2 Informasi Tambahan.....	239
BAB VII	PENUTUP.....	249

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d 2023

Gambar 3 Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s.d 2023

Gambar 4 Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2024

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
Grafik 2.2	:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024
Grafik 2.3	:	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
Grafik 2.4	:	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023
Grafik 2.5	:	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
Grafik 2.6	:	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024
Grafik 2.7	:	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
Grafik 2.8	:	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024
Lampiran 2	Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 3	Kas Bendahara BLUD Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2024
Lampiran 11	Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024
Lampiran 12	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 13	Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2024
Lampiran 14	Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Daftar Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 16	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 17	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024
Lampiran 18	Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2024
Lampiran 19	Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur
Tabel 2	:	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2019 - 2023
Tabel 3	:	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019- 2023
Tabel 4	:	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100) di Kabupaten Lampung Timur, 2019 - 2023
Tabel 5	:	PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah) 2019 sd 2023
Tabel 6	:	Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA. 2024
Tabel 7	:	Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024
Tabel 8	:	Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 9	:	Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2024
Tabel 10	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 11	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 12	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 13	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 14	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 15	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 16	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 17	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 18	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 19	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 20	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 21	:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 44 : Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 45 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 46 : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 47 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 48 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 49 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 50 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 51 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 52 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 53 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 54 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 55 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 56 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 57 : Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 58 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 59 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 60 : Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 61 : Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 62 : Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 63 : Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 64 : Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 65 : Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 66 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 67 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 68 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 70 Anggaran Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 77 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 78 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 79 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 80 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 81 Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 82 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 83 Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 84 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 85 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 86 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 87 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 88 Anggaran dan Realisasi Belanja Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 89 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 90 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 91 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 92 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 93 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 94 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 95 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 96 Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 97 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 98 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 99 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 100 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 101 Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 102 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 103 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023
Tabel 104 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023
Tabel 105 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 106 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 107 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 108 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 109 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 110 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 111 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 112 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 113 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 114 Anggaran dan Realisasi Belanja Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 115 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)* Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 116 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan pelatihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 117 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 118 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 119 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 120 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 121 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 122 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023
Tabel 123 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 124 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 125 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 126 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 127 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyartakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 128 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 129 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 130 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 131 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 132 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 133 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 134 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 135 Realisasi Belanja Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 136 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 137 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Tahun 2024 dan 2023
Tabel 138 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 139 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 140 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat social kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 141 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 142 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 143 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 144 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024
Tabel 145 Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024
Tabel 146 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 147 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 148 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 149 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 150 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 151 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 152 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 153 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 154 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 155 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 156 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 157 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 158 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 159 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 160 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 161 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 162 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 163 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 164 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 165 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 166 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 167 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 168 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 169 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 170 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 171 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 172 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 173 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 174 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 175 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 176 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 177 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 178 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 179 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 180 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 181 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 182 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 183 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 184 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 185 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 186 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 187 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 188 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 189 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 190 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 191 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 192 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 193 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 194 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 195 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 196 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 197 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 198 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 199 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 200 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 201 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Tabel 202 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 203 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 204 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 205 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 206 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 207 Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2024
Tabel 208 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 209 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 210 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 211 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 212 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 213 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 214 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 215 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 216 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 217 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 218 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 219 Rincian SiLPA Periode s.d 31 Desember 2024
Tabel 220 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023
Tabel 221 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023
Tabel 222 Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 223 Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2024 dan 2023
Tabel 224 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 225 Kas di Kas Daerah per 30 Desember 2024
Tabel 226 Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah
Tabel 227 Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2024

Tabel 228 Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 229 Mutasi Piutang Pajak Hotel
Tabel 230 Mutasi Piutang Pajak Restoran
Tabel 231 Mutasi Piutang Pajak Katering
Tabel 232 Mutasi Piutang Pajak Hiburan
Tabel 233 Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard
Tabel 234 Mutasi Piutang Pajak Kain
Tabel 235 Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum
Tabel 236 Mutasi Piutang Pajak Parkir
Tabel 237 Mutasi Piutang Pajak Air Tanah
Tabel 238 Mutasi Piutang Pajak MBLB
Tabel 239 Mutasi PBB Perkotaan dan Perdesaan
Tabel 240 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024
Tabel 241 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 242 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2024
Tabel 243 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2024
Tabel 244 Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan 2023
Tabel 245 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Tabel 246 Daftar Obat Daluarsa Per 31 Desember 2024
Tabel 247 Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan 2023
Tabel 248 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPRS Lampung Timur TA. 2024
Tabel 249 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur TA 2024
Tabel 250 Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024
Tabel 251 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024
Tabel 252 Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024
Tabel 253 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
Tabel 254 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Tabel 255 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024
Tabel 256 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
Tabel 257 Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2024
Tabel 258 Aset Lainnya per 31 Desember 2024
Tabel 259 Rincian TPTGR Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang per 31 Desember 2024
Tabel 260 Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
Tabel 261 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

Tabel 262 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 263 Rincian Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 264 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023
Tabel 265 Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 266 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 267 Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 268 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 269 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 270 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 271 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 272 Rincian Pendapatan Operasional-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 273 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 274 Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 275 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 276 Rincian Pendapapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 277 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 278 Rincian Pendapatan Transfer-LO per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 279 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 280 Rincian Pendapatan Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 281 Rincian Dana Alokasi Umum-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 282 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

Tabel 283 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 284 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 285 Rincian Pendapatan Daerah yang Sah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 286 Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah-LO per 31 Desember 2024
Tabel 287 Rincian Beban -LO Per 31 desember 2022 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2023
Tabel 288 Rincian Beban Operasi –LO Per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 289 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 290 Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 291 Rincian Beban Barang-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 292 Rincian Beban Jasa -LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 293 Rincian Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 294 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 295 Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 296 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 297 Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 298 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 299 Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 300 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 301 Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 302 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 303 Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

Tabel 304		Rincian Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 305		Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024
Tabel 306		Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2024
Tabel 307		Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 serta LRA per 31 Desember 2024
Tabel 308		Beban Luar Biasa Tahun 2024
Tabel 309		Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 310		Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 311		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 312		Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 313		Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 314		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 315		Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 316		Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 317		Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 318		Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 319		Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
Tabel 320		Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2024
Tabel 321		Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023
Tabel 322		Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur
Tabel 323		Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tabel 324		Data Jumlah ASN Tahun 2020 -2025
Tabel 325		Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d 2029
Tabel 326		Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2024
Tabel 327		Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024
Tabel 328		Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024

Tabel 329 Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024
Tabel 330 Laporan Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Anggaran 2024
Tabel 331 Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
Pajak Daerah	5.1.1.1.1				
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - BUMD	4.1.1.1.3				
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)				98,82	
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAU	5.1.1.2.1				
Dana Perimbangan	4.1.1.2.1.1				
Dana Transfer Umum - DAU	5.1.1.2.1.1.1				
Dana Alokasi Umum - DAU	4.1.1.2.1.1.2				
Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik	5.1.1.2.1.1.3				
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - DBHCT					
Dana Desa	5.1.1.2.1.2				
Insentif Daerah	5.1.1.2.1.3				
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2				
Pendapatan Lainnya - PAPBD					
Jumlah Pendapatan Transfer					
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah					
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					
BELANJA DAERAH	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1				
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2				
Belanja Bunga	5.1.2.1.3				
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4				
Belanja Hibah	5.1.2.1.5				
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6				
Jumlah Belanja Operasi					
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5				
Jumlah Belanja Modal					
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga					
Jumlah Belanja Tak terduga					
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1				
Belanja Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.2				
Belanja Bantuan Keuangan					
Jumlah Belanja Transfer					
JUMLAH BELANJA					
	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
Penggunaan SILPA					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Berkenaan					
	5.1.4.3				

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
59	[illegible]		[illegible]	[illegible]	100.00	[illegible]
60	PEMBIAYAAN [illegible]		[illegible]	[illegible]	99.99	[illegible]
61	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN [illegible]	5.16	[illegible]	[illegible]	6.66	[illegible]

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[illegible] AMAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	T.A. 2024	T.A. 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		87,684,419,054.05	54,281,916,906.36
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		87,541,900,803.05	54,212,616,892.36
3	**Sub Total (1-2)**		**142,518,251.00**	69,300,014.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		113,463,326,903.38	87,684,419,054.03
5	**Sub Total (3+4)**		**113,605,845,154.38**	**87,753,719,068.05**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(142,518,251.00)	(69,300,014.00)
7	Lain-lain			
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	52.	**113,463,326,903.38**	**87,684,419,054.03**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	[illegible]			
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas		116,596,271,925.28	87,686,638,054.03
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	104,138,136,366.41	78,785,834,279.59
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	142.00	364,000.00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.3.1.1.4	2,197,411,044.87	1,111,902,933.40
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.5	832,943,020.00	
9	Kas Dana BOS	5.3.1.1.6	184,900.00	1,971,590.00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	7,101,596,951.00	5,784,765,342.96
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	14,696,445,893.71	14,204,168,747.50
13	Piutang Restribusi Daerah	5.3.1.1.9	7,939,006.29	14,297,000.00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.14	9,062,303,841.66	12,575,126,278.87
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.11		395,981,920.00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	89,280,770,645.00	90,134,222,719.00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(9,666,836,548.13)	(12,874,651,536.[illegible]
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	717,088,678.00	44,884,166.67
19	Persediaan	5.3.1.1.15	123,911,559,552.55	103,034,227,219.01
20	JUMLAH ASET LANCAR		348,985,671,732.63	295,151,177,860.38
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
23	Investasi kepada BUMN			
24	Investasi kepada BUMD			
25	Investasi kepada Obligasi			
26	Dana Bergulir			
27	Deposito Jangka Panjang			
28	Investasi Non Permanen Lainnya			
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
30	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		43,565,947,464.22	35,224,939,995.35
32	Investasi Pemerintah Pusat/Provinsi Daerah			
33	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		43,565,947,464.22	35,224,939,995.35
34	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		43,565,947,464.22	35,224,939,995.35
35	ASET TETAP	5.3.1.3		
36	Tanah	5.3.1.3.1	470,105,978,009.01	415,564,367,475.93
37	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.3	829,817,173,855.94	820,044,340,042.35
38	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	916,754,463,880.88	879,531,021,901.44
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1,812,772,226,897.67	1,863,349,155,999.65
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	14,619,176,591.19	15,946,114,515.19
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	59,935,374,388.28	58,447,775,005.19
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2,015,951,380,527.[illegible]	(2,086,455,[illegible]
43	JUMLAH ASET TETAP		[illegible]	1,722,330,191,994.83
44	DANA CADANGAN			
45	Dana Cadangan			
46	JUMLAH DANA CADANGAN			
47	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
48	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	77,092,990.00	97,032,500.00
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.1		
50	Aset Tidak Berwujud			
51	Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	416,579,281,817.24	191,887,658,171.48
52	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(284,793,175,197.50)	([illegible]
53	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.3	1,121,511,360.00	56,860,226,100.00
54	JUMLAH ASET LAINNYA		373,099,518,139.74	185,801,267,941.15
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI			
55	JUMLAH ASET		2,[illegible]	2,237,[illegible]

No.	URAIAN	CATATAN	2024	2023
56	KEWAJIBAN	5.3.2		
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132.945.020.00	
59	Utang Pungo			
60	Utang Pinjaman Jangka Pendek			
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
62	Pendapatan Diterima Dimuka		546.210.092.59	419.823.872.25
63	Utang Biaya		131.368.069.772.34	130.503.393.393.60
64	Utang Jangka Pendek Lainnya			
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		131.747.225.486.92	131.658.319.266.85
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.		
67	Utang kepada Pemerintah Pusat			
68	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			
69	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			
70	Utang kepada Masyarakat			
71	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
72	JUMLAH KEWAJIBAN		131.747.225.486.92	131.658.319.266.85
73	EKUITAS			
74	EKUITAS		2.299.095.443.143.89	2.106.917.947.142.10
75	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.430.843.669.630.81	2.237.576.266.408.95

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO LRO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1		
3	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a		
4	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2		
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3		
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)			
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2.		
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1		
10	Dana Perimbangan			
11	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5.4.1.2.1.1		
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.6		
13	Dana Alokasi Khusus - (DAK) Fisik - LO	5.4.1.2.1.7		
14	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.2.1.8		
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 14)			
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2		
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
18	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (16)			
19	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18)			
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3.		
21	Pendapatan BLUD			
22	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan			
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (21 s/d 22)			
24	Jumlah Pendapatan (7 + 19 + 23)			
25	BEBAN - LO	5.4.2.		
26	Beban Operasi			
27	Beban Pegawai	5.4.2.1.		
28	Beban Barang	5.4.2.2.		
29	Beban Jasa	5.4.2.3.		
30	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.		
31	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.		
32	Beban Uang dan atau Jasa untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.4.2.6.		
33	Beban Barang Jasa dan BOS	5.4.2.7.		
34	Beban Hibah dan Jasa BOK Pemerintah	5.4.2.8.		
35	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.9.		
36	Beban Subsidi	5.4.2.10.		
37	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.11.		
38	Beban Penyaluran Barang	5.4.2.12.		
	Jumlah Beban Operasi			
	Beban Penyusutan dan Amortisasi			
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.13		
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi			
	Beban Transfer			
41	Beban Bagi Hasil	5.4.2.14		
42	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.15		
	Jumlah Beban Transfer			
	Beban Lain-lain			
	Beban Tak Terduga			
	Jumlah Beban Lain-lain			

	Jumlah Dalam Daerah (ST s/d 44)		2,370,463,487,897.59	
	[illegible] ARUS OPERASI (45 - [illegible])		[illegible]	[illegible]
47	[illegible] OPERASIONAL	6.a.2.		
48	Belanja Pegawai Non Tunai - LO		[illegible]	[illegible]
49	Belanja Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
50	Defisit Penjualan Aset Nonkantor			(29,104 [illegible]
51	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
52	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
53	Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
54	JUMLAH [illegible] DARI KEGIATAN NON [illegible]		59,484,148.88	[illegible]
55	[illegible] KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH [illegible]		[illegible]	247,808,541,756.66
56	POS LUAR BIASA	6.a.4.		
57	Pendapatan Luar Biasa			
58	Beban Luar Biasa			34,170,000.00
59	POS LUAR BIASA (57-58)		[illegible]	[illegible]
60	[illegible] (56 + [illegible])	6.a.5.	[illegible]	247,774,371,756.66

[illegible] saldo laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

[illegible] TIMUR

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	*Arus Kas Masuk*	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah - LRA		83,590,226,924.00	83,876,136,780.30
4	Penerimaan Retribusi Daerah - LRA		3,746,508,477.00	1,741,230,161.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3,224,915,365.59	3,027,927,451.18
6	Lain-lain PAD yang Sah		117,062,035,121.58	104,393,290,920.00
7	Dana Perimbangan		1,726,318,848,000.00	1,547,697,018,000.00
8	Dana Insentif Daerah		231,862,076,000.00	
9	Dana Desa			260,134,134,040.00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		129,591,067,570.00	168,632,106,155.00
11	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		22,451,074.76	
12	*Jumlah Arus Kas Masuk*		2,523,312,800,483.93	2,131,963,803,999.59
13	*Arus Kas Keluar*	5.5.1.2		
14	Belanja Pegawai		877,748,801,265.61	819,359,372,551.61
15	Belanja Barang dan Jasa		462,577,506,141.49	465,483,193,492.82
16	Belanja Modal		241,171,826,126.00	231,335,347,242.48
17	Belanja Bantuan Sosial		7,417,293,220.00	5,854,731,769.00
18	Belanja Tak Terduga		4,611,053,932.00	4,450,346.00
19	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		7,413,156,694.00	
20	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		905,256,874,705.89	404,681,881,795.06
21	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
22	*Jumlah Arus Kas Keluar*		1,908,390,802,759.99	1,903,518,930,450.97
23	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12-22)**	5.5.1.3.	**348,721,997,658.03**	**228,444,873,548.62**
24	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
25	*Arus Kas Masuk*	5.5.2.1		
26	Penjualan Aset Tetap			
27	*Jumlah Arus Kas Masuk*			
28	*Arus Kas Keluar*	5.5.2.2.		
29	Belanja Modal Tanah			
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		34,774,593,896.28	21,913,974,319.50
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		90,126,551,760.46	87,745,207,114.85
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		182,339,782,009.24	57,181,542,807.87
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12,706,223,168.02	12,813,646,365.00
34	*Jumlah Arus Kas Keluar*		329,891,571,557.70	188,842,370,386.72
35	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (25-34)**		**(329,891,571,557.70)**	**(188,842,370,386.72)**
36	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
37	*Arus Kas Masuk*			
38	Penyertaan Modal			
39	*Jumlah Arus Kas Masuk*			
40	*Arus Kas Keluar*			
41	Penyertaan Modal		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
42	*Jumlah Arus Kas Keluar*		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
43	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (40-42)**		**(2,000,000,000.00)**	**(2,000,000,000.00)**
44	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
45	*Arus Kas Masuk*	5.5.4.1.		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		86,330,420,949.33	135,351,938,714.00
47	Uang Kerahan			
48	*Jumlah Arus Kas Masuk*		86,330,420,949.33	135,351,938,714.00

NO	URAIAN	CATATAN	2024	2023
50	***Arus Kas Bersih***	5.5.4.2.		
	Koreksi SILPA		142,518,251.00	69,930,014.00
51	Pengeluaran Pertanggung Pihak Ketiga (PFK)		86,407,484,920.32	235,361,838,099.00
52	Uang Kinerja		1,669,000.00	33,446,400.00
53	***Jumlah Arus Kas Bersih***		86,551,612,171.32	135,464,564,513.00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (41-44)		(1,182,231.00)	1,182,726,414.00
55	Kenaikan / (Penurunan) Kas (24+37+45)		25,310,245,869.33	35,369,875,767.69
56	**Saldo Awal Kas di BLD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan**		87,686,028,054.05	54,316,952,306.36
57	**Koreksi Kas**			
58	***Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas DI BLUD, Kas di JKN dan Kas di BOS***		*113,596,273,923.38*	*89,686,828,054.05*
59	**Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan**		104,138,173,903.41	78,785,824,279.39
60	**Koreksi Kas**			
61	**Kas di BLUD**		2,865,413,044.97	3,631,902,912.46
62	**Kas Lainnya**		102,945,020.00	
63	**Kas di Bendahara Penerimaan**			
64	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		142.00	564,000.00
65	**Kas di Bendahara BOS**		136,900.00	1,971,300.00
66	**Kas BOK Puskesmas**		7,151,556,913.00	5,765,765,342.00
67	**Selisih Kesalahan posting bank**			
69	*Saldo Akhir Kas*	*5.5.5*	*113,596,273,923.38*	*89,686,828,054.05*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI KAMPUNG TIMUR,

ttd

NURYAMAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	Ekuitas Awal		2,306,917,947,147.10	1,500,111,182,101.56
2	Surplus/Defisit LO		(345,015,640,850.72)	307,026,171,756.66
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
	Koreksi Lainnya		837,193,137,252.32	[illegible]
	Ekuitas Akhir	5.6	2,299,095,443,543.89	2,306,917,947,147.10

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tersebut

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELLY RITTI PUSPASARI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas LaporanKeuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. **Akuntabilitas**
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. **Manajemen**
   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. **Transparansi**
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. **Keseimbangan Antar Generasi**
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintahdaerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluarantersebut.
5. **Evaluasi Kinerja**
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahandan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih *komprehensif* mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN
1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2. Gambaran Ekonomi Makro
3. Kebijakan Keuangan Daerah
4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BADIV KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAD VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325.03 km^2 atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km^2). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten LampungTimur berkedudukan di Sukadana.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil antara lain:

1. Pulau Gosong Sekopong;
2. Pulau Segama Besar;
3. Pulau Segama Kecil;
4. Pulau Batang Besar;
5. Pulau Batang Kecil;

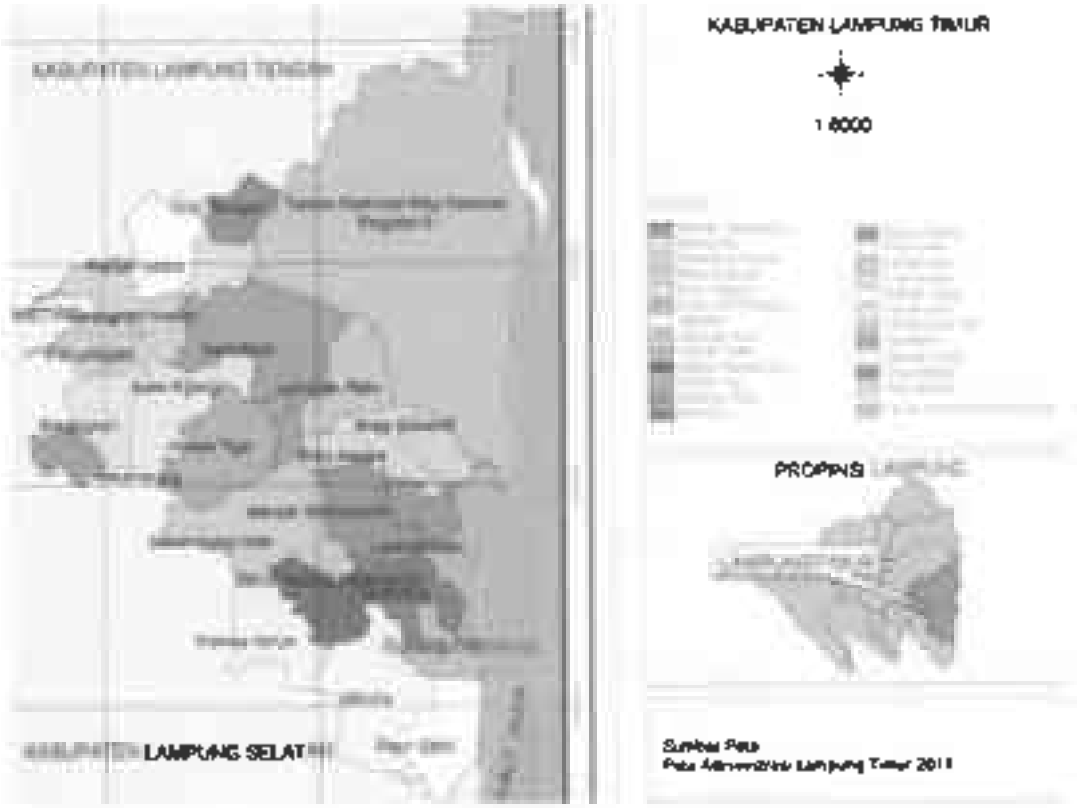
Tercatat juga ada enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4-250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15` BT - 106°20` BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Buwang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur



Pembentukan administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur menjadi 23 kecamatan definitif dan 232 desa.
4. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Marga Sekampung jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan.
5. Sampai dengan Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jumlah dusun dan rukun tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (Km²)
1	Metro Kibang	Margotoko	7	76,77
2	Batanghari	Barat Jaya	17	148,88
3	Sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,73
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Batin	15	267,85
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	11	195,91
8	Waway Karya	Sumber Rejo	8	211,07
9	Marga Sekampung	Penengahan	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	Mataram Baru	5	79,56
12	Bandar Sribhawono	Sribhawono	6	185,71
13	Melinting	Wana	7	139,30
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	7	78,52
15	Way Jepara	Braja Sakti	16	229,27
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	247,61
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	756,76
19	Bumi Agung	Donomulyo	7	73,17
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	Kota Raman	11	161,39
23	Purbolinggo	Tamar Fajar	12	222,03
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	376,38
Jumlah			**264**	**5325,03**

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2024

Secara administratif, wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan atau laut dengan ketentuan kesluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur, terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
2. Wilayah perairan atau laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*) yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara yang pada akhirnya berdampak kepada kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

2.1.1.2. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti. Braja Selebahdan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3-8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektardan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

2.1.1.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan alluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk batuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter.

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya, Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu

1. Endapan permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada didaerah pesisir dan muara sungai.
2. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qbw), tufa Lampung (Qlv) dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu (33.340,90 hektar) dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
3. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), Formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar Formasi Baturaja (Tmbg) dan Formasi Lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).
4. Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari Basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69%) luas wilayah dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

2.1.1.4. Hidrologi

2.1.1.4.1. Sungai

Satuan Wilayah Sungai (SWS) utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-Sekampung. Ketersediaan air terutama untukpengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

2.1.1.4.2. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai, yaitu Way Abar, Way Jepara dan Way Jejawa.Aliran irigasi dari Danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebahdan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin atau Way Kawatyang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan;
- Adanya kawasan permukiman, baik di desa maupun di kota;
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa; dan
- Adanya kawasan perikanan darat.

2.1.1.4.3. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu, terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpahan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

2.1.1.4.4. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yangsebagian besar adalahandesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat, dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau, air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat

terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m dengan muka air tanah bebas (TKA*static water level*) berkisar antara 0.2m–4m. Pada musim kemarau, air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6. secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada Bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografis

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang agar posisi Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur meliputi:

a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsiutama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
   1) hutan lindung;
   2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahnya;
   3) kawasan perlindungan setempat;
   4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
   5) kawasan rawan bencana alam.
b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
   1) kawasan peruntukan hutan produksi;
   2) kawasan peruntukan pertanian;
   3) kawasan peruntukan perikanan;
   4) kawasan peruntukan pertambangan;
   5) kawasan peruntukan industri; dan
   6) kawasan peruntukan pariwisata.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasikan berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak

menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. Jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, yaitu Kecamatan Braja Selebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung,Waway Karya, Marga Sekampung, Sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

2.2. Gambaran Ekonomi Makro

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur sebagaimana terlihat alam tabel berikut:

Tabel 2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung TimurAtas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,89	0,35	-1,37	1,52	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	1,06	-7,43	-4,93	-8,43	-0,56
3	Industri Pengolahan	13,48	-5,82	6,92	2,08	2,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,91	-7,95	-18,65	11,09	-0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,27	5,02	7,08	4,75	8,19
6	Konstruksi	6,11	-2,08	7,99	7,59	5,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,59	-2,43	4,67	19,07	13,97
8	Transportasi dan Pergudangan	8,02	-4,04	2,57	23,80	15,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,71	-4,06	-1,37	13,62	11,61
10	Informasi dan Komunikasi	7,86	7,25	8,16	1,17	7,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,12	3,67	2,28	-3,50	3,73
12	Real Estat	5,88	-1,44	1,56	3,06	1,57
13	Jasa Perusahaan	4,15	-1,59	1,11	15,64	6,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	5,24	5,26	-0,49	2,75
15	Jasa Pendidikan	8,66	3,40	1,34	2,42	2,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	9,56	3,85	-0,04	3,73
17	Jasa Lainnya	8,41	-4,26	-2,15	22,63	15,11
	Produk Domestik Regional Bruto	**3,79**	**-2,26**	**0,24**	**2,02**	**3,51**

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2024

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 *(BPS Lampung Timur Dalam Angka 2024)*



Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran 2,02 persen sampai dengan 3,79 persen Laju Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 2.02 persen ditahun 2022 menjadi 3,51 di tahun 2023. Pada tahun 2023 konstribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian. kehutanan dan perikanan yang mencapai 32,87 persen diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23.13 persen dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, resparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11.18 persen.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian atau perasan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (persen)

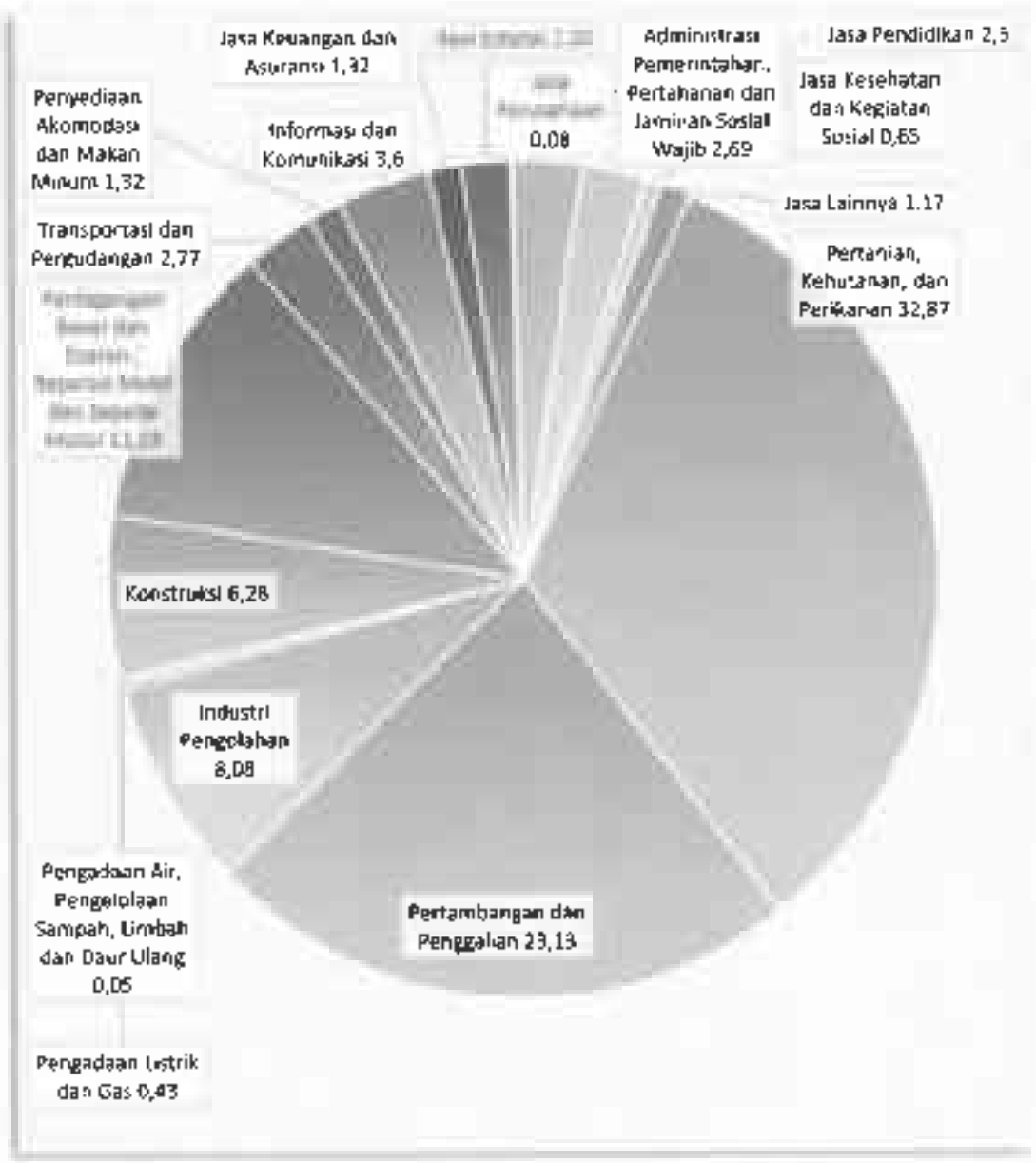
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,58	37,18	34,24	32,64	32,87
2	Pertambangan dan Penggalian	23,48	20,62	24,22	26,56	23,13
3	Industri Pengolahan	8,29	8,45	8,53	7,95	8,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0,65	0,46	0,46	0,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,76	5,72	5,95	6,20	6,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	8,86	8,76	9,59	11,18
8	Transportasi dan Pergudangan	1,95	1,95	1,89	2,21	2,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,21	1,15	1,13	1,22
10	Informasi dan Komunikasi	3,63	3,99	3,90	3,51	3,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	1,35	1,36	1,26	1,32
12	Real Estat	2,14	2,21	2,09	1,94	1,89
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	3,17	3,07	2,74	2,69
15	Jasa Pendidikan	2,58	2,77	2,65	2,48	2,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,75	0,74	0,66	0,65
17	Jasa Lainnya	1,09	0,97	0,88	1,09	1,17
	Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 masih didominasi oleh distribusi lima kategori kegiatan ekonomi, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diposisi pertama sebesar 32,87%, kategori Pertambangan dan Penggalian diposisi kedua sebesar 23,13%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diposisi ketiga sebesar 11,18%, kategori Industri Pengolahan diposisi keempat sebesar 8,08% dan kategori Konstruksi diposisi kelima sebesar 6,28%.

Sementara itu untuk kategori-kategori lainnya memberikan peranan yang rendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang masing-masing besarnya hanya dibawah 4,00%.

Gambar 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023
(Persen)



2.2.3. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan keluncaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir (Tahun 2019-2023) menunjukkan adanya fluktuasi Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada nilai jual produk, sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100)
Di Kabupaten Lampung Timur, 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149,03	151,59	152,72	162,58	174,01
2	Pertambangan dan Penggalian	126,23	117,09	141,34	211,26	193,22
3	Industri Pengolahan	144,29	152,62	155,19	168,77	170,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	141,34	143,82	140,50	136,19	130,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	143,63	144,29	146,68	147,44	148,25
6	Konstruksi	144,42	143,38	148,59	150,27	160,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,02	140,46	142,85	149,04	162,25
8	Transportasi dan Pergudangan	143,55	144,39	146,95	157,45	177,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,96	169,40	170,45	172,65	186,61
10	Informasi dan Komunikasi	128,01	127,63	124,61	125,20	127,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	151,25	150,96	157,83	171,36	184,13
12	Real Estat	139,56	142,86	144,52	146,85	150,18
13	Jasa Perusahaan	152,17	155,00	156,16	161,76	172,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	162,86	164,76	163,06	166,46	165,92
15	Jasa Pendidikan	145,15	147,16	150,02	155,15	162,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,25	142,27	145,74	146,90	151,88
17	Jasa Lainnya	148,12	147,16	147,61	148,26	154,92
	Produk Domestik Regional Bruto	**140,56**	**140,59**	**147,76**	**168,01**	**171,65**
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	**145,48**	**148,17**	**149,58**	**156,12**	**166,24**

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2024

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang diserta dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diharapkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5
PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah), 2019 s.d. 2023

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
2019	2020	2021	2022	2023
39.787.485,04	36.710.498,02	39.143.064,00	43.947.196,00	46.276.311,00

Sumber : BPS Lampung Timur 2024

PDRB perkapita Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku adalah 46,27 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita yang besar dapat diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di daerah tersebut juga besar. Keadaan ini dapat menggambarkan bagaimana kesejahteraan penduduk yang bisa diwujudkan suatu daerah. Indikator ekonomi penting yang diturunkan dari penghitungan PDRB antara lain PDRB per kapita. Indikator ekonomi tersebut dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatkan sumber daya.

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

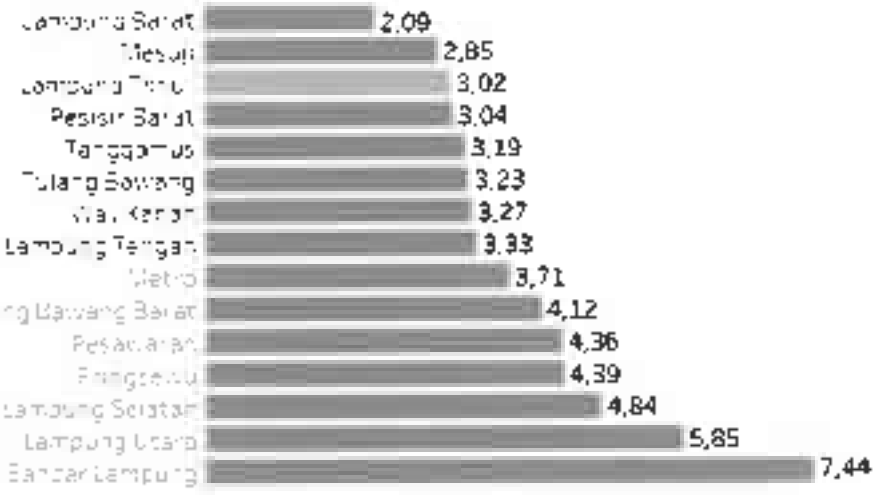
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 3,02 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

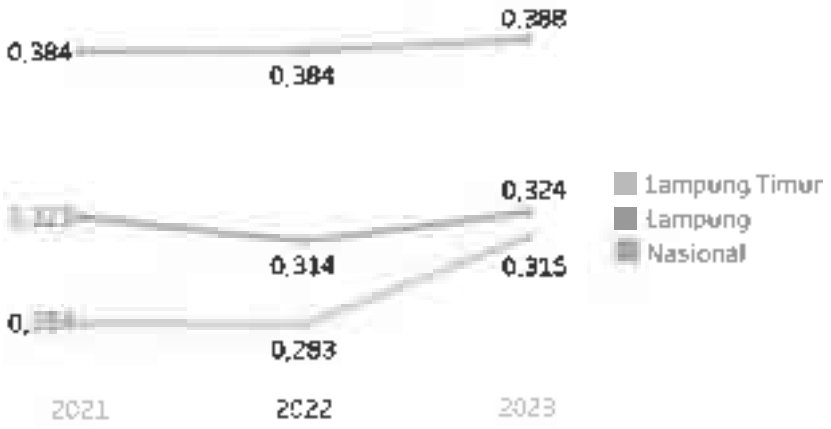


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.6. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

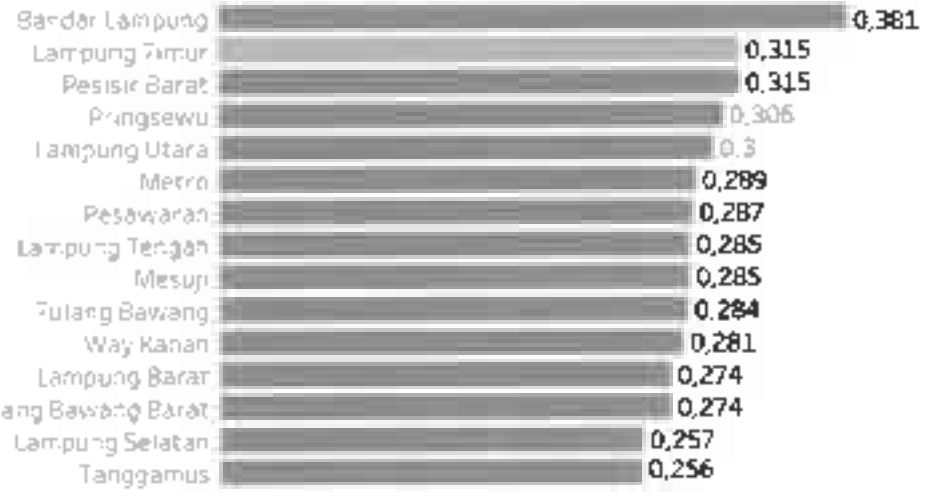
Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,315 pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang meningkat meskipun capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedua dengan indeks gini tertinggi di Provinsi Lampung.

Grafik 2.4
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

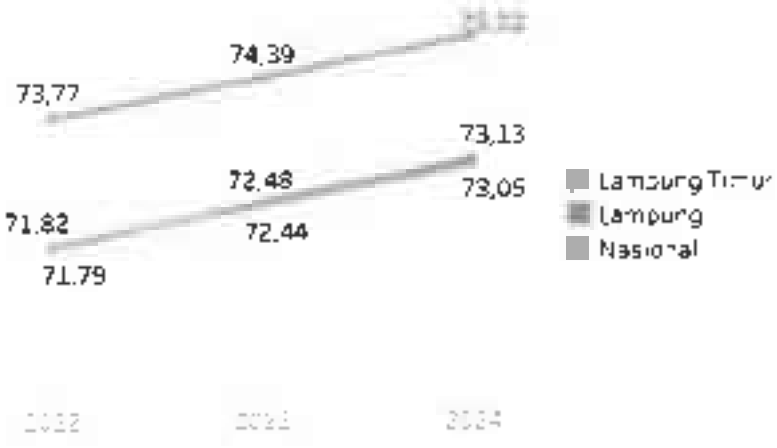


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.2.7. Indek Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

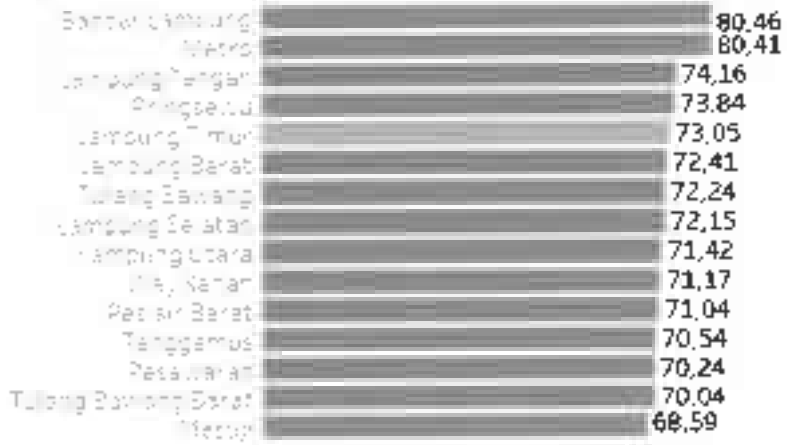
Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 terus meningkat. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,05. Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status "tinggi" (70≤IPM<80). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

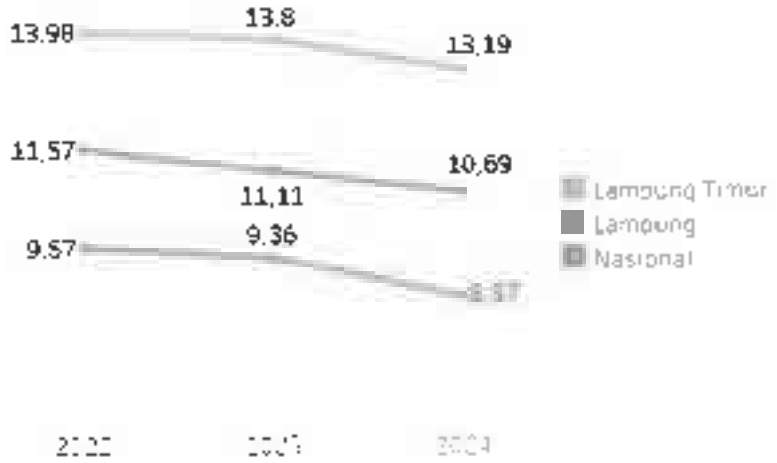


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.2.8. Kemiskinan

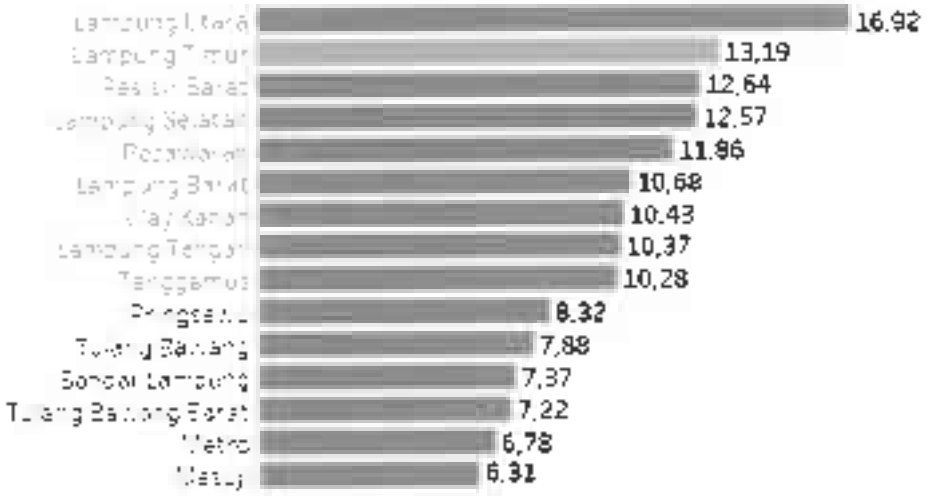
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan factor penting didalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Belanja daerah Tahun 2024 akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah mengalami peningkatan alokasi terutama pada belanja yang

berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu Pembangunan ekonomi, infrastruktur, pelayanan public dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing daerah sebagai fokus Pembangunan pada Tahun 2024.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah;
   Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada
2) Disiplin Anggaran:
   Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dipertanggungjawabkan.
3) Keadilan Anggaran:
   Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam APBD TA 2024 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pendaparan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
   1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
   2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
   4) Memantapkan kelembagaan;
   5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi

secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
8) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.

2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan:
   1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPH Pasal 21;
   2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
   3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
   4) Menindak lanjuti surat Gubernur nomor : 027/3006/V1.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
      a. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
      b. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. Sampai dengan saat ini terdapat 9 unit Bumdes di 8 Kecamatan yang telah mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan diharapkan kedepan setiap wilayah kecamatan terdapat 1 BUMDes yang dapat mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah membuat spanduk di setiap kantor kecamatan terkait kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvesional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

pada Tahun 2024 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah,belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

1) Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b) Belanja Bunga
Belanja bunga belum dianggarkan hingga penyusunan Rancangan RKPD 2024 Kabupaten Lampung Timur.

c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dialokasikan.

d) Belanja Hibah

e) Hibah terdiri dari hibah uang, hibah barang dan jasa. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka dan lain lain), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi

2) Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

3) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4) Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2.4. Strategi Pencapaian

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi data penerimaan PAD;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan restribusi daerah;
3. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
4. Memantapkan kelembagaan;
5. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan pelayananan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar restribusi daerah;

8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan;
9. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat dapat terserap sesuai dengan target Penerimaan Daerah.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu dalam rangka mengatur penggunaan Anggaran Belanja Daerah agar terarah, efektif dan efisien maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja *(Performance Based)* untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastuktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi pengelolu kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi

kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu, suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunanya, yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengindentifikasikan permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback*bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai serta harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui pembandingan *output* dengan *input*nya serta tingkat efektifitas suatu program melalui pembandingan *outcome* dengan targetnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 sebagaimana yang tercantum dalam APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 6

Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2024

No	Uraian	APBD-P 2024	Realisasi 2024	Lebih/(Kurang)	Presen
1	Pendapatan Daerah	2.474.360.330.401,00	2.223.112.000.417,93	(137.191.329.983,07)	94,46
2	Belanja Daerah	2.559.997.749.455,00	2.369.190.574.312,60	(250.797.175.137,40)	90,20
3	Surplus/(Defisit)	(85.684.419.054,00)	27.921.426.105,33	113.605.845.154,33	32,59
4	Pembiayaan				
	a. Penerimaan Pembiayaan	85.684.419.054,00	85.684.419.054,05	0,05	100,00
	Koreksi SiLPA		(142.518.250,00)	142.518.250,05	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	c. Pembiayaan Neto	83.684.419.054,00	83.541.900.803,05	(142.518.250,00)	99,83
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun	0,00	111.463.326.908,38	111.463.326.908,38	

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.

2.6. Maadatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dapat diubah atau dihilangkan tanpa perubahan undang-undang. Mandatory Spending bertujuan untuk mengurangi ketimpangan social dan ekonomi serta memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan public dasar. Mandatori Spending Kabupaten Lampung Timur dalam postur ABPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Mandatory Spending Tahun 2024

No	Fungsi	Pendanaan Mandatory Spending Tahun 2024			Kendala	Upaya
		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran		
1	**Pendidikan**					
		866.963.317.528	807.452.448.764	31,62	angka putus sekolah	Pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu jenjang SD dan SMP
					Meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honor	Pemberian dana bantuan transportasi kepada guru honor jenjang TK, SD dan SMP
2	**Kesehatan**					
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.428.417.600,00	988.790.340,00	86,87	Adanya perubahan standar layanan SPM terkait dengan adanya PMK baru tentang SPM yaitu PMK Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM	Melakukan costing SPM sampai dengan puskesmas
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.013.765.000,00	610.181.500,00	66,62	Belum tersedianya regulasi SPM tingkat Kabupaten	Integrasi program, penganggaran yang rasional dengan sharing anggaran dar berbagai sumber termasuk swasta dan dengan skala prioritas
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	463.746.080,00	358.277.700,00	56.4	Upaya pemenuhsu capaian SPM bidang kesehatan belum menjadi komotmen bersama sebagai upaya layanan kesehatan	

					dasar secara minimal yang wajib dipenuhi dan menjadi prioritas penganggaran untuk ke tingkat FKTP sebagai yang terbaik pelayanan kesehatan	
	Pelayanan kesehatan balita	103.246.870,00	93 725 000,00	75,04		
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.502.675.000,00	1 277.810 000,00	91,83		
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1 838 161 559,00	1.804.576.031,00	93,8		
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	930 324 283,00	895.800.000,00	94,67		
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	248.360.000,00	216 795 000,00	97,86		
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetus Mellitus	1.224 421 455,00	1 026 547 383,00	91,45		
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	191 254 279,00	169.312.447,00	52,02		
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1.897 885 400,00	1 459 847 850,00	88,76		
	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	868.295.390,00	471 536.800,00	71,32		
3	**Infrastruktur Pelayanan Publik**	607.201.331.266	447.532.038.322	23,45	Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan seringkali tidak mencukupi kebutuhan yang ada	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berupaya mencari sumber dana tambahan, termasuk pemanfaatan dana dari pusat untuk mendukung infrastruktur
					Kerusakan jalan yang meluas	Perencanaan perbaikan ruas jalan prioritas dan peningkatan pengawasan kualitas konstruksi
4	**Pengawasan**	7 037.546.873	3 784 789.250	0.16		
5	**Belanja Transfer**					

	Belanja Bagi Hasil	20.287.426.675	7.412.100.000	8,49	Karena perhitungan prognosis PAD pada akhir tahun belum dapat diperhitungkan dan adanya manajemen kas pada akhir tahun	Perhitungan lebih cermat sebelum berakhir tahun anggaran
	Belanja Bantuan Keuangan	127.622.775.400	121.564.301.905	11,37	Belum terealisasikan Tw 4 pada TA 2024	Perhitungan lebih cermat dan hutang Tw 4 TA. 2024 dianggarkan pada TA berikutnya

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

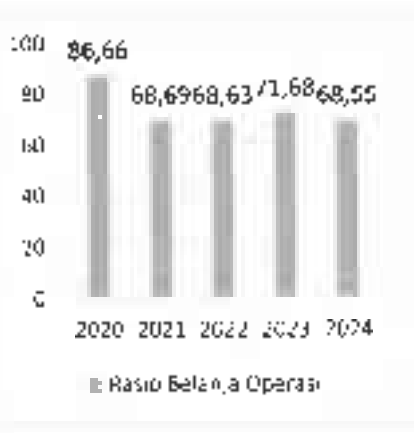
3.1.1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja = Belanja Operasi / Total Belanja

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja = 1.582.938.466.132,90 / 2.309.190.574.317,60 = 68,55



Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja keseluruhan yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah,belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 68,55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 54,53% digunakan untuk belanja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	= Belanja Modal / Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	=	320.800.571.557,70 / 2.309.190.574.317,60	= 13,89%



Rasio Belanja Modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap (peralatan an mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja modal aset tetap lainnya.

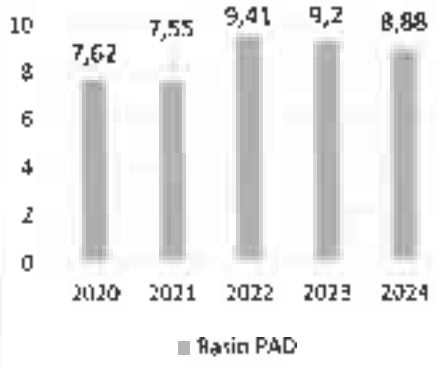
Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 13,89%, menunjukkan pembangunan fisik masih rendah sehingga sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio PADTerhadap Total	= Pendapatan PAD / Total Pendapatan

Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	=	207.567.574.087,17 / 2.337.112.000.417,93	= 8,88 %



Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024, sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan adalah sebesar 8,88%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Tahun2020-2024

Tahun 2024

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan = Dana Perimbangan / Total Pendapatan

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan = 1.728.318.848.537,00 / 2.337.112.008.417,93 = 73,95%



Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio dana perimbangan yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dan berdasarkan rasio tersebut maka terlihat bahwa

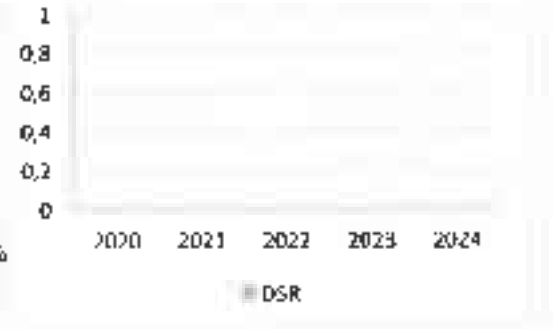
ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

e. ***Debt Service Ratio* (DSR) Tahun 2020-2024**

Tahun 2024

Debt Service Ratio (DSR) = Total Realisasi Pembayaran Pokok dan Bunga Hutang / Total Pendapatan

$$DSR = \frac{0{,}00}{2.337.112.000.417{,}93} = 0{,}00\ \%$$



Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.

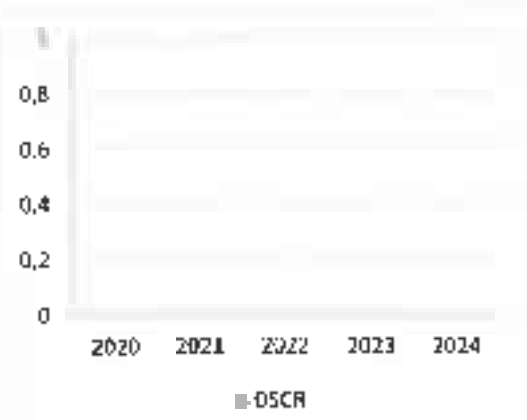
Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baikdan makin besar angka rasio maka makin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pembiayaan melalui pinjaman daerah sehingga nilai rasio DSR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 0,00%.

f. ***Debt Service Coverage Ratio*(DSCR) Tahun 2020-2024**

Tahun 2024

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = ((PAD) + (DBH+DAU) - (Belanja Wajib)) / (Pembayaran Pokok + Bunga+Jasa Bank)

$$DSCR = \frac{207.567.574.087{,}17 + (1.282.306.499.000{,}00 - 1.410.438.665.861{,}25)}{0{,}00} = -$$



DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah danbangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (PP Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar -- menunjukkan masih terbukanya peluang Kabupaten Lampung Timur untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.

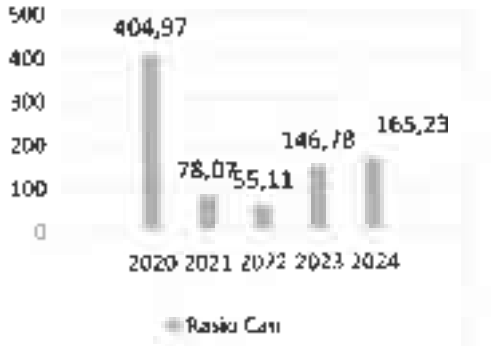
3.1.2. Rasio antar Pos Neraca

a. Rasio Cair *(Quick Ratio)* Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Cair (*Quick Ratio*) = [illegible] / Utang Jangka Pendek

Rasio Cair (Quick Ratio)	=	340.985.671.732,63 - 123.301.559.552,55 / 131.747.225.486,92	= 165,23



Rasio cair dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

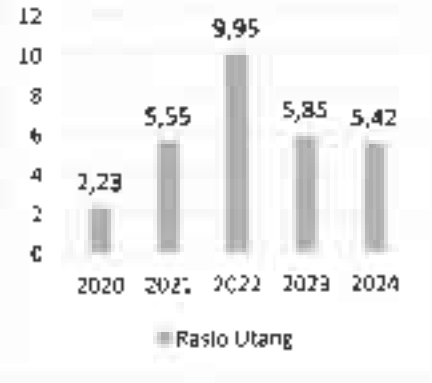
Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Apabila dilihat dari rasio di atas untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*)Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)	= Total Kewajiban / Total Aset

Rasio Utang Terhadap Aset (Debt Ratio)	131.747.225.486,92 / 2.430.842.669.030,80	= 5,42 %



Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Capaian rasio sebesar 5.85% menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih cukup mampu dalam menjamin pembiayaan aset-aset pemerintah daerah.

Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	= Total Ekuitas Dana / Total Aset

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	2.299.095.443.543,88 / 2.430.842.669.030,80	= 94,58%



Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ekuitas dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 94.58% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

3.2. Anggaran APBD Murni dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024

Anggaran APBD Murni dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
APBD Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Jumlah (Rp)	Sesudah Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	222.716.655.257,00	328.056.655.257,00	5.340.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	87.170.000.000,00	87.870.000.000,00	700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.626.300.000,00	5.626.300.000,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.320.355.257,00	122.960.355.257,00	4.640.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	**2.101.636.271.017,00**	**2.245.496.675.144,00**	**143.860.404.127,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.956.698.068.000,00	2.076.296.357.000,00	119.598.261.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.938.173.017,00	169.200.318.144,00	24.262.145.127,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	2.325.102.926.274,00	**2.474.303.330.401,00**	149.200.404.127,00
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	1.672.633.994.354,00	**1.746.843.512.869,00**	74.209.518.515,00
5.1.01	Belanja Pegawai	978.934.461.180,00	931.015.274.263,00	47.919.182.917,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.669.734.477,00	529.144.388.263,00	38.475.553.786,00
5.1.05	Belanja Hibah	200.151.991.022,00	282.526.970.568,00	82.374.979.546,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.878.823.575,00	5.156.775.675,00	277.950.100,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**273.945.976.927,00**	**393.985.335.511,00**	110.039.358.584,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.945.426.654,00	41.202.728.382,00	9.257.301.747,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.555.063.704,00	98.368.392.266,00	20.813.328.562,00

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.998.299.583,00	228.771.491.743,00	79.873.192.155,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.297.158.000,00	15.392.730.120,00	95.542.120,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.550.000.000,00**	**8.550.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.550.000.000,00	8.550.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**402.537.859.400,00**	**420.608.901.075,00**	**18.071.041.675,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.279.630.000,00	20.287.426.675,00	11.007.796.675,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.258.229.400,00	400.321.474.400,00	7.063.245.000,00
	Jumlah Belanja	**2.355.667.830.681,00**	**2.559.987.749.455,00**	**204.319.918.774,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**30.564.904.407,00**	**85.684.419.054,00**	**55.119.514.647,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			-
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**32.564.904.407,00**	**87.684.419.054,00**	**55.119.514.647,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.564.904.407,00	87.684.419.054,00	55.119.514.647,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**2.000.000.000,00**	**87.684.419.054,00**	**85.684.419.054,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	-
	Pembiayaan Netto	**30.564.904.407,00**	**85.684.419.054,00**	**55.119.514.647,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing SDM;
2. Keterbatasan Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.
4. Kesenjangan wilayah;
5. Konsistensi antara perencanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
6. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 dan mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan penyataan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu:

1) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud. berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggugjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2020,
2) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 15 Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggugjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021;
3) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022;
4) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 17 Properti Investasi, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggugjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran atau pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahselaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan udalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pertanggungjawaban pemerintah meliputi seluruh unit kerja yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas. berarti pendapatan, penerimaan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pengukuran Aset
   a. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
      1) Kas diakui pada saat diterima dan dicatat sebesar nilai nominal;
      2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
      3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
   b. Persediaan dicatat sebesar:
      1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
      2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
      3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   c. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
   d. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
   e. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Pengukuran Kewajiban

   Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

I. Pengakuan Pendapatan

A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) diantaranya PBB perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.

2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.

4) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
   a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
   Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
   b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
   Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah

diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

B. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA diakui pada saat:
1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima. dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan Belanja dan Beban

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer.
Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
1) Belanja Operasi
2) Belanja Modal
3) Belanja Tidak Terduga
4) Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban:
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2) Terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih beserta umur piutang untuk piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan dan piutang dari transfer antar entitas pelaporan pada setiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 9

Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Metode penilaian persediaan yang dipergunakan adalah FIFO (*First In, First Out*), sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara periodic dan pengukuran persediaan pada setiap periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilkukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode biaya
   Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.
2) Metode ekuitas
   Pengakuan awal investasi dicacat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerinsah dicatat sebesar pendapatan hasil investasi dan menambah nilai investas pemerintah.
   Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kreteria sebagai berikut:
   a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   c) Kepemilikan lebih dari 50% mengunakan metode ekuitas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, biaya perolehan Aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, karena penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dengan penggolongan umur ekonomis (masa manfaat).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis masa yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk semata memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Adapun Daftar masa manfaat dan penambahan umur aset tersebut pada Lampiran 15.

Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya per unit adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk aset yang diperoleh setelah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi

adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa jalan/jaringan/jembatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk asset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Kerugian Daerah
Kerugian Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya. Kerugian daerah terdiri dari:

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengukuran dan Penilaian Kerugian Daerah

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

5. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang

jangka panjang.
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

b. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;
2) dimaksudkan untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. **Pengakuan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan selisih antara aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

7. **Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. Aktivitas Investasi
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

d. Aktivitas Transitoris
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, pos aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam LRA meliputi pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 yang masing-masing diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dimana struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian terkait dengan penyusunan pelaporan atas realisasi anggaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum dapat dijelaskan untuk APBD Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.474.303.330.401,00 dan tercalisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau 94,46% serta dianggarkan Belanja Daerah sebesar Rp2.559.987.749.455.00 dan tercalisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 atau 90,20%. Adapun kontribusi masing-masing pos, baik pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merealisasikan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00 atau sebesar 94,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.131.663.102.999,38 maka realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp205.448.897.418.55 atau 9,64%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 10

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pencapaian Asli Daerah	228.056.655.257,00	207.567.574.087,12	91,02	146.136.238.928,38
2	Pendapatan Transfer	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,00	94,83	1.935.526.864.071,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SAH	750.000.000,00	72.433.674,16	9,66	0,00
	Jumlah	**2.474.303.330.401,00**	**2.337.112.000.417,93**	**94,46**	**2.131.663.102.999,38**

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 yang bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp207.567.574.086,17 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.129.471.992.656,00. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan kontribusi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi [illegible] sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	87.870.000.000,00	83.550.226.924,00	95,08	83.816.436.780,30
2	Retribusi Daerah	5.626.200.000,00	3.749.508.473,00	66,64	4.704.579.568,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,63	5.020.927.854,18
4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.960.355.257,00	117.062.925.324,58	95,20	104.594.294.929,90
	Jumlah	228.056.555.257,00	207.567.574.087,17	91,02	196.136.238.928,38

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp83.550.226.924,00 dari anggaran Rp87.870.000.000,00 atau 95,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.816.436.780,30 maka realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp266.209.856,30 atau 0,32% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun [illegible] 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	199.044.733,00	117,09	190.820.332,30
2	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	2.446.588.659,00	69,90	2.376.344.599,00
3	Pajak Hiburan	500.000.000,00	111.409.500,00	22,28	110.960.600,00

4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.514.360.360,00	95,88	1.374.570.599,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.500.000.000,00	43.559.873.028,40	102,44	47.831.800.356,00
6	Pajak Parkir	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64	[illegible]
7	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50	811.665.904,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Kapur)	5.300.000.000,00	139.417.500,00	2,63	132.475.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	26.700.000.000,00	27.970.793.579,00	104,76	26.962.404.220,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.511.184.789,00	110,22	4.023.313.450,00
	Jumlah	87.870.000.000,00	83.550.226.924,80	95,08	83.816.436.780,30

5.1.1.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, penginapan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak Hotel Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp199.044.733,00 dari anggaran sebesar Rp170.000.000,00 atau sebesar 117,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.820.312,30 maka realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.224.120,70 atau sebesar 4,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	170.000.000,00	199.044.733,00	117,09	190.820.312,30
	Jumlah	170.000.000,00	199.044.733,00	117,09	190.820.312,30

5.1.1.1.2. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak Restoran ini juga termasuk di dalamnya pajak katering yang salah satunya dipungut dari pemesanan pengadaan makanan dan minuman pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pajak Restoran/Katering pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.446.588.659,00 dari anggaran Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 69,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.376.343.339,00 maka realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp70.245.320,00 atau sebesar 2,96% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.000.000,00	296.531.438,00	118,61	222.125.718,00
2	Pajak Jasa Boga /Katering dan Sejenisnya	3.250.000.000,00	2.150.057.221,00	66,16	2.154.217.621,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	2.446.588.659,00	69,90	2.376.343.339,00

Dari tabel diketahui bahwa Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp296.541.438,00 dari anggaran Rp250.000.000,00 atau sebesar 118,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp222.125.718,00 maka realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.415.720,00 atau sebesar 33,50%. Sedangkan untuk Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp2.150.047.221.00 dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 atau sebesar 66,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.154.217 621,00 pajak Katering mengalami penurunan sebesar Rp4.170.400,00 atau sebesar 0,19%. Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Restoran dan sejenisnya khususnya dari jenis Pajak Jasa Boga/Katering hal ini dikarenakan pajak tersebut bersumber dari belanja makanan dan minuman OPD se Kabupaten Lampung Timur Dimana pada Tahun 2024 realisasi belanja makanan dan minuman tidak optimal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

5.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah pajak atas Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana. Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.409.500,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 22,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.960.600,00 maka realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp448,900,00 atau sebesar 0,40% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000.000,00	111.409.500,00	22.28	110.960.600,00
	Jumlah	**500.000.000,00**	**111.409.500,00**	**22.28**	**110.960.600,00**

Rendahnya capaian realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Lampung Timur dikarenakan adanya pembatasan waktu dan persyaratan pagelaran hiburan yang cukup ketat karena alasan keamanan.

5.1.1.1.4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pada Tahun Anggaran 2024 Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.314.360.460,00 dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sebesar 93,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.374.570.599,00 maka realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp60.210.139.00 atau sebesar 4,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	1.037.573.178,00	103,76	956.023.511,00
2	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	276.787.282,00	69,20	418.547.088,00
	Jumlah	1.400.000.000,00	1.314.360.460,00	93,88	1.374.570.599,00

Rendahnya capaian target Pajak Reklame khususnya Pajak Reklame Kain adalah karena terdapat pengurangan jumlah pemasangan Pajak Reklame Kain oleh produk rokok. Kondisi ini disebabkan menurunnya omset penerimaan yang signifikan karena maraknya peredaran rokok ilegal imasyarakat.

5.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Pajak Penerangan Jalan PLN dimana pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp44.559.873.028,00 dari anggaran sebesar Rp43.500.000.000,00 atau sebesar 102,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.831.806.356,00, maka realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.271.933.328,00 atau sebesar 6,84%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ)	43.500.000.000,00	44.559.873.028,00	102,44	47.831.806.356,00
	Jumlah	43.500.000.000,00	44.559.873.028,00	102,44	47.831.806.356,00

5.1.1.1.6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk penitipan kendaraan bermotor. Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp365.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 45,64%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Parkir	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64	0,00
	Jumlah	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64	0,00

Rendahnya realisasi Pajak Parkir disebabkan oleh statusnya sebagai pajak baru yang mulai dipungut pada Tahun 2024, sehingga pelaksanaannya belum optimal.

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Awalnya Pajak Air Tanah bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Air Permukaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp932.034.676,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 116,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.645.904,00 maka realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp120.388.772,00 atau sebesar 14,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50	811.654.904,00
	Jumlah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50	811.654.904,00

5.1.1.1.1.7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak batu kapur yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp139.817.500,00 dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 atau sebesar 2,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.475.000,00. maka realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.342.500,00 atau sebesar 5,54% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun [illegible] dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Batu Kapur	3.500.000.000,00	0,00	0,00	118.512.500,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	139.817.500,00	6,99	13.962.500,00
	Jumlah	5.500.000.000,00	139.817.500,00	2,54	132.475.000,00

Rendahnya capaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebabkan oleh belum adanya izin produksi dari para pengusaha MBLB, yang saat ini baru memiliki izin eksplorasi. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur belum dapat melakukan pemungutan pajak MBLB tersebut.

5.1.1.1.1.8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi

adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp27,970.793.579,00 dari anggaran sebesar Rp26.700.000.000.00 atau sebesar 104,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26,962.504.220,00 maka realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.289.359,00 atau sebesar 3,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.700.000.000,00	27.970.793.579,00	104,76	26.962.504.220,00
	Jumlah	**26.700.000.000,00**	**27.970.793.579,00**	**104,76**	**26.962.504.220,00**

5.1.1.1.9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.511.184.789,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 110,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.025.310.450,00 maka realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.485.874.339,00 atau sebesar 36,91% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.511.184.789,00	110,22	4.025.310.450,00
	Jumlah	**5.000.000.000,00**	**5.511.184.789,00**	**110,22**	**4.025.310.450,00**

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari pendapaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar

Rp3.749.508.473,00 dari anggaran Rp5.626.300.000,00 atau 66,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.704.579.364,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp955.070.891,00 atau 20.30% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun [illegible] dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.584.650.000,00	2.233.879.000,00	86.43	3.512.367.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.432.300.000,00	779.972.864,00	54.46	943.642.902,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.609.350.000,00	735.656.609,00	45,71	248.569.562,00
	Jumlah	**5.626.300.000,00**	**3.749.508.473,00**	**66,64**	**4.704.579.364,00**

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Parkir, Pelayanan Pasar, Pelayanan Tera Ulang dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telkomsel. Pada Tahun 2024 realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.233.879.000,00 dari anggaran Rp2.584.650.000,00 atau 86.43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.512.367.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.278.488.000,00 atau 36,40% sebagaimana terlihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	38.500.000,00	6.943.000,00	18,03	1.612.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.100.000.000,00	798.091.500,00	72,55	965.648.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	147.450.000,00	147,45	109.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	1.281.494.500,00	95,20	1.150.661.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	75.944.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.416.712.000,00
	Jumlah	2.584.650.000,00	2.233.879.000,00	86,43	3.512.367.000,00

5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan mencakup layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 diperoleh dari pelayanan Labkesda yang belum berstatus BLUD. Pada Tahun 2024 untuk pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp28.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.943.000,00 atau sebesar 18,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.612.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.331.000,00 atau 330,71%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	38.500.000,00	6.943.000,00	18,03	1.612.000,00
	Jumlah	**38.500.000,00**	6.943.000,00	18,03	1.612.000,00

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh belum tersedianya Tenaga Ahli Laboratorium yang berdampak pada terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan. Selain itu, rendahnya animo masyarakat dalam memanfaatkan jasa Labkesda juga dipengaruhi oleh lokasi Labkesda yang kurang strategis karena berada di dalam kompleks perkantoran Dinas Kesehatan.

5.1.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp796.091.500,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 72,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp765.948.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp30.143.500,00 atau 3,94%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.100.000.000,00	796.091.500,00	72,37	765.948.000,00
	Jumlah	**1.100.000.000,00**	**796.091.500,00**	72,37	**765.948.000,00**

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disebabkan oleh menurunnya aktivitas di pasar-pasar tradisional dikarenakan meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat.

5.1.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024, pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp147.450.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 147,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.200.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.250.000,00 atau 44,28% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	147.450.000,00	147,45	102.200.000,00
	Jumlah	**100.000.000,00**	**147.450.000,00**	**147,45**	**102.200.000,00**

5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.346.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.283.394.500,00 atau sebesar 95,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.150.661.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp132.733.500,00 atau 11,54% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Kios	1.346.150.000,00	1.283.394.500,00	95,34	1.150.661.000,00
	Jumlah	**1.346.150.000,00**	**1.283.394.500,00**	**95,34**	**1.150.661.000,00**

5.1.1.1.2.1.5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menetapkan 6 jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat – Alat Ukur,Takar,Timbang,dan Perlengkapannya	0,00	0,00	165,92	75.244.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**165,92**	**75.244.000,00**

5.1.1.1.2.1.6. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur tidak menganggarkan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menetapkan 6 jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga terealisasi Rp0.00 sebagaiman terlihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	1.416.702.000,00
	Jumlah	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.416.702.000,00**

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp779.972.864,00 dari anggaran sebesar Rp1.432.300.000,00 atau sebesar 54,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp945.662.802,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp165.689.938,00 atau 17,52% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	295.000.000,00	181.285.864,00	61,45	89.008.802,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	695.750.000,00	598.687.000,00	86,05	844.404.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	341.550.000,00	0,00	0,00	252.250.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.432.300.000,00**	**779.972.864,00**	**54,46**	**945.662.802,00**

5.1.1.1.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pembayaran jasa atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk kegiatan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat,alat-alat besar milik daerah. Yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. Yang menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah Pemakaian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah, Pelayanan dan Pemakaian Gedung SKB Purbolinggo, Pelayanan dan Pemakaian Gedung *Islamic Center* Sukadana serta Pemanfaatan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor Alat Berat. Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp181.285.864,00 dari anggaran sebesar Rp295.000.000,00 atau sebesar 61,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.008.802,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024

mengalami kenaikan sebesar Rp92.277.062,00 atau 103,67% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah	90.000.000,00	44.000.000,00	48,89	24.000.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00	39.500.000,00	49,38	51.898.892,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	90.713.064,00	181,43	3.750.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	7.072.800,00	9,43	9.360.000,00
	Jumlah	**295.000.000,00**	**181.285.864,00**	**61,45**	**89.008.892,00**

Rendahnya capaian target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah daerah karena alasan keamanan dan kenyamanan serta kondisi fasilitas (kendaraan bermotor) yang sudah usang

5.1.1.1.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan atau yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 menganggarkan pendapatan dari sektor tersebut sebesar Rp695.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp598.687.000,00 atau sebesar 86,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp604.304.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.617.000,00 atau 0,93% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 33
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	695.750.000,00	598.687.000,00	86,05	604.304.000,00
	Jumlah	**695.750.000,00**	**598.687.000,00**	**86,05**	**604.304.000,00**

Tidak tercapainya target Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah karena sepinya pengunjung pasar sebagai akibat dari perubahan kebiasaan dalam masyarakat yang lebih memilih berbelanja online dan berbelanja di toko-toko modern sehingga berdampak pada banyaknya kios-kios pedagang yang tutup. Disisi pedagang fenomena ini menyebabkan banyaknya pedagang yang beralih berjualan secara online karena dapat menekan biaya produksi sebab tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat.

5.1.1.1.2.2.3. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	341.550.000,00	0,00	0,00	252.350.000,00
	Jumlah	341.550.000,00	0,00	0,00	252.350.000,00

Tidak terdapat realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir karena retribusi tersebut sudah dipindah menjadi Pajak Parkir.

5.1.1.1.2.2.4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lumpung Timur. Pada Tahun 2024 pendapatan tersebut tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga	100,000,000.00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100,000,000.00	0.00	0,00	0,00

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Gedung Olah Raga yang berada di bawah wewenang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Tidak terealisasinya target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disebabkan oleh peraturan yang mengatur tentang retribusi tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterbitkan.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Restribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lampung Timur adalah Retribusi Izin Mendirikan Bagunan. RetribusiPersetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada Tahun 2024 tersebut terealisasi sebesar Rp735.656.609,00 dari anggaran Rp1.609.350.000,00 atau sebesar 45.71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp246.549.562,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp489.107.047,00 atau 198,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	246.549.562,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	735.656.609,00	45,71	0,00

3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.609.356.000,00	735.656.609,00	45,71	246.549.562,00

5.1.1.1.2.3.1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan izin mendirikan bangunan. kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merobohkan, merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 tidak menganggarkan retribusi pemberian izin mendirikan bangunan tetapi menganggarkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	246.549.562,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	246.549.562,00

5.1.1.1.2.3.2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, kepada pemilik bangunan untuk persetujuan atas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 menganggarkan pendapatan tersebut sebesar Rp1.564.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp735.656.609,00 atau 47,04% bagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	735.656.609,00	47,04	0,00
	Jumlah	1.564.000.000,00	735.656.609,00	47,04	0,00

Rendahnya capaian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebabkan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus PBG karena kurangnya informasi tentang pentingnya memiliki PBG untuk bangunan yang mereka miliki.

5.1.1.1.2.3.3. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing(TKA) merupakan retribusi yang dipungut atas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	45.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	45.350.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena sampai dengan 31 Desember 2024 peraturan yang mengatur retribusi tersebut belum terbit.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada Tahun 2024, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp3.204.913.365,59 dari anggaran sebesar Rp11.600.000.000,00 atau sebesar 27,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.020.927.854,18 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan Rp183.985.511,41 atau 6,09% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Diberikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan)	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,62	3.020.927.854,18
	Jumlah	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,62	3.020.927.854,18

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dari PT Bank Lampung dan BPRS Syariah Lampung Timur. Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari PT Bank Lampung terealisasi sebesar Rp1.726.943.923,88 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPRS Syariah Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.477.969.441,71.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD serta pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp117.062.925.324,58 dari anggaran Rp122.960.355.257,00 atau sebesar 95,20%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.594.294.929,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.468.630.194,68 atau sebesar 11,92% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.250.000.000,00	600.796.500,00	48,06	138.914.619,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	15.123.443.374,00
3	Jasa Giro	7.360.614.275,00	6.993.619.924,97	95,01	4.800.761.580,46
4	Pendapatan Bunga	400.000.000,00	394.842.735,00	98,71	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	500.000.000,00	55.992.345,87	11,20	19.843.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.000.000,00	95.541.501,00	415,40	18.758.020,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	9.040.000.000,00	12.029.214.669,02	133,05	4.792.409.596,18
9	Pendapatan BLUD	104.282.740.982,00	96.852.917.644,73	92,93	79.060.127.007,26
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	140.037.735,00
12	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**122.960.355.257,00**	**117.062.925.324,58**	**95,20**	**104.594.294.929,90**

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan dari aset berupa peralatan/mesin yang terealisasi sebesar Rp600.796.500,00 dari yang telah dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00 atau sebesar 48,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.914.619,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp461.881.881,00 atau sebesar 332,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	138.914.619,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perseorangan	300.000.000,00	457.092.000,00	152,36	0,00
4	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	14.672.500,00	29,35	0,00

6	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	300.000.000,00	129.032.000,00	43,01	0,00
	Jumlah	**1.250.000.000,00**	**600.796.580,00**	**48,06**	**138.914.619,00**

Tidak terpenuhinya target Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan lelang atas mobil dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan masa jabatan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan tidak mencukupi.

5.1.1.1.4.2. Hasil Kerja Sama Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Hasil Kerja Sama Daerah, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	15.623.443.374,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.623.443.374,00**

5.1.1.1.4.3.Jasa Giro

Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Lampung dan/atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.993.619.924,97 dari anggaran sebesar Rp7.360.614.275,00 atau 95,01%. yang merupakan penerimaan Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang juga termasuk seluruh penerimaan Jasa Giro rekening OPD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.800.761.580,46 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.192.858.344,51 atau sebesar 45,68% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Jasa Giro
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.560.614.275,00	6.910.061.196,87	105,33	4.800.761.580,46
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	1.991.563,81	4,99	0,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	200.000.000,00	1.930.310,29	0,97	0,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	200.000.000,00	73.636.854,00	36,82	0,00
	Jumlah	**7.360.614.275,00**	**6.993.619.924,97**	**95,01**	**4.800.761.580,46**

5.1.1.1.4.4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan atas Penempatan Uang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp394.842.735,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 98.71%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	400.000.000,00	394.842.735,00	98,71	0,00
	Jumlah	400.000.000,00	394.842.735,00	98,71	0,00

5.1.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pendapatan Kerugian Uang Daerah merupakan penerimaan atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang [illegible] pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp55.992.345,87 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 11,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.843.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp36.149.345,87 atau sebesar 182,18% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	55.992.345,87	11,20	19.843.000,00
	Jumlah	500.000.000,00	55.992.345,87	11,20	19.843.000,00

Dari tabel diketahui bahwa penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar 11,20%. Kendala terkait pencapaian target realisasi penerimaan tersebut antara lain:

a. TGR terhadap Bendahara yang terkait dengan Pihak Ketiga terkendala dengan keberadaan pihak ketiga yang sulit dilacak karena Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;
b. Kejadiannya terjadi di masa lampau sehingga menyulitkan untuk menelusurinya;
c. TPKD dan Majelis TPTGR belum bekerja secara maksimal.

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak adalah penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah atas sanksi administrasi yang diberikan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak dan pelaporan pajak. Pada Tahun 2024 penerimaan dari denda pajak terealisasi sebesar Rp95.541.504,00 dari anggaran sebesar Rp23.000.000,00 atau sebesar 415,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.758.020,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp76.783.484,00 atau sebesar 409,34% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	228.944,00	11,42	186.900,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000,00	2.217.759,00	110,89	1.750.861,00
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	2.000.000,00	9.217.759,00	455,89	3.101.352,00
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.000.000,00	16.000,00	0,80	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	2.021.188,00	51,22	431.535,00
6	Pendapatan Denda PBB-P2	15.000.000,00	82.937.138,00	633,96	17.295.852,00
	Jumlah	23.000.000,00	95.641.504,00	415,90	18.758.020,00

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah adalah penerimaan dari denda retribusi jasa. pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.8. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan dari LLPAD yang Sah atas pengembalian yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan pelimpahan yang bersifat tidak berulang dan mempengaruhi kas. Pendapatan dari pengembalian merupakan penyetoran/pengembalian secara tunai dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, perjalanan dinas serta pembayaran Pemeliharaan Alat Angkutan. Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.029.214.668,02 dari anggaran sebesar Rp9.040.000.000,00 atau sebesar 133,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.792.409.596,18 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.236.805.071,84 atau sebesar 151,01% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	1.862.525.844,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	7.000.000.000,00	8.822.396.691,89	126,04	1.920.361.466,22
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	350.249.561,00	175,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.000.000,00	8.844.550,00	20,94	0,00

5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.000.000,00	0.00	0.00	0.00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	80.000.000,00	0.00	0.00	0.00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	800.000.000,00	0,00	0.00	0.00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	550.000.000,00	975.472.750,00	177.36	1.626.846.408,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	729.312.072,08	0.00	182.475.877,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayarn Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	240.000.000,00	932.337.530,08	388,47	0,00
	Jumlah	9.040.000.000,00	12.829.214.668,05	133,08	4.792.489.596,18

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, terdapat kenaikan realisasi pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan, pengembalian perjalanan dinas, pengembalian pembayaran belanja jasa, pengembalian pembayaran belanja pemeliharaan dan pengembalian pembayaran belanja pegawai BOSP, belanja barang dan jasa BOSP, belanja modal peralatan dan mesin BOSP dan belanja modal aset tetap lainnya BOSP. Pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Yang Lalu. Selain itu terdapat realisasi pendapatan yang merupakan setoran atas penarikan kembali kas yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur sebesar Rp1.490.242.750,00 pada pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

5.1.1.1.4.9. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah. Pendapatan BLUD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp104.282.740.982,00 dan terealisasi sebesar Rp96.892.917.646,72 atau sebesar 92,91% dan tercatat setiap bulannya dalam rekening Kas BLUD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.060.127.007,26 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.832.790.639,46 atau sebesar 22.56% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0,00	79.060.127.007,26
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	104.082.740.982,00	96.892.917.646,72	93,09	0,00
3	Pendapatan BLUD dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang SAH	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	104,282.740.982,00	96.892.917.646,72	92,91	79.060.127.007,26

5.1.1.1.4.10. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah Penerimaan Dana atas Denda Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah disebabkan oleh tidak adanya kasus pelanggaran yang terjadi sepanjang Tahun 2024.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal serta transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Antar Daerah.

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.129.471.992.656,00 dari anggaran sebesar Rp2.245.496.675.144,00 atau 94,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.935.526.864.071,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp193.945.128.585,00 atau sebesar 10,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 52
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.076.296.357.000,00	1.999.880.925.177,00	96,32	1.826.894.762.966,00
2	Transfer Antar Daerah	169.200.318.144,00	129.591.067.479,00	76,59	108.631.101.105,00
	Jumlah	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,00	94,83	1.935.526.864.071,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa rekening pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik dan transfer dana lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.076.296.357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.999.880.925.177,00 atau 96,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.826.894.762.966,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp172.986.162.211,00 atau sebesar 9,47%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00
2	Dana Desa	232.698.701.000,00	231.562.075.800,00	99,48	269.134.513.100,00
3	Insentif Fiskal	75.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.076.296.357.000,00	1.999.880.925.177,00	96,32	1.826.894.762.966,00

5.1.1.2.1.1.Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.788.597.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.728.318.848.377,00 atau 96,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.557.560.248.866,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp170.758.599.511,00 (Rp1.728.318.848.377,00 - Rp1.557.560.248.866,00) atau sebesar 10,96% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.756.006.000,00	89.946.258.000,00	65,94	75.432.109.191,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.193.254.194.000,00	1.193.360.241.000,00	100,01	1.037.274.701.452,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	115.685.960.000,00	112.366.630.226,00	97,13	61.762.628.193,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	352.896.476.000,00	333.644.119.951,00	94,55	343.089.811.030,00
	Jumlah	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yng bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp89.946.258.000,00 dari anggaran sebesar Rp136.756.006.000,00 atau sebesar 65,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp75.432.109.191,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.514.148.809,00 atau 17,92% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	82.849.052.000,00	36.954.864.000,00	42,51	16.519.581.489,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.401.052.000,00	6.923.657.000,00	93,56	7.304.799.969,00

3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29/WPOPDN	305 269 000,00	780.704 000,00	255,74	0,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.611 208.000,00	1 716 450 000,00	106,52	787.249.357,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32 278 073 000,00	32 278 073 000,00	100,00	41 651 604 646,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3 195 552 000,00	3 195 552 000,00	100,00	938 674 356,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent	0,00	0,00	0,00	124 069.010,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) [illegible]	33.914.000,00	33.914.000,00	100,00	0,00
9	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)Kehutanan–Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	0,00	0,00	5 668 395.153,00
10	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan–Provasi Sumber Daya Hutan (PSDH)	86 207.000,00	86.207 000,00	100,00	0,00
11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.961 394.000,00	1 961 394 000,00	100,00	2 467 645 211,00
12	Bagi Hasil Sawit	4 923 563 000,00	4 923 563.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**136.756.006.000,00**	**88.946.258.000,00**	**65,04**	**75.432.109.191,00**

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap tahun sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.193.360.241.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.183.258.184.000,00 atau sebesar 100,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1 077.274.703.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp116 085.537.548.00 atau 10,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	970.232 952 000,00	980.336.006 000,00	101,04	1.077.274.703.452,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6 499 800 000,00	6.499 800 000,00	100,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	142.060.583.000,00	142 060.583.000,00	100,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	45.452 836.000,00	45.452 836 000,00	100,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19 011 013.000,00	19 011 013.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**1.183,258.184.000,00**	**1.193.360.241.000,00**	**100,85**	**1.077.274.703.452,00**

Adapun realisasi tiap bulannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 57
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Januari	79.602.829.000,00	142.758.290.000,00
2	Februari	79.602.829.000,00	80.744.414.000,00
3	Maret	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
4	April	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
5	Mei	141.560.136.000,00	93.588.330.000,00
6	Juni	79.602.829.000,00	126.351.591.000,00
7	Juli	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
8	Agustus	172.538.822.000,00	71.389.145.000,00
9	September	79.602.829.000,00	118.217.522.452,00
10	Oktober	79.602.829.000,00	115.904.247.000,00
11	November	151.233.941.000,00	71.389.148.000,00
12	Desember	111.208.600.000,00	42.544.584.000,00
	Jumlah	1.193.360.241.000,00	1.077.274.703.452,00

5.1.1.2.1.3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Fisik

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp112.366.030.326,00 dari anggaran sebesar Rp115.686.990.000,00 atau sebesar 97,13%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.763.625.193,00 maka realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp50.602.405.133,00 atau 81,93% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - PAUD	1.256.954.000,00	1.244.658.295,00	99,02	922.515.000,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan Reguler - SD	11.655.882.000,00	11.536.384.328,00	98,97	14.059.299.376,00
3	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – SMP	12.654.131.000,00	12.501.464.386,00	98,79	14.894.472.884,00
4	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - Penurunan AKI dan KB	2.972.919.000,00	2.512.872.853,00	84,53	0,00
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	249.672.000,00

6	DAK Fisik - Bidang Perhubungan-Penugasan Pembangunan Renovasi, Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	8 088.802.965,00
7	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	4 535 429 000 00	4 514 183.000,00	99.10	2.238.393.000.00
8	DAK Fisik – Bidang Jalan-Reguler-Jalan	54.739 075 000,00	53 124 886 139,00	97,05	0,00
9	DAK Fisik – Bidang Jalan – Penugasan – Jalan	0,00	0.00	0.00	20 834.800.247.00
10	DAK Fisik – Bidang Irigasi – Penugasan	1 156 500 000,00	1.144.465.935,00	98.96	595 349.722.00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.856.800.000,00	3 642.456.385,00	94.44	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	9 985 240 000,00	9.691.648.077,00	97.06	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	12 853.870 000,00	12 452.810.828,00	97,03	0,00
	Jumlah	**115.086.990.000,00**	**112.366.030.326,00**	**97,13**	**61.763.625.193,00**

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar sebesar Rp333.646.319.051,00 dari anggaran sebesar Rp352.896.476.000.00 atau sebesar 94,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp343.089.811.030,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.443.491.979,00 atau 2,75% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik – BOS Reguler	121 151 400 000,00	121 099.759.200,00	99,96	125.616 113 300.00
2	DAK Non Fisik – BOS Kinerja	3 230 000 000,00	3.230 000.000,00	100,00	3 317 500 000,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	149 861.213.000,00	139 359 816 400,00	92,99	152.301 984.440,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.246 624 000,00	5.151.595.000.00	158 67	3 829.265.371,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.032.200.000,00	17 232 168 000,00	101,17	18.005.400.000.00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0.00	0.00	0,00	2.758.000.000.00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12 503 484 000,00	9 723.844 078,00	77,77	7.333 827 520,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	618 831 000.00	0,00	0,00	524 566 000.00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	39 [redacted] 976 000,00	25.794.210.658.00	80.49	26.881.172 000.00

9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.117.389.000,00	8.810.872.200,00	87,09	4.836.483.599,60
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	415.332.000,00	415.332.000,00	100,00	585.820.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.107.181.000,00	1.107.181.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	788.352.000,00	785.962.850,00	99,70	298.973.800,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	235.237.165,00	57,94	293.545.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	707.150.000,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.813.400.000,00	2.655.240.500,00	94,38	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**352.896.476.000,00**	**333.646.319.051,00**	**94,55**	**343.089.811.030,00**

5.1.1.2.1.2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp271.562.076.800,00 dari anggaran sebesar Rp272.698.701.000,00 atau 99,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp269.334.514.100,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.227.562.700,00 atau 0,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	272.698.701.000,00	271.562.076.800,00	99,58	269.334.514.100,00
	Jumlah	**272.698.701.000,00**	**271.562.076.800,00**	**99,58**	**269.334.514.100,00**

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan alokasi dana insentif fiskal sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2024 Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp129.591.067.479,00 dari anggaran sebesar Rp169.200.318.144,00 atau sebesar 76,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp108.632.101.105,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.958.966.374,00 atau 19,29% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.028.037.000,00	27.647.645.047,00	89,11	25.269.029.443,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	49.806.097.253,00	12.215.220.547,00	24,52	13.895.976.376,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	38.854.750.000,00	48.508.787.704,00	124,85	25.550.024.023,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)	700.262.253,00	286.318.395,00	40,89	211.398.664,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	48.811.121.908,00	40.935.093.536,00	83,86	43.725.672.607,00
	Jumlah	169.200.318.144,00	129.591.065.479,00	76,59	108.632.101.105,00

Pada tahun 2024, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dimana penyaluran akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2028.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 berasal dari sumbangan pihak ketiga/sejenis, terealisasi sebesar Rp72.433.674,76 dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 atau 9,66%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00
	Jumlah	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh

Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 dari anggaran sebesar Rp2.559.987.749.455,00 atau 90,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.096.191.300.837,69 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp212.999.273.479,91 atau 10.16%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.746.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.655,97
2	Belanja Modal	383.985.335.511,00	320.800.571.557,70	83,55	188.842.370.186,72
3	Belanja Tidak Terduga	8.550.000.000,00	4.913.357.922,00	57,46	34.370.000,00
4	Belanja Transfer	420.608.901.075,00	400.538.478.705,00	95,23	404.681.887.795,00
	Jumlah	**2.559.987.749.455,00**	**2.309.190.574.317,60**	**90,20**	**2.096.191.300.837,69**

Secara rinci masing-masing jenis belanja dalam LRA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.582.938.466.132,90 dari anggaran sebesar Rp1.746.843.512.869,00 atau 90.62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.502.632.678.655,97 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80.305.787.476,93 atau 5,34% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	931.016.278.263,00	877.743.801.240,51	94,28	819.359.372.551,67
2	Belanja Barang dan Jasa	529.144.388.263,00	461.577.306.441,49	87,23	445.583.187.092,82
3	Belanja Hibah	283.526.070.668,00	241.174.866.230,90	85,06	234.335.347.242,48
4	Belanja Bantuan Sosial	3.156.775.675,00	2.442.292.220,00	77,37	2.354.771.769,00
	Jumlah	1.746.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.655,97

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp877.743.801.240,51 dari anggaran sebesar Rp931.016.278.263,00 atau sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp819.359.372.551,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp58.391.628.688,84 atau 7,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 66
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	610.860.531.581,00	578.225.104.786,00	94,66	556.029.839.792,67
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	85.947.545.595,00	80.264.934.093,00	93,39	70.286.349.869,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.796.143.645,00	162.853.344.422,00	93,20	161.881.886.31[illegible]
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.304.196.813,00	28.025.056,41	99,01	27.562.402,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.661.336,00	175.819.199,00	98,41	175.684.102,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	810.009.000,00	8.010.010,20	100,00	852.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	31.035.099.945,00	27.370.303.330,51	88,19	2.268.360.000,00
	Jumlah	**931.016.278.263,00**	**877.743.801.240,51**	**94,28**	**819.359.372.553,67**

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp578.225.104.786,00 dari anggaran sebesar Rp610.860.531.581,00 atau sebesar 94,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp556.029.839.792,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.195.264.993,33 atau 3,99% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	458.895.198.904,00	441.904.469.203,00	96,30	424.227.783.639,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.253.871.144,00	40.540.290.992,00	95,95	39.518.603.154,67
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.576.613.614,00	5.356.524.285,00	96,05	5.434.334.031,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.508.867.523,00	29.421.675.000,00	99,70	29.471.875.400,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.179.647.995,00	6.796.098.201,00	94,66	7.200.263.335,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	25.181.799.271,00	23.305.384.042,00	92,55	23.326.156.627,00
7	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus ASN	3.807.908.075,00	998.135.075,00	26,21	623.570.377,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.276.585,00	5.731.500,00	61,79	5.619.701,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	34.736.608.524,00	25.248.646.777,00	87,32	22.824.402.050,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.068.376.918,00	880.501.999,00	82,41	869.476.384,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.205.116.846,00	2.641.496.317,00	82,41	2.607.705.083,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.407.199.784,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**610.860.531.981,00**	**578.225.104.786,00**	**94,66**	**556.029.839.792,67**

5.1.2.1.1.1.1. Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2024 sebesar Rp441.904.469.203,00 dari anggaran sebesar Rp458.895.198.904,00 atau sebesar 96,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp424.227.783.639 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.676.685.664,00 atau 4,17% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	339.639.814.506,00	368.182.899.448,00	95,98	363.105.173.039,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	79.255.384.398,00	73.721.469.855,00	93,02	61.124.610.640,00
	Jumlah	458.895.198.904,00	441.904.469.303,00	96,30	424.229.783.679,00

5.1.2.1.1.2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2024 sebesar Rp40.646.290.992,00 dari anggaran sebesar Rp42.243.871.144,00 atau sebesar 96,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.618.603.154,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.027.687.837,33 atau 2,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.233.752.749,00	33.242.918.628,00	97,11	33.429.588.426,67
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.010.118.395,00	7.403.372.364,00	92,43	6.189.214.728,00
	Jumlah	42.243.871.144,00	40.646.290.992,00	96,22	39.618.603.154,67

5.1.2.1.1.3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2024 sebesar Rp5.356.524.286,00 dari anggaran sebesar Rp5.576.613.014,00 atau sebesar 96,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.454.335.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp97.810.714,00 atau 1,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.576.613.014,00	5.356.524.286,00	96,05	5.454.335.000,00
	Jumlah	5.576.613.014,00	5.356.524.286,00	96,05	5.454.335.000,00

5.1.2.1.1.4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2024 sebesar Rp28.421.675.000,00 dari anggaran sebesar Rp29.598.867.523,00 atau sebesar 96,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.471.874.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.050.199.400,00 atau 3,56% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.568.657.523,00	28.411.465.000,00	96,09	29.441.244.400,00

2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.210.000,00	10.210.000,00	33,80	30.400.000,00
	Jumlah	**29.498.867.823,00**	**28.421.678.000,00**	**96,02**	**29.471.874.400,00**

5.1.2.1.1.5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2024 sebesar Rp6.796.098.700,00 dari anggaran sebesar Rp7.129.642.995,00 atau sebesar 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.290.253.375,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp494.154.675,00 atau 6,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.787.762.845,00	2.634.944.700,00	94,52	3.497.528.375,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.342.380.150,00	4.161.165.000,00	95,83	3.792.725.000,00
	Jumlah	**7.129.642.995,00**	**6.796.098.700,00**	**95,32**	**7.290.253.375,00**

5.1.2.1.1.6. Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2024 sebesar Rp22.325.384.742,00 dari anggaran sebesar Rp23.181.799.271,00 atau sebesar 96,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.336.156.627,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.010.771.885,00 atau 4,33% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.013.068.552,00	17.496.419.142,00	97,13	18.052.501.605,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.168.730.699,00	4.828.965.600,00	93,43	4.383.655.020,00
	Jumlah	**23.181.799.271,00**	**22.325.384.742,00**	**96,31**	**23.336.156.627,00**

5.1.2.1.1.7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Pada Tahun 2024 Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebesar Rp998.235.076,00 dari anggaran sebesar Rp3.807.960.073,00 atau sebesar 26,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp623.570.377,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp374.664.699,00 atau 60,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.807.960.073,00	998.235.076,00	26,21	622.778.706,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	791.671,00
	Jumlah	**3.807.960.073,00**	**998.235.076,00**	**26,21**	**623.570.377,00**

5.1.2.1.1.8. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Pembulatan gaji ASN adalah sebesar 5.731.594,00 dari anggaran sebesar Rp9.276.585,00 atau sebesar 61,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.619.701,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp111.893,00 atau 1,99% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.576.585,00	4.421.753,00	58,36	4.681.317,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.700.000,00	1.309.841,00	77,05	938.389,00
	Jumlah	**9.276.585,00**	**5.728.074,00**	**61,75**	**5.619.701,00**

5.1.2.1.1.9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Pada Tahun 2024 Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebesar Rp28.248.696.777,00 dari anggaran sebesar Rp34.736.608.524,00 atau sebesar 81,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.524.462.050,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.724.234.727,00 atau 25,41% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.049.439.370,00	25.315.178.970,00	81,53	20.068.850.344,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.687.169.154,00	2.933.517.807,00	79,56	2.455.611.706,00
	Jumlah	**34.736.608.524,00**	**28.248.696.777,00**	**81,32**	**22.524.462.050,00**

5.1.2.1.1.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN adalah sebesar Rp880.501.999,00 dari anggaran sebesar Rp1.068.376.918,00 atau sebesar 82,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp869.476.384,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.025.615,00 atau 1,27% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS	877.685.012,00	729.820.665,00	83,15	743.742.732,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK	190.691.906,00	150.681.334,00	79,02	125.733.652,00
	Jumlah	**1.068.376.918,00**	**880.501.999,00**	**82,41**	**869.476.384,00**

5.1.2.1.1.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebesar Rp2.641.496.317,00 dari anggaran sebesar Rp3.205.116.846,00 atau sebesar 82,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.607.705.085,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp33.791.232,00 atau 1,30% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.633.041.132,00	2.189.465.900,00	83,15	2.261.131.768,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	572.075.714,00	452.030.417,00	79,02	346.573.317,00
	Jumlah	**3.205.116.846,00**	**2.641.496.317,00**	**82,41**	**2.607.705.085,00**

5.1.2.1.1.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terdapat realisasi. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.293.192.841,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	120.005.943,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.407.199.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp80.264.934.093,00 dari anggaran sebesar Rp85.947.745.597,00 atau sebesar 93,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.289.400.922,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.978.534.285,00 atau 14,20% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.183.253.172,00	43.340.942.337,50	93,85	70.289.400.922,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	38.198.582.825,00	35.479.211.755,50	92,88	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.565.909.600,00	1.444.780.000,00	92,26	0,00
	Jumlah	**85.947.745.597,00**	**80.264.934.093,00**	**93,39**	**70.289.400.922,00**

5.1.2.1.1.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp162.853.343.422,00 dari anggaran sebesar Rp173.796.043.367,00atau sebesar 93,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.88[illegible],11,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp978.857.111,00 atau 0,60% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 81
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.222.989.687,00	3.798.770.000,00	89,95	1.897.635.000,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	400.682.704,00	208.515.694,00	52,04	41.175.911,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	149.861.217.000,00	142.470.620.900,00	95,07	145.448.766.300,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.416.787.371,00	3.185.000.000,00	58,81	4.247.750.039,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.369.324.205,00	3.345.374.528,00	76,58	0,00
6	Belanja Honorarium	10.628.692.400,00	9.230.091.300,00	86,84	9.302.260.000,00
7	Belanja Jasa Penerbitan BPJD	[illegible]	574.810.000,00	72,14	564.066.601,00
	Jumlah	173.796.043.367,00	162.853.343.422,00	93,70	161.881.686.311,00

5.1.2.1.1.3.1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.798.770.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.222.989.687,00 atau sebesar 89,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.897.635.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.901.135.000,00 atau 100,18% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	[illegible]	7.536.250,00	99,50	4.199.250,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Pajak Restoran	[illegible]	106.775.000,00	60,98	56.956.250,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.257.500,00	4.690.000,00	23,15	1.642.500,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	60.225.000,00	51.945.000,00	86,25	27.375.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.158.062.500,00	2.142.437.500,00	99,28	1.155.225.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	[illegible]	4.380.000,00	15,00	3,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	41.975.000,00	41.625.000,00	99,17	16.425.000,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.750.000,00	[illegible]	0,00	0,00

9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.293.332.187,00	1.206.453.750,00	92,94	508.362.500,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Hak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	223.432.500,00	265.947.406,00	99,37	67.342.500,00
	Jumlah	4.222.989.687,00	3.790.770.000,00	89,95	1.897.635.000,00

5.1.2.1.1.3.2. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp208.315.694,00 dari anggaran sebesar Rp400.682.704,00 atau sebesar 51,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.175.011,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp167.140.683,00 atau 405,93% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.405.250,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.025.000,00	30.160.513,00	37,69	9.013.750,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman Umum	7.163.250,00	4.366.257,00	60,95	821.250,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	115.298.369,00	74.471.617,00	64,60	11.055.257,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.471.409,00	1.334.941,00	53,99	630.728,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.045.000,00	41.715.000,00	99,22	9.855.000,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11.537.125,00	2.383.250,00	21,02	373.750,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	59.643.165,00	36.323.285,00	60,90	5.313.647,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	16.309.013,00	4.735.431,00	29,29	2.604.979,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	990.150,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung	57.068.700,00	12.844.350,00	22,50	0,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.555.279,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	400.682.704,00	208.315.694,00	51,99	41.175.011,00

5.1.2.1.1.3.3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah sebesar Rp142.470.620.900,00 dari anggaran sebesar Rp149.861.217.000,00 atau sebesar 95,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp145.498.766.300,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.028.145.400,00 atau

2,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 84
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja TPG PNSD	149.861.217.000,00	142.470.620.900,00	95,07	145.498.766.300,00
	Jumlah	**149.861.217.000,00**	**142.470.620.900,00**	**95,07**	**145.498.766.300,00**

5.1.2.1.1.3.4. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Pada Tahun 2023 realisasi belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD adalah sebesar Rp3.185.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.516.787.371,00 atau sebesar 90,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.257.750.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.072.750.000,00 atau 25,20% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 85
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.516.787.371,00	3.185.000.000,00	90,57	4.257.750.000,00
	Jumlah	**3.516.787.371,00**	**3.185.000.000,00**	**90,57**	**4.257.750.000,00**

5.1.2.1.1.3.5. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN dianggarkan sebesar Rp4.369.724.205,00 dan terealisasi Rp3.385.774.828,00 atau 77,48% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 86
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	4.369.724.205,00	3.385.774.828,00	77,48	0,00
	Jumlah	**4.369.724.205,00**	**3.385.774.828,00**	**77,48**	**0,00**

5.1.2.1.1.3.6. Belanja Honorarium

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Honorarium adalah sebesar Rp9.230.052.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.638.692.400,00 atau sebesar 86,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.302.360.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp72.308.000,00 atau 0,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 87
Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Honorarium [illegible]	10.289.474.800,00	9.105.412.000,00	88,49	9.147.800.000,00
2	Belanja Honorarium [illegible]	349.217.600,00	124.640.000,00	35,69	154.560.000,00
	Jumlah	**10.638.692.400,00**	**9.230.052.000,00**	**86,76**	**9.302.360.000,00**

5.1.2.1.1.3.7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD adalah sebesar Rp574.810.000,00 dari anggaran sebesar Rp785.950.000,00 atau sebesar 73,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp876.800.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp301.990.000,00 atau 34,44% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 88
Anggaran dan Realisasi Belanja Pengelolaan BMD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan [illegible] yang Telah [illegible]	785 950 000,00	574.810.000,00	73,14	876.800.000,00
	Jumlah	**785.950.000,00**	**574.810.000,00**	**73,14**	**876.800.000,00**

5.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 sebesar Rp28.025.096.410,00 dari anggaran sebesar Rp28.364.196.817,00 atau sebesar 98,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.867.402.638,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp157.693.772,00 atau 0,57% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 89
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114 [illegible]	1 [illegible]	99,85	1 101 660 000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121 000 000,00	117 838 000,00	96,81	116 946 400,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	135.802.441,00	131.225.040,00	96,63	131.369.880,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95 308.000,00	95 340.000,00	99,82	94 462 000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677 000,00	1.613 241 000,00	99,85	1.595 173 250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.726.700,00	108 330 650,00	81,60	130.955 000,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18 625 700,00	15 331.575,00	82,31	14 798.700,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6 300 000 000,00	6.300 000.000,00	100,00	6 226 500 000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 010 000 000,00	1 008.000.000,00	99,80	1.539 300.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	510.605.000,00	390.000 457,00	76,38	361 283.054,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.265.491 976,00	8.225 284 688,00	99,51	8 006 933 354,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.572 000 000,00	8.452 000 000,00	98,60	8.548 000 000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	472 500 000,00	446 645.000,00	96,64	0,00
	Jumlah	**28.364.196.817,00**	**28.025.096.410,00**	**98,80**	**27.867.402.638,00**

5.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 sebesar Rp174.819.199,00 dari anggaran sebesar Rp178.661.356,00 atau sebesar 97,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.684.002,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.135.197,00 atau 0,65% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 90
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.111.546,00	98,48	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.727.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.719.972,00	7.719.972,00	100,00	6.932.220,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.000,00	230.159,00	76,72	253.762,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.500,00	1.040,00	41,60	961,00
7	Belanja Iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.272,00	5.392.296,00	95,59	5.503.680,00
8	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	110.046,00	95,59	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	330.140,00	95,59	336.960,00
	Jumlah	**178.661.356,00**	**174.819.199,00**	**97,85**	**173.684.002,00**

5.1.2.1.1.5.1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH adalah sebesar Rp55.111.546,00 dari anggaran sebesar Rp55.965.000,00 atau sebesar 98,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.600.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp511.546,00 atau 0,94%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 91
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.111.546,00	98,48	54.600.000,00
	Jumlah	**55.965.000,00**	**55.111.546,00**	**98,48**	**54.600.000,00**

5.1.2.1.1.5.2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH adalah sebesar Rp7.644.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.835.100,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.644.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 92
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00
	Jumlah	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00

5.1.2.1.1.5.3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH adalah sebesar Rp98.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.737.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp98.280.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 93
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
	Jumlah	**100.737.000,00**	**98.280.000,00**	**97,56**	**98.280.000,00**

5.1.2.1.1.5.4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH adalah sebesar Rp7.719.972,00 dari anggaran sebesar Rp7.719.972,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.952.320,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp767.652,00 atau 11,04%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 94
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.719.972,00	7.719.972,00	100,00	6.952.320,00
	Jumlah	**7.719.972,00**	**7.719.972,00**	**100,00**	**6.952.320,00**

5.1.2.1.1.5.5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH adalah sebesar Rp230.159,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau sebesar 76,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp253.762,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.603,00 atau 9,30%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 95
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.000,00	230.159,00	76,72	253.762,00
	Jumlah	300.000,00	230.159,00	76,72	253.762,00

5.1.2.1.1.5.6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH adalah sebesar Rp1.040,00 dari anggaran sebesar Rp2.500,00 atau sebesar 41.60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp960,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80,00 atau 8.33%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.500,00	1.040,00	41,60	960,00
	Jumlah	**2.500,00**	**1.040,00**	**41,60**	**960,00**

5.1.2.1.1.5.7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.392.296,00 dari anggaran sebesar Rp5.641.272,00 atau sebesar 95,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.503.680,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp111.384,00 atau 2.02%. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 97
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.272,00	5.392.296,00	95.59	5.503.680,00
	Jumlah	**5.641.272,00**	**5.392.296,00**	**95.59**	**5.503.680,00**

5.1.2.1.1.5.8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH adalah sebesar Rp110.046,00 dari anggaran sebesar Rp115.128,00 atau sebesar 95,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.320,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.274,00 atau 2,02%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 98
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	110.046	95.59	112.320,00
	Jumlah	**115.128,00**	**110.046**	**95.59**	**112.320,00**

5.1.2.1.1.5.9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH adalah sebesar Rp330.140,00 dari anggaran sebesar Rp345.384,00 atau sebesar 95.59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp336.960,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.820,00 atau 2.02%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	330.140,00	95,59	336.960,00
	Jumlah	**345.384,00**	**330.140,00**	**95,59**	**336.960,00**

5.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp810.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp810.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp852.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.000.000,00 atau 4,93%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 100
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	**810.000.000,00**	**810.000.000,00**	**100,00**	**852.000.000,00**

5.1.2.1.1.7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 sebesar Rp27.390.503.330,50 dari anggaran sebesar Rp31.059.099.545,00 atau sebesar 88,19%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.268.360.000,00 maka Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.122.143.330,50 atau 1.107,50%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 101
Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	31.059.099.545,00	27.390.503.330,50	88,19	2.268.360.000,00
	Jumlah	**31.059.099.545,00**	**27.390.503.330,50**	**88,19**	**2.268.360.000,00**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp461.577.506.441,49 dari anggaran sebesar Rp529.144.388.263,00 atau sebesar 87,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp445.583.187.092,82 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.987.119.348,67 atau 3,59%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 102
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	82.610.016.969,00	71.010.575.354,00	85,96	62.225.805.477,00
2	Belanja Jasa	209.126.824.360,00	178.657.423.132,73	85,43	148.994.911.889,52
3	Belanja Pemeliharaan	14.725.990.474,00	12.722.221.614,06	86,39	15.105.767.166,28
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.059.104.310,00	30.492.462.786,00	62,15	33.439.714.452,00
5	Belanja Lang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.066.406.930,00	2.847.648.996,00	92,87	4.372.214.400,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.220.400.000,00	79.965.200.662,00	100,94	81.585.261.965,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.206.205.000,00	19.012.644.259,00	75,45	31.115.406.658,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.125.440.220,00	66.869.329.637,70	95,36	78.946.105.085,02
	Jumlah	**529.144.388.263,00**	**461.577.506.441,49**	**87,23**	**445.583.187.092,82**

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp461.577.506.441,49 terdapat realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan APBD sebesar Rp295.730.331.882,79 dan penerimaan non APBD (transaksi non anggaran) sebesar Rp165.847.174.558,70

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.010.575.354,00 dari anggaran sebesar Rp82.610.016.969,00 atau sebesar 85,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.225.805.477,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.784.769.877,00 atau 14,12%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	82.044.104.706,00	70.568.145.979,00	86,01	62.225.805.477,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	565.912.263,00	442.429.375,00	78,18	0,00
	Jumlah	**82.610.016.969,00**	**71.010.575.354,00**	**85,96**	**62.225.805.477,00**

5.1.2.1.2.1.1. Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.568.145.979,00 dari anggaran sebesar Rp82.044.104.706,00 atau sebesar 86,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.225.805.477,00 maka realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.342.340.502,00 atau 13,41%. Realisasi belanja barang pakai habis dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-bahan Pangunan dan konstruksi	543.293.307,00	445.894.606,00	82,07	66.540.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	77.957.520,00	47.687.770,00	61,17	96.298.400,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.603.634.739,00	1.213.215.256,00	75,65	3.692.020.154,00
4	Belanja Bahan-Barang/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.524.006,00	3.292.800,00	99,06	2.250.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	31.358.724,00	25.729.160,00	82,05	12.717.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	239.550.000,00	238.120.000,00	99,65	101.500.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.113.393.526,00	10.437.523.521,00	93,92	6.996.494.235,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang alat Angkutan	29.250.000,00	0,00	0,00	216.953.999,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	16.626.347,00	12.173.648,00	73,18	30.265.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.750.000,00	4.500.000,00	46,15	65.754.500,00
12	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.955.109.841,25	4.951.599.947,00	84,15	[illegible]
13	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.631.076.534,00	4.223.522.334,00	91,20	3.551.763.540,00
14	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.279.357.573,00	11.879.092.374,00	83,19	20.498.192.092,00
15	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	667.790.200,00	558.481.770,00	83,62	416.040.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penyediaan Dokumen Administrasi Tender	21.477.168,00	19.522.056,00	90,90	11,01
17	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.680.429.174,00	3.286.102.738,00	89,29	2.677.572.431,00
18	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.209.755.658,00	1.059.640.244,00	87,59	1.031.698.991,00
19	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.246.675.511,00	1.158.151.736,00	92,90	974.296.850,00
20	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.728.315.236,00	1.481.647.308,00	85,73	563.200.000,00

21	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	38.863.094,00	35.650.500,00	91,72	7.120.000,00
22	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	380.831.525,00	334.848.475,00	87,93	282.750.000,00
23	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.488.446.475,75	1.415.936.162,00	95,13	1.021.509.400,00
24	Belanja Obat-obatan-Obat	2.769.370.387,00	2.704.435.462,00	97,66	2.528.729.610,00
25	Belanja Obat-obatan-Obat Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.487.800,00
26	Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.147.585.879,00	1.025.184.950,00	89,33	2.910.610.450,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Natura	1.415.900.645,00	1.298.628.727,00	91,72	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	102.925.527,00	92.782.696,00	90,15	205.638.000,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.869.535.456,00	12.372.085.528,00	77,96	12.380.633.850,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.465.101.555,00	3.285.830.181,00	94,83	3.852.789.015,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan	13.307.679,00	6.655.700,00	50,01	10.021.660,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial	218.052.500,00	215.000.000,00	98,60	167.800.000,00
33	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	4.247.141.206,00	3.452.539.000,00	81,29	763.285.600,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.707.500,00	125.175.000,00	99,74	169.800.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	586.650.000,00	566.400.000,00	96,55	324.500.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	133.758.000,00	129.150.000,00	96,55	514.205.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	313.548.000,00	254.850.000,00	81,28	0,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	388.608.500,00	262.084.500,00	67,44	246.574.200,00
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.696.580,30	55.767.230,00	98,36	88.976.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	53.280.000,00	52.700.000,00	98,91	164.725.000,00
41	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	194.064.000,00	28.724.000,00	14,80	5.475.000,00
42	Belanja Pakaian Adat Daerah	67.932.000,00	67.080.000,00	98,75	0,00

43	Belanja Pakaian Batik Tradisional	974.790.000,00	917.826.700,00	94,16	646.786.000,00
44	Belanja Pakaian Olahraga	895.789.350,00	813.889.901,00	90,86	353.575.000,00
45	Belanja Pakaian Paskibraka	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00	50.571.600,00
	Jumlah	82.044.104.706,00	70.568.148.979,00	86,01	62.225.005.477,00

5.1.2.1.2.1.2. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp442.429.375.00 dari anggaran sebesar Rp565.912.263.00 atau sebesar 78,18%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 105
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.490.260,00	2.507.000,00	100,67	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	4.636.364.900,00	396.921.000,00	95,55	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Mebel	33.195.938,00	32.901.375,00	99,11	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	9.270.345,00	9.100.000,00	98,16	0,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/ Tanda Batas- Tugu Tanda Batas Administrasi	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	565.912.263,00	442.429.375,00	78,18	0,00

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp178.657.423.132,73 dari anggaran sebesar Rp209.126.824.360,00 atau sebesar 85,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp149.002.111.889,52 maka realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.665.311.243,21 atau 19,90%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	129.638.649.439,00	114.292.161.943,73	88,16	104.065.494.032,52
2	Beban Iuran dan Jaminan Asuransi	45.379.273.674,00	34.749.336.661,00	76,58	20.152.227.916,30
3	Beban Sewa [illegible]	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	12.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan [illegible]	3.848.298.938,00	3.399.543.160,00	88,34	1.506.416.735,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.235.634.400,00	698.472.900,00	56,53	521.295.400,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap [illegible]	176.628.550,00	117.238.275,00	[illegible]	60.300.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.669.852.020,00	7.195.271.868,00	93,84	1.421.525.880,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.404.100.000,00	1.323.976.129,00	94,29	177.097 [illegible]
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	5.443.507.000,00	4.460.412.500,00	81,96	255.965.000,00
10	Belanja [illegible] Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.801.089.828,00	11.075.184.447,00	86,52	9.675.495.512,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.530.731.250,00	1.299.962.510,00	84,92	701.865.000,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi [illegible]	85.023.051,00	28.843.643,00	33,92	15.229.114,00
	Jumlah	**209.126.824.360,00**	**179.657.423.132,73**	**85,93**	**149.092.111.589,52**

5.1.2.1.2.2.1. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.292.161.943,73 dari anggaran sebesar Rp129.638.649.439,00 atau sebesar 88,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.065.494.032,52 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.189.667.911,21 atau 9,79%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Tahun Anggaran 2024 dan [illegible]

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	[illegible] Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan [illegible]	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
2	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	5.735.144.000,00	3.590.907.500,00	62,61	3.600.345.000,00

3	Honorium tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	4.272.660.000,00	2.846.435.000,00	66,62	3.741.917.500,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Herapara	118.800.000,00	100.800.000,00	84,85	45.000.000,00
5	Honorium penyuluhan atau pendampingan	191.600.000,00	181.950.000,00	94,49	247.800.000,00
6	Honorium narasumber	91.600.000,00	7.100.000,00	22,47	72.800.000,00
7	Honorium tim penyusun jurnal bulletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	430.760.000,00	285.860.000,00	43,15	1.221.460.000,00
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
9	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	134.550.000,00	62.700.000,00	46,60	92.850.000,00
11	Honorium tim anggaran pemerintah daerah	565.200.000,00	559.200.000,00	98,94	556.350.000,00
12	Belanja jasa tenaga pendidikan	23.782.000.000,00	24.152.000.000,00	99,96	15.698.000.000,00
13	Belanja jasa tenaga kesehatan	397.500.000,00	391.967.000,00	98,61	2.076.439.000,00
14	Belanja jasa tenaga laboratorium	62.470.000,00	49.528.000,00	79,28	55.300.000,00
15	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	685.097.000,00	664.019.000,00	97,49	1.198.394.000,00
16	Belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	7.668.000.000,00	7.648.500.000,00	99,75	3.966.700.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.343.100.000,00	1.341.600.000,00	99,89	183.600.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Penanggulan Bencana	620.400.000,00	620.400.000,00	100,00	1.355.300.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Penangan Sosial	1.227.600.000,00	1.207.950.000,00	98,40	0,00
20	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan	0,00	0,00	0,00	195.150.000,00
21	Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan	84.000.000,00	57.000.000,00	67,86	145.500.000,00
22	Belanja jasa tenaga administrasa	12.156.500.000,00	11.831.576.325,00	97,33	15.351.954.175,00
23	Belanja jasa tenaga operator komputer	9.548.300.000,00	9.062.392.500,00	94,91	10.271.715.700,00
24	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	2.141.700.000,00	2.013.800.000,00	96,80	2.085.950.000,00

25	Belanja jasa tenaga ahli	5.056.910.000,00	4.249.980.193,00	84,04	2.449.414.000,00
26	Belanja jasa tenaga kebersihan	6.916.800.000,00	6.594.480.000,00	95,33	5.267.100.000,00
27	Belanja jasa tenaga keamanan	4.491.900.000,00	4.550.725.000,00	91,16	4.495.500.000,00
28	Belanja jasa tenaga cerakia	96.180.000,00	21.038.920,00	21,87	23.324.200,00
29	Belanja jasa tenaga supir	1.914.288.000,00	1.708.972.000,00	89,27	1.002.140.000,00
30	Belanja jasa tenaga juru masak	180.000.000,00	155.925.000,00	86,63	85.000.000,00
31	Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	204.818.000,00
32	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	151.200.000,00	124.000.000,00	82,01	77.900.000,00
33	Belanja jasa medis	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
34	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	127 [illegible]
35	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	29.790.200,00	99,30	0,00
36	Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi	1.066.189.400,00	898.418.404,73	84,26	520.054.000,00
37	Belanja jasa penyelenggaraan acara	5.465.705.100,00	4.668.179.622,00	85,41	964.961.890,52
38	Belanja jasa kontribusi asosiasi	181.500.000,00	159.450.000,00	87,85	260.500.000,00
39	Belanja jasa kalibrasi	128.349.600,00	97.174.000,00	75,68	15.045.000,00
40	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	800.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi	124.000.000,00	123.250.000,00	99,40	114.400.000,00
42	Belanja jasa pengukuran tanah	287.940.000,00	1.200.680,00	0,42	21.827.500,00
43	Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	1.574.864.000,00	1.500.870.000,00	95,30	1.458.000.000,00
44	Belanja jasa operator kapal	90.000.000,00	90.000.600,00	100,00	90.000.000,00
45	Belanja tagihan telepon	24.500.000,00	21.248.170,00	86,73	231 [illegible]
46	Belanja Tagihan listrik	3.569.471.132,00	2.607.586.017,00	73,18	2.687.769.817,00
47	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	1.580.350.000,00	1.473.002.500,00	93,21	2.021.642.000,00
48	Belanja sewa/faksimili/fotokopi berlangganan	3.633.153.000,00	3.252.652.000,00	89,53	1.005.845.987,00
49	Belanja paket/pengiriman	161.880.000,00	161.177.500,00	99,57	112.840.000,00
50	Belanja penambahan daya	0,00	0,00	0,00	24.876.132,00
51	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	932.700.000,00	386.552.412,00	41,44	356.994.004,00

52	Belanja rekening penerangan jalan umum	19.349.954.000,00	14.839.004.092,00	76,65	15.395.804.765,00
53	Belanja lembur	0,00	0,00	0,00	35.246.000,00
54	Belanja medical check up	698.684.10.7,00	87.216.965,00	12,48	72.700.135,00
	Jumlah	129.638.649.439,00	114.292.161.945,53	88,16	104.102.604.032,52

5.1.2.1.2.2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.749.356.661,00 dari anggaran sebesar Rp45.275.273.674,00 atau sebesar 76,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.152.227.916,00 maka realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.597.108.745,00 atau 15,25%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Tabel 108
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	41.676.595.000,00	33.226.393.572,00	79,73	27.239.081.840,00
2	Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	2.108.504.000,00	1.018.122.800,00	48,29	2.520.078.400,00
3	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	11.000.000,00	5.298.470,00	48,17	3.346.971,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	117.524.640,00	93.908.354,00	79,91	84.166.826,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	141.814.800,00	113.554.248,00	80,07	101.124.913,00
6	Belanja asuransi barang milik Daerah	295.831.234,00	291.581.917,00	98,62	205.414.961,00
	Jumlah	45.275.273.674,00	34.749.356.661,00	76,75	30.152.227.916,00

5.1.2.1.2.2.3. Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp15.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp19.000.000,00 atau sebesar 81,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.000.000,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.5000,000,00 atau 29,17% sebagaimana terlihat pada rincian bawah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja sewa tanah bangunan perumahan/asrama tempat tinggal	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	12.000.000,00
	Jumlah	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	12.000.000,00

5.1.2.1.2.2.4. Belanja Sewa Peralatan dan mesin

Untuk Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.399.543.160,00 dari total anggaran sebesar Rp3 848.298.938,00 atau sebesar 88,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp1.506,416.735,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.893.126.425.00 atau 125.67%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja sewa excavator	164.283.900,00	164 283 900,00	100,00	0,00
2	Belanja sewa electric generating set	53.339.338,00	40 520 000,00	75,97	35 826.570,00
3	Belanja sewa alat bantu lainnya	32.500.000,00	17 400 000,00	53,54	1 000.000,00
4	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	1 631 283 000,00	1 534 648 000,00	94,08	355 810 000,00
5	Belanja sewa kendaraan angkutan barang	392.724.000,00	392 724 000,00	100,00	65 454.000,00
6	Belanja sewa kendaraan bermotor khusus	42.900.000,00	42 250 000,00	98,48	47.519.000,00
7	Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya	13 380 000,00	13 050 000,00	97,53	3 000.000,00
8	Belanja sewa mebel	696 564 400,00	530 307 760,00	76,15	2.000.000,00
9	Belanja sewa alat pendingin	58 081 500,00	14 843 700,00	25,56	6 000.000,00
10	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use)	226.115 500,00	161 266 800,00	71,32	538 747.000,00
11	Belanja sewa peralatan studio audio	83.650.000,00	60 675 000,00	72,53	11 500.000,00
12	Belanja sewa alat studio lainnya	267.475.000,00	230 174.000,00	86,05	140 956.000,00
13	Belanja sewa peralatan umum	0,00	0,00	0,00	248.814.165,00
14	Belanja sewa peralatan jaringan	198.000.000,00	197 000 000,00	99,49	49 790 000,00
	Jumlah	**3.848.298.938,00**	**3.399.543.160,00**	**88,34**	**1.506.416.735,00**

5.1.2.1.2.2.5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp698.472.000.00 dari anggaran sebesar Rp1.235.674.400,00 atau sebesar 56,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp521.295.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp177.176.600,00 atau 33,99%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	49 050.000,00	27 500.000,00	56,07	76.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 016.675 000,00	551 280.000,00	54,23	320 300.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
5	Belanja Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Perisirahatan	128.849 400,00	119.692.000,00	92,89	100 995 400,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.235.674.400,00	698.472.000,00	56,53	521.295.400,00

5.1.2.1.2.2.6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp117.278.277,00 dari anggaran sebesar Rp176.628.750,00 atau sebesar 66,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.300.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.978.277,00 atau 94,49%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 112
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	134.478.330,00	77.878.277,00	57,91	35.000.000,00
2	Belanja Sewa Alat Penga Kesenian	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	6.400.000,00
3	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.750.000,00	25.000.000,00	90,09	19.000.000,00
	Jumlah	**176.628.750,00**	**117.278.277,00**	**66,40**	**60.300.000,00**

5.1.2.1.2.2.7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.196.371.868,00 dari anggaran sebesar Rp7.668.853.030,00 atau sebesar 93,84%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.421.525.880,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.774.845.988,00 atau 406,24% sebagaimana terlihat pada rincian berikut ini:

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	25.430.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	380.544.030,00	358.931.785,00	94,32	228.300.000,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	696.000.000,00	539.418.168,00	77,50	108.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	4.848.000.000,00	4.806.287.284,00	99,18	272.550.260,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	810.394.000,00	651.629.715,00	80,41	312.274.750,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	128.915.000,00	98.472.603,00	76,39	116.875.920,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	6.745.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	805.000.000,00	739.632.314,00	91,88	228.129.900,00
	Jumlah	**7.668.853.030,00**	**7.196.371.868,00**	**93,84**	**1.421.525.880,00**

5.1.2.1.2.2.8. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.323.376.129,00 dari anggaran sebesar Rp1.404.100.000,00 atau sebesar 94.25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp577.097.300,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp746.278.829,00 atau 129,32%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	75.000.000,00	74.558.700,00	99,41	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	210.000.000,00	193.444.660,00	92,12	89.530.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	69.133.500,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.650.580,00	99,65	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Rancang Teknik	689.100.000,00	627.160.101,00	91,01	69.463.800,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	330.000.000,00	326.559.088,00	99,56	200.000.000,00
	Jumlah	**1.404.100.000,00**	**1.323.376.129,00**	**94,25**	**577.097.300,00**

5.1.2.1.2.2.9. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availiability Payment)* Infrastruktur Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.461.412.500,00 dari anggaran sebesar Rp5.443.507.000,00 atau sebesar 81,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp255.965.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.205.447.500,00 atau 1.642,98%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibilty Paymem) Infrastruktur Kesehatan	5.443.507.000,00	4.461.412.500,00	81,96	255.965.000,00
	Jumlah	**5.443.507.000,00**	**4.461.412.500,00**	**81,96**	**255.965.000,00**

5.1.2.1.2.2.10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sostalisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp11.075.184.441,00 dari anggaran sebesar Rp12.801.084.828,00 atau 86,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.675.495.512,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.399,688.929,00 atau 14,47%, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.458.684.828,00	6.778.494.441,00	79,86	5.535.915.512,00
2	Belanja Sosialisasi	4.208.400.000,00	4.202.690.000,00	99,87	3.096.800.000,00
3	Belanja Biaya Kepemimpinan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	743.780.000,00
	Jumlah	**12.801.084.828,00**	**11.075.184.441,00**	**86,52**	**9.675.495.512,00**

5.1.2.1.2.2.11. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.299.942.510,00 dari anggaran sebesar Rp1.530.731.250,00 atau sebesar 84,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp701.865.000,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp598.077.510,00 atau 85,21%, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel	2.801.250,00	2.801.250,00	100,00	1.518.750,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Restoran	63.043.750,00	38.812.500,00	61,56	13.668.750,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hiburan	7.492.500,00	1.755.000,00	23,42	937.500,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame	22.275.000,00	19.305.000,00	86,67	50.125.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan	798.187.500,00	683.667.510,00	85,65	427.275.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	10.800.000,00	1.620.000,00	15,00	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah	15.525.000,00	15.525.000,00	100,00	6.075.000,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	74.250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Hotel dan Hiburan Perolehan dan Perkotaan	148.638.750,00	44.638.750,00	30,03	1.776.87.500,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	87.817.500,00	87.817.500,00	100,00	24.907.500,00
	Jumlah	**1.530.731.250,00**	**1.299.942.510,00**	**84,92**	**701.865.000,00**

5.1.2.1.2.2.12. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja pakaian dinas dan atributnya pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp28.843.643,00 dari anggaran sebesar Rp85.023.051,00 atau sebesar 33,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.229.114,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.614.529,00 atau 89,40%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	519.750,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai non ASN atas Pemungutan Reribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman/Kebersihan	14.850.000,00	3.341.250,00	22,50	3.341.250,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	1.721.250,00	700.429,00	40,69	503.750,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	20.898.919,00	9.540.837,00	45,65	4.088.931,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum:-Pelayanan Tera/Tera Ulang	76.528,00	76.528,00	100,00	229.584,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi	4.455.000,00	4.455.000,00	100,00	3.645.000,00
7	Retribusi Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	4.012.875,00	702.000,00	17,49	101.250,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	10.601.519,00	4.931.129,00	46,65	2.113.341,00
9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	44.510.925,00	345.819,00	7,50	1.027.458,00
10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	368.550,00
12	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung	21.114.000,00	4.750.650,00	22,50	0,00
13	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	612.225,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**85.023.051,00**	**28.843.643,00**	**33,92**	**15.229.114,00**

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp12.722.221.614,06 dari anggaran sebesar Rp14.725.990.474,00 atau sebesar 86,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.105.767.166,28 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.383.545.552.22 atau 15,78%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 119
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.817.997,00	99,82	99.811.992,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.107.516.124,00	9.522.553.030,00	85,73	8.975.446.483,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.440.911.850,00	3.050.876.587,06	88,66	5.201.658.981,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.562.500,00	48.974.000,00	63,14	828.849.710,28
	Jumlah	**14.725.990.474,00**	**12.722.221.614,06**	**86,39**	**15.105.767.166,28**

5.1.2.1.2.3.1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp99.817.997,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 99,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.811.992,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.005,00 atau 0,01% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 120
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000,00	99.817.997,00	99,82	99.811.992,00
	Jumlah	**100.000.000,00**	**99.817.997,00**	**99,82**	**99.811.992,00**

5.1.2.1.2.3.2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.522.553.030,00 dari anggaran sebesar Rp11.107.516.124,00 atau sebesar 85,73%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.975.446.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp547.106.547,00 atau 6,10%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 121
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar – Alat Berat-Electric Generating Set	70.400.400,00	48.120.000,00	68,64	21.525.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.439.735.300,00	3.224.768.628,00	85,60	5.446.760.237,00
3	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	574.250.000,00	457.228.252,00	79,62	666.752.946,00

	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
4	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor-Kendaraan bermotor Angkutan Barang	0.00	0,00	0,00	44.163.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	145.193.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	16.363.620,00	4.800.000,00	29,89	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perlakatan Bengkel Kayu	2.775.000,00	2.020.000,00	72,79	7.500.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel tak Bermesin-Alat Tak Bermesin lainnya	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.568.800,00	26.974.350,00	82,82	389.015.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Pendingin	990.785.920,00	350.565.250,00	89,71	368.780.300,00
14	Belanja pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	72.200.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	388.243.200,00	146.772.750,00	89,32	110.660.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	120.000.000,00	119.000.000,00	99,17	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	308.989.400,00	253.229.600,00	81,95	28.760.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	685.804.884,00	683.874.200,00	99,72	1.539.852.000,00
	Jumlah	**11.107.516.124,00**	**9.522.553.930,00**	**85,73**	**8.915.446.483,00**

5.1.2.1.2.3.3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.050.876.587,06 dari anggaran sebesar Rp3.440.911.850,00 atau sebesar 88,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.201.658.981,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.150.782.393,94 atau 41,35%. sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 122
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.282.840.315,00	2.911.400.057,06	88,66	1.877.039.151,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	157.071.535,00	139.476.530,00	88,80	3.324.619.830,00
	Jumlah	**3.440.911.850,00**	**3.050.876.587,06**	**88,66**	**5.201.658.981,00**

5.1.2.1.2.3.4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp48.974.000,00 dari anggaran sebesar Rp77.562.500,00 atau sebesar 63,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp828.849.710,28 mengalami penurunan sebesar Rp779.875.710,28 atau 94,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	810.099.710,28
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Penyakan Air Bersih/Air Baku	77.562.500,00	48.974.000,00	63,14	18.750.000,00
	Jumlah	**77.562.500,00**	**48.974.000,00**	**63,14**	**828.849.710,28**

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.492.462.786,00 dari anggaran sebesar Rp49.059.104.310,00 atau sebesar 62,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau 8,81% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 124
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun [redacted] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Jalam Negeri	49.059.104.310,00	30.492.462.786,00	62,15	33.439.714.452,00
	Jumlah	49.059.104.310,00	30.492.462.786,00	62,15	33.439.714.452,00

5.1.2.1.2.4.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.492.462.786,00 dari anggaran sebesar Rp49.059.104.310,00 atau sebesar 62,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau 8,81% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 125
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.420.831.810,00	21.074.605.870,00	69,28	22.935.279.558,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.109.607.500,00	8.568.563.166,00	50,08	9.753.319.894,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	912.235.000,00	292.271.750,00	32,04	381.665.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	616.430.000,00	557.020.0000,00	90,36	359.450.000,00
	Jumlah	**49.059.104.310,00**	**30.492.462.786,00**	**62,15**	**33.439.714.452,00**

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan /atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.847.648.996,00 dari anggaran sebesar Rp3.066.406.930,00 atau sebesar 92,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.372.214.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.524.565.404,00 atau 34,87%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 126
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.810.406.930,00	1.662.205.000,00	91,81	2.938.785.500,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.256.000.000,00	1.185.443.996,00	94,38	1.433.428.900,00
	Jumlah	**3.066.406.930,00**	**2.847.648.996,00**	**92,87**	**4.372.214.400,00**

5.1.2.1.2.5.1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.662.205.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.810.406.930.00 atau sebesar 91.81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.938.785.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.276.580.500,00 atau 43,44%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 127
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja hadiah yang bersifat Perlombaan	1.050.406.930,00	934.105.000,00	88,96	270.585.500,00
2	Belanja Beasiswa	740.400.000,00	728.100.000,00	98,34	314.700.000,00
3	Belanja Penanggan Dampak Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00
5	Belanja Santunan Kematian	0.00	0,00	0.00	1.778.500.000,00
	Jumlah	**1.810.406.930,00**	**1.663.205.000,00**	**91,81**	**2.938.785.500,00**

5.1.2.1.2.5.2. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.185.443.996.00 dari anggaran sebesar Rp1.256.000.000,00 atau sebesar 94,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.433.428.900,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp247.984.904.00 atau 17.30%. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 128
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.256.000.000,00	1.185.443.996,00	94,38	937.847.200,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0.00	495.581.700,00
	Jumlah	**1.256.000.000.00**	**1.185.443.996,00**	**94,38**	**1.433.428.900,00**

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp79.965.200.662.00 dari anggaran sebesar Rp75.226.400.000,00 atau sebesar 106,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.383.261.965,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.418.061.303.00 atau 1,74% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 129
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.226.400.000,00	79.965.200.662.00	106.30	81.383.261.965.00
	Jumlah	**75.226.400.000.00**	**79.965.200.662.00**	**106.30**	**81.383.261.965.00**

Realisasi sebesar 106,30% (melebihi anggaran) terjadi karena adanya kenaikan nilai salur dana BOSP dari Pemerintah Pusat ke sekolah akibat dari bertambahnya jumlah siswa. Dana BOSP merupakan penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas sekolah penerima, yaitu 532 SD Negeri sebesar Rp57.115.787.287,00 dan 61 SMP Negeri sebesar Rp22.849.413.375,00.

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.012.644.259,00 dari anggaran sebesar Rp25.206.205.000,00 atau sebesar 75,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.115.406.658,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.102.762.399,00 atau 9,96% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 130
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.206.205.000,00	19.012.644.259,00	75,43	21.115.406.658,00
	Jumlah	25.206.205.000,00	19.012.644.259,00	75,43	21.115.406.658,00

BOK Puskesmas merupakan penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Puskesmas sebanyak 34 Puskesmas se Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penggunaan Dana BOK adalah untuk membiayai operasional pelayanan bidang kesehatan di puskesmas yaitu pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, bantuan transport petugas dan kader kesehatan serta insentif untuk petugas puskesmas yang melaksanakan palayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

5.1.2.1.2.8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp66.869.329.637,70 dari anggaran Rp70.123.440.220,00 atau sebesar 95,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.946.105.085,02 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.076.775.447,32 atau 15,30% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 131
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.123.440.220,00	66.869.329.637,70	95,36	78.946.105.085,02
	Jumlah	70.123.440.220,00	66.869.329.637,70	95,36	78.946.105.085,02

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan realisasi dari penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sukadana dan 34 Puskesmas yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp241.174.866.230,90 dari anggaran sebesar Rp283.526.070.668,00 atau sebesar 85,06%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp234.335.347.242,48 maka mengalami kenaikan sebesar Rp6.839.518.988,42 atau sebesar 2,92%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 132
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	88.325.568.765,00	83.926.835.512,23	95,02	20.485.290.705,95
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	149.509.895.328,00	112.205.713.418,68	75,05	189.842.516.836,53

3	Belanja Hibah Dana BOS	23.915.200.000,00	23.811.987.000,00	99,57	22.751.451.100,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.644.835.575,00	1.297.827.800,00	78,90	1.295.165.700,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	20.139.600.000,00	19.932.505.500,00	99,02	0,00
	Jumlah	283.526.070.668,00	241.174.866.230,99	85,06	324.335.347.242,48

5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp83.926.835.512,22 dari anggaran sebesar Rp88.325.568.765,00 atau sebesar 95,02%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp20.485.390.705,95 maka mengalami kenaikan sebesar Rp63.441.444.806,27 atau sebesar 309,69%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 133
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00
2	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	14.325.468.765,00	10.167.468.512,22	70,97	3.003.645.625,95
	Jumlah	88.325.568.765,00	83.926.835.512,22	95,02	20.485.390.705,95

5.1.2.1.3.1.1. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2024 terealisasi sebesar Rp73.759.367.000,00 dari anggaran sebesar Rp74.000.100.000,00 atau sebesar 99,67%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp17.481.745.080,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.277.621.920,00 atau sebesar 321,92%. Terdapat Kenaikan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat karena adanya kegiatan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 134
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00
	Jumlah	74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat teralisasi sebagai berikut:

Tabel 135
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hibah Uang kepada POLRES Lampung Timur	9.000.000.000,00
2	Hibah Uang kepada POLDA Lampung	1.800.000.000,00
3	Hibah Uang kepada KODIM Lampung Timur	2.000.000.000,00
4	Hibah Uang kepada Kemenag-OTD Haji	3.750.267.000,00
5	Hibah Uang kepada KPU Kabupaten Lampung Timur	36.800.100.000,00
6	Hibah Uang kepada BAWASLU Kabupaten Lampung Timur	21.400.000.000,00
	Jumlah	73.759.367.000,00

Atas realisasi belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel 135, terdapat saldo per 31 Desember 2024 atas hibah uang kepada KPU sebesar Rp5.780.642.588,70 dan BAWASLU sebesar Rp5.761.340.208,00. Hibah Uang kepada KPU dan BAWASLU terdapat pada Kegiatan Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Desa, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

5.1.2.1.3.1.2. Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp10.167.468.512,22 dari anggaran sebesar Rp14.325.468.765,00 atau sebesar 70,97%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.003.645.625,95 maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.163.822.886.27 atau sebesar 238,50% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 136
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat	14.325.468.765,00	10.167.468.512,22	70,97	3.003.645.625,95
	Jumlah	**14.325.468.765,00**	**10.167.468.512,22**	**70,97**	**3.003.645.625,95**

5.1.2.1.3.2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp112.205.713.418,68 dari anggaran sebesar Rp149.509.895.328.00 atau sebesar 75,05%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp189.842.316.836,53 mengalami penurunan Sebesar Rp77.636.603.417,85 atau 40,90%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 137
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan	101.637.112.229,00	79.319.073.688,22	78,04	150.974.128.160,01
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.027.000.000,00	1.790.840.000,00	88,53	2.140.181.150,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.885.783.099,00	30.395.799.730,46	67,72	36.728.007.526,52
4	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	725.000.000,00	700.000.000,00	96,55	0,00
	Jumlah	149.509.895.328,00	112.205.713.418,68	75,05	189.842.316.836,53

5.1.2.1.3.2.1. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp79.319.073.688,22 dari anggaran sebesar Rp101.637.112.229,00 atau sebesar 78,04%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp150.974.128.160,01 mengalami penurunan Sebesar Rp71.655.054.471,79 atau 47,46%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 136
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.811.300.000,00	12.443.500.000,00	90,10	34.368.032.500,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	87.825.812.229,00	66.875.573.688,22	76,15	116.606.095.660,01
	Jumlah	**101.637.112.229,00**	**79.319.073.688,22**	**78,04**	**150.974.128.160,01**

5.1.2.1.3.2.2. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.790.840.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.022.000.000,00 atau sebesar 88,57%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp2.140.181.150,00 mengalami penurunan Sebesar Rp349.341.150,00 atau 16,32%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 139
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.569.000.000,00	1.344.000.000,00	85,66	897.900.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	453.000.000,00	446.840.000,00	98,64	1.242.281.150,00
	Jumlah	**2.022.000.000,00**	**1.790.840.000,00**	**88,57**	**2.140.181.150,00**

5.1.2.1.3.2.3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.395.799.730,46 dari anggaran sebesar Rp44.885.783.099,00 atau sebesar 67,72%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp Rp36.728.007.526,52 mengalami penurunan Sebesar Rp6.332.207.796,06 atau 17,24%, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 140
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	701.600.000,00	701.600.000,00	100,00	1.031.949.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.184.183.099,00	29.694.190.730,46	67,21	35.696.058.526,52
	Jumlah	**44.885.783.099,00**	**30.395.790.730,46**	**67,72**	**36.728.007.526,52**

5.1.2.1.3.2.4. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 141
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	240.000.000,00	0,00	0,00	1.031.949.000,00
	Jumlah	**240.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.728.007.526,52**

5.1.2.1.3.2.5. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp700.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp725.000.000,00 atau sebesar 96.55%, dengan rincian pada tahel berikut:

Tabel 142
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	725.000.000,00	700.000.000,00	96,55	0,00
	Jumlah	**725.000.000,00**	**700.000.000,00**	**96,55**	**0,00**

5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS merupakan Belanja Dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta. Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp23.811.981.000.00 dari anggaran sebesar Rp23.915.200.000,00 atau sebesar 99,57%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp Rp22.754.454.000,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp1.057.527.000,00 atau 4,65% dengan rincian pada tahel berikut:

Tabel 143
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Lain Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah Swasta	23.915.200.000,00	23.811.961.000,00	99,57	22.754.454.000,00
	Jumlah	**23.915.200.000,00**	**23.811.961.000,00**	**99,57**	**22.754.454.000,00**

Belanja Hibah Dana BOSP merupakan belanja Dana BOSP yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta yang disalurkan kepada 44 SD Swasta sebesar Rp6.597.576.000,00 dan 123 SMP Swasta sebesar Rp17.214.405.000,00.

5.1.2.1.3.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.297.827.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.644.806.575.00 atau sebesar 78,90%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp1.253.185.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.642.100,00 atau 3.56%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 144
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan Keuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kab. Lampung Timur	241.722.130,00
2	Bantuan Keuangan kepada DPC PKB Kab. Lampung Timur	268.121.100,00
3	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Nasdem Kab. Lampung Timur	150.011.800,00
4	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrat Kab. Lampung Timur	139.020.400,00
5	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Gerindra Kab. Lampung Timur	163.854.600,00
6	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Golkar Kab. Lampung Timur	159.738.100,00
7	Bantuan Keuangan kepada DPC PKS Kab. Lampung Timur	113.149.300,00
8	Bantuan Keuangan kepada DPC PAN Kab. Lampung Timur	62.206.400,00
	Jumlah	**1.297.827.800,00**

5.1.2.1.3.5. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.932.508.500.00 dari anggaran sebesar Rp20.130.600.000.00 atau sebesar 99,02%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 145
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	17.250.000.000,00	17.232.168.000,00	99,90	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.880.600.000,00	2.700.340.500,00	93,74	0,00
	Jumlah	**20.130.600.000,00**	**19.932.508.500.00**	**99,02**	**0,00**

Belanja Hibah Dana BOSP terdiri dari BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Dana BOP PAUD terealisasi sebesar Rp17.232.168.000.00 yang disalurkan kepada 842 Lembaga PAUD, sedangkan

Dana BOP Kesetaraan terealisasi sebesar Rp2.700.340.500.00 yang disalurkan kepada 21 Lembaga Kesetaraan. Kenaikan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh perubahan rekening belanja hibah BOSP. Pada Tahun 2023 Belanja Hibah BOSP terealisasi pada rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba. Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.442.292.220,00 dari anggaran sebesar Rp3.156.775.675,00 atau sebesar 77,37%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.354.771.769,00 mengalami penurunan Sebesar Rp912.479.549,00 atau 27,20%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 146
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	3.084.775.675,00	2.370.292.220,00	76,84	3.124.889.769,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	229.882.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**3.156.775.675,00**	**2.442.292.220,00**	**77,37**	**3.354.771.769,00**

5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.370.292.220,00 dari anggaran sebesar Rp3.084.775.675,00 atau sebesar 76,84%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.124.889.769,00 mengalami penurunan Sebesar Rp754.597.549,00 atau 24,15%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 147
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	2.171.612.020,00	1.746.600.000,00	80,43	2.659.196.769,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu	913.163.655,00	623.692.220,00	68,30	465.693.000,00
	Jumlah	**3.084.775.675,00**	**2.370.292.220,00**	**76,84**	**3.124.889.769,00**

5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp72.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp72.000.000,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 148
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Tahun [illegible] dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	229.882.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp320.800.571.557,70 dari total anggaran belanja modal sebesar Rp383.985.335.511,00 atau sebesar 83,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp131.958.201.170,98 atau 69,88%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 149
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun [illegible] dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.202.728.382,00	34.779.530.896,00	84,41	21.093.974.539,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	98.368.382.266,00	90.778.537.780,46	92,28	67.753.207.114,85
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.771.494.741,00	182.525.782.693,24	79,79	87.161.542.497,87
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.392.730.120,00	12.706.720.188,00	82,55	12.813.646.335,00
	Jumlah	**383.985.335.511,00**	**320.800.571.557,70**	**83,55**	**188.842.370.386,72**

Belanja Modal sebesar Rp320.800.571.557,70 direalisasikan untuk:

- Utang Retensi & Jangka Pendek Lainnya tahun lalu yang dibayar sebesar Rp26.881.401.841,80
- Belanja modal yang tidak menjadi asset (*Extracomtable*) karena tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp18.868.348.885,75;
- Belanja modal yang tidak menjadi aset karena direklasifikasi ke belanja barang dan jasa sebesar Rp739.464.996,75;
- Belanja Modal yang menjadi aset tetap sebesar Rp274.311.355.833,40.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00, sebagai berikut:

Tabel 150
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal dan Peralatan Mesin Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp34.779.530.896,00 dari anggaran sebesar Rp41.202.728.382,00 atau sebesar 84,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.093.974.539,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.685.556.357,00 atau 64,88%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 151
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	71.425.337,00	70.386.937,00	98,55	15.760.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.482.065.000,00	5.711.249.800,00	88,11	550.400.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.219.383.841,00	8.847.638.845,00	95,97	14.798.082.839,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	535.209.081,00	566.665.225,00	98,51	341.980.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.872.144.871,00	2.664.639.990,00	92,78	699.862.000,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	653.247.840,00	615.888.000,00	94,28	470.408.200,00
9	Belanja Modal Komputer	10.129.625.712,00	9.471.452.194,00	93,50	2.225.815.500,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	20.816.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.120.000,00	8.373.211.150,00	85,44	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	603.000.000,00	15.246.000,00	2,53	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin DLUD	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	
	Jumlah	**41.202.728.382,00**	**34.779.530.896,00**	**84,41**	**21.093.974.539,00**

5.1.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp70.386.937,00 dari anggaran sebesar Rp71.425.337,00 atau sebesar 98,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.760.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp54.626.937,00 atau 346,62%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 152
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.157.337,00	5.850.000,00	95,01	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	65.268.000,00	64.536.937,00	98,88	15.760.000,00
	Jumlah	**71.425.337,00**	**70.386.937,00**	**98,55**	**15.760.000,00**

5.1.2.2.2.1.1. Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.157.337,00 atau sebesar 95,01%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 153
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Proses	6.157.337,00	5.850.000,00	95,01	0,00
	Jumlah	**6.157.337,00**	**5.850.000,00**	**95,01**	**0,00**

5.1.2.2.2.1.2. Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp64.536.937,00 dari anggaran sebesar Rp65.268.000,00 atau sebesar 98,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.760.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.776.937,00 atau 309,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 154
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu
Tahun [illegible] 2024 dan [illegible]

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	65.268.000,00	64.536.937,00	98,88	15.760.000,00
	Jumlah	**65.268.000,00**	**64.536.937,00**	**98,88**	**15.760.000,00**

5.1.2.2.2.2. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.711.249.800,00 dari anggaran sebesar Rp6.482.065.000,00 atau sebesar 88,11% Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.400.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.160.849.800,00 atau 937,65%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 155
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan
Tahun [illegible] 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.482.065.000,00	5.711.249.800,00	88,11	550.400.000,00
	Jumlah	**6.482.065.000,00**	**5.711.249.800,00**	**88,11**	**550.400.000,00**

5.1.2.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.711.249.800,00 dari anggaran sebesar Rp6.482.065.000,00 atau sebesar 88,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.400.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.160.849.800,00 atau 937,65%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 156
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.191.488.000,00	2.446.800.000,00	76,67	550.400.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	241.950.000,00	241.950.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	0,00
4	Belanja Modal Bermotor Beroda Tiga	39.627.000,00	37.917.000,00	95,68	0,00
5	Belanja Modal Bermotor Khusus	2.959.000.000,00	2.934.982.800,00	99,19	0,00
	Jumlah	**6.482.065.000,00**	**5.711.249.800,00**	**88,11**	**550.400.000,00**

5.1.2.2.2.3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.370.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.420.000,00 atau sebesar 98,87, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 157
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermotor	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00
	Jumlah	**4.420.000,00**	**4.370.000,00**	**98,87**	**0,00**

5.1.2.2.2.4. Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 158
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00
	Jumlah	**0,00**	0,00	0,00	**11.550.000,00**

5.1.2.2.2.4.1. Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja Modal Alat Pengolahan di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 159
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
2	Belanja Modal Alat Penciharaan Tanaman Ikan Tawar	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Jumlah	**0,00**	0,00	0,00	**11.550.000,00**

5.1.2.2.2.5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.047.638.845,00 dari anggaran sebesar Rp4.219.383.841,00 atau sebesar 95,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.758.082.839,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.710.443.994,00 atau 75,85%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 160
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	236.852.910,00	208.398.900,00	87,99	14.396.779.239,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.778.335.659,00	3.639.578.865,00	96,27	2.146.173.600,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Pada Gedung	204.195.272,00	201.661.080,00	98,76	215.130.000,00
	Jumlah	**4.219.383.841,00**	**4.047.638.845,00**	**95,93**	**16.758.082.839,00**

5.1.2.2.2.5.1. Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp208.398.900,00 dari anggaran sebesar Rp236.852.910,00 atau sebesar 87,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.396.779.239,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.188.380.939,00 atau 98,55%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 161
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	13.875.000,00	8.100.000,00	58,38	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perangkat Lunak Komputer	22.215.540,00	18.132.000,00	81,62	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.762.370,00	182.166.900,00	90,74	14.396.779.239,00
	Jumlah	**236.852.910,00**	**208.398.900,00**	**87,99**	**14.396.779.239,00**

5.1.2.2.2.5.2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.639.578.865,00 dari anggaran sebesar Rp3.778.335.659,00 atau sebesar 96,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.146.173.600,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.405.265,00 atau 69,49%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 162
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mebel	3.142.087.292,00	3.046.559.250,00	96,96	1.636.473.600,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	3.496.500,00	2.100.600,00	60,06	9.700.000,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	450.663.127,00	442.439.449,00	98,17	354.000.000,00

4	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	5.264.800,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Ytdk Dkl	79.695.940,00	77.999.620,00	98,00	52.687.300,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	73.163.300,00	68.440.000,00	93,54	0,00
	Jumlah	3.778.335.659,00	3.637.578.865,00	96,27	2.146.173.600,00

5.1.2.2.2.5.3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp201.661.680,00 dari anggaran sebesar Rp204.195.272,00 atau sebesar 98,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.130.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.468.320,00 atau 6,26%. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 163
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	171.500.000,00	171.500.000,00	100,00	39.750.000,00
2	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
3	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00
4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	32.695.272,00	30.161.680,00	92,25	0,00
	Jumlah	204.195.272,00	201.661.680,00	98,76	215.130.000,00

5.1.2.2.2.6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp566.665.225,00 dari anggaran sebesar Rp575.209.981,00 atau sebesar 98,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp341.980.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp224.685.225,00 atau 65,70%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 164
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	575.209.981,00	566.665.225,00	98,51	326.380.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
	Jumlah	575.209.981,00	566.665.225,00	98,51	341.980.000,00

5.1.2.2.2.6.1. Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp566.665.225,00 dari anggaran sebesar Rp575.209.981,00 atau sebesar 98,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp326.380.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp240.285.225,00 atau 73,62%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 165
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	378.961.932,00	373.685.225,00	98,60	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	101.235.840,00	99.550.000,00	98,34	3.950.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	91.013.778,00	89.500.000,00	98,33	0,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.966.141,00	3.900.000,00	98,33	47.250.000,00
	Jumlah	**575.209.981,00**	**566.665.225,00**	**98,51**	**326.300.000,00**

5.1.2.2.2.6.2. Belanja Modal Alat Komunikasi

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan belanja modal alat komunikasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 166
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600.000,00**

5.1.2.2.2.7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.664.639.930,00 dari anggaran sebesar Rp2.872.144.121,00 atau sebesar 92,78%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.862.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.964.777.930,00 atau 280,74%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 167
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.510.242.065,00	1.437.730.930,00	95,20	0,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.361.902.056,00	1.226.909.000,00	90,09	699.862.000,00
	Jumlah	**2.872.144.121,00**	**2.664.639.930,00**	**92,78**	**699.862.000,00**

5.1.2.2.2.7.1. Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.437.730.930,00 dari anggaran sebesar Rp1.510.242.065,00 atau sebesar 95,20%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 168
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.509.671.525,00	1.437.165.390,00	95,20	0,00
2	Belanja Alat Kedokteran THT	570.540,00	565.540,00	99,12	0,00
	Jumlah	**1.510.242.065,00**	**1.437.730.930,00**	**99,20**	**0,00**

5.1.2.2.2.7.2. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.226.909.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.361.902.056,00 atau sebesar 90,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.862.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp527.047.000,00 atau 75,31%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 169
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.361.902.056,00	1.226.909.000,00	90,09	699.862.000,00
	Jumlah	**1.361.902.056,00**	**1.226.909.000,00**	**90,09**	**699.862.000,00**

5.1.2.2.2.8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp615.888.000,00 dari anggaran sebesar Rp653.274.840,00 atau sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp470.408.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp145.479.800,00 atau 30,93%, dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 170
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	461.247.840,00	428.000.000,00	92,79	374.808.200,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	192.027.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00
	Jumlah	**653.247.840,00**	**615.888.000,00**	**94,28**	**470.408.200,00**

5.1.2.2.2.8.1. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp428.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp461.247.840,00 atau sebesar 92,79% Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp374.808.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp53.191.800,00 atau 14,19%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 171
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	6.519.840,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	275.129.425,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	454.428.000,00	428.000.000,00	94,18	0,00
4	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.678.575,00
	Jumlah	**461.247.840,00**	**428.000.000,00**	**92,79**	**374.808.200,00**

5.1.2.2.2.8.2. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Unit Alat Peraga Praktek Sekolah di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp187.888.000,00 dari anggaran sebesar Rp192.000.000,00 atau sebesar 97,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.600.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp92.288.000,00 atau 96,54%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 172
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Otomotif	192.000.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00
	Jumlah	192.000.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00

5.1.2.2.2.9. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.471.452.194,00 dari anggaran sebesar Rp10.129.623.712,00 atau sebesar 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.225.815.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.245.636.694,00 atau 325,53%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 173
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasiq 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit	8.259.681.988,00	7.808.840.084,00	94,54	1.895.629.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.869.941.724,00	1.662.612.110,00	88,91	330.186.500,00
	Jumlah	10.129.623.712,00	9.471.452.194,00	93,50	2.225.815.500,00

5.1.2.2.2.9.1. Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.808.840.084,00 dari anggaran sebesar Rp8.259.681.988,00 atau sebesar 94,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.895.629.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.913.211.084,00 atau 311,94%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 174
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	61.558.011,00	60.783.450,00	98,74	193.000.000,00
2	Belanja Modal Personal Komputer	8.144.767.977,00	7.696.943.384,00	94,50	1.260.226.000,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.355.950,00	46.112.050,00	97,42	442.403.000,00
	Jumlah	8.259.681.988,00	7.808.840.084,00	94,54	1.895.629.000,00

5.1.2.2.2.9.2. Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.662.612.110,00 dari anggaran sebesar Rp1.869.941.724,00 atau sebesar 88,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp320.186.500,00 maka realisasi

Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.332.425.610,00 atau 403.54%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 175
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Perlatan Personal Komputer	1.504.186.981,00	1.297.867.170,00	86,28	122.726.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	365.754.743,00	364.745.940,00	99,72	207.458.500,00
	Jumlah	**1.869.941.724,00**	**1.662.612.110,00**	**88,91**	**330.186.500,00**

5.1.2.2.2.10. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja di Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 176
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	20.116.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.116.000,00**

5.1.2.2.2.10.1. Belanja Modal Alat Pelindung

Belanja Modal Alat Pelindung di Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 177
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.116.000,00**

5.1.2.2.2.11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.373.211.150,00 dari anggaran sebesar Rp9.800.120.000,00 atau sebesar 85,44%. sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 178
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.120.000,00	8.373.211.150,00	85,44	0,00
	Jumlah	**9.800.120.000,00**	**8.373.211.150,00**	**85,44**	**0,00**

5.1.2.2.12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp15.246.000,00 dari anggaran sebesar Rp603.000.000.00 atau sebesar 2,53%. sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 179
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Umum	603.000.000,00	15.246.000,00	2.53	0.00
	Jumlah	603.000.000,00	15.246.000,00	2.53	0.00

5.1.2.2.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.238.782.815,00 dari anggaran sebesar Rp5.792.088.550,00 atau sebesar 55,92%. sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 180
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	0.00
	Jumlah	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	0.00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp90.778.537.780,16 dari anggaran sebesar Rp98.368.382.266,00 atau sebesar 92,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114,85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.025.330.665,61 atau 33,99% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 181
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85
2	Belanja Modal Gedung dari Pengguna BLUD	256.184.000,00	180.325.000,00	70,39	0,00
	Jumlah	98.368.382.266,00	90.778.537.780,46	92,28	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.598.212.780.46 dari anggaran sebesar Rp98.112.198.266,00 atau sebesar 92,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114.85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.845.005.665,61 atau 33,72%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 182
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85
	Jumlah	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.598.212.780,46 dari anggaran sebesar Rp98.112.198.266,00 atau sebesar 92,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114,85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.845.005.665,61 atau 33,72%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 183
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.218.985.562,00	7.074.492.315,07	69,23	22.367.406.063,80
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	14.250.000,00	14.016.458,80	98,36	281.162.695,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	12.717.474.375,00	12.554.900.166,80	98,72	4.444.313.484,50
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	71.796.348.329,00	64.067.328.308,01	89,23	17.189.888.361,05
5	Belanja Modal Bangunan Peternakan/ Perikanan	1.290.000.000,00	1.285.405.854,00	99,64	20.358.411.111
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	61.302.579,00
7	Belanja Modal Taman	1.075.000.000,00	362.668.475,76	33,74	3.245.375.260,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.261.264,00
	Jumlah	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp180.325.000,00 dari anggaran sebesar Rp256.184.000,00 atau sebesar 70,39%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 184
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	256.184.000,00	180.325.000,00	70,39	0,00
	Jumlah	256.184.000,00	180.325.000,00	70,39	0,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp182.535.782.891,34 dari anggaran sebesar Rp228.771.494.743,00 atau sebesar 79,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.181.542.397,87 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp95.354.240.295,37 atau 109,37% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 185
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	223.407.895.952,00	177.685.867.278,19	79,53	80.912.042.329,59
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.945.736.096,00	2.525.749.890,05	85,74	3.886.647.689,28
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.366.033.995,00	2.284.265.025,00	96,54	2.574.902.180,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	51.831.700,00	39.950.981,00	77,08	0,00
	Jumlah	228.771.494.743,00	182.535.782.693,24	79,79	87.181.542.397,87

5.1.2.2.4.1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp177.685.867.278,19 dari anggaran sebesar Rp223.407.895.952,00 atau sebesar 79,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.912.042.329,59 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp96.773.824.948,60 atau 119,60% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 186
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	217.567.223.792,00	174.132.009.671,99	80,04	70.106.414.397,89
2	Belanja Modal Jembatan	5.840.672.160,00	3.553.857.606,20	60,85	10.805.627.931,70
	Jumlah	223.407.895.952,00	177.685.867.278,19	79,53	80.912.042.329,59

5.1.2.2.4.1.1. Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp174.132.009.671,99 dari anggaran sebesar Rp217.567.223.792,00 atau sebesar 80,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.106.414.397,89 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp104.025.595.274,10 atau 148,38% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 187
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	214.276.788.914,00	173.239.950.167,99	80,84	70.063.408.797,89
2	Belanja Modal Jalan Khusus	3.147.444.878,00	892.059.504,00	27,99	25.955.600,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.050.000,00
	Jumlah	217.567.223.792,00	174.132.009.671,99	80,04	70.106.414.397,89

5.1.2.2.4.1.2. Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.553.857.606,20 dari anggaran sebesar Rp5.840.672.160,00 atau sebesar 60,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.805.627.931,70 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.251.770.325,50 atau 67,11% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 188
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.840.672.160,00	3.553.857.606,20	60,85	10.805.627.931,70
	Jumlah	**5.840.672.160,00**	**3.553.857.606,20**	**60,85**	**10.805.627.931,70**

5.1.2.2.4.2. Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.525.759.890,05 dari anggaran sebesar Rp2.945.733.096,00 atau sebesar 85,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.886.647.888,28 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.887.998,23 atau 35,01% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 189
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.545.733.096,00	2.289.110.716,09	89,92	3.264.970.575,90
2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	400.000.000,00	236.649.173,96	59,16	621.677.312,38
	Jumlah	**2.945.733.096,00**	**2.525.759.890,05**	**85,74**	**3.886.647.888,28**

5.1.2.2.4.2.1. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.289.110.716,09 dari anggaran sebesar Rp2.545.733.096,00 atau sebesar 89,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.264.970.575,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp975.859.859,81 atau 29,89% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 190
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.545.733.096,00	2.289.110.716,09	89,92	3.264.970.575,90
	Jumlah	**2.545.733.096,00**	**2.289.110.716,09**	**89,92**	**3.264.970.575,90**

5.1.2.2.4.2.2. Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp236.649.173,96 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 59,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp621.677.312,38 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp385.028.138,42 atau 61,93% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 191
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pengelola Air Kotor	0,00	0,00	0,00	621.677.312,38
2	Belanja Modal Bangunan Penampung Air Kotor	400.000.000,00	236.649.173,96	59,16	0,00
	Jumlah	**400.000.000,00**	**236.649.173,96**	**59,16**	**621.677.312,38**

5.1.2.2.4.3. Belanja Modal Instalasi

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Instalasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 192
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.950.000,00**

5.1.2.2.4.3.1. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 193
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.950.000,00**

5.1.2.2.4.4. Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.284.205.025,00 dari anggaran sebesar Rp2.366.033.995,00 atau sebesar 96,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.374.902.180,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.697.155,00 atau 3,82% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 194
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.366.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00
	Jumlah	2.366.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00

5.1.2.2.4.4.1. Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.284.205.025,00 dari anggaran sebesar Rp2.366.033.995,00 atau sebesar 96,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.374.902.180,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.697.155,00 atau 3,82% dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 195
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.366.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00
	Jumlah	2.366.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00

5.1.2.2.4.4.2. Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp39.950.500,00 dari anggaran sebesar Rp51.831.700,00 atau sebesar 77,08%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 196
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi BLUD	51.831.700,00	39.950.500,00	77,08	0,00
	Jumlah	51.831.700,00	39.950.500,00	77,08	0,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal tersebut digunakan untuk pembelian buku kepustakaan, pengadaan alat olah raga lainnya, belanja modal Aset BOS, dan belanja modal aset BOKP pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.706.720.168,00 dari anggaran sebesar Rp15.392.730.120,00 atau sebesar 82,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.813.646.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp106.926.167,00 atau 0,83% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 197
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00
2	Belanja Modal Barang Bersenjata Keamanan/Kebudayaan, Olahraga	494.000.000,00	490.250.000,00	98,24	377.246.800,00

3	Belanja Modal Aset Tidak [illegible]	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.700.180.000,00	12.164.801.988,00	82,75	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**15.392.730.120,00**	**12.706.720.188,00**	**82,55**	**12.813.646.335,00**

Terdapat anggaran sebesar Rp136.500.000,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh pergeseran Rencana Kegiatan Sekolah (RKAS) yang tidak dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak terakomodir pada perubahan APBD 2024.

5.1.2.2.5.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp51.608.200,00 dari anggaran sebesar Rp62.050.120.00 atau sebesar 83,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.237.046.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.185.438.135,00 atau 99,58% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 198
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00
	Jumlah	**62.050.120,00**	**51.608.200,00**	**83,17**	**12.237.046.335,00**

5.1.2.2.5.1.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp51.608.200,00 dari anggaran sebesar Rp62.050.120,00 atau sebesar 83.17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.237.046.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.185.438.135,00 atau 99,58% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 199
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00
	Jumlah	**62.050.120,00**	**51.608.200,00**	**83,17**	**12.237.046.335,00**

5.1.2.2.5.2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp490.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp494.000.000,00 atau sebesar 99,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.000.000,00 atau 29.95% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 200
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00
	Jumlah	**494.000.000,00**	**490.250.000,00**	**99,24**	**377.250.000,00**

5.1.2.2.5.2.1. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp490.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp494.000.000,00 atau sebesar 99,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.000.000,00 atau 29,95% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 201
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Musik	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00
	Jumlah	**494.000.000,00**	**490.250.000,00**	**99,24**	**377.250.000,00**

5.1.2.2.5.3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 202
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.350.000,00**

5.1.2.2.5.3.1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana rincian pada tabel berikut

Tabel 203
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.350.000,00**

5.1.2.2.5.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp12.164.861.988,00 dari anggaran sebesar Rp14.700.180.000,00 atau sebesar 82,75%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 204
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.700.180.000,00	12.164.861.988,00	82,75	0,00
	Jumlah	**14.700.180.000,00**	**12.164.861.988,00**	**82,75**	**0,00**

5.1.2.2.5.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2024 tidak tercalisasi dari anggaran sebesar Rp136.500.000,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 205
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOS Kemdik	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**136.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp4.913.057.922,00 dari anggaran sebesar Rp8.550.000.000,00 atau sebesar 57,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.370.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.878.687.922,00 atau 14.194,61% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 206
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00
	Jumlah	**8.550.000.000,00**	**4.913.057.922,00**	**57,46**	**34.370.000,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 207
Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan kepada warga yang terdampak bencana akibat angin puting beliung kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2024	146.557.000,00
2	Bantuan kepada warga yang terdampak akibat angin puting beliung kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2024	552.148.000,00
3	Penanikan mas Kesalahan Setor pengembalian belanja makan dn minum Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2023	1.490.242.150,00
4	Pengembalian Dana BOK Kesehatan Puskesmas dan Evaluasi BPK TA 2023 dari [illegible]	1.369.143.657,00
5	Pengembalian dana BOS Reguler atas evaluasi BPK T.A. 2022, 2023 dan sekolah yang T.A. [illegible] RKUD ke [illegible]	415.466.515,00
6	Bantuan biaya pemakaman bagi warga/ masyarakat Lampung Timur	641.500.000,00
	Jumlah	**4.913.057.922,00**

Terdapat realisasi belanja yang merupakan penarikan kembali atas setoran pengembalian belanja sebesar Rp1,490.242.750,00. Penarikan dilakukan untuk memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Penarikan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 dan disetorkan Kembali Ke Kas Daerah 8 Februari 2024 dengan nilai yang sama.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp400.538.478.705,00 dari anggaran sebesar Rp420.608.901.075,00 atau sebesar 95,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.143.403.090,00 atau 1,02% Realisasi Belanja Tranfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 208
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	20.287.426.675,00	7.412.100.000,00	36,54	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00
	Jumlah	**420.608.901.075,00**	**400.538.478.705,00**	**95,23**	**404.681.881.795,00**

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Terdiri Dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp20.287.426.675,00 dan terealisasi sebesar Rp7.412.100.000,00 atau 36,54%, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 209
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.026.308.389,00	6.849.470.000,00	36,00	0,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.261.118.286,00	562.630.000,00	44,61	0,00
	Jumlah	**20.287.426.675,00**	**7.412.100.000,00**	**36,54**	**0,00**

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa pada Tahun 2024 terealilasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran Sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.555.503.090,00 atau 2,86% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 210
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada Desa	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran Sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.555.503.090,00 atau 2,86% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 211
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	404.681.881.795,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	710.000.000,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00

5.1.2.4.2.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran Sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp710.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp392.416.378.705,00 atau 55.269,91% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 212
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber Dari Dana Desa	272.698.703.000,00	271.562.076.800,00	99,58	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	127.622.771.400,00	121.564.301.905,00	95,25	0,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	710.000.000,00

5.1.3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit diperoleh berdasarkan transaksi kas dari pendapatan, belanja dan transfer. Pada Tahun 2024 pendapatan terealisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00 atau sebesar 94,46%, sedangkan Belanja Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 dari anggaran Rp2.559.987.749.455,00 atau sebesar 90,20%.

Secara lebih lengkap hal tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 213
Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	94,46	2.131.663.102.999,38
2	Belanja Daerah	(2.559.987.749.455,00)	(2.309.190.574.317,60)	90,20	(2.096.191.300.837,69)
	Jumlah	**(85.684.419.054)**	**27.921.426.100,33**	**(32,59)**	**35.471.802.161,69**

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp 87.541.900.803,05 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 214
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	5.000.000.000,00	0,00		0,00
2	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Penerimaan Pembiayaan	82.684.419.054,00	87.684.419.054,05	94,30	54.281.916.906,36
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	(142.518.251,00)	0,00	(69.300.044,00)
	Jumlah	**87.684.419.054,00**	**87.541.900.803,05**	**99,84**	**54.212.616.892,36**

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dipergunakan untuk penyertaan modal daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 215
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Tabel 216
Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

5.1.4.2.2. Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan pembiayaan untuk pengeluaran Pemberian Pinjaman Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 217
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 218
Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.337.142.000.417,95	94,46	2.121.663.302.999,38
2	Belanja Daerah	(2.559.987.749.455,00)	(2.309.190.574.317,60)	(90,20)	(2.096.191.500.837,69)
3	Surplus/Defisit	(85.684.419.054,00)	27.921.426.100,33	(32,59)	25.471.802.161,69
4	Penerimaan Pembiayaan	87.684.419.054,00	87.684.419.054,03	100,00	54.283.916.906,36
5	Koreksi SiLPA	0,00	(142.518.251,00)		(69.180.014,00)

6	Pengeluaran pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.[illegible]	100,00	7.000.000.000,00
7	Pembiayaan Netto	85.684.419.054,05	85.541.900.803,05	99,83	52.212.616.892,36
8	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	113.463.426.903,38	0,00	87.684.419.054,05

SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp 113.463.326.903,38. Bila dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp87.684.419.054,05 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.778.907.849,33 atau 29,40%. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) periode s.d. 31 Desember 2024 sejumlah Rp 113.463.326.903,38 terdiri dari:

Tabel 219
Rincian SiLPA [illegible] 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.138.153.903,41	78.785.874.279,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	0,00
4	Kas di BLUD	2.163.41[illegible]044,97	1.131[illegible]
5	Kas BOSP	164.900,00	926.500,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	7.161.556.913,00	5.765.765.342,00
	Jumlah	113.463.326.903,38	87.684.419.054,05

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal
   Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp87.684.419.054,05 atau naik sebesar Rp33.471.802.161,69 atau 61,74 dari Tahun 2023 sebesar Rp54.281.916.906,36. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp87.684.419.054,05 terdiri dari:

Tabel 220
Saldo [illegible] Awal Tahun 2024 dan Tahun [illegible]

No	Uraian	Per 01 Januari TA 2024	Per 01 Januari TA 2023
1	Kas di Kas Daerah	78.785.824.279,59	44.204.676.933,[illegible]4
2	Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	1.300.014,00
4	Kas di BLUD	5.131.902.932,46	9.575.939.959,27
5	Kas di Bendahara BOS	926.500,00	0,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	5.765.765.342,00	0,00

7	Koreksi kas	0.00	0,00
	Jumlah	**87.684.419.054,05**	**54.281.916.906,36**

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp87.684.419.054,05 naik sebesar Rp33.471.802.161,69 atau 61,74 dari Tahun 2023 yang sebesar Rp54.281.916.906,36.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA
   Adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38 naik sebesar Rp25.778.907.849,33 atau 29,40% dari Tahun 2023 sebesar Rp87.684.419.054,05.
4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
   Saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38 terdiri dari :

Tabel 221
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.138.175.903,41	78.785.824.279,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	0.00
4	Kas di BLUD	2.163.411.044,97	3.131.902.992,46
5	Kas di Bendahara BOS	184,900,00	926.900,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	7.161.556.913,00	5.765.765.342,00
	Jumlah	**113.463.326.903,38**	**87.684.419.054,05**

5.3. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan *(balance sheet)* adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas aset (aktiva), kewajiban *(liabilities)* dan ekuitas. Untuk posisi keuangan per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara umum sebagai berikut:

Tabel 222
Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Aset	2.430.842.669.030,81	2.237.938.166.408,95	192.904.502.621,86
	Jumlah Aset	**2.430.842.669.030,81**	**2.237.938.166.408,95**	**192.904.502.621,86**
2	Kewajiban	131.747.225.486,92	131.020.219.266,85	727.006.220,07
3	Ekuitas	2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10	192.177.496.401,79
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**2.430.842.669.030,81**	**2.237.938.166.408,95**	**192.904.502.621,86**

Saldo **Aset** per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.430.842.669.030,81 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp340.985.671.732,63; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp42.565.942.464,22; Aset Tetap sebesar Rp 1.674.200.542.694,22; serta Aset Lainnya sebesar Rp373.090.512.139,74.

Saldo **Kewajiban** per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.747.225.486,92 terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp132.945.020,00, Pendapatan Diterima Dimuka Rp546.210.693,58 dan Utang Belanja Rp131.068.069.773,34 serta Saldo Total **Ekuitas** per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.299.095.443.543,89.

5.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 223
Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Lancar	340.985.671.732,63	295.351.775.588,38	45.633.896.144,25
2	Investasi Jangka Panjang	42.565.942.464,22	35.224.930.995,25	7.341.011.468,97
3	Aset Tetap	1.674.200.542.694,22	1.722.329.191.884,13	(48.129.649.189,91)
4	Aset Lainnya	373.090.512.139,74	185.031.267.941,19	188.059.244.198,55
	Jumlah	**2.430.842.669.030,81**	**2.237.938.166.408,95**	**192.904.502.621,86**

Berdasarkan rincian aset pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi terbesar merupakan kelompok aset tetap yaitu sebesar 68,87% terhadap total keseluruhan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA. 2024.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar tersebut terdiri atas kas dan setara kas. Adapun rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 224
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	104.138.173.903,41	78.785.824.279,59	25.352.349.623,82
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00

3	Kas di Bendahara Pengeluaran	842,00	564.000,00	(563.858,00)
4	Kas di BLUD	2.163.411.044,97	3.132.902.932,46	(968.491.887,49)
5	Kas Lainnya	132.945.020,00	0,00	132.945.020,00
6	Kas Dana BOSP	184.900,00	1.971.500,00	(1.786.600,00)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	7.161.596.913,00	5.765.765.342,00	1.395.791.571,00
8	Piutang Pajak Daerah	14.606.556.892,75	14.204.168.747,50	402.388.145,25
9	Piutang Restitusi Daerah	7.959.000,00	16.297.000,00	(8.338.000,00)
10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.062.303.841,05	12.375.720.278,87	(3.313.416.437,82)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	750.903.920,00	(750.903.920,00)
12	Piutang Transfer Antar Daerah	89.860.770.643,00	90.134.732.739,00	[illegible]
13	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang	(9.666.818.798,31)	(12.874.651.536,79)	3.207.832.738,66
15	Beban Dibayar Dimuka	217.068.678,00	44.864.166,67	172.204.511,41
16	Persediaan	123.301.559.552,55	103.034.222.219,08	20.267.337.333,47
	Jumlah	**340.985.671.732,63**	**295.351.775.588,38**	**45.633.896.144,25**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp340.985.671.732,63 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp45.633.896.144,25 atau 15,45%, apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp295.351.775.588,38. Rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan Kasda adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Per 31 Desember 2024 dan 2023, kas di Kas daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
104.138.173.903,41	**78.785.824.279,59**

Kas di Kas Daerah merupakan kas dan setara kas yang ada pada Giro Bank Lampung Nomor 399.00.09.000001.6 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.138.173.903,41 mengalami kenaikan sebesar Rp25.352.349.623,82 atau 32,18% apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp78.785.824.279,59. Seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 225
Kas di Kas Daerah Per 30 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Kas	78.785.824.279,59
2	Penambahan Kas	1.801.843.075.586,83
3	Pengurangan Kas	1.776.490.725.962,99
4	Saldo Akhir kas	**104.138.173.903,43**

Adapun Pembatasan Penggunan Kas di Kas Daerah terdapat pada rincian table sebagai berikut:

Tabel 226
Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024
1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	4.105.264.830,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.226.750.371,00
3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB	2.142.347.828,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	162.892.443,00
5	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	[illegible]
6	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	[illegible]
7	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan	56.013.200,00
8	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi	24.461,00
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan	51.531.487,00
10	DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UMKM	31.950.165,00
11	DAK Fisik Regular Bidang Pendidikan	22.538.279,10
12	DAK Fisik Penugasan Jalan	150.981.379,99
13	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	2,00
14	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian	7.800.000,00
15	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	42.395.146,00
16	DAK Fisik Penugasan Kesehatan & KB	150.114.448,00
17	DAU SG -PPPK	0,00
18	DAU SG- Pendidikan	10.909.492.211,75
19	DAU SG-Kesehatan	8.352.224.229,00
20	DAU SG-PUPR	2.219.572.991,44
21	DAU Tambahan TIR bagi ASN Guru Daerah	25.152.410.035,00
22	DBH CHT	294.547.596,00
23	DBH -Sawit	519.848.408,00
	Jumlah Pembatasan Kas	**57.284.966.269,28**
24	DAU	46.853.207.614,13
	Jumlah Kas di Kas Daerah	**104.138.173.903,41**

Penggunaan Silpa DAU SG pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Silpa DAU SG Pendidikan sebesar Rp10.306.492.211,75 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 untuk:
   - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 7.687.925.500,00;
   - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 1.578.962.000,00
   - Kegiatan Pengelolaan PAUD sebesar Rp 1.015.016.000,00;
   - Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 24.588.711,00.
b) Silpa DAU SG Kesehatan sebesar Rp 8.352.234.229,00 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 untuk kegiatan:
   - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.654.494.176,00;
   - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.935.053,00;
   - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp200.000.000,00;
   - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebesar Rp 446.805.000
c) Silpa DAU SG PUPR sebesar Rp3.319.572.991,44 dianggarkan untuk Kegiatan Rekonstruksi Jalan.
d) Silpa DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp25.152.419.935,00 telah direalisasikan untuk membayar THR Guru Daerah Tahun 2025 sebesar Rp25.086.696.900,00.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
142,00	564.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp142,00. Kas tersebut berada pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.

Selain itu terdapat uang titipan atas setoran pengembalian tindak lanjut rekomendasi berdasarkan LHP BPK Nomor 32B/LHP/XVIII.BI.P/05/2023 pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp212.630.275,00 yang baru disetorkan Tahun 2025.

Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
2.163.411.044,97	3.131.902.932,46

Kas di BLUD merupakan kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 34 Puskesmas. Kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.163.411.044,97. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp968.491.887,49 atau 30,92%. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 227
Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Rejo Kanon	40.777.019,04
2	Puskesmas Sukorejo	49.204.592,08
3	Puskesmas Bumi Emas	15.312.457,76
4	Puskesmas Karya Tani	55.036.648,22
5	Puskesmas Pekuan Aji	3.696.210,14
6	Puskesmas Adirejo	44.947.783,85
7	Puskesmas Bulanghari	50.413.460,80
8	Puskesmas Sekampung	37.021.880,35
9	Puskesmas Trimulyo	14.198.537,78
10	Puskesmas Jabung	74.033.160,64
11	Puskesmas Pasir Sakti	1.029.573,95
12	Puskesmas Pugung Raharjo	230.744.697,55
13	Puskesmas Penumgan	42.907.201,89
14	Puskesmas Sumber Rejo	42.987.712,50
15	Puskesmas Labuhan Maringgai	97.743.539,43
16	Puskesmas Sekaliawood	41.706.903,84
17	Puskesmas Way Mili	56.647.329,85
18	Puskesmas Watu	409.586,65
19	Puskesmas Mataram Baru	89.199.041,09
20	Puskesmas Way Jepara	240.227.465,02
21	Puskesmas Rajabasa Lama	70.670.469,98
22	Puskesmas Braja Harjosari	86.270.618,53
23	Puskesmas Braja Caka	46.856.780,01
24	Puskesmas Sukadana	19.454.011,40
25	Puskesmas Sawaraja Nuban	4.513.712,31
26	Puskesmas Suka Raja Tiga	3.013.647,00
27	Puskesmas Donomulyo	64.122.622,53
28	Puskesmas Tanjung Harapan	511.224,39

29	Puskesmas Pekalongan	586.650,09
30	Puskesmas Ganti Warno	496.532,90
31	Puskesmas Rantau Untara	225.930,20
32	Puskesmas Purbolinggo	17.642.876,28
33	Puskesmas Tambah Subur	17.847.076,40
34	Puskesmas Margototo	8.151.814,30
35	RSUD Sukadana	580.570.896,50
	Jumlah	**2.163.411.044,97**

Pada Kas BLUD PKM Labuhan Maringgai terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2023 sebesar Rp142.518.251,00 yang pada Tahun 2023 tetap diakui sebagai kas. Pada Tahun 2024 telah dipungut pajak atas belanja BLUD sebesar Rp110.858.438,00 yang belum disetorkan ke kas negara. Hasil konfirmasi kepada KPP Metro diketahui bahwa atas potongan pajak tersebut belum diristitusi pada kelebihan penyetoran pajak Tahun 2023.
Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
132.945.020,00	**0,00**

Kas Lainnya sebesar Rp 132.945.020,00 merupakan pajak pusat yang belum disetor per 31 Desember 2024 (Utang PFK) dengan rincian sebagai berikut:

- UPTD SDN Karang Anom sebesar Rp1.677.500,00
- UPTD SDN 1 Rejo Katon sebesar Rp 281.441,00
- UPTD SDN 1 Rama Puja sebesar Rp743.242,00
- UPTD SDN 2 Bandar Agung sebesar Rp545.455,00
- UPTD SMPN 1 Labuhan Ratu sebesar Rp 5.457.610,00
- UPTD SMPN 2 Labuhan Ratu sebesar Rp 8.831.008,00
- UPTD SMPN 2 Marga Sekampung sebesar Rp 2.949.760,00
- Puskesmas Pakuan Aji sebesar Rp1.600.566,00
- Puskesmas Labuhan Maringgai sebesar Rp110 858.438,00

5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
184.900,00	**1.971.500,00**

Kas Dana BOSP adalah kas yang berada di bawah penguasaan Bendahara BOS SDN dan SMPN penerima Dana BOSP. Kas Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 184.900,00. Kas tersebut adalah Kas Bendahara BOSP SMPN 1 Way Bungur.

Selain Kas Tunai tersebut terdapat saldo Kas sebesar Rp26.764.185,00 yang merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2024 terdiri dari Pajak Pusat sebesar Rp 20.486.016,00 dan Pajak Daerah sebesar Rp6.278.169,00. Untuk Pajak Pusat (Utang PFK) telah dicatat pada Kas Lainnya sedangkan pajak daerah sebesar Rp6.278.169,00 adalah Pajak Restoran dan sejenisnya yang belum disetor oleh sekolah penerima Dana BOSP dengan rincian sebagai berikut:

- SDN 1 Rejo Katon sebesar Rp383.000,00;
- SDN 1 Rukti Sedyo sebesar Rp 182.500,00;
- SDN 1 Raman Aji sebesar Rp60.000.00;
- SMPN 1 Labuhan Ratu sebesar Rp 3.700.000,00;
- SMPN 2 Labuhan Ratu sebesar Rp1.010.669,00;
- SMPN 2 Marga Sekampung sebesar Rp942.000,00.

Rincian Kas Dana Bos terdapat pada Lampiran 4.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
7.161.556.913,00	5.765.765.342,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.161.556.913.00 Kas tersebut merupakan kas yang bersumber dari Dana Transfer Pusat yang disalurkan secara langsung ke puskesmas-puskesmas. Bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp5.765.765.342,00 Kas Dana BOK Puskesmas mengalami kenaikan sebesar Rp 1.395.791.571,00 atau 24.21%. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas terdapat pada Lampiran 5.

5.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
[illegible]	14.204.168.747,50

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp14,606.556.892.75. Bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp14.204.168.747,50 mengalami kenaikan sebesar Rp 402.388.145,25 atau 2,83%. Rincian Piutang Pajak Daerah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 228
Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	43.948.622,60	53.570.910,60
2	Piutang Pajak Restoran	164.995.669,90	189.572.535,90
3	Piutang Pajak Katering	214.616.630,00	156.022.400,00
4	Piutang Pajak Hiburan	15.625.000,00	15.625.000,00
5	Piutang Pajak Reklame/Bilboard	286.789.847,92	249.248.965,00
6	Piutang Pajak Reklame Kain	19.546.284,33	17.454.150,00
7	Piutang PPJ Dihasilkan Sendiri	4.726.031.129,00	4.567.760.933,00
8	Piutang Pajak Parkir	75.300.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Air Tanah	39.711.224,00	30.616.228,00

10	Piutang PMBLB	3.750.000,00	3.750.000,00
11	Piutang PBB P2	8.956.842.474,00	8.742.547.825,00
12	Piutang BPHTB	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	**14.406.556.392,75**	**14.204.168.747,50**

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 6.

Rincian mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.948.622,60 mengalami penurunan sebesar Rp7.622.288,00 atau 14,78% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.570.910,60 Rincian Piutang Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 229
Mutasi Piutang Pajak Hotel

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	51.570.910,60
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	191.422.445,00
3	Realisasi 2024	199.044.733,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2024	**43.948.622,60**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hotel di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Hotel di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.422.445,00 dari saldo awal sebesar Rp 51.570.910,60 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Hotel tahun 2024 sebesar Rp199.044.733,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.948.622,60.

(b) Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.395.699,90 mengalami penurunan sebesar Rp5.176.634,00 atau 2,73% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.527.333,90 Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 230
Mutasi Piutang Pajak Restoran

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	189.572.333,90
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	291.364.804,00
3	Realisasi 2024	296.541.438,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**184.395.699,90**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Restoran di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Restoran di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp291.364.804,00 dari saldo awal sebesar Rp189.572.333,90 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp296.541.438,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.395.699,90.

(c) Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Katering per 31 Desember 2024 sebesar Rp 214.616.620,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.594.220,00 atau 37,56% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp156.022.400,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagai berikut:

Tabel 231

Mutasi Piutang Pajak Katering

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	156.022.400,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	2.207.032.441,00
3	Realisasi 2024	2.148.438.221,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**214.616.620,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Katering di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Katering di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.207.032.441,00 dari saldo awal sebesar Rp156.022.400,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Katering Tahun 2024 sebesar Rp2.148.438.221,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.616.620,00

(d) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.625.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp15.625.000,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 232

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	15.625.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	111.409.500,00
3	Realisasi 2024	111.409.500,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**15.625.000,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hiburan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Hiburan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.409.500,00 dari saldo awal sebesar Rp15.625.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp111.409.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.625.000,00.

(e) Piutang Pajak Reklame Bilboard

Saldo Piutang Pajak Reklame Bilboard per 31 Desember 2024 sebesar Rp 286.789.847,92. mengalami kenaikan sebesar Rp37.540.880,92 atau 15,06% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp249.248.967,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Bilboard sebagai berikut:

Tabel 233

Mutasi Piutang Pajak Reklame Bilboard

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	249.248.967,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	1.236.909.507,00
3	Realisasi 2024	1.037.573.178,00
4	Koreksi Penyesuaian	(161.795.448,08)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**286.789.847,92**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Bilboard diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Reklame Bilboard di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.236.909.507,00 dari saldo awal sebesar Rp249.248.967.00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Reklame Bilboard Tahun 2024 sebesar Rp1.037.573.178,00 serta koreksi penyesuaian sebesar Rp161.795.448,08 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp286.789.847,92.

(f) Piutang Pajak Reklame Kain

Saldo Piutang Pajak Reklame Kain per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.092.134,33 atau 11,99% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.454.150,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain sebagai berikut:

Tabel 234

Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	17.454.150,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	281.955.935,00
3	Realisasi 2024	276.787.282,00
4	Koreksi Penyesuaian	(3.076.518,67)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**19,546,284,33**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Reklame Kain di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp281.955.935,00 dari saldo awal sebesar Rp17.454.150,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Reklame Kain Tahun 2024 sebesar Rp276.787.282,00 serta Koreksi penyesuaian sebesar Rp3.076.518,67 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33.

(g) Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.726.031.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.729.813,00 atau 0,88% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.767.760.933,00. Piutang tersebut terdiri dari pajak yang dipungut KLP Sinar Siwo Mego Tahun 2012 sebesar Rp576.500.591,00 dan pajak yang dipungut PLN Tahun 2024 sebesar Rp4.149.530.529,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai berikut:

Tabel 235

Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

No.	Uraian	Jumlah
	KLP Sinar Siwo Mego	
1	**Saldo awal per 1 Januari 2024**	**576.500.591,00**
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	0.00
3	Realisasi 2024	0.00
	Saldo Akhir KLP Sinar Siwo Mego per 31 Desember 2024	**576.500.591,00**
	PLN	
1	**Saldo awal per 1 Januari 2024**	**4.191.260.342,00**
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	44.518.143.215,00
3	Realisasi 2024	44.559.873.028,00
	Saldo Akhir PLN per 31 Desember 2024	**4.149.530.529,00**
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**4.726.031.120,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Penerangan Jalan **PLN** di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 44.518.143.215,00 dari saldo awal sebesar Rp 4.191.260.342,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2024 sebesar Rp44.559.873.028,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.767.760.953.00. Dari jumlah saldo piutang tersebut terdapat piutang Pajak Penerangan Jalan **KLP** Sinar Siwo Mego sebesar **Rp**576.500.591,00 yang tidak terrealisasi sejak Tahun 2012.

(h) Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00. Pajak Parkir merupakan pajak baru yang berlaku di Kabupaten Lampung Timur. Rincian Mutasi Piutang Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 236

Mutasi Piutang Pajak Parkir

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	0.00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	440.420.000,00
3	Realisasi 2024	365.120.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**75.300.000,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Parkir diatas terdapat Ketetapan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp440.420.000.00 dengan realisasi sebesar Rp365.120.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00.

(i) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711.224.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 69.094.996,00 atau 650,84% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp10**.616.228,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 237

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	10.616.228,00
2	Koreksi atas saldo awal piutang	0,00
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	1.001.129.672,00
4	Realisasi 2024	932.034.676,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**79.711.224,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Air Tanah diatas terjadi penambahan Ketetapan Piutang Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.001.129.672,00 dari saldo awal sebesar Rp10.616.228,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp932.034.676,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711 224,00.

(j) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.750.000,00 .Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.750.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak MBLB sebagai berikut:

Tabel 238

Mutasi Piutang Pajak MBLB

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	3.750.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	139.817.500,00
3	Realisasi 2024	139.817.500,00
4	Realisasi Non Ketetapan	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**3.750.000,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak MBLB diatas terjadi penambahan Ketetapan Piutang Pajak MBLB di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.817.500,00 dari saldo awal sebesar Rp3.750.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak MBLB Tahun 2024 sebesarRp139.817.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.750.000.00.

(k) Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan

Saldo Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.956.842.474,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 214.294.649,00 atau 2,45% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.742.547.825,00. Rincian Mutasi Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

Tabel 239
Mutasi PBB Perkotaan dan Pedesaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	8.742.547.825,00
2	Koreksi catat pelimpahan piutang 2023	(27.784.024,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	25.676.395.575,00
4	Realisasi 2024	25.434.316.902,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**8.956.842.474,00**

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.676.395.575,00 dari saldo awal sebesar Rp8.742.547.825,00 dan pengurangan piutang dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp27.784.024,00 realisasi pembayaran Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2024 sebesar Rp 25.434.316.902,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.956.842.474,00.

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
[illegible]	16.297.000,00

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa saldo tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) berdasarkan surat ketetapan retribusi. Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp7.959.000,00 merupakan tagihan saldo piutang tahun 2023. Pada Tahun 2024 Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
9.062.303.841,00	12.375.720.278,87

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp 9.062.303.841,00 merupakan piutang pendapatan BLUD. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp3.313.416.437,87 atau sebesar 26,77% . Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 240
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Kepo Kalen	22.395.800,00
2	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sidorejo	24.750.000,00

3	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Hutu Emas	4.040.000,00
4	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas [illegible] Tani	1.120.000,00
5	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pakuan Aji	8.430.000,00
6	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Adireyo	4.510.000,00
7	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Batanghari	47.532.000,00
8	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sekampung	35.530.000,00
9	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas [illegible]	11.[illegible]
10	[illegible] Pendapatan BLUD Puskesmas Jabung	14.114.000,00
11	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pasir Sakti	89.245.000,00
12	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pugung Raharjo	9.479.000,00
13	Piutang Pendapatan [illegible] Puskesmas Penengan	[illegible]
14	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sumber Rejo	22.829.000,00
15	Piutang Pendapatan [illegible] Puskesmas Labuhan [illegible]	44.755.000,00
16	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sribawono	8.515.000,00
17	Piutang Pendapatan BLUD uskesmas Way Mili	126.018.000,00
18	Piutang Pendapatan [illegible] Puskesmas Wana	8.830.000,00
19	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Mataram Baru	3.925.000,00
20	Piutang Pendapatan BLUD uskesmas Way Jepara	63.420.000,00
21	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rajabasa Lama	32.635.000,00
22	[illegible] Pendapatan BLUD Puskesmas Braja Harjosari	34.060.000,00
23	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Braja Caka	4.160.000,00
24	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukacana	1.181.000,00
25	Piutang Pendapatan BLUD [illegible] Sukaraja Kuban	2.860.000,00
26	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukaraja Tiga	6.850.000,00
27	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Donomulyo	5.491.000,00
28	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Taruna Harapan	400.000,00
29	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pekalongan	12.238.000,00
30	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Ganji Warno	6.310.000,00
31	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rantau Utara	7.091.000,00
32	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Purbolinggo	13.475.000,00
33	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tambah Subur	2.970.000,00
34	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Margotoko	43.025.000,00
35.	Piutang Pendapatan RSUD Sukadana	8.254.564.041,00
	JUMLAH	9.062.303.841,00

Piutang RSUD Sukadana sebesar Rp8.354.564 041,00 diantaranya merupakan Piutang KK KTP Tahun 2021 s.d 2024 yang berasal dari pembiayan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.222.601.231,00.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 8.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	730.903.920,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dicatat sebesar Rp0,00.

Bardasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, terdapat Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp10.268.498.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak kurang bayar sebesar Rp19.495.156 000,00;
- CHT lebih bayar sebesar Rp7.999.000,00;
- DBH SDA Migas lebih bayar sebesar Rp3.796.529.000,00;
- DBH SDA Minerba lebih bayar sebesar Rp973.518.000,00;
- DBH SDA Panas Bumi lebih bayar sebesar Rp149.128.000,00;
- DBH SDA Kehutanan kurang bayar sebesar Rp11.691.000,00;
- DBH SDA Perikanan lebih bayar sebesar Rp1.494.566.000,00;
- DBH SDA Perkebunan sawit lebih bayar sebesar Rp2.816.589.000,00.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 9.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
89.860.770.643,00	90.134.222.739,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp89.860.770.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp273.452.096,00 atau 0,30% dari Tahun 2023 sebesar Rp90.134.222.739,00. Rincian Tranfer Antar Daerah- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 241

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.782.937.284,00	21.602.428.392,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.557.175.080,00	17.273.220.547,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.794.361.087,00	48.506.787.704,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	268.564.903,00	221.361.512,00
5	Pajak Rokok	7.457.732.789,00	7.588.414.583,00
	Jumlah	**89.860.770.643,00**	**90.134.222.739,00**

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 242
Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah -Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	90.134.222.739,00
2	Ketetapan Tahun 2024	127.776.638.818,00
3	Koreksi kurang Catat Piutang 2023	1.540.976.565,00
4	Realisasi Transfer DBH Tahun 2024	129.591.067.479,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	**89.860.770.643,00**

Berdasarkan tabel Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diatas terdapat penambahan ketetapan sebesar Rp127.776.638.818.00 dan koreksi kurang catat piutang sebesar Rp1.540.976.565,00 . Dari saldo awal sebesar Rp90.134.222.739,00 dan pengurangan realisasi pembayaran Tahun 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka terdapat saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 89.860 770.643,00.

Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi akan diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Nomor:900.1.14.5/5171/VI.02/2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

1) DBH Pajak Daerah Triwulan I TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025;
2) DBH Pajak Daerah Triwulan II TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2026
3) DBH Pajak Daerah Triwulan III TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2027;
4) DBH Pajak Daerah Triwulan IV TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2028.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 10.

5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
9.666.818.798.13	12.874.651.536,79

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, sebagai berikut:

a. Sebesar 0.50% untuk kualitas piutang lancar;
b. Sebesar 10% untuk kualitas piutang kurang lancar;
c. Sebesar 50% untuk kualitas piutang diragukan;
d. Sebesar 100% untuk kualitas piutang macet.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.666.818.798.13 mengalami penurunan sebesar Rp3.207.832.738,66 atau 24,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.874.651.536,79. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan adanya penurunan nilai piutang Tahun 2024. Rincian penyisian piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 243
Rincian Penyisihan Piutang
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.550.670.320,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.959.000,00
3	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	449.303.853,23
5	Penyisihan Piutang Lainnya	4.658.885.623,93
	Jumlah	**9.666.818.798,13**

5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
217.068.678,08	**44.864.166,67**

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024 Beban dibayar dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Beban Premi Asuransi BMD pada Sekretariat Daerah dan Bappeda sebesar Rp74.550.427,08 dan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran pajak pada Puskesmas Labuhan Maringgai Tahun 2023 sebesar Rp142.518.251,00. Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp217.068.678,08. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, Beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp172.204.511,41 atau 383,84%. Kenaikan Beban Dibayar Dimuka tersebut terjadi karena adanya kenaikan jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan pada OPD Sekretariat Daerah serta adanya pengakuan restitusi pajak Tahun 2023. Rincian Beban Dibayar Dimuka terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 244
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Premi Asuransi BMD	74.550.427,08	44.864.166,67
2	Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2023	142.518.251,00	0,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	**217.068.678,08**	**44.864.166,67**

Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 11.

5.3.1.1.15. Persediaan

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
123.301.559.552,55	**103.034.222.219,08**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat berdasarkan Berita

Acara Stock Opname. Pada Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Stock Opname diketahui bahwa kondisi persediaan dalam keadaan baik. Saldo persediaan Tahun 2024 sebesar Rp123.301.559.552,55. Persediaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.267.337.333,47 atau 19,67% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.034.222.219,08, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245
Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Bahan Lainnya	12.297.997.483,18	5.903.363.299,51
3	Suku Cadang Lainnya	152.206.518,00	465.400.700,00
4	Alat Tulis Kantor	1.096.173.925,00	1.151.406.856,00
5	Kertas dan Cover	20.450.395,00	29.397.300,00
6	Bahan Cetak	1.265.861.894,00	1.222.419.174,00
7	Benda Pos	593.000,00	285.000,00
8	Bahan Komputer	93.708.700,00	62.710.500,00
9	Perabot Kantor	708.000,00	629.940,00
10	Alat Listrik	120.000,00	0
11	Obat	10.638.299.604,76	10.017.441.172,95
12	Obat-obatan Lainnya	0,00	250.160.349,00
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	74.527.525.139,51	72.157.332.883,00
14	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	23.205.822.393,10	11.771.714.444,62
15	Natura dan Pakan Lainnya	592.500,00	461.500,00
	Jumlah	**123.301.559.552,56**	**103.034.222.219,08**

Dari tabel diatas diketahui bahwa persediaan terbesar terdapat pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk dijual/diserahkan Lainnya. Persediaan tersebut tercatat pada Dinas PUPR yang salah satunya disebabkan karena proses administrasi serah terima hibahnya yang belum selesai sehingga masih tercatat di persediaan.

Selain itu terdapat Bahan Obat-Obatan-Obat yang tercatat dalam Persediaan Puskesmas yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 246
Daftar Obat Daluarsa
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Puskesmas	Nilai Persediaan
1	PKM DONOMULYO	1.840.638,00
2	PKM SUKARAJA TIGA	6.652.716,00
3	PKM TANJUNG HARAPAN	925.400,00
4	PKM PENTANGAN	636.420,00
5	PKM WAY JEPARA	1.012.000,00

6	PKM BRAJA CAKA	884.550,00
7	PKM BRAJA HARJOSARI	2.483.374,00
8	PKM LABUHAN MARINGGAI	2.796.470,00
9	PKM KARYA TANI	6.699.482,80
10	PKM WAY MILI	4.411.108,00
11	PKM WANA	8.150.746,80
12	PKM ADIREJO	1.103.591,02
13	PKM SUKARAJA NUBAN	4.535.981,00
14	PKM SEKAMPUNG	5.723.478,00
15	PKM GANTI WARNO	5.686.870,96
16	PKM RAMAN UTARA	3.135.300,00
17	PKM REJO KATON	4.807.065,00
18	PKM PEKALONGAN	598.410,00
19	PKM RAJABASA LAMA	3.540.269,00
20	DINKES	23.598.654,76
	Jumlah	94.220.523,74

Daftar Persediaan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 12.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
42.565.942.464,22	35.224.930.995,25

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Atas pencatatan investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diatas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan nilai Investasi jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.565.942.464,22 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung, PT. BPR Syariah Lampung Timur dan PDAM Way Goruh.

Nilai Investasi Jangka Panjang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.341.011.468,97 atau 20,84% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.224.930.995,25. Rincian Nilai

Investasi Jangka Panjang terdapat pada pada tabel berikut:

Tabel 247
Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun [illegible]

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Metode Biaya		
1	Penyertaan Modal Saham pada PT Bank Lampung	7.880.780.000,00	6.880.780.000,00
	Metode Ekuitas		
2	Penyertaan Modal PT BPRS Lampung Timur	25.674.886.938,22	23.642.467.779,25
3	Penyertaan Modal PDAM Way Guruh	9.010.275.526,00	4.701.283.216,00
	Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**42.565.942.464,22**	**35.224.930.995,25**

Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2024 terdapat pada Lampiran 13

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung

Penyertaan modal merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pandapatan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT Bank Lampung hingga Tahun 2024 sesuai dengan sertifikat saham sudah disetor mencapai Rp7.880.780.000,00. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal kurang dari 20% maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penilaian investasi menggunakan metode biaya. Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.880.780.000.00.

5.3.1.2.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Syariah Lampung Timur

PT BPRS Syariah Lampung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Syariah (PDBPRS) Lampung Timur sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur. Sampai dengan saat ini nilai kepemilikan atas modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 99,04%. Berdasarkan SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal lebih dari 50% maka menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT BPRS Syariah Lampung Timur dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Laporan Keuangan PT BPR Syariah Lampung Timur Tahun 2024 telah diaudit KAP Zubaidi, Komaruddin. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar. Per 31 Desember 2024 kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPRS Lampung Timur sebagaimana terdapat dalam table berikut:

Tabel 248
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur Tahun [illegible]ran 2024

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2024	23.642.867.779,25
2	Penambahan setoran modal Tahun 2024	1.000.000.000,00
3	Bagian L/R Pemerintah Daerah Tahun 2024	2.509.988.600,68
4	Deviden yang Diterima Pemda s.d. Tahun 2024	1.477.969.441,71
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2024	**25.674.886.938,22**

Berdasarkan tabel diatas nilai saldo awal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dicatat sebesar Rp 23.642.867.779,25, penambahan setoran modal Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00, penambahan dari Bagian Laba(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.509.988.600,68 dikurangi Deviden yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp1.477.969.441,71 sehingga nilai penyertaan modal Pemda Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.674.886.938,22. Bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Tahun 2023 sebesar Rp23.642.867.779,25 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.032.019.158,97 atau 8,59%.

5.3.1.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh

PDAM Way Guruh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum di bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2008. Pada Tahun 2022 PDAM diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Perda Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PDAM Way Guruh memiliki nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar 100%. Berdasarkan saldo awal per 1 Januari 2024 nilai penyertaan modal Pemda sebesar Rp 4.701.283.216,00. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan penambahan penyertaan modal berupa aset sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/930/23-SK/2024 senilai Rp4.039.600.000,00 sedangkan PDAM Way Guruh pada Tahun 2024 mencatatkan Laba sebesar Rp269.392.310,00 sehingga nilai investasi pemda juga ikut bertambah. Berdasarkan metode ekuitas, maka nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.010.275.526,00 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 249
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur Tahun Ang[illegible] 2024

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2024	4.701.283.216,00
2	Penambahan/Pengurangan Penyertaan Modal Tahun 2024	4.039.600.000,00
3	Laba (Rugi) Tahun 2024	269.392.310,00
	Nilai Investasi per 31 Desember 2024	**9.010.275.526,00**

Dalam Penjelasan atas akun Neraca per 31 Desember 2024 terdapat penjelasan yang berkaitan dengan saldo kas sebesar Rp336.602.687,00 dan saldo Bank sebesar Rp328.466.930,00 yang

menjadi kas titipan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dikarenakan saat ini PDAM Way Guruh sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan penunjukan Perumdam Way Guruh sebagai penerima dana Participating Interest Tahun 2020.

5.3.1.3. ASET TETAP

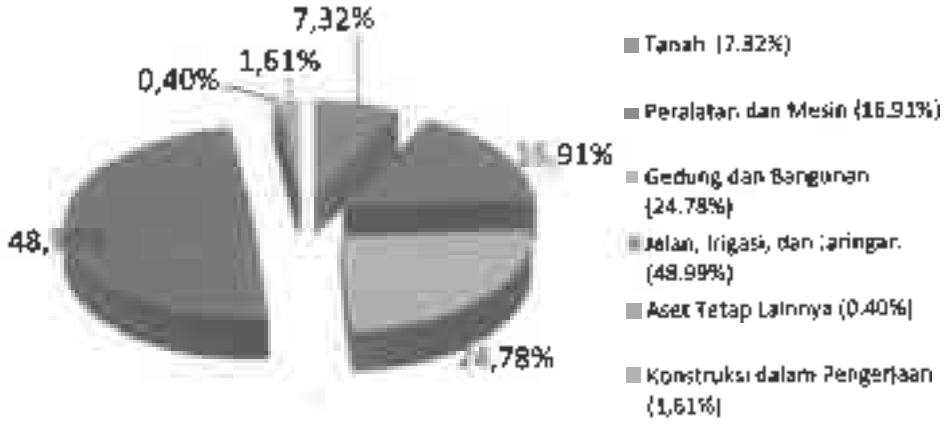
Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2023 *(audited)* adalah sebesar Rp3.810.785.534.998,90 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.088.455.343.114,77 sehingga Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 *(audited)* adalah sebesar Rp1.722.330.191.884,13. Mutasi Aset Tetap sepanjang Tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp987.300.570.906,36 dan penambahan beban penyusutan sebesar Rp572.837.785.362,08 dan mutasi kurang sebesar Rp1.097.934.502.683,28 dan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Awal sebesar Rp635.342.067.949,08, sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp3 699.951.603.221,97. dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.025.951.060.527,77 sehingga nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp1.674.200.542.694,20 (Rp3.699.951.603.221,97 - 2.025.951.060.527,77) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250
Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	01 Jan 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Tanah	415 563.267 475,93	67 527 015 500,00	212 493 402 966,92	270.269.598 009,01
Peralatan dan Mesin	620.044 340 043,35	56 518 800 585,00	50 750 068 577,41	625 812.132.055,94
Gedung dan Bangunan	823.523 025 900,59	122 959 144 141,64	29 753 702 161,37	916.728.467 880,86
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1 867 549 755 998,65	313 344.091.662,41	767 921 609 561,39	1 412 772 216.097,67
Aset Tetap Lainnya	25 846 514 575,29	24.871 582 136,00	36.098,920 161,00	14 619 376.590,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	58 447 735 106,19	1.973 938 841,31	916 299 259,22	59.505 374 688,28
Akumulasi Penyusutan	(2 088 455.343 114,77)	(572.837 785 362,08)	(635 342 067 949,08)	(2 025 951 060 527,77)
Jumlah	1 722.330 191.884,13	414 462 785 544,27	452 592 434 354,29	1 674.200.542 694,20

Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4. Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2024



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2023 (*audited*) telah mensertifikatkan tanah sebanyak 756 bidang. Selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menambah sertifikat sebanyak 61 bidang, sehingga jumlah tanah yang telah disertifikatkan sebanyak 817 bidang.

Pada tahun 2024, terjadi koreksi atas tanah dibawah jalan serta tanah dibawah irigasi. Koreksi tersebut terjadi atas dasar perubahan SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2013 dengan Nomor B.693/15.SK/2013 ke SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan Nomor B.261/15-SK/2023 dan penertiban catatan tanah dibawah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Untuk koreksi tanah dibawah jalan mengikuti koreksi ruas jalan yang semula berjumlah 257 bidang menjadi 203 bidang, sedangkan untuk koreksi tanah dibawah irigasi yang semula 232 bidang menjadi 53 bidang. Jumlah catatan asset tanah per 31 Desember 2024 setelah mengalami koreksi tersebut menjadi 1420 bidang tanah.

Adapun mutasi Aset Tetap selama tahun 2024 antara lain terjadi karena: (1) penambahan yang merupakan perolehan Aset Tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, utang retensi tahun 2024 atas aset yang telah selesai 100 persen dan utang jangka pendek lainnya tahun 2024 atas aset yang belum selesai 100 persen, reklasifikasi kelompok aset, koreksi pencatatan dan Hibah.mutasi antar OPD; dan (2) pengurangan atas Aset Tetap berupa penghapusan Aset Tetap yang telah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, hibah kepada pihak lain, reklasifikasi kelompok aset, dan koreksi pencatatan atas Aset Tetap sebelumnya, serta mutasi antar OPD. Rincian mutase Aset Tetap sepanjang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 251
Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal Aset	3.810.785.534.998,9
II	Penambahan Aset	987.366.370.906,36
	Perolehan Aset Berasal dari Belanja Modal	730.8888 371 557,70
	Utang Rekmed & Jamsos Pendek Lainnya	48.366.160.292,49
	Reklasifikasi antar KIB	30.151.736.739,95
	Reklasifikasi Konstruksi Aset Lainnya	
	ASP	29.449.296.006,24
	Hibah	36.595.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.836.237.788,46
	Pemutakhiran Data	82.926.186.263,57
	Koreksi	720,15
	Pendapatan Dimuka	11.087.536,79
III	Pengurangan	4.097.934.502.883,28
	antar KIB	30.151.736.739,95
	Utang Rekmed & Jk Pendek Lainnya th lalu yg dibayar	26.881.441.841,80
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	3.977.901.320.638,09
	ASP	29.449.296.006,24
	Hibah	
	Extracomptable	18.068.348.885,75
	Tidak ditemukan / Hilang	
	RB	
	Penghapusan	
	Double Catat	
	Reklasifikasi	739.464.996,75
	koreksi	483.905.813.574,70
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.700.151.603.221,97
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.700.151.603.221,97
V	Penyusutan	-2.025.951.060.527,77
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan	1.674.200.542.694,20

Pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Akrual terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi Aset Tetap, yaitu sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal,
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam opersi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6) Biaya perolehan atas Aset Tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;
7) Untuk biaya-biaya yang muncul setelah perolehan Aset Tetap, misalnya biaya pemeliharaan, terdapat batasan nilai kapitalisasi. Apabila pengeluaran dengan nilai minimum sebesar Rp30.000.000.00 per unit untuk bangunan gedung, nilai minimum sebesar Rp500.000,00 per unit dan berlaku mulai dari aset yang dibeli sebelum tahun 2016 untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, dan nilai minimum sebesar Rp200.000.000,00 dan berlaku sejak tahun 2016 berupa jalan/jaringan/jembatan, maka nilai tersebut akan dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap tersebut. Penambahan nilai Aset Tetap terjadi

apabila pengeluaran atas biaya-biaya tersebut bersifat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi atas aset tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya hanya pemeliharaan rutin dengan maksud untuk mempertahankan kondisi aset tersebut berfungsi normal, tidak dikapitalisasi dan diperlakukan hanya sebagai biaya pemeliharaan/biaya operasional saja, meskipun nilai pengeluarannya cukup signifikan.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah dicatat berdasarakan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi Antar KIB, dan untuk pencatatan aset tanah yang bernilai Rp1,00 maupun yang belum tercatat dilakukan penilaian ulang berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap tanah per 1 Januari 2024 sebesar Rp415.564.367.475,93 Dalam tahun 2024 terdapat mutasi penambahan Aset Tetap tanah sebesar Rp67.637.013.500,00 dan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp212.493.402.966,92 sehingga saldo akhir Aset Tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp270.707.978.009,01. Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Adapun penambahan dan pengurangan dimaksud disebabkan karena pencatatan baru dan pengurangan tanah dibawah jalan disebabkan perubahan jumlah ruang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan SK penetapan perubahan ruas jalan, nomor B.261/15-SK/2023 dan pengurungan tanah dibawah irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dimana terdapat kelebihan pengakuan ruas irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel 252
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	Tanah	415.564.367.475,93	67.637.013.500,00	212.493.402.966,92	270.707.978.009,01
	Jumlah	415.564.367.475,93	67.637.013.500,00	212.493.402.966,92	270.707.978.009,01

Mutasi tambah pada Aset Tetap tanah sebesar Rp67.637.013.500,00 terdiri dari:

a. Pencatatan baru sebesar Rp23.825.665.000,00;
b. Koreksi atas Pencatatan tanah karena perubahan SK Ruas Jalan sebesar Rp43.811.348.500,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap tanah sebesar Rp212.493.402.966,92 terdiri dari:

a. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp168.682.054.466,92;
b. Koreksi atas Pencatatan tanah karena perubahan SK Ruas Jalan sebesar Rp43.811.348.500,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima Pengajuan perpanjangan pinjam pakai aset berupa tanah milik EKS. Kanwil Perindustrian Pemerintah DATI

II Lampung Tengah di Desa Gedung Dalem Kecamatan Sukadana Lampung Timur **a.n. Muhtar bin Ibrahim**, asset dimaksud merupakan asset milik Pemerintah DATI II Lampung Tengah yang berlokasi wilayah kewenangan Kbaupaten Lampung Timur yaitu Desa Gedong Dalem Kecamatan Batanghari Nuban dengan luas kurang lebih 8.500 m2 (sebagaimana dokumen perolehan terlampir), sehubungan dengan pemekaran daerah otonomi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1999 yang lalu asset dimaksud hingga saat ini belum diserahkan dari Kabupaten Lampung Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengajukan permohonan pendapat hukum terkait kedudukan tanah dimaksud kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dan berdasarkan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Pengacara Negara disarankan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah untuk berkoordinasi dan membuat nota kesepahaman atau berita acara guna memastikan legalitas kepemilikan atas tanah dimaksud.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah. Alih Status Pengguna (ASP). Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal per 1 Januari 2024 Aset Tetap-peralatan mesin sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp620.044.340.042,35. Aset Tetap-peralatan mesin pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp56.518.800.585,00 dan mutasi kurang sebesar Rp50.750.968.571,41. Sehingga, saldo akhir Aset Tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp625.812.172.055,94 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 253
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	Alat-alat besar	12.752.267.717,00	398.201.933,00	188.569.437,00	12.961.900.213,00
2	Alat-alat angkutan	128.527.421.650,67	12.544.878.137,00	14.169.513.757,67	126.902.786.030,00
3	Alat- alat bengkel dan alat ukur	3.452.365.307,87	363.975.000,00	184.489.576,67	3.631.850.731,20
4	Alat- alat pertanian	7.022.813.612,00	137.000.000,00	104.968.000,00	7.055.045.612,00
5	Alat- alat kantor dan rumah tangga	148.933.932.819,32	11.591.689.957,00	6.765.848.468,64	153.574.773.308,68
6	Alat- alat studio dan alat- alat komunikasi	14.700.876.759,00	681.625.533,00	400.557.000,00	14.981.945.292,00
7	Alat- alat kedokteran & Kesehatan	121.176.336.112,35	8.141.542.640,00	11.955.575.959,72	117.364.502.792,63
8	Alat- alat laboratorium	60.280.296.761,95	1.606.856.860,00	1.588.332.159,18	60.298.821.000,77
9	Alat Persenjataan	302.554.000,00	46.000.000,00	14.300.000,00	335.854.000,00
10	Komputer	111.896.520.329,21	13.173.345.416,00	3.615.249.248,33	121.454.616.496,88
11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	31.116.000,00	-	-	31.116.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	1.969.139.790,00	327.298.600,00	9.895.000,00	2.287.539.390,00
16	Alat Peraga	-	-	-	-
17	Peralatan Proses/ Produksi	14.000.000,00	16.925.000,00	-	30.925.000,00
18	Rambu-Rambu	4.986.328.879,00	-	92.400.000,00	4.893.928.879,00
19	Peralatan Olahraga	3.468.361.103,78	61.722.000,00	13.830.000,00	3.516.657.103,78
20	Peralatan dan Mesin DOS	-	8.373.211.150,00	8.373.211.150,00	-
21	Peralatan dan Mesin BOSP	-	15.246.000,00	15.246.000,00	-
22	Peralatan dan Mesin BLUD	-	3.238.782.815,00	3.238.782.815,00	-
	Jumlah	620.044.348.042,35	56.518.800.585,00	50.750.968.571,41	625.812.172.055,94

Mutasi tambah Aset Tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp56.518.800.585,00 adalah sebagai berikut:

a) Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2024, yang memenuhi kriteria berikut: kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.779,530.896,00 termasuk belanja modal atas Dana BOS, belanja modal pada BLUD RSUD Sukadana dan BLUD Puskesmas serta belanja modal dana JKN pada Puskesmas-puskesmas;

b) Reklas antar KIB sebesar Rp13.232.957.592,00;
c) ASP (Alih Status Penggunaan) sebesar Rp8.293.331.400,00;
d) Hibah Masuk sebesar Rp36.395.000,00;
e) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp125.311.141.00
f) Koreksi sebesar Rp51.274.556,00;

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap - peralatan dan mesin dalam tahun 2024 sebesar Rp50.750.968.571,41 terdiri dari:

a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp13.215.055.992,00;
b) Reklasifikasi ke/dari Aset Lainnya Rp25.645.679.394,41;
c) Alih status penggunaan (Asp) Rp8.293.331.400,00;
d) Aset extracomptable Rp3.453.911.785,00;
e) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp133.520.000,00;
f) Koreksi sebesar Rp9.470.000,00:

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa. Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat dan tidak diketemukan dokumen perolehan awal maka dilakukan penilaian berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap gedung dan bangunan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp823.533.023.900,59 Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp122.955.144.141,64 dan mutasi kurang sebesar Rp29.753.702.161,33 Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp916.734.465.880,89 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 254
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	BANGUNAN GEDUNG	805.855.957.231,80	122.144.721.032,43	29.573.177.161,33	898.427.501.082,95
2	MONUMEN	5.000.569.545,24			5.000.569.545,24
3	BANGUNAN MENARA	134.671.800,00			134.671.800,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	12.741.724.945,55	610.108.109,21		13.351.833.052,76
4	Gedung dan Bangunan-RII		185.325.000,00	-185.325.000,00	
	Jumlah	823.533.023.900,59	122.955.144.141,64	29.753.702.161,33	916.734.465.880,89

Uraian mutasi tambah Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp122.955.144.141,64 adalah sebagai berikut.

a) Belanja modal konstruksi gedung pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2024 sebesar Rp90.778.537.780,46;
b) Utang retensi dan jangka pendek lainnya sebesar Rp5.624.788.927,87;
c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.228.615.436,33;
d) Alih Status Penggunaan sebesar Rp21.155.874.606,24;
e) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp1.415.352.095,06;
f) Koreksi sebesar Rp2.740.887.758,89;
g) Pendapatan Denda sebesar Rp11.087.536,79;

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.753.702.161,33 adalah sebagai berikut:

a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.297.098.465,73;
b) Utang retensi tahun lalu yang dibayarkan sebesar Rp4.872.807.936,71;

c) Alih status penggunaan sebesar Rp21.155 874.606,24;
d) Aset Ekstrakompatable sebesar Rp80.325.000,00;
e) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp306.291.596,66;
f) Koreksi sebesar Rp41.304.556,00:

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan), baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Pada tahun 2024, terdapat perubahan jumlah ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Berdasarkan SK lama nomor B.693/15-SK/2013 terdapat 257 ruas jalan. Sedangkan pada SK baru nomor B.261/15-SK/2023, menjadi 203 ruas jalan dengan rincian 133 ruas yang tidak terjadi perubahan. 55ruas terdapat penyesuaian, dan terdapat penambahan 15 ruas baru.

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saldo awal Aset Tetap-jalan, irigasi, dan jaringan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.867.349.753.998,65. Pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp713 344.091.662,41 dan mutasi kurang sebesar Rp767.921.609.563,39; Sehingga saldo akhir Aset Tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1 812.772.236.097,67 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 255
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1.	Jalan dan Jembatan	1.544.599.641.467,47	704.850.671.646,26	740.285.222.218,34	1.509.160.089.895,39
2.	Bangunan air / Irigasi	220.372.228.857,24	4.185 636.556,58	25.007.399.480,05	199.550.485 933,87
3.	Prasiasi	38.479.362.150,62	1.872 821.741,57	194.045.147,00	40.158.338 745,19
4.	Jaringan	63.903.321.523,26	2.394 991.218,00	2.394.991.218,00	63.903.321.523,26
4	Jalan Jaringan, dan Iri	0,00	39.950.500,00	39.950.500,00	0,00
	Jumlah	**1.867.349.753.998,65**	**713.344.091.662,41**	**767.921.609.563,39**	**1.812.772.236.097,67**

Uraian mutasi tambah Aset Tetap pada kelompok jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp713.344.091.662,41 terdiri atas:

a) Belanja modal TA. 2024 sebesar Rp182.535.782.693,24;
b) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp39.341.591.882,93;
c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.153.142.364.00;
d) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp295.574.552,40;
e) Pencatatan Baru sebesar Rp59.100.521.264,57;
f) Koreksi sebesar Rp429.917.478.905.27;

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp767.921.609.563,39 terdiri dari:

a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp558.921.035,00;
b) Utang retensi yang dibayarkan tahun lalu sebesar Rp22.008.593.905,09;
c) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp313.613.996.776,76;
d) Aset Ekstracomptable sebesar Rp3.194.085.962,75;
e) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp299.653 400,10;
f) Koreksi sebesar Rp428.246.358.483,79;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, dan Reklasifikasi antar KIB. Saldo awal Aset Tetap lainnya sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.846.314.575,19. Pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp24.871.582.176,00 dan mutasi kurang sebesar Rp36.098.520.161,00; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp14.619.376.590,19 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 256
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	18.775.283.216,19	12.216.479.138,00	25.882.008.173,00	6.454.745.233,19
2	BARANG BERCORAK KESE	2.647.256.500,00	490.250.000,00	51.650.000,00	3.086.356.500,00
3	HEWAN	420.050.300,00	0,00	0,00	420.050.300,00
4	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TANAMAN	4.568.274.857,00	0,00	0,00	4.568.274.857,00
6	BARANG KOLEKSI NON BU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASET TETAP DALAM RENO	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
8	ASET TAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	12.164.861.988,00	12.164.861.988,00	0,00
8	Modal Aset Tetap Lainnya BO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	25.846.314.575,19	24.871.582.176,00	36.098.520.161,00	14.619.376.590,19

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp24.871.582.176,00 terdiri:
a) Belanja modal TA 2024 sebesar Rp12.706.720.188,00;
b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.164.861.988,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp36.098.520.161,00 terdiri atas:
a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.164.861.988,00,
b) Ekstrakompetabel sebesar Rp12.140.026.138,00;
c) Koreksi sebesar Rp11.793.632.035,00;

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan aset yang kondisi fisiknya belum selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Jangka Pendek, dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2024 sebesar Rp58.447.735.006,19. Dalam tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.973.938.841,31 dan mutasi kurang sebesar Rp916.299.259,22. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp59.505.374.588,28.

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan dalam tahun anggaran 2024 pada tabel berikut:

Tabel 257
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

No	Uraian	01/01/2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31/12/2024 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.447.735.006,19	1.973.938.841,31	916.299.259,22	59.505.374.588,28
	Jumlah	**58.447.735.006,19**	**1.973.938.841,31**	**916.299.259,22**	**59.505.374.588,28**

Mutasi tambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.973.938.841,31, dengan rincian sebagai berikut :

a) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp601.779.841,69;
b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.372.159.159,62.

Mutasi kurang konstruksi dalam pengerjaan dalam Tahun 2024 sebesar Rp916.299.259,22. terdiri dari:

a) Reklas antar KIB sebesar Rp915.799.259,22;
b) Koreksi sebesar Rp500.000,00.

Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 14.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan menggunakan aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11.R7, dan telah dilakukan *update* terhadap aplikasi SIMDA BMD tersebut serta dilakukannya penyesuaian masa manfaat aset dan batasan parameter terhadap nilai kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 sehingga berdampak pada perhitungan penyusutan Aset Tetap secara keseluruhan.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat didalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Aset Tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap Aset Tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan Aset Tetap yang bersangkutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau kerusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun perubahan masa manfaat dapat dilakukan apabila terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat atau terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perbaikan sebagaimana dimaksud dikarenakan renovasi berupa penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan batasan nilai kapitalisasi terdiri dari:

a) >30% s.d 45% dari Nilai Perolehan Awal
b) >45% s.d 75% dari Nilai Perolehan Awal
c) >75 dari Nilai Perolehan Awal

Berdasarkan batasan nilai kapitalisasi diatas akan memperoleh penambahan masa manfaat umur ekonomis asset dimaksud, dimana besaran masa manfaatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Daftar masa manfaat terdapat pada lampiran 15.

Dari saldo awal akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 yang disajikan sebesar Rp2.088.455.343.114,77 dan mutasi tambah sebesar Rp572.837.785.362,08 dan mutasi kurang sebesar Rp635.342.067.949,08 maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.025.951.060.527,77.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 terdapat pada lampiran 16.

Total akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp572.837.785.362,08 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional tahun 2024 sebesar Rp572.837.785.362,08. Sedangkan mutasi yang mengurangi nilai akumulasi penyusutan dalam tahun 2024 sebesar Rp635.342.067.949,08 adalah sebagai berikut :

a. Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp25.170.749.409,69;
b. Koreksi akumulasi penyusutan atas kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam tahun 2024 sebesar Rp767.043.756,00.
c. Koreksi akumulasi penyusutan atas koreksi perubahan pencatatan aset karena perubahan ruas jalan pada Aset Tetap Jalan, irigasi, dan jaringan dalam tahun 2024 sebesar Rp372.243.567.243,33;
d. Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam tahun 2024 sebesar Rp238.694.795.052,07;

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo awal Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp185.031.267.941,19. Dalam tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp242.745.881.876,55; dan mutasi kurang sebesar Rp54.686.637.678,00 sehingga saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp373.090.512.139,74 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 258
Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	1 Jan 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2024(Rp)
1	Tagihan TP/TGR	87.012.500,00		9.920.000,00	77.092.500,00
2	Aset Lain-lain	180.487.654.371,38	507.979.530.638,09	31.887.903.172,23	656.579.281.837,24
3	Akumulasi Penyusutan	(30.403.624.930,19)	(266.410.961.761,54)	(12.071.411.494,23)	(284.743.175.197,50)
4	Treasury Deposit Facility (TDF)	34.860.226.000,00	1.177.313.000,00	34.860.226.000,00	1.177.313.000,00
	Jumlah	**185.031.267.941,19**	**242.745.881.876,55**	**54.686.637.678,00**	**373.090.512.139,74**

Uraian mutasi tambah Aset lainya pada Tahun 2024 sebesar Rp242.745 881.876,55 terdiri atas:

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp507.979.530.638,09;
b) Koreksi karena Aset Ekstrakomptable sebesar Rp37.800.000,00:
c) Akumulasi penyusutan Rp266.410.961.761,54;
d) Penerimaan pokok TDF sebesar Rp1.177.313.000,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2024 sebesar Rp54.686.637.678,00 terdiri dari:

a) Penerimaan Tagihan TPTGR sebesar Rp9.920.000,00;
b) Penghapusan sebesar Rp31,887,903,172,23:
c) Akumulasi penyusutan Rp12.071.411.494,23;
d) Penerimaan pokok TDF sebesar Rp34.860.226.000,00

5.3.1.4.1. Tagihan TP/TGR

Per 1 Januari 2024 saldo tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) sebesar Rp 87.012.500,00. Terdapat mutasi kurang saldo tuntutan ganti rugi atas pembayaran TGR sebesar Rp1 820.000,00 serta koreksi saldo atas penerimaan pembayaran TGR yang belum dicatat Tahun 2023 sebesar Rp8.100.000,00, sehingga saldo akhir tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.092.500,00. Adapun Rincian pembayaran TPTGR Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 259
Rincian TPTGR berdasarkan Jenis dan Umur Piutang Per 31 Desember 2024

No	Jenis Tagihan	Rincian Aset	Saldo awal TP/TGR 2024	Realisasi Tahun 2024	Koreksi catat	TP/TGR per 31 Des 2024	Tanggal SKTJM	Jangka Waktu
1	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5697 NZ	8.562.500,00			8.562.500,00	20/09/2017	24 Bulan
2	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6095 NZ	8.600.000,00		8.100.000,00	500.000,00	26/01/2018	24 Bulan

3	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6209 NZ	16.700.000,00			16.700.000,00	13/09/2019	24 Bulan
4	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5998 NZ	9.200.000,00	300.000,00		8.900.000,00	13/09/2019	24 Bulan
5	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5319 NZ	8.100.000,00	810.000,00		7.290.000,00	18/09/2019	24 Bulan
6	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5381 NZ	7.400.000,00			7.400.000,00	18/09/2019	24 Bulan
7	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5386 NZ	7.400.000,00	710.000,00		6.690.000,00	12/09/2019	24 Bulan
12	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5498 NZ	8.000.000,00			8.000.000,00	12/09/2018	12 Bulan
13	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5523 NZ	7.800.000,00			7.800.000,00	12/09/2021	12 Bulan
14	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5489 NZ	5.250.000,00			5.250.000,00	18/09/2019	24 Bulan
	Jumlah		87.012.500,00	1.820.000,00	(8,100.000,00)	77.092.500,00		

Terhadap sisa Tagihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.092.500,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih mengupayakan proses penyelesaian secara damai.

5.3.1.4.1. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 1 Januari 2024 sebesar Rp180.487.654.371,38. Mutasi tambah dalam tahun 2024 sebesar Rp507.979.530.638,09; dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp31,887.903,172,23; sehingga diperoleh nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp656.579.281.837,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 260
Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

No	Uraian	01 Januari 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang/Hilang	43.495.196.173,64	25.685.479.394,41	31.887.903.172,23	37.290.772.395,82
2.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	27.333.719.347,74	482.296.051.243,68	0	509.629.770.591,42
3	Aset Lain-Lain Lainnya	12.400.000,00	0	0	12.400.000,00
4	Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca	109.472.359.850,00	0	0	109.472.359.850,00
5	Kas Tekor pada Bendahara OPD	175.979.000,00	0	0	175.979.000,00
6	Nilai Aset Lain-lain sebelum penyusutan	180.489.654.371,28	507.979.530.638,09	31.887.903.172,23	656.579.281.837,24
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(30.405.624.930,19)	(4266.410.961.761,54)	(12.071.411.494,23)	(284.742.175.197,50)
	Nilai Aset Lain-lain setelah Penyusutan	150,084.029.441,19	241.568.569.576,55	19,816,491,678.00	371.836.106.639,74

Uraian mutasi tambah Aset lainya pada Tahun 2024 sebesar Rp507.979.530.638,09 terdiri atas:

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp507.941.730.638,09;
b) Koreksi karena kapitalisasi sebesar Rp37.800.000,00

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2024 sebesar Rp31,887,903,172,23 terdiri dari:

a) Penghapusan sebesar Rp31,887.903,172,23.

Rincian Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabuputen Lampung Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp656.579.281.837,24 terdiri atas:

a) Aset rusak berat/Usang/Hilang/Lainnya merupakan aset yang tidak memenuhi klasifikasi aset tetap karena kondisi rusak berat, usang, aset hilang, dan aset kondisi lainnya dengan nilai sebesar Rp37.303.172.395,82;
b) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang pengoperasian/pemakaiannya dimanfaatkan selain oleh entitas pelaporan, misalnya instansi pemerintah lainnya. Nilai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan aset yang tercatat pada OPD, namun belum BAST hibah atau sudah diserahkan namun belum ada SK Penghapusan Aset s.d per 31 Desember 2024 nilai sebesar Rp509.629.770.591,42;
c) Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana merupakan saldo kas tak tertagih karena PT BPR Tripanca telah dicabut izin usahanya berdasarkan SK Gubenur BI Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009, tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tripanca Setia Dana, sehingga hak dan kewajiban PT BPR Tripanca Setia Dana dibawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Lampung Timur telah menerima pencairan dana Jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2014 ke kas daerah, berdasarkan Surat Bupati Lampung Timur Nomor xxx perihal xxx serta Surat

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-247/DKRB/XII/2014 perihal Pengakhiran penundaan pembayaran simpanan nasabah PT BPR Tripanca Setia Dana (Terlikuidasi) atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur. Saldo Kas Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.472.359.850,00. Lebih lanjut mengenai kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan putusan Makamah Agung RI Nomor: 510K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama terpidana SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp106.861.614.800,00 (seratus enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
2) Berdasarkan surat klarifikasi Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tanggal 4 September Tahun 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemda Lampung Timur disampaikan bahwa Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah membayar uang pengganti pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung;
3) Mengingat dana yang menjadi obyek perkara tersebut merupakan dana APBD Kabupaten Lampung Timur dan pembayaran uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka Bupati Lampung Timur mengirimkan surat nomor:900/585/03-UK/2021 tanggal 15 September 2021 kepada Menteri Keuangan agar dana yang telah disetorkan Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY melalui Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dapat dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

d) Kas Tekor pada Bendahara OPD Merupakan saldo kas tekor yang belum ditindaklanjuti dalam majelis TPKD berupa penetapan pembebanan sebesar Rp173.979.000.00. Yang terdiri dari ketekoran saldo kas pada Disdikbud sebesar Rp67.979.000,00, merupakan penerimaan pendapatan atas pemakaian Retribusi *Islamic Center* oleh pihak lain yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan ketekoran saldo kas pada Kesbangpol sebesar Rp106.000.000,00 merupakan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeuaran Kesbangpol karena yang bersangkutan meninggal dunia.

e) Dari saldo awal akumulasi penyusutan Aset Lainnya 1 Januari 2023 yang disajikan sebesar Rp(30.403.624.930,19)., dan mutasi tambah sebesar Rp(266.410.961.761,54) merupakan jumlah akumulasi penyusutan atas Rubah Kondisi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat, dan mutasi kurang sebesar Rp(12.071.411.494,23) merupakan jumlah akumulasi penyusutan atas penghapusan Aset Lainnya; maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp(284.743.175.197,50).

f) Penghapusan sebesar Rp31.887.903.172,23 berupa Barang Rusak Berat, sesuai dengan Surat Keputusan Setdakab Lampung Timur Nomor : 032/132/23-SK/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp4.640.176.735,75; Nomor :032/177/23-SK/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp12.538.847.820,00: Nomor: B.188/23-SK/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.177.037.764,00; Nomor: 032/1158/23-SK/2024 tanggal 12 Juli

2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor dari Daftar Pengguna Barang Kec.Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp32.243.000,00; Nomor: B.389/23-SK/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp4.111.928.855,80; Nomor: 032/2163/23-SK/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor dari Daftar Pengguna Barang Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp8.700.000,00; Nomor : 032/2169/23-SK/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp5.102.530 264,01; Nomor: B.404/23-SK/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Motor dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp3.276.438.732.67.

5.3.1.4.3. Dana TransferTreasury Deposit Facility (TDF)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima Pendapatan Transfer DBH Non Tunai berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2024 sebesar Rp1.177.313.000,00, sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp34.860.226.000,00. Dana tersebut merupakan Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 261

Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.166.727.000,00	18.997.227.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	1.134.051.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	305.269.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	2.900,00	11.613.808.000,00
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	7.838.000,00	2.706.190.000,00
6	DBH SDA Mineral Batubara-Landrent	0,00	33.209.000,00
7	DDH SDA Kehutanan- PSDH	2.746.000,00	40.478.000,00
	Jumlah	1.177.313.000,00	34.860.226.000,00

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
131.747.225.486,92	[illegible]

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terdiri dari Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.747.225.486,92. Kewajiban tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp727.006.220,07 atau 0,55% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.020.219.266,85.

Rincian Kewajiban terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 262
Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.945.020,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	546.210.693,58	518.825.873,25
3	Utang Belanja	131.068.069.773,34	130.501.393.393,60
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**131.747.225.486,92**	**131.020.219.266,85**

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo 12 bulan yang terdiri dari.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak-pajak pemerintah pusat, setoran taspen, bapetarum dan BPJS Kesehatan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp132.945.020,00 terdiri dari utang PFK Dana BOS sebesar Rp20.486.016,00 dan utang PFK Dana BLUD sebesar Rp112.459.004,00.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp546.210.693,58. Saldo pendapatan yang diterima dimuka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.384.820,33 atau 5,28% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp518.825.873,25. Pendapatan yang diterima dimuka terdiri dari Pajak Reklame Billboard Pajak Reklame Kain dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 263
Rincian Pendapatan yang diterima dimuka Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron	539.893.576,33	510.791.835,42
2	Pajak Reklame Kain	6.317.117,25	8.034.037,83
	Jumlah	**546.210.693,58**	**518.825.873,25**

Pendapatan Diterima Dimuka dan Rincian Pendapatan Dimuka Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 17.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan akun yang digunakan untuk mencatat jasa yang telah dimanfaatkan tetapi belum dilakukan pembayaran terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja, utang belanja hibah, utang belanja modal, utang bagi hasil dan utang bantuan keuangan. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.068.069.773,34. Saldo utang belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp566.676.379,74 atau 0,43% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.501.393.393,60. Rincian Utang Belanja terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 264

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	5.820.165.538,08	3.812.075.310,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.624.941.940,12	47.861.188.608,90
3	Utang Belanja Hibah	21.983.034.487,91	17.500.874.318,74
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.229.671.239,17	4.759.385.251,18
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.436.770.853,95	21.431.212.883,58
6	Utang Belanja Bagi Hasil	13.332.458.639,13	11.007.196.676,20
7	Utang Belanja Bantuan Keuangan	30.631.449.975,00	24.126.860.525,00
	Jumlah	**131.068.069.773,34**	**130.501.393.393,60**

Dari total utang belanja tersebut telah terealisasi utang Dinas PUPR pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp50.879.080.768,84
- Utang Konsultan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.445.283.333,36
- Utang Retensi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp142.732.184,05
- Utang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.704.864,13
- Utang Konsultan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp19.750.000,00

Selain itu terdapat realisasi utang retensi Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.267.593,84.

Selanjutnya pembayaran utang akan dilakukan melalui tahapan Pergeseran/Perubahan APBD dan dianggarkan pada Program/Kegiatan/Subkegiatan yang sama.

Utang Belanja Pegawai sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 265

Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.793.734.264,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.413.971.600,00	1.018.341.046,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	3.406.193.938,08	0,00
	Jumlah	**5.820.165.538,08**	**3.812.075.310,00**

Utang Belanja Barang dan Jasa sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 266

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Jasa	6.118.062.487,00	35.947.379.920,50
2	Utang Belanja Pemeliharaan	9.476.506,00	329.219.275,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.497.402.947,12	11.581.589.313,40
	Jumlah	**14.624.941.940,12**	**47.961.188.608,90**

Catatan:
Terdapat Utang KK KTP yang dicatat pada Dinas Kesehatan kepada RSUD Sukadana sebesar Rp4.571.047.123,00 dan dicatat juga sebagai piutang dengan nilai yang sama pada RSUD Sukadana. Selain itu RSUD juga telah mencatat utang jasa pelayanan atas bagian piutang tersebut sebesar Rp2.222.601.231,00.

Utang Belanja Hibah sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 267

Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.632.882.224,66	4.835.785.664,89
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.350.948.353,25	12.667.088.653,85
	Jumlah	**21.983.031.587,91**	**17.500.874.318,74**

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 268

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.627.506.018,37	2.895.581.870,01
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	14.016.458,80
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	587.124.619,10	189.121.491,07
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.447.983.470,90	1.660.665.451,30
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Taman	577.057.130,80	0,00
	Jumlah	**6.239.671.239,17**	**4.759.385.271,18**

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Organisasi sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 269

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	39.012.514.348,40	21.184.517.091,39
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air	292.370.812,55	215.988.932,20

3	Utang Belanja Modal Jaringan	31.685.695,00	28.706.819,99
	Jumlah	39.436.770.853,93	[illegible]

Utang Belanja Bagi Hasil sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 270
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.821.229.205,83	10.309.308.089,70
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	510.809.433,30	698.488.586,50
	Jumlah	12.332.038.639,13	11.007.796.676,20

Utang Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 271
Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	24.129.860.325,00
2	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	30.631.449.975,00	0,00
	Jumlah	30.631.449.975,00	24.129.860.325,00

Daftar utang belanja dan Daftar Utang Pihak Ketiga Perkreditur Per 31 Desember 2024 terdapat pada lampiran 18.

5.3.3. Ekuitas

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10

Ekuitas adalah nilai seluruh jumlah asset daerah yang sudah dikurangi kewajiban. Dengan kata lain ekuitas merupakan selisih dari total aset dan kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.299.095.443.543,89. Saldo ekuitas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp192.177.496.401,79 atau 9,12% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.106.917.947.142,10.

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Operasional Tahun 2024 ditutup dengan jumlah Pendapatan LO sebesar Rp2.034.386.440.287,17 Beban-LO sebesar Rp2.279.461.687.897,90, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 59.606.760,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0.00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2. Pendapatan Operasional-LO

Pendapatan- LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi. Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
2.034.386.440.287,17	2.019.601.191.230,45

Pendapatan Operasional-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.034.386.440.287,17 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.019.601.191.230,45. Pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.785.249.056,72 atau sebesar 0,73% dari Tahun 2023. Rincian Pendapatan Operasional-LO terdapat pada tabel berikut:

Tabel 272
Rincian Pendapatan Operasional-LO Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember [illegible]

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	202 [illegible] 833,61	202.558.193.645,98	207.567.574.087,17
2	Pendapatan Transfer-LO	1.763.715.900.827,00	1.822.307.532.195,00	2.129.471.992.656,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	53 [illegible]	9.520.714.446,00	72.422.674,76
	Jumlah	[illegible]	2.034.386.440.287,17	2.337.112.000.417,93

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan LRA 2024 dikarenakan adanya piutang, penghapusan piutang, Pendapatan Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo, Tuntutan Ganti Rugi, koreksi ekuitas dan Koreksi Catat Piutang yang mengurangi nilai Pendapatan Daerah-LO serta Dana Desa.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
202.558.193.645,98	202.773.279.833,61

Jumlah Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2024 sebesar Rp202.558.193.645,98 dan Tahun 2023 sebesar Rp202.773.279.833,61. Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp215.086.187,63 atau sebesar 0,11% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 273

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	85.649.132.647,65	83.925.230.248,92	83.550.226.924,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	4.544.072.864,00	3.749.508.473,00	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.139.343.910,19	4.506.324.834,56	3.204.913.365,59
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	105.440.830.811,77	110.377.130.089,50	117.062.925.324,58
	Jumlah	202.773.279.833,61	202.558.193.645,98	207.567.574.087,17

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2024 sebesar Rp83.925.230.248,92 dan Tahun 2023 sebesar Rp85.649.132.647,65 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp Rp1.723.902.398,73 atau sebesar 2,01% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 274
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pajak Hotel – LO	183.025.104,90	191.422.445,00	199.044.723,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya – LO	213.603.712,00	291.364.804,00	296.541.438,00
3	Pajak Jasa Boga /Katering dan sejenisnya– LO	1.992.245.100,00	2.208.641.442,00	2.150.047.221,00
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana – LO	91.115.800,00	103.409.500,00	111.409.500,00
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LO	826.459.096,33	1.046.312.318,01	1.037.573.178,00
6	Pajak Reklame Kain LO	424.875.331,42	280.596.336,91	276.787.282,00
7	Pajak Penerangan Jalan Dibasilkan Sendiri – LO	48.056.493.860,00	44.518.143.215,00	44.559.873.028,00
8	Pajak Parkir	0,00	440.420.000,00	265.120.000,00
9	Pajak Air Tanah – LO	724.726.815,00	1.001.129.672,00	932.034.676,00
10	Pajak Batu Kapur-LO	104.150.000,00	0,00	0,00
11	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	13.962.500,00	139.817.500,00	139.817.500,00
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LO	28.905.165.578,00	28.185.038.228,00	27.970.794.579,00
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) LO	4.025.310.450,00	5.511.184.789,00	5.511.184.789,00
	Jumlah	85.649.132.647,65	83.925.230.248,92	83.550.226.924,00

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Hotel-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp7.622.288,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal pendapatan TA 2024 sebesar Rp51.570.910,60 dan penambahan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.948.622,60;
2) Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp5.176.634,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp189.572.333,90 dan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp184.395.699,90;
3) Pendapatan Pajak Jasa Boga /Katering dan sejenisnya- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp58.594.220,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp156.022.400,00 dan penambahan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.616.620,00;
4) Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana –LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
5) Pendapatan Reklame papan/Billboard/Vidiotron/Megatron- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.439.140,01 yang berasal dari pengurangan berupa piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp249.248.967,00 dan pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp539.893.576,33 serta penambahan dari piutang akhir Tahun 2024 sebesar Rp286.789.847,92 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo per 31 desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp510.791.835,42;
6) Pendapatan Reklame Kain - LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.809 054,91 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.454.150,00 dan pendapatan diterima dimuka yang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.317.117,25 serta penambahan piutang akhir Tahun 2024 sebesar Rp19.546.284,33 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo Tahun 2024 sebesar Rp8.034.037,83;
7) Pendapatan Penerangan Jalan Dihasilkan sendiri- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.729.813,00 yang berasal dari pengurangan pendapatan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.767.760.933,00 dan penambahan atas piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.726.031.120,00;
8) Pendapatan Pajak Parkir- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp75.300.000,00 yang berasal dari penambahan atas piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.300.000,00;
9) Pendapatan Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp69.094.996,00 yang berasal dari pengurangan pendapatan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.616.228,00 dan penambahan berupa piutang akhir pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp79.711.224,00;
10) Pendapatan Pajak Batu Kapur –LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
11) Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil –LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
12) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp214.294.649,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.742.547.825,00 serta penambahan atas piutang akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.956.842.474,00;
13) Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.544.072.864,00, Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp794.564.391,00 atau sebesar 17,49% dari Pendapatan Retribusi–LO Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 275
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis - LO	1.612.000,00	6.943.000,00	6.943.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	765.948.000,00	796.091.500,00	796.091.500,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	102.200.000,00	147.450.000,00	147.450.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar -Kios - LO	1.150.661.000,00	1.283.394.500,00	1.283.394.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	75.244.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.256.195.500,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	24.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
8	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	51.898.802,00	39.500.000,00	39.500.000,00
9	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	3.750.000,00	90.713.064,00	90.713.064,00
10	Retribusi Pemakaian Kendaraan Dinas-LO	9.360.000,00	7.072.800,00	7.072.800,00
11	Penyediaan Fasilitas Pasar Pemukiman yang dikontrakan - LO	654.304.000,00	598.687.000,00	598.687.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	752.350.001,00	0,00	0,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
14	Pemberian Izin Untuk Memfungsikan Suatu Bangunan - LO	246.549.562,00	0,00	0,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0,00	735.656.609,00	735.656.609,00
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.544.072.864,00**	**3.749.508.473,00**	**3.749.508.473,00**

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Ditempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
3) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
4) Retribusi Kios-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
5) Retribusi Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024,

7) Restribusi Penyewaan Tanah-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
8) Restribusi Penyewaan Bangunan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
9) Retribusi Pelayanan Ruangan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
10) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
11) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
12) Retribusi Pelayanan Khusus Parkir-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
13) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024
14) Retribusi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024.
15) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Tahun 2024 sebesar Rp4.506.324.834,56 dan Tahun 2023 sebesar Rp7.139.243.910,19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.632.919.075,63 atau 36,88% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Bagian Laba yang diberikan kepada Pemerintah daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	7.139.243.910,19	4.506.324.834,56	3.204.913.365,59
	Jumlah	**7.139.243.910,19**	**4.506.324.834,56**	**3.204.913.365,59**

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPRS Kabupaten Lampung Timur-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.301.411.468,97 yang berasal dari penambahan dari kenaikan investasi Tahun 2023 sebesar Rp1.301.411.468,97.

5.4.1.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp110.377.130.089,50 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp105.440.830.411,77 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.936.299.677,73 atau 4.68% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 287
Rincian Beban -LO Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Operasi	1.498.601.497.906,43	1.564.907.611.094,69	1.582.938.466.132,90
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.639.533.393,16	572.837.785.262,08	
3	Beban Transfer	131.340.545.960,00	126.803.233.519,13	400.538.478.705,00
4	Beban Tidak Terduga	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00
	Jumlah			

5.4.2.1. BEBAN OPERASI-LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat fungsinya dengan baik. Realisasi Beban Operasi -LO Tahun 2024 sebesar Rp1.564.907.611.094,69 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.498.601.497.906,43 mengalami kenaikan sebesar Rp66.306.113.188,26 atau 4,42% - Realisasi Beban Operasi Tahun 2024 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 288
Rincian Beban Operasi-LO Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Pegawai	823.167.847.861,67	879.683.811.468,59	877.712.801.240,51
2	Beban Barang dan Jasa	511.347.340.100,31	448.846.371.658,78	461.577.506.441,49
3	Beban Hibah	156.797.250.342,83	232.562.174.822,16	241.174.866.230,90
4	Beban Bantuan Sosial	3.354.771.769,00	2.442.292.220,00	2.442.292.220,00
5	Beban Penyisihan Piutang	3.934.287.832,62	1.372.960.925,16	0,00
	Jumlah	1.498.601.497.906,43	1.564.907.611.094,69	1.582.938.466.132,90

5.4.2.1.1. BEBAN PEGAWAI-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi Beban Pegawai -LO Tahun 2024 sebesar Rp879.683.811.468,59 dan Tahun 2023 sebesar Rp 823.167.847.861,67 mengalami kenaikan sebesar Rp56.515.963.606,92 atau 6,87% Rincian Beban Pegawai-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 289
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan	558.823.574.016,67	575.563.290.522,00	576.225.104.786,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	70.286.299.808,00	80.264.934.093,00	80.264.934.093,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	162.960.027.357,00	168.298.953.976,00	162.853.545.422,00

4	Beban Gaji dan Tunjangan (SPR)	27.867.402.e38,00	28.025.096.410,00	28.025.096.410,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH atau WKDH	175.684.002,00	174.819.199,00	174.819.199,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	816.000.000,00	816.000.000,00
7	Beban Pegawai (L -3)	2.264.760.070,00	30.705.597.258,39	27.390.903.340,51
	Jumlah	823,167,847,861.67	879.683.811.468,39	877.745.801.240,51

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp2.861.8'.4.264,00 yang merupakan pengurang dari utang awal sebesar Rp2.861.814.264,00;
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN terdapat selisih dengan yang di sajikan dalam LRA sebesar Rp2.413 971.600,00 yang merupakan penambahan dari pengakuan utang akhir sebesar Rp2.413.971 600,00
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya ASN berbeda dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.018.341.046,00 hal ini disebabkan karena adanya pengurangan Utang awal di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan pada penyajian Beban Pegawai sebagai berikut:
   (1) Beban Insentif Pemungutan Pajak Hotel-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.331.250,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (2) Beban Insentif Pemungutan Pajak Restoran-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.268 750,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (3) Beban Insentif Pemungutan Pajak Hiburan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.952.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (4) Beban Insentif Pemungutan Pajak Reklame-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.875.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (5) Beban Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp554.687.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (6) Beban Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp12.425.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (7) Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bungunan Pedesaan dan Perkotaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp231.902.750,00 yang berasal dari pengurang utang awal.
   (8) Beban Insentif Pemungutan Pajak BPHTB-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp53.427.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (9) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp12.375.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (10) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.476.250,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
   (11) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp32.408.561,00 yang berasal dari pengurang utang awal;

(12) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera Ulang-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.334.991,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
(13) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.715.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
(14) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp567.375,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
(15) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp16.750.181,00 yang berasal dari pengurang utang awal:
(16) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.842.438,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
(17) Beban Insentif Pemungutan Retribusi IMB-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA ;
(18) Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA:
(19) Beban Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
(20) Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA:
(21) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA:
(22) Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;
(23) Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;
5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
7. Beban Pegawai BLUD-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3 406.193.938,08 yang merupakan penambah dari saldo utang akhir sebesar Rp3.406.193.938,08.

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa-LO

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp448.846.371.658,78 dan Tahun 2023 sebesar Rp511.347.340.100,31. Beban Barang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.500.968.441,53 atau 12,22% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban barang –LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 290
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang	105.764.659.076,34	87.987.832.427,50	71.010.575.354,00

2	Beban Jasa	175.658.571.585,18	148.887.352.748,82	176.657.825.132,73
3	Beban Pemeliharaan	9.792.360.175,00	11.189.314.523,00	12.722.221.614,06
4	Beban Perjalanan Dinas	33.439.714.452,00	50.492.462.786,00	50.492.462.786,00
5	Beban Hang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.372.214.400,00	2.847.648.996,00	2.847.648.996,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	81.382.261.955,00	2.498.454.000,00	79.961.200.662,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	77.466.746.662,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.115.406.658,00	19.012.644.259,00	19.012.644.259,00
9	Beban Pegawai BLUD	79.821.151.988,79	68.463.974.253,46	56.869.329.637,20
	Jumlah	**511.347.340.100,31**	**448.846.371.658,78**	**461.577.506.441,49**

5.4.2.1.2.1. Beban Barang-LO

Jumlah Beban Barang-LO Tahun 2024 sebesar **Rp87.987.813.427,50** dan Tahun 2023 sebesar **Rp105.764.659.076,34**. Beban Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp-17.776.825.648,84 atau 16,81% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban Barang-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 291
Rincian Beban Barang -LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	66.540.000,00	401.780.012,01	445.894.605,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	96.298.400,00	47.687.770,00	47.685.770,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.692.020.154,00	1.213.215.256,00	1.213.215.256,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	41.700.000,00	0,00	0,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	3.292.800,00	3.292.800,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	12.717.000,00	25.729.160,00	25.729.160,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Ikan/Ikan	101.500.000,00	238.720.000,00	238.720.000,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.386.115.637,59	6.606.058.040,74	10.437.523.521,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	226.953.999,00	0,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Alat Besar	30.265.000,00	12.173.648,00	12.173.648,00
11	Beban Suku Cadang-Alat Laboratorium	12.550.000,00	0,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	65.754.500,00	317.694.182,00	4.500.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.158.067.676,00	5.070.422.993,00	4.951.599.947,00

14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.553.151.390,00	4.222.679.239,00	4.225.732.634,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.601.785.356,00	11.835.649.654,00	11.839.092.374,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	436.025.000,00	558.173.770,00	558.481.770,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	19.522.056,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.649.697.431,00	3.255.104.538,00	3.286.102.738,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.034.069.951,00	1.040.761.284,00	1.038.640.244,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	974.307.350,00	1.158.351.736,00	1.158.351.736,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	563.200.000,00	1.481.647.308,00	1.481.647.308,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	17.302.000,00	35.650.500,00	35.650.500,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	262.750.000,00	334.848.475,00	334.848.475,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor [illegible]	1.024.551.800,00	1.423.751.452,00	1.415.903.162,00
25	Beban Obat-Obatan-Obat	14.186.283.198,23	3.346.704.728,17	2.704.435.462,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.362.635,00	0,00	0,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.774.176.400,00	1.993.139.832,83	1.025.144.950,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	0,00	1.298.628.727,00	1.298.628.727,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura/Pakan Lainnya	235.638.000,00	92.782.696,00	92.782.696,00
31	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.380.635.850,00	12.372.085.528,00	12.372.085.528,00
32	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.852.789.015,00	3.285.830.181,00	3.285.830.181,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum Kesehatan	80.021.600,00	6.655.700,00	6.655.700,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum Sosial	167.800.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	763.285.600,00	3.452.539.000,00	3.452.539.000,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH	169.800.000,00	125.375.000,00	125.375.000,00
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	324.500.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	104.205.000,00	129.150.000,00	129.150.000,00
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	254.850.000,00	254.850.000,00

40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	246.574.200,00	262.084.500,00	262.084.500,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	88.576.000,00	55.767.220,00	55.767.220,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	164.725.000,00	52.700.000,00	52.700.000,00
43	Beban Pakaian Penyelamatan	17.500.000,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	5.475.000,00	28.724.000,00	28.724.000,00
45	Beban Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00
46	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	67.080.000,00	67.080.000,00
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	646.786.000,00	917.826.700,00	917.826.700,00
48	Beban Pakaian Olahraga	353.575.000,00	813.889.901,00	813.889.901,00
49	Beban Pakaian Paskibraka	10.571.600,00	8.060.000,00	8.060.000,00
50	Beban Komponen-komponen lainnya	20.982.408.943,47	18.868.348.885,75	0,00
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	367.460.000,00	396.921.000,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meja	0,00	582.000,00	32.901.375,00
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
	Jumlah	**105.764.659.076,34**	**87.987.833.427,50**	**71.910.575.354,00**

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Barang-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Barang, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp44.114.592,99 yang merupakan pengurang dari reklas belanja ke aset.

(2) Beban Bahan Bahan Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.831.465.480,26 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp1.589.147.819,06 serta pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp5.420.613.299,32 :

(3) Beban Suku Cadang Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 313.194.182,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp465.400.700,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp152.206.518,00;

(4) BebanAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp 118.823.046,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp138.467.416,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp19.644.370,00;

(5) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.946.905,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp29.397 300,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp20.450.395,00

(6) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp43.442.720,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp1.222.419.174,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp1.265.861.894,00:

(7) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp308 000,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp285.000,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp593.000,00;

(8) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp19.522.056.00 yang merupakan pengurangan dari barjas ke aset sebesar Rp19.522.056,00;

(9) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp 30.998.200,00 yang terdiri dari penambahan saldo persediaan awal sebesar Rp62.710.500,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp93.708.700,00;

(10) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2023 sebesar Rp18.878.960,00 yang terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp629.040,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp708.000,00 serta reklas barjas ke asset sebesar Rp18.800,000,00;

(11) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan alat listrik -LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp120.000,00 yang terdiri dari pengurangan persediaan akhir sebesar Rp120.000,00;

(12) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA

(13) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cindera Mata tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024;

(14) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp107.821.290,00 yang merupakan penguragan dari mutase barjas ke asset sebesar Rp25.698.710,00 penambahan dari asset ke barjas sebesar Rp133.520.000,00:

(15) Beban Obat-Obatan-Obat terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp642.269.266,17 yang terdiri dari penambah persediaan awal sebesar Rp3.578.396.082,66 serta pengurang persediaan akhir sebesar Rp2.936.126.816,49;

(16) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Obat-Obatan lainnya tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024

(17) Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp967.994.882,83 yang terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp37.424.411.724.30 dan Pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp36.456.416.841,47;

(18) Beban Pakaian Penyelamatan tidak terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA;

(19) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Komponen-Komponen Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp18.868.348.885,75 yang berasal dari penambahan adanya reklas asset menjadi ekstrakomtable sebesar Rp Rp18.868.348.885,75:

(20) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp28.971.000,00 yang merupakan pengurangan dari reklas barjas ke aset sebesar Rp28.971.000,00;
(21) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 32.319.375,00 yang merupakan pengurangan dari reklas barjas ke aset sebesar Rp 32.319.375,00.

5.4.2.1.2.2. Beban Jasa-LO

Jumlah Beban Jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp148.887.352.748,82 dan Tahun 2023 sebesar Rp175.658.571.385,18. Beban Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.771.218.636,36 atau 15,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban jasa-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 292
Rincian Beban Jasa -LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Jasa Kantor	101.370.578.540,02	114.192.068.089,23	114.292.161.943,23
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	52.768.627.093,16	12.390.994.600,59	34.749.336.662,00
3	Beban sewa Tanah	12.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
4	Beban sewa Peralatan dan Mesin	1.506.416.715,00	3.399.543.160,00	3.399.543.160,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	521.295.400,00	608.472.000,00	608.472.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.500.000,00	113.278.277,00	113.278.277,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.294.984.808,00	4.277.656.670,00	7.186.271.868,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	955.647.200,00	1.323.376.129,00	1.323.376.129,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	600.117.580,00	542.047.484,00	4.967.425.500,00
10	Beban Kursus Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.675.495.512,00	11.075.184.441,00	11.075.184.441,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.046.351.250,00	955.456.260,00	1.299.942.510,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	24.299.155,00	19.775.642,00	28.843.743,30
	Jumlah	**175.658.571.385,18**	**148.887.352.748,82**	**178.657.423.132,73**

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Jasa-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Jasa, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Beban Jasa Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp120.093.858,50 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian utang awal sebesar Rp1.598.415.402,50 dan Mutasi penambah dengan rincian Utang akhir sebesar Rp1.475.576.414,00. dan koreksi ekuitas sebesar Rp2.745.110,00.
(2) Beban Iuran Jaminan/ Asuransi -LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp22.558.342.060,11 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian beban di

bayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp74,550.427,08 serta utang awal sebesar Rp22.528,655.800,00 serta penambahan dari Beban Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp44.864.166.67;

(3) Beban Jasa Konsultansi-Konstruksi-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp2,818.715.198.00 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp69.400.530.00 dan reklas asset ke barjas sebesar Rp17.880.000.00 serta koreksi ekuitas sebesar Rp228.210.00 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp2.906.223.928.00;

(4) Beban ketersediaan Layanan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.919.365.016,00 yang terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp4.571.047.123,00 serta pengurangan utang awal sebesar Rp8.490.412 139,00;

(5) Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp344.486.250.00 yang merupakan pengurangan dari utang awal sebesar Rp344 486.250.00;

(6) Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp9.068.001,00 yang merupakan pengurangan dari utang awal sebesar Rp9.068.001.00.

5.4.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp11.189.314.527.00 dan Tahun 2023 sebesar Rp9.792.360.175.00 Beban PemeliharaanTahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.396.954.352,00 atau 14,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk LRA Tahun 2024 sebesar Rp12.722.221.614,06 sehingga jika dibandingkan dengan LO Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar Rp1.532.907.087,06 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 293
Rincian Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah	99.811.962,00	99.817.997,00	99.817.997,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.426.980.483,00	9.522.553.030,00	9.522.553.030,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.227.565.500,00	1.517.969.400,00	3.059.876.587,06
4	Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi	37.986.200,00	48.974.000,00	48.974.000,00
	Jumlah	9,792,360,175.00	11.189.314.527.00	12.722.221.614,06

Terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagai berikut:

1) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 1.393.430.557,06 yang merupakan pengurang dari reklas barjas ke asset sebesar Rp 1.393.430.557,06 ;

2) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatanterdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp139.476.530,00 pengurang dari reklas dari barjas ke asset sebesar Rp139.476.530.00.

5.4.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp30.492.462.786,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau sebesar 8.81% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 294
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.935.279.558,00	21.074.605.870,00	[illegible] 673,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.000.000,00	0,00	
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.753.319.894,00	8.568.563.166,00	8.568.563.166,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	381.645.000,00	292.273.750,00	292.273.750,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	359.450.000,00	557.020.000,00	557 [illegible]
	Jumlah	33.439.714.452,00	30.492.462.786,00	30.492.462.786,00

5.4.2.1.2.5. Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp2.847.648.996,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.372.214.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.524.565.404,00 atau sebesar 34,87%. Tidak terdapat selisih jika dibandingkan dengan LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 295
Rincian Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan - LO	270.585.900,00	934.105.000,00	934.105.000,00
2	Beban Beasiswa-LO	314.700.000,00	728.100.000,00	728.100.000,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa [illegible] – LO	575.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Sumbangan Kematian-LO	1.778.500.000,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak [illegible] Lain- LO	937.847.[illegible]	1.185.443.996,00	1.185.443.996,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada [illegible] - LO	495.581.700,00	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	4.372.214.400,00	2.847.648.996,00	2.847.648.996,00

5.4.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp79.965.200.662,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp81.383.261.965,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.418.061.303,00 atau 1,74%. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRATahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 296
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOS	81.383.261.965,00	79.965.200.662,00	79.965.200.662,00
	Jumlah	81.383.261.965,00	79.965.200.662,00	79.965.200.662,00

5.4.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp19.012.644.259,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp21.115.406.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.102.762.399,00 atau 9,96%. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRATahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 297
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.115.406.658,00	19.012.644.259,00	19.012.644.259,00
	Jumlah	**21.115.406.658,00**	**19.012.644.259,00**	**19.012.644.259,00**

5.4.2.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp68.463.914.252,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.821.151.988,79 mengalami penurunan sebesar Rp11.357.237.736,33 atau sebesar 14,23%. Sedangkan jika disandingkan dengan LRA Tahun 2024 sebesar Rp66.869.329.637,70 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.594.584.614,76. Selisih tersebut berasal dari penambahan saldo persediaan awal sebesar Rp17.218.476.089,86 serta pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp15.472.389.414,10 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 298
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	79.821.151.988,79	68.463.914.252,46	66.869.329.637,70
	Jumlah	**79.821.151.988,79**	**68.463.914.252,46**	**66.869.329.637,70**

5.4.2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp232.562.174.822,16 dan Tahun 2023 sebesar Rp156.797.250.342,83. Beban Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp75.764.924.479,33 atau sebesar 48,32%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 299
Rincian Beban Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.481.745.080,00	33.759.367.000,00	33.759.367.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.447.343.557,83	7.710.508.857,06	10.167.468.512,22
3	Beban Hibah Uang kepada Dalam dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.309.032.900,00	12.443.500.000,00	12.443.500.000,00

4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	90 010 718 050,17	64 645 755 188,10	66 875 573 688,22
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	697 500 000,00	1 344 000 000,00	1 344 000 000,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3 442 681 150,00	446 840 000,00	446 840 000,00
7	Beban Hibah Uang kepada [redacted] dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial [redacted]	1 031 549 000,00	701 600 000,00	701 600 000,00
8	Beban Hibah Barang [redacted] Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial [redacted]	40 349 640 904,83	25 768 306 405,00	29 594 199 730,46
9	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan [redacted]	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuikdas Swasta	22 754 454 000,00	21 811 981 000,00	25 811 981 000,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1 253 185 700,00	1 297 827 800,00	1 297 827 800,00
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	17 232 168 000,00	17 232 168 000,00
13	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	2 700 340 500,00	2 700 340 500,00
	Jumlah	156 797 250 342,83	232 562 174 822,16	241 174 866 230,68

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 2.456.959.675,16 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp1.632.883.234,84 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp4.089.842.910,00.
2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar R 2.229.838.500,12 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp19.508.374.209,14 dan reklas dari aset sebesar Rp588.064996,75 serta pengurangan dari pengakuan persediaan sebesar Rp11.434.107.948,48 utang awal sebesar Rp 10.647.420.201,13 dan reklas ke aset sebesar Rp 327.122.334,40;
3) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp3.925.893.233,46 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp252.366.738,34 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp4.178.259.971,80.

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp2.442.292.220,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.354.771.769,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp912.479.549,00 atau sebesar 27,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Tidak ada selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 300
Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu	7.659.196.769,00	1.746.600.000,00	1.746.600.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Individu	599.575.000,00	623.692.220,00	623.692.220,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Keluarga	156.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
	Jumlah	**3.354.771.769,00**	**2.442.292.220,00**	**2.442.292.220,00**

5.4.2.1.5. Beban Peyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.372.960.925,16 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.934.287.832,62. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.561.326.907,46 atau 65,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan piutang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 301
Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	352.569.139,76	895.499.841,93	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	7.877.515,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.234.439.206,36	16.288.715,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	52.080.797,97	0,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	275.198.688,33	449.303.853,23	0,00
	Jumlah	**3.934.287.832,62**	**1.372.960.925,16**	**0,00**

5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp572.837.785.362,08 dan Tahun 2023 sebesar Rp182.639.533.393,36. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp400.490.143.374,72 atau sebesar 213,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 302
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.744.939.737,72	49.287.976.654,24	0,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.525.647.162,00	19.865.245.936,97	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.326.775.436,64	502.468.836.979,87	0,00

4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.171.057,00	215.725.795,00	0,00
	Jumlah	**182.639.533.393,36**	**572.857.785.362,08**	**0,00**

5.4.2.2. Beban Transfer-LO

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer-LO terdiri dari:

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Jumlah Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp8.736.341.964.13 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.904.837.940,00. Beban Bagi Hasil Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp168.495.975,87 atau 1,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 303
Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.434.380.004,00	8.361.391.116,83	6.849.470.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	470.457.936,00	374.950.847,30	562.630.000,00
	Jumlah	**8.904.837.940,00**	**8.736.341.964,13**	**7.412.100.000,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.519.921.116,83 yang terdiri dari mutasi penambah utang akhir sebesar Rp 11.821.229.205,83 dan koreksi ekuitas sebesar Rp0,70 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp10.309.308.089,70.
2) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp187 679.152,70 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp510.809.433,30 dan koreksi ekuitas sebesar Rp0,50 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp698.488.586,50.

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp128.066.891.555.00 dan Tahun 2023 sebesar Rp122.435 708.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.631.183.535,00 atau sebesar 4,60% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Beban Bantuan Keuangan merupakan beban bantuan keuangan kabupaten ke desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 304
Rincian Beban Bantuan Keuangan Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per [illegible] 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	121.524.508.020,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	910.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	0,00	271.562.076.800,00

4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota [illegible] Alokasi Dana Desa	0,00	128.066.891.555,00	121.564.301.905,00
	Jumlah	122.435.708.020,00	128.066.891.555,00	393.126.318.705,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp271.562.076.800.00 yang merupakan Dana Desa yang tidak masuk dalam LO
2) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp6.502.589.650,00 yang terdiri dari mutasi pengurang yaitu utang awal sebesar Rp24.128.860.325,00 serta penambahan dari utang akhir tahun 2024 sebesar Rp30.631.449.975.00.

5.4.2.3. BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp 4.913.057.922,00. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024. Rincian Beban Tidak Terduga adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 305
Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta [illegible] Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Tidak Terduga	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00
	Jumlah	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00

Rincian Beban Tidak Terduga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 306
Rincian Beban Tidak [illegible] Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan kepada warga yang terdampak bencana alobar angin puting beliung Kecamatan Jabung dan Way Bungur 2024	146.557.001,00
2	Bantuan kepada warga yang terdampak akibat angin puting beliung kecamatan Jabung dan Way Bungur Tahun 2024	352.148.000,00
3	Penarikan atas Kesalahan Setor pengembalian belanja makan dan minum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2023	1.490.242.750,00
4	Pengembalian Dana BOK Kesehatan Puskesmas dan Evaluasi BPK TA 2023 dari RKUD ke RKUN/KPPN	1.869.143.657,00
5	Pengembalian dana BOS Reguler atas evaluasi BPK TA 2022, 2023 dan sekolah tutup TA. 2023 dari RKUD ke RKUN/KPPN	413.466.515,00
6	Bantuan biaya pemakaman bagi warga masyarakat Lampung Timur	641.500.000,00
	Jumlah	4.913.057.922,00

Terdapat realisasi beban atas belanja yang merupakan penarikan kembali dari setoran pengembalian belanja sebesar Rp1,490.242.750,00. Penarikan dilakukan untuk memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Penarikan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 dan disetorkan Kembali Ke Kas Daerah 6 Februari 2024 dengan nilai yang sama.

5.4.2.4. Surplus/Defisitdari Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp59.606.760,00 yang merupakan

Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 307
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	40.927.786,00	59.606.760,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.927.786,00	59.606.760,00	0,00

5.4.2.5. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian tidak terduga pada awal tahun anggaran. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Beban Luar Biasa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 308
Beban Luar Biasa Tahun 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Luar biasa	34.370.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	34.370.000,00	0,00	0,00

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp245.015.640.850,73 dan Tahun 2023 sebesar Rp207.026.171.756,66 mengalami penurunan sebesar Rp452.041.812.607,39 atau sebesar 218,35% jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp207.026.171.756,66.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyetoran kepada pihak ketiga atas penerimaan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.337.112.000.417,93 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.131.663.102.999,38. Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 205.448.897.418,55 atau 9,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 309

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	83.550.226.928,00	85.816.456.780,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.749.508.475,00	4.704.579.364,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.204.913.365,59	3.020.927.834,18
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	117.062.925.324,54	101.594.294.929,91
5	Dana Perimbangan	1.528.318.848.377,00	1.557.560.248.866,00
6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
7	Dana Desa	271.562.076.800,00	269.334.514.110,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	129.591.067.479,00	108.632.101.105,00
9	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-	22.433.674,76	0,00
	Jumlah	**2.337.112.000.417,93**	**2.131.663.102.999,38**

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.988.390.002.759,90 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.907.348.930.450,97. Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp 81.041.072.308,93 atau 4,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 310

Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja Pegawai	877.745.801.240,51	819.359.372.551,67
2	Belanja Barang dan Jasa	461.577.506.441,49	445.583.187.092,82
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	241.174.866.220,90	334.355.447.242,48

5	Belanja Bantuan Sosial	2.442.292.220,00	3.354.771.769,00
6	Belanja Tak Terduga	4.913.057.972,00	34.370.000,00
7	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.412.100.000,00	0,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	393.126.378.705,00	404.681.881.795,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**1.988.390.602.759,90**	**1.907.348.930.450,97**

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 Rp348.721.997.658,03 dan Tahun 2023 sebesar Rp224.314.172.548,41. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.407.825.109,62 atau 55,46% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 311

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Jumlah Arus Masuk Kas	2.337.112.000.417,92	2.131.663.102.999,38
2	Jumlah Arus Keluar Kas	1.988.390.002.759,90	1.907.348.930.450,97
	Jumlah	**348.721.997.658,03**	**224.314.172.548,41**

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari aktivitas Investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 312

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2024 sebesar Rp 320.800.571.557,70 dan Tahun 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 131.958.201.170,98 atau 69,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 313
Arus Keluar Kas dari Aktifitas investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja Modal Tanah		0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.779.530.896,00	21.092.974.539,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.774.537.780,46	67.753.207.114,85
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	193.533.982.693,24	87.181.542.397,87
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.705.720.188,00	12.813.646.335,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**320.800.571.557,70**	[illegible]

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar Rp320.800.571.557,70dan Tahun 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp131.958.201.170,98 atau 69,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 314
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas	320.800.571.557,70	188.842.370.386,72
	Jumlah	**(320.800.571.557,70)**	**(188.842.370.386,72)**

5.5.3. Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 315

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Arus Kas Masuk		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
2	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	**(2.000.000.000,00)**	**(2.000.000.000,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023. Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00, sedangkan arus kas keluar sebesar Rp2.000.000.000,00, merupakan penyertaan modal pada BUMD.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Rincian Kas dari Aktivitas Transitoris sebagaimana tabel berikut:

Tabel 316

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris	86.540.429.940,32	135.361.838.099,00
2	Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris	86.551.612.171,32	135.464.564.513,00
	Jumlah	**(11.182.231,00)**	**(102.726.414,00)**

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktifitas Transitoris meliputi Penerimaan PFK dan Kiriman Uang Masuk. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 terdiri dari Penerimaan PFK sebesar dan kiriman uang masuk sebesar Rp0,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 317

Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penerimaan PFK	86.540.429.940,32	135.361.838.099,00
2	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah	**86.540.429.940,32**	**135.361.838.099,00**

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan Kiriman Uang Keluar. Penerimaan dari aktivitas Transitoris ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari pihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 terdiri dari Pengeluaran PFK sebesar Rp86.407.484.920,32 dan Kiriman Uang sebesar Rp 1.609.000,00 serta koreksi SILPA sebesar Rp142.518.251,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 318

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pengeluaran PFK	86.407.484.920,32	135.361.838.099,00
2	Kiriman Uang Keluar	1.609.000,00	33.429.400,00
3	Koreksi SiLPA	142.518.251,00	69.300.314,00
	Jumlah	**86.551.612.171,32**	**135.464.567.813,00**

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.596.271.923,38 dan Tahun 2023 sebesar Rp87.686.028.054,05. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.910.243.869,33 atau 29,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Saldo Akhir Kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 319

Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.138.153.902,41	78.785.824.219,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	342,00	564.300,00
4	Kas di BLUD	2.163.411.344,97	
5	Kas Lainnya	132.945.020,00	
6	Kas di Bendahara BOS	184.900,00	1.951.500,00
7	Kas BOK Puskesmas	7.161.556.913,00	5.765.765.342,00
	Jumlah	**113.596.271.923,38**	**87.686.028.054,05**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.106.917.947.142,10 merupakan saldo akhir Tahun 2023;
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp245.015.640.850,73
3. Koreksi ekuitas Lain-Lain sebesar Rp437.193.137.252,52 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 320
Ekuitas Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	(1.409.200,00)
2	Piutang Kembusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(8.269.000,00)
3	Piutang Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan	3.322.029.574,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	(629.861.930,00)
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.540.926.666,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	208.649,06
7	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*	19.234,59
8	Penyisihan Piutang Dana Pembagian Dana [illegible] CHT	35.050.291,99
9	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	168.012.191,97
10.	Penyisihan Piutang [illegible] Pajak-Bea Balik Nama [illegible]	61.067.102,74
11.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	242.243.938,52
12	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	1.106.807,50
13.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	37.912.672,92
14.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada BLUD	4.056.744.374,47
15.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.039.600.000,00
16	Tanah untuk Jalan	23.823.669.000,00
17	Kendaraan Bermotor Penumpang	346.605.000,00
18.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(139.000.000,00)
19	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(204.985.000,00)
20.	Kendaraan Bermotor [illegible]	609.500.000,00

21	[illegible] Perlengkapan Kantor	9.500.000,00
22	Alat Kantor Lainnya	44.100.000,00
23	Mebel	3.900.000,00
24.	[illegible] (Home Use)	10.000.000,00
25	[illegible] Kelekatan	2.140.000,00
26.	Lemari dan Arsip Pejabat	3.900.000,00
27	Peralatan Studio [illegible]	110.000.000,00
28.	Personal Computer	14.250.000,00
29	[illegible]	(16.250.000,00)
30	Bangunan Gedung Kantor	134.202.525,29
31	Bangunan Gedung Instalasi	6.000.000,00
32.	Bangunan Gedung Laboratorium	6.750.000,00
33	Bangunan Kesehatan	246.294.500,00
34.	Bangunan Gedung Tempat Perkemahan	15.000.000,00
35.	[illegible] Gedung Tempat [illegible]	2.227.160.739,11
36	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	[illegible]
37	Bangunan Gedung Garasi/Pool	14.850.000,00
38	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.400.000,00
39	Jalan Kabupaten	59.209.471.264,57
40.	Instalasi Air Bersihan Industri	512.712.267,00
41.	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.049.515.154,57
42	Rekl Utama	(12.793.622.235,00)
43	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(435.406.285,00)
44	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(159.000.300,00)
45	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(24.980.000,20)
46.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(108.000.000,00)
47	Akumulasi Penyusutan Alat Kelekatan-Alat Kelekatan Umum	(568.334,55)
48	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal [illegible]	(14.250.000,00)
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(8.550.000,00)
50.	Akumulasi Penyusutan [illegible] Tempat [illegible] Gedung Kantor	(37.457.297,00)
51	Akumulasi Penyusutan [illegible]	(4.574.587,50)
52.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(62.461.878,00)

53	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(1.057.084.921,00)
54.	Akumulasi Penyusutan Bangunan [illegible] Tempat Tinggal-Rumah Negara [illegible]	[illegible]
55	Akumulasi Penyusutan [illegible] Gedung Tempat [illegible]	(21.061.477,00)
56.	[illegible] Penyusutan [illegible] Kabupaten	(72.249.967.945,93)
57	Tuntutan [illegible] Kerugian Daerah [illegible]	(81.[illegible]
58	Aset Rusak Berat/Usang	(27.937.310.408,27)
59	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	[illegible]
60	Akumulasi Penyusutan Aset [illegible] Rusak Berat/Usang	(1.515.045.214,51)
61	Utang [illegible] Jasa [illegible] Tagihan Telepon	(2.500,00)
62.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	[illegible]
63.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(9.250,00)
64.	Utang Belanja Jasa [illegible] Dapat Dibayar Lainnya	(26.250,00)
65	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	(1.21)
66	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	(1.594.426.623,20)
67	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Aset	(43.042.555,07)
68.	Utang Belanja Hibah Barang kepada Rumah dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	(100,00)
69	Utang Belanja Hibah Barang kepada Rumah dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	(0,01)
70.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1,84)
71.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(0,3)
72.	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	(0,01)
73	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	(0,70)
74	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	(0,30)
	Jumlah	(437.193.137.252,52)

4. Ekuitas Akhir yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang tergambar pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp2.299.095.443.543,89 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 321
Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	2.106.917.947.142,10	1.900.311.182.101,56
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(245.015.640.850,73)	207.024.291.756,66
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	Koreksi Ekuitas	437.193.137.252,52	(419.406.716,12)
	EKUITAS AKHIR	Rp2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.299.095.443.543,89. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.106.917.947.142,10 mengalami kenaikan sebesar Rp192.177.496.401,79 atau 9,12%.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kegiatan Pokok Entitas

6.1.1. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 yang meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999, dua kecamatan pembantu, yaitu Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik, statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Dalam perkembangannya pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (*sebelas*) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, jumlah wilayah kecamatan definitif menjadi 23 (*dua puluh tiga*) kecamatan. Sampai dengan Tahun 2025 ini, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Timur telah dijabat oleh 13 (tiga belas) Bupati, yaitu;

Tabel 322

Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	H. Muhammad Noer, S.H.	27 April 1999 s.d. 30 April 2000
2.	Ir. H. Iskak, M. Thaher, C.E.S	30 Mei 2000 s.d. 09 Desember 2002
3.	H. Hakimi, M.S.	10 Desember 2002 s.d. 05 Mei 2005
4.	H. Syahrul Azwar HADM, S.H.	06 Mei 2005 s.d. 31 Agustus 2005
5.	H. Satono, S.H., S.P.	September 2005 s.d. Agustus 2010
6.	H. Satono, S.H., S.P.	2 September 2010 s.d. 26 Mei 2011
7.	Erwin Arifin, S.E.,M.H.	26 Mei 2011 s.d. 29 Mei 2012
8.	Erwin Arifin, S.H.,M.H.	30 Mei 2012 s.d. 02 September 2015
9.	Tantawi, S.STP,MM	09 September 2015 s.d. 17 Februari 2016
10.	Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D	17 Februari 2016 s.d. 15 Juni 2019
11.	Zaiful Bokhari, S.T.,M.M	15 Juni 2019 s.d. 17 Februari 2021
12.	Dra. Hj. M. Dawam Rahardjo, M.Si	26 Februari 2021 s.d. 19 Februari 2025
13.	Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos., M.A.P	20 Februari 2025 s.d. sekarang

6.1.2. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 16 (*enam belas*) Dinas dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 5 (*lima*) Badan dan 5 (*lima*) Kantor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas 1 (*satu*) Inspektorat, 9 (*sembilan*) Badan, 4 (*empat*) Kantor, dan 1 (*satu*) Rumah Sakit Umum Daerah (Perda tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 15, 16, 17 dan 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g dan h).
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Derah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat perubahan susunan peringkat daerah sebagai berikut:

Tabel 523
Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

No	Perda [illegible]	Perda 07/2021
I	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan [illegible]	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Dinas [illegible] Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, [illegible] Pendidikan dan [illegible]
3	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan [illegible]
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga [illegible]	Dinas Pemberdayaan Perempuan, [illegible] Anak, [illegible] Penduduk dan [illegible] Perencana
5	Dinas Lingkungan [illegible]	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Dinas [illegible]	[illegible]
7	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	[illegible] Pariwisata	[illegible]
9	Dinas Peternakan dan [illegible]	Dinas [illegible] Peternakan
10	Dinas Tanaman Pangan [illegible] dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Sampai dengan Tahun 2024 perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas-Dinas Daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sosial;

5. Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Badan-Badan Daerah :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan :
1. Kecamatan Sukadana;
2. Kecamatan Jabung,
3. Kecamatan Labuhan Maringgai;
4. Kecamatan Way Jepara;
5. Kecamatan Sekampung;
6. Kecamatan Pekalongan;
7. Kecamatan Metro Kibang;
8. Kecamatan Purbolinggo;
9. Kecamatan Raman Utara;
10. Kecamatan Batanghari;
11. Kecamatan Marga Tiga;
12. Kecamatan Sekampung Udik;
13. Kecamatan Wwway Karya;
14. Kecamatan Bandar Sribhawono;
15. Kecamatan Batanghari Nuban;
16. Kecamatan Braja Selebah;
17. Kecamatan Bumi Agung;
18. Kecamatan Gunung Pelindung;
19. Kecamatan Labuhan Ratu;
20. Kecamatan Mataram Baru;
21. Kecamatan Melinting;
22. Kecamatan Way Bungur;
23. Kecamatan Pasir Sakti;
24. Kecamatan Marga Sekampung.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
2. Puskesmas Rejo Katon
3. Puskesmas Sidorejo
4. Puskesmas Bumi Mas

5. Puskesmas Karya Tani
6. Puskesmas Pakuan Aji
7. Puskesmas Adirejo
8. Puskesmas Batanghari
9. Puskesmas Sekampung
10. Puskesmas Trimulyo
11. Puskesmas Jabung
12. Puskesmas Pasir Sakti
13. Puskesmas Pugung Raharjo
14. Puskesmas Peniangan
15. Puskesmas Sumbe Rejo
16. Puskesmas Labuhan Maringgai
17. Puskesmas Sribhawono
18. Puskesmas Way Mili
19. Puskesmas Wana
20. Puskesmas Mataram Baru
21. Puskesmas Way Jepara
22. Puskesmas Rajabasa Lama
23. Puskesmas Braja Harjosari
24. Puskesmas Braja Caka
25. Puskesmas Sukadana
26. Puskesmas Sukaraja Nuban
27. Puskesmas Sukaraja Tiga
28. Puskesmas Donomulyo
29. Puskesmas Tanjung Harapan
30. Puskesmas Pekalongan
31. Puskesmas Ganti Warno
32. Puskesmas Raman Utara
33. Puskesmas Purbolinggo
34. Puskesmas Tambah Subur
35. Puskesmas Margo Toto.

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD kedalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, asset dan kewajiban yang berasal dari Dinas Kesehatan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Dinas Kesehatan.

Per 31 Desember 2024 terdapat akun asset dan kewajiban berupa utang dan piutang yang harusnya dieliminasi, tetapi belum dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data antara BLUD (RSUD dan beberapa Puskesmas) dengan Dinas Kesehatan sehingga memerlukan konsolidasi lebih lanjut.

6.1.3. Kepegawaian Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 – 2025 adalah sebagaimana data berikut:

Tabel 3.24
Data Jumlah ASN Tahun 2020 - 2025

NO.	TAHUN	JUMLAH ASN		TOTAL
		PNS	PPPK	
1.	Jun - 2020	8250	0	8250
2.	Jun - 2021	7892	0	7892
3	Jun - 2022	7411	191	7602

4	Jan - 2023	7098	1445	8543
5	Jan - 2024	6555	1464	8019
6.	Jan - 2025	6207	1681	7888

6.2. Informasi Tambahan

6.2.1. Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

Tabel 325
Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d. 2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1	2	3	
1	Ruda Rasul Aliyah	PKB	Ketua
2	Aryan Putra Marga, S.E., M.M	Golkar	Wakil Ketua I
3	Wayan Surya Utama	PDI-P	Wakil Ketua II
4	Hanif Fauzi, S.E.	Gerindra	Wakil Ketua III
5	Masrul Hofi	PKB	Anggota
6	Drs. Rakhmat, M.M.	PKB	Anggota
7	M. Rohby Mahari M. S	PKB	Anggota
8	Elvanny Carulita	PKB	Anggota
9	Sunarno	PKB	Anggota
10	Yulida Saputri Ayu	PKB	Anggota
11	Agus	PKB	Anggota
12	Tri Sukarno Wiliardan	PKB	Anggota
13	Ir. Tri Prabowo, S.Pt., M.M.	PKB	Anggota
14	Gani Suteono	PKB	Anggota
15	Winarno	PKB	Anggota
16	Purwanto, S.Pd	Gerindra	Anggota
17	Rendi Pratama, S.H	Gerindra	Anggota
18	Ria Andrayana, S.Pd.	Gerindra	Anggota
19	Mohammad Zakwan, S.Sos., S.H.	Gerindra	Anggota
20	Solihin	Gerindra	Anggota
21	Sudibyo, S.IP	Gerindra	Anggota
22	Hevzon, M.M	Gerindra	Anggota
23	Ali Johan Arif, S.E	PDI-P	Anggota
24	Sandi Yudha, S.H.	PDI-P	Anggota
25	Antonius Gatot Suyanto	PDI-P	Anggota
26	Deris Andrian Prasetia	PDI-P	Anggota
27	Made Tangkas Budhawan, S.T	PDI-P	Anggota
28	Deni Supriyadi, S.H	PDI-P	Anggota
29	H. M. Paryoto	PDI-P	Anggota
30	Yusnita A. S., S.K.M., M.H	Golkar	Anggota
31	Hariyanto	Golkar	Anggota
32	Imam Zaki Nurhidayat, S.T.P	Golkar	Anggota
33	Edi Purwanto, S.T	Golkar	Anggota
34	Hajat Sudrajat, S.Pd.	Golkar	Anggota
35	H. Kemam, S.H.	Golkar	Anggota

36	Ikhsan Nurgatsb, S.H	Golkar	Anggota
37	H. Yuyun Adtorillah, S.E.	Nasdem	Anggota
38	Ahmad Fanyardyah	Nasdem	Anggota
39	Alfirman	Nasdem	Anggota
40	H. Supriyono, S.Ag.	Nasdem	Anggota
41	Herman Susanto	Nasdem	Anggota
42	Kusmanto, S.Pd.	Nasdem	Anggota
43	H. Nawawi Iskandar, S.E.	Nasdem	Anggota
44	Yudhistira Harry Wikrowo Adjie	PKS	Anggota
45	Siti Barah, S.Ag.	PKS	Anggota
46	Ismu Prayitno, S.T.	PKS	Anggota
47	M. Edy Rizki Mustofa, S.H.I.	PAN	Anggota
48	Samsudin	Demokrat	Anggota
49	Nyoman Sanyasa	Demokrat	Anggota
50	Ahmad Isak, S.P.	Demokrat	Anggota

6.2.2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2024

Daftar produk hukum tentang keuangan yang yang ditetapkan Thun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 326
Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2024

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
1	[redacted] Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan [redacted] Daerah.
2	Peraturan [redacted] Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang [redacted] Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
6	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024.
7	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2024.
8	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
9	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
10	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembebanan Perubahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.
13	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PRODUK
14	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame
15	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
16	Peraturan Bupati Lampung [illegible] 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara [illegible] Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Berupa Sirtu/pasir Pemungutan Pajak [illegible] Bukan Logam dan Batuan dan [illegible] Mineral Bukan Logam dan Batuan.
17	Peraturan [illegible] Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang [illegible] Cara Pengelolaan Pajak Barang dan atau Jasa Tertentu.
18	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan [illegible] atas Peraturan Bupati [illegible] Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Gaji dan Insentif kepada Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah [illegible]
19	Peraturan Bupati Lampung [illegible] Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu
20	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
21	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22	Peraturan [illegible] Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang [illegible] Cara Pengelolaan [illegible] Usaha [illegible]
23	Peraturan Bupati Lampung [illegible] Timur [illegible] 42 Tahun 2024 tentang Tata Cara [illegible] Retribusi Jasa Umum

6.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPRS Lampung Timur Tahun 2024 atas Tahun Buku 2023

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Syariah Kabupaten Lampung Timur atas Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Rumah Makan Kayu Jalan Arief Rohman Hakim No.45 Way Halim Bandar Lampung, dengan menghasilkan beberapa point keputusan sebagai berikut:

1) Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Zuhaidi. Komanudin sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023;
2) Menyetujui pembagian Laba Bersih positif (Deviden) Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.713.264.506,00.- sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 86 Ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut.

I	Laba Bersih Tahun 2023	Rp2.713.264.506,00
2	Bagian Laba Daerah dan Swasta	55% x Rp2.713.264.506,00 = Rp1.492.295.478,30
	[illegible] Laba Daerah dan Swasta Sesuai Perbandingan sebagai berikut:	
	• Pemda Kab Lampung Timur	[illegible] x Rp1.492.295.[illegible] = Rp1.477.[illegible],21
	• Swasta	0,68% x Rp1.492.295.478,30 = Rp14.820.016,50
3	Bagian Perusahaan	
	Laba Perusahaan dibagi dengan persentase dari jumlah Laba Tahun 2020 dengan pembagian sebagai berikut:	
	• Cadangan	20% x Rp2.713.264.506,00 = Rp542.652.901,20
	• CSR	3% x Rp2.713.264.506,00 = Rp81.397.935,18
	• Tantiem	4% x Rp2.713.264.506,00 = Rp108.530.580,24
	• Jasa Produksi	8% x Rp2.713.264.506,00 = Rp217.061.160,48
	• Dana Kesejahteraan	10% x Rp2.713.264.506,00 = Rp271.326.450,60

3) Menyetujui Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun 2024;

4) Menyetujui Pembangunan Gedung Kantor PT. BPRS Lampung Timur di Kota Metro. Jl. AH. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
5) Menyetujui Pembukaan Kantor Kas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
6) Menyetujui pemindahan Kantor Kas Semarang Baru Kecamatan Pasir Sakti ke Pasar Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabuaten Lampung Timur;
7) Menyetujui penutupan Kantor Kas Metro Kibang Kecamatan Metro Kibang;
8) Menyetujui Bapak Soemarsono sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan menyetujui untuk mengusulkan pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mengisi kekurangan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah;
9) Menyetujui penambahan Modal dari Pemerintah Daerah Lampung Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
10) Menyetujui perubahan Renumerasi Pengurus PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda);
11) Menyetujui penggunaan Dana Cadangan untuk pembayaran Deuda Pajak PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda);
12) Menyetujui penunjukan **KAP Zubaidi, Komaruddin** untuk melakukan Audit Atas Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2024.
13) Menyetujui penunjukan **Notaris MGS Edy Putra, SH,** yang berkedudukan di Metro Provinsi Lampung untuk melakukan pengurusan hasil keputusan RUPS ini.
14) Penunjukan Khusus :
Rapat menyetujui memberi kuasa kepasa Tuan **TONY ADRYANSYAH** Sarjana Pertanian untuk menyatakan dan menyusun keputusan rapat ini dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan rapat tersebut kedalam akta notarial dihadapan notaris dan karenanya berhak/berwenang menandatangani akta yang bersangkutan.

6.2.4. Belanja Wajib DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Spesific Grant)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Alokasi DAU Specific Grant dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, serta DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, dengan realisasi sebagai berikut:

Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK sebagai berikut:

Tabel 327
Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	JENIS PPPK	SISA DAU PPPK SEBELUMNYA	JUMLAH PPPK	TOTAL GAJI
1	Guru	30.154.374.000,00	166	6.372.959.726,00
2	Tenaga Kesehatan	0,00	34	126.840.274,00
3	Tenaga Teknis	0,00		0,00
	Jumlah	**30.154.374.000,00**	**200**	**6.499.800.000,00**

Realisasi DAU SG Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 328
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.867.546.684,00	6.212.646.101,00	654.150.583,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.115.240.145,00	3.002.850.020,00	112.389.125,00
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	24.785.580.123,00	23.661.138.189,00	1.124.441.934,00
4	Pengadaan Mebel Sekolah	2.068.055.263,00	2.068.055.263,00	0,00
5	Pengadaan Perlengkapan	542.265.641,00	529.631.541,00	12.634.100,00
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	350.616.182,00	334.415.959,00	16.200.223,00
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.707.324.248,00	3.658.324.248,00	49.000.000,00
8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	353.520.800,00	284.369.767,00	69.151.033,00
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	321.330.100,00	212.784.296,00	108.545.804,00
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	85.563.000,00	81.713.000,00	3.850.000,00
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	426.005.400,00	383.295.314,00	42.710.086,00
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	400.000.000,00	288.868.691,00	111.131.309,00
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000,00	155.657.823,00	144.342.177,00
13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.898.000,00	174.397.857,00	28.500.143,00
14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	375.000.000,00	347.399.759,00	27.600.241,00
15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000,00	243.872.400,00	56.127.600,00
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.495.985.063	5.273.909.263,00	222.075.800,00
17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	6.744.675.684,00	6.416.856.001,00	327.819.683,00
18	Pengadaan Mebel Sekolah	645.504.255,00	626.534.085,00	8.770.170,00
19	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	397.499.824,00	386.637.824,00	10.862.000,00

20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	372.000.000,00	354.899.957,00	17.100.043,00
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.018.399.729,00	1.007.951.329,00	10.448.400,00
22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	344.000.000,00	132.302.991,00	211.697.009,00
23	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.563.000,00	69.313.000,00	16.250.000,00
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.000.000	343.053.624,00	56.946.376,00
25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	353.250.000,00	248.490.332,00	104.759.668,00
26	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	182.000.000,00	117.716.571,00	64.283.429,00
27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.500.000,00	79.878.000,00	12.622.000,00
28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	350.000.000,00	314.779.704,00	35.220.296,00
29	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	453.976.232,00	400.150.546,00	53.825.684,00
30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.917.839.827,00	5.638.257.928,00	279.581.899,00
31	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	94.750.000,00	5.250.000,00
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	867.470.838,00	849.531.991,00	17.938.847,00
33	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6.254.096.182,00	5.964.355.609,00	289.740.573,00
34	Pengadaan Mebel PAUD	555.324.690,00	542.383.326,00	12.941.364,00
35	Pengadaan Perlengkapan PAUD	512.631.144,00	205.331.144,00	7.300.000,00
36	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	75.000.000,00	67.860.000,00	7.140.000,00
37	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	425.000.000,00	424.918.950,00	81.050,00
38	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	85.563.000,00	71.038.000,00	14.525.000,00
39	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	565.000.000,00	557.802.200,00	7.197.800,00
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00

41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	135.000.000,00	115.046.899,00	19.953.101,00
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.331.535.848,00	3.177.609.148,00	153.926.700,00
43	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.357.030,00	80.395.230,00	4.961.800,00
44	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	144.311.400,00	140.667.837,00	3.643.563,00
45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	91.436.200,00	82.058.700,00	9.377.500,00
46	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	85.750.000,00	75.749.915,00	10.000.085,00
47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	214.974.900,00	210.358.500,00	4.545.400,00
48	Pembinaan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24.252.800.000,00	24.166.092.895,00	86.707.105,00
49	Penilaian Kelayakan Izin Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	68.260.400,00	66.485.400,00	1.775.000,00
50	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	396.566.961,00	119.439.040,00	277.127.921,00
51	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	698.952.090,00	677.092.090,003	21.860.000,00
52	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	473.820.000,00	399.882.100,00	73.937.900,00
53	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	191.968.000,00	191.968.000,00	0,00
54	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	48.162.500,00	45.331.600,00	2.830.900,00
55	Pengembangan Cagar Budaya	274.008.039,00	107.066.956,00	166.941.083,00
56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.838.474.578,00	34.838.474.578,00	0,00
	TOTAL	**142.068.583.004,00**	**136.846.813.491,00**	**5.213.769.589,00**

Realisasi DAU SG Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 329
Realisasi DAK yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	492.248.677,00	471.423.198,00	20.825.479
2	Pengembangan Puskesmas	3.926.515.761,00	3.703.012.835,00	223.902.926,00
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.247.917.903,00	5.878.812.195,00	369.105.708,00
4	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.021.112.800,00	553.878.400,00	467.234.400,00
5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	545.962.930,00	490.637.475,00	55.325.455,00
6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.291.400,00	88.138.136,00	5.153.264,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	251.637.600,00	187.665.400,00	63.972.200,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.263.000,00	33.725.000,00	23.538.000,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00	21.710.000,00	28.290.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.651.250.329,00	1.651.250.329,00	0,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	930.524.283,00	919.050.000,00	11.274.283,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	246.360.000,00	216.795.000,00	29.565.000,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	215.873.705,00	18.165.000,00	197.708.705,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	406.165.509,00	149.312.447,00	256.853.062,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	400.011.740,00	77.803.800,00	322.207.940,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	352.229.900,00	29.674.300,00	322.555.600,00
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	611.770.000,00	502.064.500,00	109.705.500,00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	256.144.574,00	43.855.426,00
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	65.734.301,00	9.724.000,00	55.010.301,00
23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.000.000,00	6.807.500,00	18.192.500,00
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	9.124.000,00	40.876.000,00
26	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50.000.000,00	24.800.000,00	25.200.000,00
27	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.197.367.770,00	465.993.550,00	731.374.220,00
28	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	37.260.000,00	8.650.000,00	28.610.000,00
29	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	32.240.000,00	24.800.000,00	7.440.000,00
30	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.772.946.130,00	1.128.213.900,00	644.732.230,00
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	991.600.000,00	808.550.465,00	183.049.535,00
32	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
33	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000,00	29.446.350,00	20.553.650,00
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
35	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000,00	17.515.000,00	32.485.000,00
36	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50.000.000,00	18.218.800,00	31.781.200,00
37	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.363.209.000,00	11.362.558.200,00	650.800,00
38	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	88.578.285,00	72.541.568,00	16.036.717,00
39	Pengembangan Mutu dan Penunggakan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.261.799,00	143.258.995,00	84.002.804,00
40	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4.762.178,00	0,00	4.762.178,00

41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.363.209.000,00	11.363.209.000,00	0,00
	TOTAL	**45.452.836.000,00**	**40.742.473.878,00**	**4.710.362.122,00**

Realisasi DAU SG Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 330
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Rekonstruksi Jalan	19.011.013.000,00	18.918.021.324,00	92.991.676,00
	TOTAL	**19.011.013.000,00**	**18.918.021.324,00**	**92.991.676,00**

6.2.5. Aset Tanah Milik Pemerintah yang Masih Perlu Ditelusuri

Terdapat tanah dan Bangunan yang terindikasi Eks MILIK PEMERINTAH Dati.II Lampung Tengah Terletak di dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang belum tercatat dalam daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan luas kurang lebih ± 2.675 M² dengan kondisi Bangunan dalam keadaan Rusak. Berdasarkan penelusuran diketahui berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat Tanah dan Bangunan eks Pemerintah dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dahulu digunakan sebagai rumah dinas kehutanan diwilayah dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana dengan kondisi rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan konfirmasi atas pencatatan tanah dimaksud pada :

a. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung c.q. Kepala BPKAD Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/514/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset, dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata lingkungan Wilayah 20 Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/396/23-SK/2025 tanggal 4 maret 2025 tentang Konfirmasi aset.
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala BPKAD Lampung Tengah dengan surat Nomor 032/512/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
d. Sekretaris Daerah Kota Metro c.q. Kepala BPKAD Kota Metro dengan surat Nomor 032/513/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi Aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengingat sejarah tanah dimaksud adalah tanah milik Pemerintah, Pemkab Lampung Timur memandang penting untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan atas aset dimaksud. Akan tetapi dibutuhkan dokumen dan data dukung perolehan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna melakukan pengakuan atas aset dimaksud.

BAB VII
PENUTUP

APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Perubahan anggaran dan realisasi pada APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 337
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD-P (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	(137.191.329.983,07)	94,46
2	Belanja	2.559.987.749.455,00	2.309.190.574.317,60	(250.797.175.137,40)	90,20
3	Surplus/ (Defisit)	(85.684.419.054,00)	27.921.426.100,33	113.605.845.154,33	32,59
4	Pembiayaan:				
a.	Penerimaan Pembiayaan	87.684.419.054,00	87.684.419.054,05	0,50	
	Sisa Lebih SiLPA		142.518.251,00	142.518.251,00	
b	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
c.	Pembiayaan Netto	85.684.419.054,00	85.541.900.805,05	(142.518.251,00)	99,83
	SiLPA Tahun Berjalan	0,00	113.463.326.905,38	113	

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.474.303.330.401,00 terealisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau sebesar 94,46% sedangkan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.559.987.749.455,00 terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 atau sebesar 90,20%. sehingga terdapat surplus sebesar Rp27.921.426.100,33. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan Silpa sebesar Rp113.463.326.903,38.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini disusun dalam rangka menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dimasa mendatang.

Sukadana, 27 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELLY NURYAMAH

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2024

LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1		a	2	3	4	5	6
				4.304.330.401	2.357 [illegible] 000 417	137 [illegible] 329	
1			PEMERINTAHAN [illegible] YANG BERKAITAN DE[illegible] PELAYANAN	109.810.240.582	97 733 303 [illegible]72	[illegible] 937	
1.01			[illegible] ERINTAHAN BIDANG [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000		[illegible] Pendidikan dan [illegible]	50 000 000	50.713.064,00	40.713.064,00	181,43
1 01	1 01 2.22 0 00 01 0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50 000 000	50 713 064,00	40.713.064,00	181,43
1.01	1.01.2 [illegible]	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	50 000.000	90 713.064,00	40.713.064,00	181 43
1 01	1 01 2 22.0.00 01.0000	4 1 02	Retribusi Daerah	50 000.000	90 713.064,00	[illegible]	181,43
1 02			URUSAN [illegible] olahan BIDANG [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 22	
1 02	1 02 0 00.0.00.01 0000		Dinas [illegible]	56.788.438.467	6 943 000,00	[56 781 475 467,00]	0,01
1 02	[illegible]	a	PENDAPATAN DAERAH	56.788.438.467	6.943.000,00	[56 781 [illegible]	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	56.788.438.467	6.943 [illegible]	[56 781 475 467	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	[illegible] Daerah	[illegible]	0 [illegible]	131.557 000,00]	
1.02	1 02 0 00 0 00 01.0000	4.1.06	Lain-lain PAD yang Sah	56 749 918 467	0,00	[56.749 918 467,00]	0,00
1 02	[illegible] 00 01.0001		[illegible] [illegible] Daerah Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	47 432.822.515	[illegible]	[illegible]	
1 02	1 02.0.00.0.00 01.0001	4 1	PENDAPATAN [illegible] DAERAH [illegible]	47.332 822.515	48.870 712.653,72	1.537.890.138,72	103 25
[illegible]	1 02 0.00.0.00 01.0001	[illegible]	Lain-lain PAD [illegible] Sah	47.332 822.515	48.870 712.653,72	1.537.890.138,72	103 25
[illegible]	1 02 0.00.0.00 01.0002		Puskesmas Seka [illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
1 02	1 02 0 00 0.00 01 0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0	[illegible]	[illegible]	
1 02	1 02 0 00.0.00.01.0002	4 1	PENDAPATAN [illegible] DAERAH [illegible]	0	1 743 475 960,00	1.743.475 960,00	0,00
1 02	1 02 0 00.0.00.01.0002	4 1 04	Lain-lain PAD [illegible] Sah	0	1 743.475.960,00	1.743 475.960,00	0.00
1.02	[illegible]		Puskesmas [illegible] Harapan	0	864.248.126,00	864.248 126,00	0.00
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003	a	PENDAPATAN DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4 1	PENDAPATAN [illegible] DAERAH [illegible]	0	864.248.126,00	864.248 126,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD [illegible] Sah	0	864 248 126 00	864.248 126,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas [illegible] Tani	0	910 856 260,00	910.856.260,00	0 00
1.02	1 02 0 00 0.00.01.0004	4	PENDAPATAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.02	1 02 0.00.0.00 01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI [illegible]	0	910 856 260,00	910 856.260,00	0.00
1.02	[illegible]	[illegible]	Lain-lain PAD [illegible] Sah	0	910.856.260,00	910 856.260,00	
1 02	1 02 0 00.0.00 01.0005		Puskesmas Mangunan	0	1 169 417 [illegible]	[illegible]	
[illegible]	1 02 0 00 0.00 01 0005	a	[illegible]	0	1 169.417 [illegible]	1.169 417 853 00	0,00
1 02	1.02 0.00.0.00 01 0005	4 1	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
1 02	1.02.0 00.0.00.01 0005	4 1 04	[illegible]	0	1.169 417 [illegible]	[illegible]	
1 02	1.02.0 00 0.00.01 0006		Puskesmas [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.02	1.02.0.00 0.00.01 0006	a	PENDAPATAN DAERAH	0	950 051 270 00	[illegible]	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	0	950 051 270,00	[illegible]	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD [illegible] Sah	0	[illegible]	[illegible]	

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Wana	C	1.192.326.804,00	1.192.326.804,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	C	1.192.326.804,00	1.192.326.804,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	1.192.326.804,00	1.192.326.804,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	1.192.326.804,00	1.192.326.804,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Labuhan Maringgai	C	3.049.902.147,00	3.049.902.147,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	C	3.049.902.147,00	3.049.902.147,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	3.049.902.147,00	3.049.902.147,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	3.049.902.147,00	3.049.902.147,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Tanjung	C	1.086.834.408,00	1.086.834.408,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	C	1.086.834.408,00	1.086.834.408,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	1.086.834.408,00	1.086.834.408,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	1.086.834.408,00	1.086.834.408,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas [illegible]	C	735.126.104,00	735.126.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	C	735.126.104,00	735.126.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	735.126.104,00	735.126.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	735.126.104,00	735.126.104,00	0,00
1.02	[illegible]		Puskesmas Sekarang Tua	C	764.950.189,00	764.950.189,00	0,00
1.02	[illegible]	4	PENDAPATAN DAERAH	C	764.950.189,00	764.950.189,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	764.950.189,00	764.950.189,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	764.950.189,00	764.950.189,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Pasir Sakti	C	2.215.805.578,00	2.215.805.578,00	0,00
1.02	[illegible]	4	PENDAPATAN DAERAH	C	2.215.805.578,00	2.215.805.578,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	C	2.215.805.578,00	2.215.805.578,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	2.215.805.578,00	2.215.805.578,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas [illegible]	C	744.809.295,00	744.809.295,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	C	744.809.295,00	744.809.295,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	744.809.295,00	744.809.295,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	744.809.295,00	744.809.295,00	0,00
1.02	[illegible]		Puskesmas Rawas	C	1.173.040.053,00	1.173.040.053,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	C	1.173.040.053,00	1.173.040.053,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	1.173.040.053,00	1.173.040.053,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	1.173.040.053,00	1.173.040.053,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Muara Kelingi	C	1.408.117.432,00	1.408.117.432,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	C	1.408.117.432,00	1.408.117.432,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	1.408.117.432,00	1.408.117.432,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	1.408.117.432,00	1.408.117.432,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Simpur [illegible]	C	2.034.509.800,00	2.034.509.800,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4	PENDAPATAN DAERAH	C	2.034.509.800,00	2.034.509.800,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1	PENDAPATAN ASLI [illegible]	C	2.034.509.800,00	2.034.509.800,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	2.034.509.800,00	2.034.509.800,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas [illegible] Baru	C	1.537.082.467,00	1.537.082.467,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	C	1.537.082.467,00	1.537.082.467,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	C	1.537.082.467,00	1.537.082.467,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	C	1.537.082.467,00	1.537.082.467,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Rantau Ulaya	C	792.532.836,00	792.532.836,00	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4	PENDAPATAN DAERAH	0	792.532.836,00	792.532.836,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	792.532.836,00	792.532.836,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	792.532.836,00	792.532.836,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Pugung Raharjo	0	1.574.056.521,00	1.574.056.521,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.574.056.521,00	1.574.056.521,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.574.056.521,00	1.574.056.521,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.574.056.521,00	1.574.056.521,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas	0	2.567.766.351,00	2.567.766.351,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.567.766.351,00	2.567.766.351,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	2.567.766.351,00	2.567.766.351,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.567.766.351,00	2.567.766.351,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Sobonawono	0	2.078.455.082,00	2.078.455.082,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.078.455.082,00	2.078.455.082,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	2.078.455.082,00	2.078.455.082,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.078.455.082,00	2.078.455.082,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Ratanghari	0	1.596.785.752,00	1.596.785.752,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.596.785.752,00	1.596.785.752,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.596.785.752,00	1.596.785.752,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.596.785.752,00	1.596.785.752,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Sukaraja Barat	0	1.246.429.763,00	1.246.429.763,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.246.429.763,00	1.246.429.763,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.246.429.763,00	1.246.429.763,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.246.429.763,00	1.246.429.763,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Pekalongan	0	1.527.979.580,00	1.527.979.580,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.527.979.580,00	1.527.979.580,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.527.979.580,00	1.527.979.580,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.527.979.580,00	1.527.979.580,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		Puskesmas Peniangan	0	1.057.131.701,00	1.057.131.701,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.057.131.701,00	1.057.131.701,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.057.131.701,00	1.057.131.701,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.057.131.701,00	1.057.131.701,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		Puskesmas Raja Basa Lama	0	1.418.403.072,00	1.418.403.072,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.418.403.072,00	1.418.403.072,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.418.403.072,00	1.418.403.072,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.418.403.072,00	1.418.403.072,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Tamban Subur	0	1.287.324.759,00	1.287.324.759,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.287.324.759,00	1.287.324.759,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1.287.324.759,00	1.287.324.759,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.287.324.759,00	1.287.324.759,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		Puskesmas Raja Setun	0	688.613.785,00	688.613.785,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	4	PENDAPATAN DAERAH	0	688.613.785,00	688.613.785,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	688.613.785,00	688.613.785,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	688.613.785,00	688.613.785,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029		Puskesmas Gambarang	0	773.070.691,00	773.070.691,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	4	PENDAPATAN DAERAH	0	773.070.691,00	773.070.691,00	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	773.070.691,00	773.070.691,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	773.070.691,00	773.070.691,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030		Puskesmas Boja Caka	0	571.515.989,00	571.515.989,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	4	PENDAPATAN DAERAH	0	571.515.989,00	571.515.989,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0030	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	571.515.989,00		
1.02	[illegible] 01.0030	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	571.515.989,00	571.515.989,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031		Puskesmas Sukadana	0	2.276.401.678,00	2.276.401.678,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.276.401.678,00	2.276.401.678,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.276.401.678,00	2.276.401	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0031	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.276.401.678,00	2.276.401	
1.02	[illegible] 0.00.01.0032		Puskesmas Sum Emas	0	934.218.782,00	934.218.782,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	4	PENDAPATAN DAERAH	0	934.218.782,00	934.218.782,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	934.218.782,00	934.218.782,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0032	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	934.218.782,00	934.218.782,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033		Puskesmas Purbolinggo	0	2.065.971.395,00	2.065.971.395,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.065.971.395,00	2.065.971.395,00	0,00
1.02	[illegible]	4.1	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0033	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.065.971.395,00	2.065.971.395,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034		Puskesmas Labuhan	0	1.612.931.230,00	1.612.931.230,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.612.931.230,00	1.612.931.230,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1.612.931.230,00	1.612.931.230,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0034	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.612.931.230,00	1.612.931.230,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0035		Puskesmas Way Mili	0	2.372.052.280,00	2.372.052.280,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0035	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.372.052.280,00	2.372.052.280,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0035	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.372.052.280,00	2.372.052.280,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0035	4.1.04	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.639.000.000	742.729.409,00	(896.270.591,00)	45,32
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.639.000.000	742.729.409,00	(896.270.591,00)	45,32
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.639.000.000	742.729.409,00	(896.270.591,00)	45,32
1.03	[illegible]	4.1	[illegible]	1.639.000.000	[illegible]	[illegible]	45,32
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.639.000.000	742.729.409,00	(896.270.591,00)	
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	586.900.000	147.450.000,00	(439.450.000,00)	
2.39			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000	0,00	(100.000.000,00)	
2.39	3.26.2.39.0.00.01.0000		Dinas Pemuda, Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000	0,00	(100.000.000,00)	0,00
2.39	3.26.2.39.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	0,00	(100.000.000,00)	0,00
2.39	3.26.2.39.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	0,00	(100.000.000,00)	
2.39	3.26.2.39.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	0,00	(100.000.000,00)	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	45.350.000	0,00	[illegible]	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga [illegible]	45.350.000	0,00	(45.350.000,00)	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	45.350.000	0,00	(45.350.000,00)	0,00
2.07	[illegible]	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.350.000	0,00	(45.350.000,00)	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	45.350.000	0,00	(45.350.000,00)	
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	441.550.000	147.450.000,00	(294.100.000,00)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	441.550.000	147.450.000,00	(294.100.000,00)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	441.550.000	147.450.000,00	[illegible]	

2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	441.550.000	147.450.000,00	[illegible]	33,39
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	441.550.000	147.450.000,00	[illegible]	33,39
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.143.900.000	2.678.173.000,00	[illegible]	85,39
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	[illegible]	2.678.173.000,00	7465.727.000,00]	85,39
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000		Dinas [illegible] dan [illegible]	[illegible]	2.678.173.000,00	7465.727.000,00]	85,39
3.30	[illegible]	4	PENDAPATAN [illegible]	3.143.900.000	2.678.173.000,00	[illegible]	85,25
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.143.900.000	2.678.173.000,00	[illegible]	85,25
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000	0,00	[illegible]	0,00
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.000.000	0,00	[illegible]	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	80.000.000	0,00	[80.000.000,00]	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		[illegible]	80.000.000	0,00	[80.000.000,00]	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	80.000.000	0,00	[80.000.000,00]	0,00
[illegible]	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.02			KEUANGAN	364.682.288.419	2.236.521.574.298,21	[1128.168.715.120,79]	86,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		[illegible] dan Aset [illegible]	2.275.847.289.419	2.152.356.529.403,45	[121.490.759.958,55]	94,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.275.847.289.419	2 [illegible]	[illegible]	94,57
[illegible]	[illegible]	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH [illegible]	[illegible]	22.880.536.804,45	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.204.913.365,59	[illegible]	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil [illegible] Daerah [illegible]	18.750.614	19 [illegible]	524.109.163,86	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4.1.04	Lain-lain PAD [illegible] Sah	2 [illegible]	2.129.471.092.556,00	[1116.024.682.485,00]	[illegible]
5.02	[illegible]	4.2	PENDAPATAN [illegible] ERAH	2.076.296.357.000	1.949.850.925.177,00	[illegible]	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	[illegible] Transfer [illegible] Pusat	569.200.138.144	329.591.067.479,00	[illegible]	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	[illegible] Transfer Antar Daerah	88.835.000.000	84.157.044.837,76	[4.677.955.162,24]	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Penda[illegible] Daerah	88.835.000.000	84.157.044.837,76	[4.677.955.162,24]	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	96.085.000.000	84.084.633.163,00	[10.000.366.837,00]	95,46
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	[illegible] ASLI [illegible]	87.870.000.000	87.560.226.524,00	[4.319 [illegible]	[illegible]
5.02	[illegible]	4.1.01	[illegible]	50.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4.1.02	Retribusi [illegible]	125.000.000	[illegible]	[369.384. [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	4.1.04	Lain- lain PAD [illegible] Sah	750.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.02	[illegible]	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.02	[illegible]	4.3.01	[illegible] Hibah	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		BAGIAN [illegible] RAKYAT	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	4	PENDAPATAN DAERAH	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1	[illegible] ASLI DAERAH [illegible]	0	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	2.309.190.574.317	[illegible]	[illegible]	90,20
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.410.436.665.861,25	[illegible]	89,62
1			[illegible] PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN [illegible]	[illegible]	808.359.246.270,15	[37.611.806.795,85]	95,55
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	[illegible]	808.359.246.270,15	[37.611.806.795,85]	95,55
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan [illegible]	[illegible]	808.359.246 [illegible]	[illegible]	95,55
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	[illegible]	770.460.833.133,15	[29.899.707.712,85]	95,90
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	549.246.810.490	518.749.950.494,00	[30.996.860.012,00]	94,36
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible] Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.975.671.710	114.634.914.477,00	2.959.242.767,000	102,64
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	78.660.853.600	76.797.988.352,15	(1.862.865.447,85)	97,63
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	105.187.716.749	87.676.432.666,00	(17.511.303.083,00)	83,35
1.01	[illegible]	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.260.688.420	34.115.573.370,00	(2.347.115.050,00)	88,24
1.01	[illegible]	5.2.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.796.348.329	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.330.680.000	32.655.111.988,00	(2.675.568.012,00)	[illegible]
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	347.010.523.165	305.985.945.340,00	(40.441.983.024,36)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	246.189.857.697	185.179.084.[illegible]	(21.010.772.727,17)	89,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	[illegible]	185.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	107.358.128.571	105.766.927.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.289.686.896	15.149.179.266,83	[illegible]	94,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.572.072.521	2.395.272.800,00	(176.799.72[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal [illegible] dan [illegible]	13.717.614.375	12.953.[illegible]	(764.713.908,17)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Rumah Sakit [illegible] Daerah Sukoharjo	[illegible]	[illegible]220.269 [illegible]	[illegible]	96,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	51.977.850.454	50.220.269.[illegible]42,00	(1.757.581.438,00)	96,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.969.346.543	47.999.256.607,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.926.139.653	1.295.770.000,00	(2.922.169.653,00)	33,00
1.02	[illegible]	[illegible] 02	[illegible]	[illegible]	46.753.486.607,00	1.712.279.717,00	103,80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.261.012.635,00	(747.491.475,00)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]491 [illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan [illegible]	3.010.879.637	2.892.[illegible]	588.127 [illegible]	82,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas [illegible]	3[illegible]	2.494.751 [illegible]	[illegible]87[illegible]	82,79
1.02	[illegible]	5	BELANJA DAERAH	[illegible]	2.329.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	[illegible]	1.284.090.800	1.061.682.563,80	(222.348.266,20)	82,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.521.298.807	1.266.558.260,20	(254.740.506,80)	83,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.960.300	164.911.000,00	(42.039.300,00)	79,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA [illegible]	183.550.300	141.931.000,00	[illegible]	77,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000	23.000.000,00	(40.000,00)	99,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.05	Belanja Modal [illegible] dan [illegible]	1.961.908.415	1.552.479.714,00	[illegible]	79,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas [illegible] [illegible]	1.563.308.415	1.552.479.714,00	1411 [illegible]	[illegible]
1.02	[illegible]	5	[illegible]	1.929.896.415	1.524.300.850,00	1405.597.565,00)	[illegible]
[illegible]	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	[illegible]	583.826 [illegible]	[illegible]	227 [illegible]	93,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	82,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	[illegible]	94.010.000	[illegible]	[illegible]	82,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.791.335.750	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas [illegible] Tani	1.791.335.[illegible]	1.591.428.846,71	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	[illegible]	1.712.168.050	1.551.382.846,71	[illegible]	[illegible]
1.02	[illegible]	5.1	[illegible]	634.498.211	[illegible]	197 [illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.077.669.839	965.967.832,71	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.167.700	10.966.000,00	711. [illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	79.167.700	10.966.000,00	(68.711.700,00)	14,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas [illegible]	2.435.893.596	3.845.018.028,20	(590.875.567,80)	75,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	[illegible] DAERAH	2.435.893.596	3.845.018.028,20	(590.875.567,80)	75,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	[illegible] OPERASI	2.345.733.596	3.764.710.028,20	(570.003.567,80)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	977.384.680	731.098.024,00	(256.285.656,00)	74,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.368.348.916	1.043.[illegible]	[illegible]	76,23
[illegible]	[illegible]	5.2	BELANJA MODAL	90.180.000	75.308.000,00	(14.872.000,00)	83,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.996.000	28.012.500,00	(13.983.500,00)	66,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.184.000	7.345.000,00	(839.000,00)	89,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.04	Belanja Modal [illegible] Jaringan dan Irigasi	40.000.000	39.950.500,00	(49.500,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Pustesmas [illegible]	2.038.612.819	1.590.020.917,80	(448.591.901,20)	78,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	[illegible] DAERAH	2.038.612.819	1.590.020.917,80	(448.591.901,20)	78,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.912.916.619	1.548.911.417,80	(364.005.201,20)	80,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	665.406.051	617.005.117,00	(48.400.934,00)	92,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.247.510.568	931.906.300,80	(315.604.267,20)	73,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	125.696.200	41.109.500,00	(84.586.700,00)	32,71
1.02	[illegible]	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan [illegible]	125.696.200	41.109.500,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Wana	[illegible]	2.013.437.[illegible]	(490.361.470,00)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5	[illegible] DAERAH	2.045.799.305	[illegible]	[illegible]	82,36
1.02	[illegible]	5.1	BELANJA OPERASI	2.363.799.305	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	883.289.280	756.213.969,00	(127.005.321,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.580.025	1.233.323.876,00	(267.256.149,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal [illegible] dan Mesin	56.168.000	23.900.000,00	(32.268.000,00)	46,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.04	Belanja Modal [illegible]	8.841.700	0,00	[illegible]	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas [illegible]	5.450.089.735	4.116.135.360,00	(1.333.954.375,00)	75,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	[illegible] DAERAH	5.450.089.735	4.116.135.360,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	[illegible] OPERASI	5.193.018.503	4.009.161.360,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	[illegible]	3.872.152.763,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.809.851.805	2.137.010.597,00	(672.841.208,00)	76,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	256.991.234	106.973.000,00	(150.019.234,00)	41,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.991.234	106.973.000,00	(150.019.234,00)	41,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas [illegible]	1.970.448.617	1.745.265.596,00	[illegible]	88,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA [illegible]	1.970.448.617	1.745.265.596,00	(225.183.021,00)	88,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.321.236.117	1.102.065.596,00	(219.170.521,00)	83,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	881.647.000	812.059.808,00	[illegible]	92,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.589.117	890.005.988,00	[illegible]	85,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	49.212.500	43.200.000,00	(6.012.500,00)	87,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.212.500	43.200.000,00	(6.012.500,00)	87,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Pakuan [illegible]	1.471.397.000	1.278.158.268,00	(193.138.732,00)	86,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	[illegible] DAERAH	1.471.397.000	1.278.158.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA [illegible]	[illegible]	1.247.[illegible]	[illegible]	87,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	575.161.350	541.352.058,00	(33.809.112,00)	94,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.179.560	706.520.950,00	[illegible]	82,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	35.956.250	30.785.250,00	[illegible]	81,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.956.250	30.785.250,00	[illegible]	81,95

1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011		Puskesmas Suka	1.856.682.001	1.375.188.478,00	(481.493.523,00)	74,07
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	1.856.682.001	1.375.188.428,00	(481.493.573,00)	74,07
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.789.732.046	1.328.681.221,00	(461.050.825,00)	74,24
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	570.814.042	496.630.096,00		87,01
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.918.004	832.051.126,00	(382.871.886,00)	68,30
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	66.944.955	46.507.203,00	(20.437.748,00)	69,47
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.944.955	46.507.203,00	(17.437.748,00)	72,73
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000	0,00	(3.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0012		Puskesmas Pasir Saku	3.691.008.128	3.238.317.457,00	(452.690.671,00)	92,76
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0012	5	BELANJA DAERAH	3.691.008.128	3.238.317.457,00	(452.690.671,00)	92,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.308.673.188	3.189.417.457,00	(119.255.731,00)	96,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.967.672	1.288.039.786,00		97,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.705.516	1.900.977.671,00		95,40
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	382.334.940	48.900.000,00	(333.434.940,00)	12,79
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.334.940	48.900.000,00	(73.434.940,00)	39,97
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0012	5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	60.000.000	0,00	(60.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0013		Puskesmas Bengkuring	1.849.929.773	1.277.015.841,36	(561.913.381,64)	69,04
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.839.029.223	1.277.015.841,36	(561.913.381,64)	69,44
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.763.369.223	1.227.505.841,36		69,62
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	764.864.200	478.574.698,72	(286.289.501,64)	75,04
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.705.023	648.131.143,00		64,89
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	75.560.000	48.510.000,00		64,20
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0013	5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.560.000	49.510.000,00	(26.050.000,00)	65,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Mesjid	2.409.702.377	1.950.579.238,00	(459.123.139,00)	80,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	2.409.702.377	1.950.579.238,00		80,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.309.502.377	1.946.114.238,00	(363.388.139,00)	84,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	827.587.000	710.693.563,00	(116.893.437,00)	85,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.915.377	1.235.520.675,00	(246.394.702,00)	83,47
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0014	5.2	BELANJA MODAL	100.200.000	4.465.000,00	(95.835.000,00)	4,46
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.200.000	4.465.000,00	(95.835.000,00)	4,46
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0015		Puskesmas Bees Hempasan	2.400.987.626	2.008.119.508,00	(392.868.028,00)	83,64
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	2.268.303.426	1.936.547.598,00	(331.755.828,00)	85,37
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	851.128.000	774.540.391,00	(76.587.609,00)	91,00
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	1.407.175.426	1.161.007.207,00	(246.168.219,00)	82,51
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.684.200	72.572.000,00	(60.112.200,00)	54,70
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0015	5.2	BELANJA MODAL	3.613.643.908	2.807.116.132,00	(806.527.776,00)	77,68
1.02	1.02.0.30.0.00.03.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.613.543.908	2.807.116.132,00	(806.427.776,00)	77,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Sumber Sari	3.413.243.908	2.807.116.132,00	(606.127.776,00)	82,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	3.506.835.003	3.302.723.915,00	(204.111.085,00)	94,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.908.908	3.019.290.649,00	(296.618.259,00)	91,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.01	Belanja Pegawai	100.900.000	80.103.568,00		79,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.971.118.026	2.194.512.697,00	(776.605.329,00)	73,86
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0016	5.2	BELANJA MODAL				
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1.02	1.02.0.30.0.00.01.0017		Puskesmas Mataram Baru				

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	2.873.138.076	1.584.912.697,00	(688.205.379,00)	76,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.737.638.076	2.135.862.697,00	(601.755.379,00)	78,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.01	[illegible] Pegawai	852.171.000	838.768.989,00	(13.402.011,00)	98,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	1.885.467.076	1.297.091.708,00	(588.353.368,00)	68,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2	[illegible] MODAL	135.500.000	49.050.000,00	(86.450.000,00)	36,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	135.500.000	49.050.000,00	(86.450.000,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Raman Utara	2.111.872.694	1.359.754.972,00	(752.117.722,00)	64,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5	BELANJA DAERAH	2.111.872.694	1.359.754.972,00	(752.117.722,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.981.342.694	1.337.641.000,00	[illegible]	68,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.01	Belanja Pegawai	685.745.000	546.423.161,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	1.295.597.694	786.117.841,00	[illegible] 179,35	60,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	130.730.000	27.113.970,00	(103.616.030,00)	85,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.03	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	130.730.000	27.113.970,00	(103.616.030,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Pugung Raharjo	2.947.917.173	2.328.098.456,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	2.947.917.173	2.328.098.456,00	(619.878.717,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.730.080.833	2.287.483.733,00	(442.597.100,00)	83,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.040.092.000	902.535.820,00	(137.556.180,00)	86,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	1.689.988.833	1.384.947.893,00	[illegible]	81,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	217.836.340	40.554.743,00	(177.281.597,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	217.836.340	40.554.743,00	(177.281.597,00)	18,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		[illegible]	3.735.451.504	3.200.273.632,00	(535.177.872,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA [illegible]	3.735.451.504	3.200.273.632,00	(535.177.872,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	3.541.756.504	3.070.967.382,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.556.216.440	1.476.630.897,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.540.104	1.594.336.485,00	(391.203.619,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	193.695.000	129.306.250,00	(64.388.750,00)	66,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.695.000	129.306.250,00	[illegible]	66,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Gilahwaone	3.475.945.552	2.958.480.772,00	(517.464.780,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5	BELANJA DAERAH	3.475.945.552	2.958.480.772,00	(517.464.780,00)	85,11
1.02	[illegible]	5.1	[illegible]	3.305.845.552	[illegible]	[illegible]	86,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.419.629.000	1.308.444.692,00	(111.180.308,00)	92,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.936.220.552	1.587.436.080,00	(348.784.472,00)	82,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	130.100.000	62.600.000,00	(67.500.000,00)	48,12
1.02	[illegible]	5.2.03	[illegible] Modal [illegible] dan Mesin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas [illegible]ari	2.780.936.601	2.198.810.078,00	(582.126.523,00)	79,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5	BELANJA DAERAH	2.780.936.601	2.198.810.078,00	(582.126.523,00)	79,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.645.046.601	2.063.862.078,00	(581.184.523,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	1.192.900.041	963.724.571,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.146.456	1.100.137.507,00	[illegible]	75,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2	[illegible] MODAL	135.890.000	134.948.000,00	[illegible]	99,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.890.000	134.948.000,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas [illegible] Mulyo	2.829.785.587	1.989.026.976,00	[illegible] 758.611	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5	BELANJA DAERAH	2.829.785.587	1.989.026.976,00	(840.758.611,00)	70,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	2.789.785.587	1.950.426.976,00	(839.358.611,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.137.409.920	845.269.724,00	[illegible]	[illegible]

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.02	[illegible]	1.622.175.667	1.305.157.252,00	(317.118.415,00)	68,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	70.000.000	38.600.000,00	(31.400.000,00)	55,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000	38.600.000,00	(31.400.000,00)	55,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas [illegible]	2.725.382.823	2.214.004.014,20	(511.378.808,80)	[illegible]
[illegible]	1.02.0.00.0.00.01.0024	5	BELANJA DAERAH	2.725.382.823	2.214.004.014,20	(511.378.808,80)	[illegible]
1.02	[illegible]	5.1	BELANJA [illegible]	2.548.654.121	2.065.904.014,20	(482.750.106,80)	81,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	1.183.669.158	989.056.026,60	(194.613.131,40)	83,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.987.263	1.076.047.987,60	(288.139.275,40)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	176.656.400	148.100.000,00	(28.556.400,00)	83,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	176.656.400	148.100.000,00	(28.556.400,00)	83,84
1.02	[illegible]		[illegible]	2.117.285.438	1.538.028.472,00	(579.256.846,00)	72,64
1.02	1.02.[illegible]	5	BELANJA DAERAH	2.117.285.438	1.538.028.472,00	(579.256.846,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1	Belanja OPERASI	2.085.833.318	1.506.026.472,00	(579.256.846,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.01	[illegible]	915.581.000	677.581.603,00	(238.225.397,00)	74,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.02	[illegible] dan Jasa	1.172.072.318	828.444.869,00	(343.627.449,00)	70,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2	BELANJA MODAL	31.400.000	31.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	31.400.000	31.400.000,00	0,00	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		[illegible] Rawa Laut	2.783.493.227	2.200.897.924,33	(582.595.297,67)	79,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5	[illegible]	2.783.493.227	2.200.897.924,33	(582.595.297,67)	79,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.624.140.965	2.097.249.766,33	(526.891.198,67)	79,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	1.152.545.072	969.461.102,90	(183.083.969,10)	[illegible]
[illegible]	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.02	[illegible] dan Jasa	1.471.595.893	1.127.788.693,43	(343.807.229,57)	76,64
1.02	[illegible]	5.2	[illegible]	159.352.227	103.648.128,00	(55.704.099,00)	65,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.352.227	103.648.128,00	(55.704.099,00)	65,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Tumbuh Subur	2.514.876.582	1.773.792.457,00	(741.084.125,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5	BELANJA DAERAH	2.514.876.582	1.773.792.457,00	(741.084.125,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	2.331.284.282	1.595.617.457,00	(735.666.825,00)	68,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.01	Belanja Pegawai	1.115.893.565	916.429.746,00	(199.463.819,00)	82,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.390.717	679.187.711,00	(536.203.006,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	183.592.300	178.175.000,00	(5.417.300,00)	97,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.592.300	178.175.000,00	(5.417.300,00)	97,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		[illegible] Kesehatan	1.467.002.064	1.329.849.611,00	(137.152.453,00)	90,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5	BELANJA DAERAH	1.467.002.064	1.329.849.611,00	(137.152.453,00)	90,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.466.502.064	1.329.349.686,00	(137.152.378,00)	90,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1.01	[illegible] Pegawai	512.529.356	456.308.635,00	(56.220.721,00)	89,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.812.728	849.541.053,00	(101.271.675,00)	89,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	3.500.000	3.459.925,00	(75,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000	3.459.925,00	(75,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029		Puskesmas Gani Marno	1.604.676.886	1.281.081.966,00	(323.594.520,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5	BELANJA DAERAH	1.604.676.886	1.281.081.966,00	(323.594.520,00)	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.572.576.886	1.251.081.966,00	(321.094.920,00)	79,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1.01	[illegible] Pegawai	670.210.892	615.368.963,00	(55.382.129,00)	91,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.565.994	636.113.303,00	(265.752.391,00)	70,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	32.100.000	29.600.000,00	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.100.000	29.600.000,00	[illegible]	92,21

1.01	1.02.0.00.0.00.01.0040		Puskesmas Bras Leka	1.330.412.000	1.045.977.922,99	(174.434.077,01)	85,58
1.01	1.02.0.00.0.00.01.0040	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.182.222.000	1.008.177.922,99	(374.044.077,01)	85,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0040	5.1.01	[illegible] Pegawai	473.130.262	400.938.926,54	[illegible]	84,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.091.738	607.238.996,45	(101.852.941,55)	85,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	28.190.000	27.750.000,00	(440.000,00)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0040	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.190.000	27.750.000,00	(440.000,00)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041		Puskesmas Sukadana	4.005.786.241	3.206.438.258,00	[illegible]	80,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041	5	[illegible] DAERAH	4.005.786.241	3.205.4[illegible]	[illegible]	80,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041	5.1	BELANJA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.711.428.177	[illegible]	[illegible]	77,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.016.858.064	1.715.797.247,00	(301.060.817,00)	85,07
[illegible]	1.02.0.00.0.00.01.0041	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	256.500.000	196.625.000,00	(59.875.000,00)	61,06
1.02	[illegible]	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.865.384.266	[illegible]	[illegible]	77,66
1.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.865.384.266	[illegible]	(416.645.734,00)	77,66
1.02	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0042	5.1	[illegible] OPERASI	739.169.037	640.476.315,00	(98.692.722,00)	86,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0042	5.1.01	Belanja Pegawai	1.080.021.979	747.499.717,00	(332.522.262,00)	69,21
1.02	[illegible]	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0042	5.2	BELANJA MODAL	66.193.250	60.762.500,00	(5.430.750,00)	91,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.559.031.052	2.548.727 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0043		Puskesmas Perbolingga	[illegible]	2.548.727 [illegible]	(930.349.448,38)	74,42
1.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	623 [illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	[illegible]	5.1	[illegible]	1 [illegible]	1.101 [illegible]	773 [illegible]	92,93
1.01	1.02.0.00.0.00.01.0043	5.1.01	Belanja Pegawai	2.035.057.052	1.[illegible]	[illegible]	74,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0043	5.2	[illegible]	318.550.000	21.325.000,00	[illegible]	6,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0043	5.2.02	Belanja Modal [illegible] dan Mesin	2.740.890.999	2.430.197.359,00	(306.693.640,00)	88,81
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Labu	2.740.890.999	2.430.197.359,00	[illegible]	88,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0044	5	RELANJA [illegible]	3.576.023.973	2.354.443.259,00	[illegible]	65,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0044	5.1	[illegible]	1.019.604.700	1.002.246.252,01	(17.358.447,99)	98,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0044	5.1.01	[illegible]	1.556.417.270	1.349.197.006,99	(207.220.263,01)	86,69
1.02	[illegible]	1.02	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0044	[illegible]	BELANJA MODAL	164.066.404	82.754.000,00	(82.314.969,00)	50,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0044	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	3.304.186.300	3.008.539.201,00	(295.646.799,00)	91,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045		Puskesmas [illegible] Mu	1.904.186.300	3.008.539.201,00	[illegible]	91,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5	[illegible] DAERAH	2.953.308.700	2.693.234.426,00	[illegible]	91,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.1	BELANJA OPE[illegible]	1.199.347.341	1.102.218.135,00	[illegible]	91,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.1.01	[illegible] Pegawai	1.753.962.359	1.591.006.291,00	[illegible]	90,7[illegible]
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.876.300	315.314.[illegible]	[illegible]	89,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.2	BELANJA MODAL	185.876.300	155.314.[illegible]	[illegible]	83,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.2.02	[illegible] Modal [illegible] dan Mesin	165 [illegible]	150 [illegible]	(15.000.000,00)	90,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0045	5.2.03	[illegible] Modal [illegible] dan Bangunan	328.206.967.881	249.501.067.[illegible]	[illegible] 705.900	76,02
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN [illegible]	328.206.967.881	249.501.067.[illegible]	(78.705.900.967,94)	76,02
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas [illegible] Umum dan Penataan [illegible]				

1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	328.206.967.881	204.941.067.913,06	(76.705.900.367,94)	76,02
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	91.312.956.471	67.563.787.842,23	(23.749.168.628,77)	[illegible]
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.258.492.994	8.888.665.566,00	(369.827.428,00)	96,01
1.03	[illegible]01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.553.450.079	11.394.069.150,06	(5.159.380.928,94)	68,84
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	65.501.040.398	42.381.069.176,17	(23.119.987.271,83)	64,70
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	235.893.984.410	186.847.279.670,83	(50.056.704.739,17)	[illegible]
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.625.000	0,00	(67.625.000,00)	[illegible]
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal [illegible] dan Bangunan	10.462.730.462	6.625.652.502,59	(3.837.077.859,41)	63,33
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal [illegible] Jaringan dan Irigasi	226.953.629.048	180.211.627.168,24	(46.742.001.879,76)	79,40
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN [illegible] PERUMAHAN DAN [illegible] PERMUKIMAN	14.408.928.308	13.258.361.995,00	(1.150.566.313,00)	[illegible]
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000		[illegible] Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	14.408.928.308	13.258.361.995,00	(1.150.566.313,00)	92,01
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.408.928.308	13.258.361.995,00	(1.150.566.313,00)	92,01
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.299.591.033	10.233.247.770,00	(1.066.343.263,00)	90,56
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.542.089.099	5.215.645.490,00	(326.453.609,00)	94,11
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.341.024.209	3.964.489.040,00	[illegible]	91,32
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.746.467.725	1.641.113.250,00	[illegible]	94,03
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000	760.000.000,00	(10.000.000,00)	98,70
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.109.337.275	2.927.114.225,00	(182.223.050,00)	94,14
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.103.280	242.909.200,00	(194.080,00)	99,92
1.04	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal [illegible] Jaringan dan Irigasi	2.366.033.995	2.284.205.025,00	(81.828.970,00)	96,54
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM S	26.731.890.708	25.542.116.235,00	(1.189.572.373,00)	95,55
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	17.386.983.346	16.549.166.686,00	(837.816.660,00)	95,18
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.386.983.346	16.549.166.686,00	(837.816.660,00)	95,18
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.291.145.091	16.464.891.686,00	(826.253.405,00)	95,22
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.317.103.739	6.146.297.225,00	(170.806.514,00)	97,30
1.05	[illegible]	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.953.999.312	10.288.594.461,00	(665.404.851,00)	[illegible]
[illegible]	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	95.840.255	94.275.000,00	(1.565.255,00)	[illegible]
1.05	[illegible]	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.840.255	94.275.000,00	(1.565.255,00)	98,37
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan [illegible] Bencana Daerah	9.344.707.362	8.992.951.449,00	(351.755.913,00)	96,24
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	9.344.707.362	8.992.951.449,00	(351.755.913,00)	96,24
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.005.638.762	6.694.521.449,00	(311.097.313,00)	[illegible]
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.133.035.732	2.984.817.438,00	(148.211.054,00)	95,27
1.05	[illegible]	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.590.030	3.709.703.771,00	(162.886.259,00)	95,79
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.339.068.600	2.298.430.000,00	(40.638.600,00)	[illegible]
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.339.068.600	2.298.430.000,00	(40.638.600,00)	98,26
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.111.589.278	7.411.926.099,00	[illegible]	91,38
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	8.111.589.278	7.411.926.099,00	[illegible]	91,38
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.111.589.278	7.412.526.099,00	(699.063.179,00)	91,38
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.099.710.058	7.412.526.099,00	(687.183.959,00)	91,51
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.557.895.308	3.233.438.194,00	[illegible]	90,88
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.163.864.750	3.844.594.905,00	(319.269.805,00)	92,33
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	225.000.000	200.000.000,00	(25.000.000,00)	88,89
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	152.950.000	134.500.000,00	(18.450.000,00)	87,94
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.879.220	0,00	(11.879.220,00)	0,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.879.270	0,00	(11.879.270,00)	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	92.830.017.246	85.006.114.521,73	(7.823.902.724,27)	91,57
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	405.225.000	333.476.686,00	(71.748.314,00)	82,29
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	405.225.000	333.476.686,00	(71.748.314,00)	82,29
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	405.225.000	333.476.686,00	(71.748.314,00)	82,29
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	400.224.869	328.481.575,00	(71.743.294,00)	82,07
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.224.869	328.481.575,00	(71.743.294,00)	82,07
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.995.111	4.995.111,00	0,00	100,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.995.111	4.995.111,00	0,00	100,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.633.577.525	5.633.522.708,00	(1.000.054.817,00)	84,92
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.633.577.525	5.633.522.708,00	(1.000.054.817,00)	84,92
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.633.577.525	5.633.522.708,00	(1.000.054.817,00)	84,92
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.514.254.303	5.521.372.708,00	(992.881.595,00)	84,76
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.985.281.475	3.841.105.891,00	(144.175.584,00)	96,38
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.972.828	1.680.266.817,00	(848.706.009,00)	66,44
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	119.323.224	111.350.000,00	(7.973.224,00)	93,32
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.323.224	111.350.000,00	(7.973.224,00)	93,32
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN	650.000.000	306.450.747,00	(343.549.253,00)	47,15
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	650.000.000	306.450.747,00	(343.549.253,00)	47,15
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	650.000.000	306.450.747,00	(343.549.253,00)	47,15
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	643.842.669	300.601.747,00	(343.241.916,00)	46,68
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.160.000	5.160.000,00	0,00	100,00
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.682.669	295.440.747,00	(343.241.916,00)	46,26
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.157.337	5.850.000,00	(307.337,00)	95,01
2.09	2.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.157.337	5.850.000,00	(307.337,00)	95,01
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	329.610.799	146.095.988,00	(183.514.811,00)	44,33
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kearsipan dan Perpustakaan	329.610.799	146.095.988,00	(183.514.811,00)	44,33
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	329.610.799	146.095.988,00	(183.514.811,00)	44,33
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	307.714.935	126.795.988,00	(180.918.951,00)	41,21
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.714.935	126.795.988,00	(180.918.951,00)	41,21
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.895.860	19.300.000,00	(2.595.860,00)	88,14
2.10	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.895.860	19.300.000,00	(2.595.860,00)	88,14
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.639.942.950	3.088.552.535,00	(551.390.415,00)	84,85
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	3.639.942.950	3.088.552.535,00	(551.390.415,00)	84,85
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.639.942.950	3.088.552.535,00	(551.390.415,00)	84,85
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.380.441.630	2.929.051.215,00	(451.390.415,00)	86,65
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.152.942.690	2.603.151.215,00	(549.791.475,00)	82,56
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	227.498.940	225.900.000,00	(1.598.940,00)	99,30
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	259.501.320	259.501.320,00	0,00	100,00
2.11	2.11.1.04.2.10.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.501.320	259.501.320,00	0,00	100,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.697.206.270	8.234.116.618,00	(463.089.652,00)	94,68
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.697.206.270	8.234.116.618,00	(463.089.652,00)	94,68
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.697.206.270	8.234.116.618,00	(463.089.652,00)	94,68
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.823.439.245	7.392.204.018,00	(431.235.227,00)	94,49
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.303.692.982	4.132.770.114,00	(170.922.868,00)	96,03

2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.539.746.263	3.279.411.904,00	(260.312.359,00)	92,60
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	872.767.025	841.912.600,00	131.854.425,00	96,35
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	872.767.025	841.912.600,00	131.854.425,00	96,35
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.388.794.643	6.800.801.315,00	(587.993.328,00)	92,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.388.794.643	6.800.801.315,00	(587.993.328,00)	92,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA	7.388.794.643	6.800.801.315,00	(587.993.328,00)	92,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.289.647.822	6.711.075.090,00	(578.572.732,00)	92,06
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.548.570.911	3.335.568.181,00	(213.002.730,00)	94,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.176.476.911	3.011.566.809,00	(164.910.102,00)	94,81
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000	240.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.800.000	124.140.000,00	(660.000,00)	99,47
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	99.146.821	89.726.225,00	(9.420.596,00)	90,50
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.146.821	89.726.225,00	(9.420.596,00)	90,50
2.14			PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	11.270.053.000	11.022.421.575,00	(247.631.425,00)	97,80
2.14	2.14.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	11.270.053.000	11.022.421.575,00	(247.631.425,00)	97,80
2.14	2.14.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.270.053.000	11.022.421.575,00	(247.631.425,00)	97,80
2.14	2.14.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.270.053.000	11.022.421.575,00	(247.631.425,00)	97,80
2.14	2.14.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	57.960.000	57.960.000,00	0,00	100,00
2.14	2.14.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.212.093.000	10.964.461.575,00	(247.631.425,00)	97,79
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.683.879.225	6.410.187.292,00	(273.691.933,00)	95,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	6.683.879.225	6.410.187.292,00	(273.691.933,00)	95,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.683.879.225	6.410.187.292,00	(273.691.933,00)	95,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.683.879.225	6.410.187.292,00	(273.691.933,00)	95,91
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.507.118.255	3.397.649.514,00	(109.468.741,00)	96,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.076.760.970	2.912.537.778,00	(164.223.192,00)	94,66
2.16			PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.194.469.906	8.848.128.140,00	(346.341.766,00)	96,23
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	9.194.469.906	8.848.128.140,00	(346.341.766,00)	96,23
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.194.469.906	8.848.128.140,00	(346.341.766,00)	96,23
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.111.514.364	8.766.106.740,00	(345.407.624,00)	96,21
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.878.830.829	3.736.819.173,00	(142.011.656,00)	96,34
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.732.703.535	4.531.180.807,00	(201.522.728,00)	95,74
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000,00	0,00	100,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	82.955.542	80.026.400,00	(2.929.142,00)	96,47
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.955.542	80.026.400,00	(2.929.142,00)	96,47
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.524.649.073	6.738.604.266,00	(786.044.807,00)	89,55
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	7.524.649.073	6.738.604.266,00	(786.044.807,00)	89,55
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.524.649.073	6.738.604.266,00	(786.044.807,00)	89,55
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.462.924.435	6.677.629.286,00	(785.295.149,00)	89,48
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.133.092.703	4.830.448.795,00	(302.643.908,00)	94,10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.089.831.732	1.847.180.533,00	(242.651.181,00)	88,39
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000	0,00	(240.000.000,00)	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	61.724.656	60.975.000,00	(749.656,00)	98,79
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.724.656	60.975.000,00	(749.656,00)	98,79
2.18			URUSAN PENANAMAN MODAL	8.485.523.372	7.828.482.543,73	[illegible]	92,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.485.523.372	7.828.482.543,73	[illegible]	92,26

2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.485.523.772	3.628.482.543,73	(857.040.806,27)	92,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.353.565.707	7.201.779.998,73	(851.785.708,27)	91,70
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible]	3.506.999.122	5.364.818.929,00	(141.180.193,00)	95,95
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	[illegible] dan Jasa	4.146.566.585	3.836.961.069,73	(509.585.515,27)	88,28
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	631.977.665	626.702.545,00	(5.275.120,00)	99,17
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan [illegible] Mesin	631.977.665	626.702.545,00	(5.275.120,00)	[illegible]
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.770.276.763	11.338.840.854,00	(1.431.435.908,00)	88,79
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas [illegible] dan [illegible]	12.770.276.763	11.338.840.854,00	(1.431.435.908,00)	88,79
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.770.276.763	11.338.840.854,00	(1.431.435.908,00)	88,79
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.443.468.898	11.029.472.354,00	(1.414.096.544,00)	[illegible]
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible] Pegawai	5.229.902.454	4.802.537.238,00	(427.365.216,00)	[illegible]
2.19	[illegible]	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	4.329.066.444	4.091.936.116,00	(237.130.328,00)	94,24
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.084.000.000	2.134.000.000,00	(950.000.000,00)	69,65
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	[illegible] MODAL	326.807.865	310.367.500,00	(16.440.365,00)	[illegible]
2.19	[illegible]	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.807.865	310.367.500,00	(16.440.365,00)	94,97
2.20			URUSAN [illegible] PEMERINTAHAN BIDANG [illegible]	278.147.188	247.332.900,00	(30.814.288,00)	88,92
2.20	2.16.2.20.0 [illegible]		Dinas [illegible] dan Informatika	278.147.188	247.332.900,00	(30.814.288,00)	88,92
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	278.147.188	247.332.900,00	(30.814.288,00)	88,92
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	[illegible] OPERASI	278.147.188	247.332.900,00	(30.814.288,00)	88,92
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	278.147.188	247.332.900,00	(30.814.288,00)	88,92
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	136.418.465	126.504.124,00	(9.914.341,00)	92,73
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	136.418.465	126.504.124,00	(9.914.341,00)	[illegible]
2.21	[illegible]	5	[illegible] DAERAH	136.418.465	126.504.124,00	(9.914.341,00)	92,73
2.21	[illegible]	5.1	BELANJA [illegible]	136.418.465	126.504.124,00	(9.914.341,00)	92,73
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	136.418.465	126.504.124,00	(9.914.341,00)	92,73
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.480.885.000	1.996.411.778,00	(484.473.222,00)	80,47
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		[illegible] Pendidikan dan [illegible]	2.480.885.000	1.996.411.778,00	(484.473.222,00)	80,47
2.22	[illegible]	5	BELANJA DAERAH	2.480.885.000	1.996.411.778,00	(484.473.222,00)	80,47
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.480.885.000	1.996.411.778,00	(484.473.222,00)	[illegible]
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	[illegible] dan Jasa	2.027.885.000	1.549.531.778,00	(478.353.222,00)	[illegible]
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	[illegible] Hibah	453.000.000	446.940.000,00	(6.060.000,00)	[illegible]
2.23			URUSAN PEM [illegible] BIDANG PERPUSTAKAAN	5.941.903.190	5.605.457.850,00	(336.445.340,00)	94,34
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas [illegible] dan [illegible]	5.941.903.190	5.605.457.850,00	(336.445.340,00)	94,34
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	[illegible] DAERAH	5.941.903.190	5.605.457.850,00	(336.445.340,00)	94,34
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.782.881.593	5.457.309.650,00	(325.571.943,00)	94,37
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible] Pegawai	4.454.506.437	0.904.715.642,00	[illegible]	[illegible]
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.375.156	1.152.634.008,00	[illegible]	86,77
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	159.021.597	148.108.200,00	[illegible]	[illegible]
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.971.477	96.500.000,00	(10.471.477)	90,21
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	[illegible]	Belanja Modal Aset [illegible]	52.450.120	51.608.200,00	(841.920,00)	[illegible]
2.24			[illegible] PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	319.454.877	300.726.602,00	(18.728.275,00)	94,14
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	319.454.877	300.726.602,00	(18.728.275,00)	94,14
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	319.454.877	300.726.602,00	(18.728.275,00)	[illegible]
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	269.389.215	250.946.602,00	(18.442.613,00)	93,15
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	269.389.215	250.946.602,00	[illegible]	93,15

2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.065.662	49.780.000,00	(285.662,00)	99,43
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0400	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.065.662	49.780.000,00	(285.662,00)	99,43
3			URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH	89.388.422.380	65.067.101.732,98	(21.301.318.667,02)	76,17
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERIKANAN	35.397.960.005	11.589.997.748,00	(23.807.962.256,00)	58,26
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000		Dinas Perikanan dan Peternakan	35.397.960.005	11.589.997.748,00	(23.807.962.256,00)	58,26
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	35.397.960.005	11.589.997.748,00	(23.807.962.256,00)	58,26
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.931.658.031	12.143.580.085,00	(1.788.377.536,00)	87,16
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.412.715.015	6.814.367.668,00	(598.547.347,00)	91,93
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.965.286.426	2.242.963.827,00	(722.282.599,00)	75,64
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.553.906.590	3.066.159.080,00	(487.547.590,00)	86,28
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.466.071.934	1.446.487.254,00	(19.584.720,00)	98,66
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.071.934	161.381.400,00	(14.690.574,00)	91,66
3.25	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.290.000.000	1.285.105.854,00	(4.894.146,00)	99,62
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.646.865.236	2.547.105.170,00	(99.760.066,00)	96,23
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga	2.646.865.236	2.547.105.170,00	(99.760.066,00)	96,23
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.646.865.236	2.547.105.170,00	(99.760.066,00)	96,23
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.645.304.466	2.547.105.170,00	(98.199.296,00)	96,29
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.051.347	2.403.493.930,00	(95.557.417,00)	96,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	146.252.119	143.611.240,00	(2.640.879,00)	98,19
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.561.770	0,00	(1.561.770,00)	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.561.770	0,00	(1.561.770,00)	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN	53.919.155.775	42.145.357.091,98	(11.773.778.683,02)	78,16
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7.222.485.000	2.468.909.514,40	(4.753.575.485,60)	34,18
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.222.485.000	2.468.909.514,40	(4.753.575.485,60)	34,18
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.140.611.000	2.387.473.742,00	(4.753.137.258,00)	33,44
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.766.344.530	335.923.742,00	(1.430.420.788,00)	19,02
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	5.374.266.530	2.051.550.000,00	(3.322.716.530,00)	38,17
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	81.874.000	81.435.772,40	(438.227,60)	99,46
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.274.000	59.100.000,00	(174.000,00)	99,71
3.27	3.25.3.27.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.600.000	22.335.772,40	(264.227,60)	98,83
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	52.696.650.779	39.676.447.577,58	(13.020.203.201,42)	75,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	52.696.650.779	39.676.447.577,58	(13.020.203.201,42)	75,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	51.314.649.029	39.380.663.626,58	(11.933.985.402,42)	75,28
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.809.169.631	14.411.401.352,00	(1.397.768.279,00)	91,16
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.074.261.977	3.085.960.614,00	(1.088.401.363,00)	75,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	32.331.217.421	21.883.401.662,58	(10.447.815.758,42)	67,69
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	382.001.750	295.783.951,00	(86.217.799,00)	77,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.001.750	131.050.000,00	(50.951.750,00)	55,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	164.733.951,00	(35.266.049,00)	82,37
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.582.330.924	9.527.026.147,00	(1.055.304.777,00)	90,03
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.582.330.924	9.527.026.147,00	(1.055.304.777,00)	90,03
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.469.567.014	9.466.426.147,00	(1.003.280.867,00)	90,42
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.120.435.510	4.745.059.785,00	(385.435.725,00)	92,69
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.339.218.504	4.721.366.362,00	(617.849.142,00)	88,43
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				

3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	112.643.913	60.600.000,00	152.043.910,00	54,80
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan Mesin	112.643.913	60.600.000,00	152.043.910,00	54,80
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	842.130.436	277.617.555,00	1564.512.991,00	32,97
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	842.130.436	277.617.555,00	1564.512.991,00	32,97
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	842.130.436	277.617.555,00	1564.512.991,00	32,97
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	592.130.436	277.617.555,00	1314.512.881,00	46,88
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.130.436	277.617.555,00	1314.512.881,00	46,88
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000	0,00	(250.000.000,00)	0,00
3.31	3.30.0.00.0.00.01.0000	5.2.07	Belanja Modal Tanah	250.000.000	0,00	(250.000.000,00)	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	149.492.283.378	123.386.239.438,00	116.006.048.960,00	88,52
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	72.924.615.072	64.023.863.809,00	19.900.751.263,00	86,42
4.01	4.01.0 [illegible]		Setretariat Daerah	72.924.615.072	64.023.863.809,00	19.900.751.263,00	86,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	72.924.615.072	64.023.863.809,00	19.900.751.263,00	86,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	71.828.494.051	61.948.382.792,00	19.879.510.659,00	86,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	21.861.324.057	18.822.594.483,00	12.038.529.974,00	90,66
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.248.182.519	30.644.561.089,00	15.303.821.430,00	85,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	13.819.000.800	9.758.375.000,00	2.954.785.500,00	84,05
[illegible]	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	[illegible] Sosial	2.109.025.675	1.423.852.220,00	1685.373.455,00	67,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.096.121.621	1.074.881.017,00	121.240.804,00	98,06
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.096.121.621	1.074.881.017,00	121.240.804,00	98,06
[illegible]			SEKRETARIAT DPRD	66.467.668.406	60.362.370.609,00	16.105.297.697,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	66.467 [illegible]	60.362.370.609,00	[illegible]	[illegible]
4.02	[illegible]	5	BELANJA DAERAH	66.467.668.306	60.362.370.609,00	16.105.297.697,00	90,81
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	63.366.408.084	57.335.994.439,00	16.031.353.445,00	90,49
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible] Pegawai	33.319.590.456	32.805.305.539,00	4513.684.917,00	98,46
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	30.046.817.628	24.529.349.100,00	15.517.668.528,00	81,64
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.100.259.222	3.027.335.970,00	(73.944.252,00)	97,62
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	[illegible] Modal Peralatan dan [illegible]	2.895.565.022	2.824.700.000,00	(240.865.022,00)	97,55
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	[illegible] Modal [illegible] Bangunan	205.705.200	202.635.970,00	(3.069.230,00)	98,50
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	528.120.719.709	490.548.582.878,61	150.972.135.830,39	92,89
5.01			PERENCANAAN	12.410.037.265	11.112.397.756,00	11.297.639.509,00	89,54
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.410.037.265	11.112.397.756,00	(1.297.639.509,00)	89,54
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.410.037.265	11.112.397.756,00	(1.297.639.509,00)	89,54
5.01	[illegible] 01.5.[illegible]	5.1	BELANJA OPERASI	12.080.309.699	10.973.972.756,00	(1.106.436.943,00)	90,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.973.015.899	6.665.835.250,00	(307.180.149,00)	95,59
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	[illegible] Barang dan Jasa	5.107.354.300	4.308.137.506,00	(799.256.794,00)	84,35
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	329.627.566	138.425.000,00	(191.202.566,00)	41,99
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.627.566	138.425.000,00	(191.202.566,00)	41,99
5.02			KEJAKSAAN	504.584.346.399	470.290.000.148,64	134.290.116.290,36	93,20
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan [illegible] dan Aset Daerah	465.721.136.536	438.285.348.946,00	127.435.787.590,00	94,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	465.721.136.536	438.285.348.946,00	127.435.787.590,00	94,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	35.268.311.263	32.260.112.319,00	12.999.198.944,00	91,50
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	[illegible] Pegawai	10.547.913.970	10.123.454.152,00	1531.460.818,00	94,66
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.035.590.738	10.238.564.367,00	11.837.026.371,00	84,73
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	11.444.806.575	11.357.994.800,00	[illegible] 711. [illegible]	99,28

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.253.929.199	564.700.000,00	(729.229.199,00)	43,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.253.929.199	564.700.000,00	(729.229.199,00)	43,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.550.000.000	4.913.057.922,00	(3.636.942.078,00)	57,46
5.02	[illegible]	5.3.01	Belanja Hibah	8.550.000.000	4.913.057.922,00	(3.636.942.078,00)	57,46
5.02	5.02.[illegible]	5.4	DELANJA TRANSFER	420.648.901.075	400.538.478.705,00	(20.070.422.370,00)	95,23
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.287.426.075	7.412.100.000,00	(12.875.326.075,00)	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan [illegible]	400.321.474.000	393.126.378.705,00	(7.195.095.295,00)	98,20
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pendapatan Daerah	38.863.009.863	32.004.681.202,64	(6.858.328.660,36)	82,35
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	38.863.009.863	32.004.681.202,64	(6.858.328.660,36)	82,35
5.02	5.02.0.00.0.00.02.[illegible]	5.1	BELANJA OPERASI	34.188.410.709	31.345.791.247,00	(2.842.619.462,00)	[illegible]
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.324.286.268	8.427.014.867,00	(897.271.382,00)	90,38
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.064.123.940	22.938.776.360,00	(6.125.347.580,00)	78,93
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	574.599.654	558.883.955,64	(15.709.698,36)	97,27
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.199.654	252.450.000,00	(4.749.654,00)	98,08
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	417.400.000	406.439.955,64	(10.960.044,36)	97,37
5.03	[illegible]		KESBANGPOL	10.184.661.510	8.318.120.434,00	(1.866.541.076,00)	81,67
5.03	5.03.5.04.0 [illegible]		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan [illegible]	10.184.661.510	8.318.120.434,00	(1.866.541.076,00)	81,67
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.184.661.510	8.318.120.434,00	(1.866.541.076,00)	[illegible]
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.835.138.513	7.972.970.434,00	(1.862.168.079,00)	[illegible]
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.975.635.950	4.845.926.188,00	(129.709.762,00)	97,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.859.502.563	3.127.044.246,00	(1.732.458.317,00)	64,35
5.03	5.03.5.04.0.00.[illegible]	5.2	BELANJA MODAL	349.522.997	345.150.000,00	(4.372.997,00)	[illegible]
[illegible]	[illegible] 5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan [illegible]	349.522.997	345.150.000,00	(4.372.997,00)	98,75
5.04	[illegible]		[illegible] DAN PELATIHAN	356.602.162	277.562.610,00	(79.039.552,00)	77,84
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan [illegible]	356.602.162	277.562.610,00	(79.039.552,00)	77,84
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	356.602.162	277.562.610,00	(79.039.552,00)	77,84
[illegible]	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	356.602.162	277.562.610,00	(79.039.552,00)	77,84
5.04	[illegible]	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.602.162	277.562.610,00	(79.039.552,00)	77,84
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	585.272.373	550.471.930,00	(34.800.443,00)	94,05
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan [illegible] Daerah	585.272.373	550.471.930,00	(34.800.443,00)	[illegible]
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	585.272.373	550.471.930,00	(34.800.443,00)	94,05
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	563.995.673	531.549.930,00	(32.446.743,00)	94,25
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.995.673	531.549.930,00	(32.446.743,00)	[illegible]
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.278.700	18.925.000,00	(2.353.700,00)	88,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.278.700	18.925.000,00	(2.353.700,00)	88,94
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	22.500.892.202	18.946.783.802,00	(3.554.108.400,00)	84,20
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	22.500.892.202	18.946.783.802,00	(3.554.108.400,00)	[illegible]
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		[illegible]	22.500.892.202	18.946.783.802,00	(3.554.108.400,00)	84,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.500.892.202	18.946.783.802,00	(3.554.108.400,00)	84,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.174.892.202	18.675.275.602,00	[illegible]	[illegible]
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	35.663.506.329	35.233.994.552,00	(429.511.777,00)	97,25
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.510.466.676	3.443.281.050,00	(3.067.185.626,00)	52,89
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	326.930.197	271.508.200,00	(55.421.997,00)	83,05
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.930.197	271.508.200,00	(55.421.997,00)	[illegible]
7			UNSUR KEWILAYAHAN	46.168.304.849	42.049.984.778,00	[illegible]	91,07

7.01			KECAMATAN	46.156.304.149	42.044.984.778,00	(4.123.319.371,00)	91,07
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Metro Kibang	1.930.383.798	1.887.092.037,00	(43.291.761,00)	97,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.930.383.798	1.887.092.037,00	(43.291.761,00)	97,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.895.709.210	1.851.937.449,00	(43.771.761,00)	97,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.578.649.616	1.546.201.397,00	(32.448.219,00)	97,94
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.583.594	305.736.052,00	(10.847.542,00)	96,57
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.154.588	35.154.588,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.154.588	35.154.588,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Kasui	2.493.004.120	2.337.313.427,00	(155.690.693,00)	93,75
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.493.004.120	2.337.313.427,00	(155.690.693,00)	93,75
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.479.265.096	2.323.574.902,00	(155.690.694,00)	93,72
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.063.672.993	1.911.785.857,00	(151.887.136,00)	92,64
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.592.102	411.788.575,00	(3.803.527,00)	99,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.739.025	13.739.025,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.739.025	13.739.025,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Sukoharjo	2.328.397.284	2.076.121.033,00	(252.276.251,00)	89,17
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.328.397.284	2.076.121.033,00	(252.276.251,00)	89,17
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.291.573.284	2.043.871.033,00	(247.702.251,00)	89,19
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.586.653.757	1.760.171.033,00	(102.482.724,00)	94,57
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.919.527	259.700.000,00	(145.219.527,00)	64,14
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	36.824.000	32.250.000,00	(4.574.000,00)	87,58
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.824.000	32.250.000,00	(4.574.000,00)	87,58
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Pekalongan	2.485.371.736	2.240.318.988,00	(245.052.748,00)	90,14
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	2.485.371.736	2.240.318.988,00	(245.052.748,00)	90,14
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.471.032.847	2.225.118.988,00	(244.913.879,00)	90,09
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.110.545.301	2.019.421.368,00	(91.124.933,00)	95,68
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.487.546	205.697.620,00	(154.789.926,00)	57,06
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.338.889	14.200.000,00	(138.889,00)	99,03
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.338.889	14.200.000,00	(138.889,00)	99,03
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Purbolinggo	3.948.502.085	3.852.924.463,00	(96.577.622,00)	95,09
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.948.502.085	3.852.924.463,00	(96.577.622,00)	95,09
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.918.180.659	3.825.074.463,00	(93.106.196,00)	95,35
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.561.222.840	3.531.674.463,00	(29.548.367,00)	99,17
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.957.820	293.400.000,00	(63.557.820,00)	82,19
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.321.426	27.850.000,00	(2.471.426,00)	91,85
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.321.426	27.850.000,00	(2.471.426,00)	91,85
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Raman Utara	2.035.356.878	1.709.805.408,00	(325.551.470,00)	84,01
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	2.035.356.878	1.709.805.408,00	(325.551.470,00)	84,01
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.348.477	1.677.603.108,00	(322.655.369,00)	83,87
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.647.727.278	1.316.416.908,00	(291.310.370,00)	82,31
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.621.199	131.276.200,00	(131.344.999,00)	93,36
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.008.401	32.202.300,00	(2.805.101,00)	91,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.008.401	32.202.300,00	(2.806.101,00)	91,99
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Way Bungur	1.733.492.010	1.634.158.846,00	(99.333.164,00)	94,27
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	1.733.492.010	1.634.158.846,00	(99.333.164,00)	94,27

7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.732.492.010	1.633.158.846,00	[99.333.164,00]	94,27
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.347.768.654	1.313.306.826,00	[34.461.828,00]	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.723.356	320.852.020,00	[64.871.336,00]	83,18
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Buri Agung	1.756.638.585	1.651.011.788,00	[105.626.797,00]	93,98
7.01	[illegible]	5	BELANJA [illegible]	1.756.638.585	1.651.011.788,00	[105.626.797,00]	93,98
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.731.673.256	1.627.111.788,00	[104.561.468,00]	93,96
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.369.838.683	1.286.958.931,00	[82.939.752,00]	93,95
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.774.573	340.152.857,00	[21.621.716,00]	94,02
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	[illegible]	26.965.329	23.900.000,00	[3.065.329,00]	88,63
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.965.329	23.900.000,00	[3.065.329,00]	88,63
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Sukadana	1.993.470.821	1.877.084.592,00	[116.386.229,00]	94,16
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.993.470.821	1.877.084.592,00	[116.386.229,00]	94,16
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.537.667	1.859.990.654,00	[109.547.013,00]	94,44
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.547.424.981	1.483.744.138,00	[63.680.843,00]	95,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.112.686	376.246.516,00	[45.866.170,00]	89,13
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.933.154	17.093.938,00	[6.839.216,00]	71,42
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.933.154	17.093.938,00	[6.839.216,00]	71,42
7.01	[illegible]		Kecamatan [illegible]	1.743.508.516	1.589.150.273,00	[154.358.243,00]	90,57
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.743.508.516	1.589.150.273,00	[154.358.243,00]	90,57
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.695.135.046	1.535.650.273,00	[159.484.773,00]	90,59
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.332.428.046	1.215.704.873,00	[116.723.173,00]	91,24
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.710.000	319.945.400,00	[42.764.600,00]	87,21
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.370.470	53.500.000,00	[4.870.470,00]	89,93
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.370.470	53.500.000,00	[4.870.470,00]	89,93
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Teluk Udik	1.888.832.457	1.821.520.797,00	[67.291.660,00]	96,44
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.888.832.457	1.821.520.797,00	[67.291.660,00]	96,44
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.865.867.869	1.798.575.709,00	[67.291.660,00]	96,39
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.416.640.649	1.381.377.996,00	[35.262.653,00]	97,51
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.197.220	417.203.213,00	[31.994.007,00]	92,88
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.964.588	22.944.588,00	0,00	[illegible]
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.964.588	22.944.588,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Labuhan Ratu	1.706.604.475	1.486.685.464,00	[219.919.015,00]	87,11
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	1.706.604.475	1.486.685.464,00	[219.919.015,00]	87,11
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.678.273.949	1.458.506.464,00	[219.768.485,00]	86,91
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.327.473.079	1.173.466.564,00	[154.006.515,00]	88,40
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.800.870	285.038.900,00	[65.761.970,00]	81,25
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.330.530	28.180.000,00	[150.530,00]	99,47
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.330.530	28.180.000,00	[150.530,00]	99,47
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Pagar Dewa	2.343.195.361	2.267.439.870,00	[75.755.491,00]	96,77
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	2.343.195.361	2.267.439.870,00	[75.755.491,00]	96,77
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.201.134.361	2.127.439.870,00	[73.694.491,00]	96,65
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.656.853.688	1.623.521.146,00	[33.332.542,00]	98,26
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.280.673	443.918.724,00	[41.361.949,00]	91,48
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.061.000	0,00	[12.061.000,00]	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.061.000	0,00	[12.061.000,00]	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Selaparang	8.795.116.281	1.540.165.810,00	(265.950.471,00)	85,19
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.796.116.281	1.530.165.810,00	(265.950.471,00)	85,19
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.709.858.565	1.504.025.310,00	(205.833.255,00)	84,98
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.420.447.049	1.245.570.050,00	(174.867.049,00)	87,69
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.426.466	258.455.260,00	(30.971.205,00)	73,97
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	26.257.716	26.140.500,00	(117.216,00)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.257.716	26.140.500,00	(117.216,00)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Mataram Baru	1.913.473.200	1.780.994.413,00	(132.478.787,00)	93,08
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	1.913.473.200	1.780.994.413,00	(132.478.787,00)	93,08
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.878.956.296	1.746.377.509,00	(132.478.787,00)	92,95
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.538.236.818	1.475.804.359,00	(62.432.435,00)	95,94
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.519.478	270.573.150,00	(69.946.328,00)	79,46
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.516.904	34.616.904,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.616.904	34.616.904,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Selaparang	1.642.512.748	1.537.027.581,00	(105.485.167,00)	93,58
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	1.642.512.748	1.537.027.581,00	(105.485.167,00)	93,58
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.611.369.478	1.505.884.411,00	(105.485.167,00)	93,45
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.426.298.610	1.200.965.317,00	(225.333.293,00)	97
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.070.868	305.118.994,00	(79.951.874,00)	79,74
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.143.270	31.143.270,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.143.270	31.143.270,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000		Kecamatan Sandubaya	2.033.296.315	1.510.974.243,00	(522.322.072,00)	74,31
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	2.033.296.315	1.510.974.243,00	(522.322.072,00)	74,31
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.984.934.667	1.462.612.595,00	(522.322.072,00)	73,69
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.655.535.076	1.166.741.149,00	(488.793.927,00)	70,48
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.399.591	295.871.446,00	(33.528.145,00)	89,82
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.361.648	48.361.648,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.361.648	48.361.648,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000		Kecamatan Ampenan	1.814.089.243	1.560.058.210,00	(254.031.033,00)	86,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	1.814.089.243	1.560.058.210,00	(254.031.033,00)	86,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.810.476.193	1.556.805.860,00	(254.031.033,00)	85,97
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.533.215.607	1.285.658.210,00	(247.557.397,00)	83,85
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.260.586	270.786.960,00	(6.473.636,00)	97,67
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.2	Belanja Modal	3.613.050	3.613.050,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.613.050	3.613.050,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000		Kecamatan Cakranegara	1.665.861.142	1.557.060.364,00	(108.800.778,00)	93,47
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	1.665.861.142	1.557.060.364,00	(108.800.778,00)	93,47
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.626.508.534	1.519.141.964,00	(107.366.570,00)	93,40
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.323.471.526	1.252.521.160,00	(68.950.366,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.037.005	265.620.804,00	(36.416.201,00)	87,95
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	39.352.608	38.918.400,00	(434.208,00)	98,90
7.01	7.01.0.00.0.00.19.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.352.608	38.918.400,00	(434.208,00)	98,90
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000		Kecamatan Selaparang	2.838.039.121	1.719.798.493,00	(1.118.240.628,00)	97,53
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	2.838.039.121	1.719.798.493,00	(1.118.240.628,00)	97,53
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.769.411.151	1.655.808.743,00	(1.113.602.408,00)	93,58

7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.402.638.375	1.370.353.253,00	142.285.069,00	97,70
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.772.850	285.455.090,00	81.317.340,00	77,83
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	68.627.970	63.989.750,00	4.638.220,00	93,24
7.01	7.01.0.00.0.00.20.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.627.970	63.989.750,00	4.638.220,00	93,24
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000		Kecamatan Bandar Sribhawono	1.688.900.848	1.459.138.809,00	229.762.039,00	86,40
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	1.688.900.848	1.459.138.809,00	229.762.039,00	86,40
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.641.511.013	1.411.508.984,00	229.762.039,00	86,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.309.955.666	1.218.238.809,00	91.716.857,00	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.639.337	193.570.155,00	138.045.182,00	58,37
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	47.329.845	47.329.845,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.329.845	47.329.845,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		Kecamatan Labuhan Maringgai	1.440.980.489	1.364.440.406,00	80.490.593,00	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	1.444.930.999	1.364.440.406,00	80.490.593,00	94,43
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.408.399.345	1.328.547.819,00	79.851.526,00	94,33
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.023.395.959	987.697.885,00	35.698.074,00	96,51
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.003.386	340.849.934,00	44.153.452,00	88,53
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	36.531.654	35.892.587,00	639.067,00	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.531.654	35.892.587,00	639.067,00	98,25
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000		Kecamatan Mataram Baru	2.354.590.166	2.178.316.251,00	176.273.915,00	92,51
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	2.354.590.166	2.178.316.251,00	176.273.915,00	92,51
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.328.025.046	2.151.796.251,00	176.228.795,00	92,43
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.940.775.656	1.825.775.531,00	114.999.125,00	94,07
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.249.390	326.018.720,00	161.229.670,00	84,19
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	26.565.120	26.520.000,00	45.120,00	99,83
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.565.120	26.520.000,00	45.120,00	99,83
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000		Kecamatan Pasir Sakti	1.587.755.976	1.426.383.232,00	161.372.744,00	89,84
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	1.587.755.976	1.426.383.232,00	161.372.744,00	89,84
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.550.784.156	1.401.723.232,00	149.060.924,00	90,41
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.095.940	1.036.254.997,00	139.840.943,00	88,11
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.688.216	365.468.235,00	29.219.981,00	92,59
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.048.820	24.660.000,00	2.388.820,00	91,19
7.01	7.01.0.00.0.00.24.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.048.820	24.660.000,00	2.388.820,00	91,15
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	71.347.353.276	70.732.104.345,00	615.248.931,00	99,14
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	71.347.353.276	70.732.104.345,00	615.248.931,00	99,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.347.353.276	70.732.104.345,00	615.248.931,00	99,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	71.347.353.276	70.732.104.345,00	615.248.931,00	99,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	71.323.083.276	70.707.834.345,00	615.248.931,00	99,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.732.146.866	2.592.252.431,00	139.894.435,00	94,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.463.336.430	2.087.981.914,00	475.354.516,00	81,46
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	66.027.600.000	66.027.600.000,00	150.000.000,00	99,98
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.270.000	24.270.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.270.000	24.270.000,00	0,00	100,00
			Jumlah	185.684.419.050	50.067.385.600,33	135.751.807.650,33	58,43

LAMPIRAN 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KAS BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur	[illegible]	[illegible]
JUMLAH		[illegible]	

LAMPIRAN V

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KAS BENDAHARA BLUD
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA BLUD	SALDO AWAL	KOREKSI	PENDAPATAN	BELANJA					JUMLAH BELANJA	SALDO BLUD
					PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL PERALATAN DAN MESIN	MODAL BANGUNAN	MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
1	Raja Kamun										
2	[illegible]			1 179 040 053,00		611 671 773,00	4 365 100,00			1	49.204.592,00
3	Nuni Emas	13 472 265,76		934 2..8 782,00	356 666 875,00	312 929 713,00	60 765 500,00				
4	Kang Toni	24.654.153,05		910 956 260,00		480 036 830,71	30 446 000,00			51	55
5	[illegible] Aji	151 135,14				244 119 500,00				1	
6	Adreyn			[illegible]						954,5 1	
7	[illegible]	41.826.000,00		9 599 765 567,00	370 16 5,00	304 934 907,00	134.948.000,00				50 413 460,00
8	[illegible]	270 485 637,35		3.743 475 960,00	1 016 314 068,80	304 119 618,22	141.511.000,00	22 491 301,00			17 021
9	[illegible]					174 295 986,00	43.200.001,00				
10	[illegible]					984 066,99	80.754.000,00				
11	[illegible]	1 019 127,05		3 215 805 578,00		1 053 413 671,00	48 900 200,00				
12	[illegible]	192 536 931,35		1 574 056 521,00		714 561 856,00	740,00				184.097
13	Parmiatun	20 185 317,89		1 037 131 701,00		297 234 869,00	31 400 000,00				
14	Sunaker Bejo	38.851 907,54		[illegible]	96	[illegible]	[illegible]				
15	Kasubbag Umumnan	[illegible]	[illegible]	2 [illegible] 147,..	[illegible]	[illegible]	[illegible]			33	7.741.539,41
[illegible]	[illegible]	67.339 551,84		2 [illegible] 465 042,01	1 [illegible] 758 650,00	902 [illegible] 080,00	52 690 050,00			2	41 706 901,84
17	[illegible]	3 166 102,45		2 372 052 240,00		1 087 [illegible] 29..,00	163.364.775,00	140 000 000,00			
18	Wani	4.484.304,65		1 142 826 894,00	[illegible]	337 296 878,00	23 900 000,00			051	
19	[illegible]	27.663.078,39		[illegible]	[illegible]	304 [illegible] 910,00	49.050.000,00				
20	[illegible]	226.[illegible] 704,22		[illegible]	[illegible]	2 465,00	139 [illegible] 250,00			2 554 056 950,00	24 [illegible] 465,02
21	[illegible]	93.536.222,31		1 414 [illegible] 412,00	[illegible] 187 000,00	417 440 892,41	103,648 [illegible] 130,00				To 670 465,96
22	Ibnu Hanu Sari	85 768 675,34		1.405.[illegible] 432,00	[illegible]	681 051 207,00	72 512 000,00				
23	[illegible]	21.755.209,00		[illegible]	33 [illegible]	[illegible]	23.750.000,00			546.364.507,95	
24	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	626.525.000,00				
[illegible]	Sukarasa	5.675.585,21		1.346.429.763,00		476 [illegible] 252,00	58.500.000,00			1 [illegible]	4 514 [illegible] 21
26	Sukarasa Mulya	1.494.011,00		744 [illegible] 186,00	[illegible] 772.814,50	278.449.126,00	46 507.207,00				
27	[illegible]	131 301.122,07		744.809.295,50	[illegible]	252.480.143,00	49 510.000,00				
28	[illegible]	45 [illegible] 615,39		[illegible]	[illegible]	41 [illegible] 935,..5	26 [illegible] 864,00			916 615 213,00	
[illegible]	Pekalongan	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] 23.287	148 100 000,00			1 561 503 [illegible]	
29	Gunu Warno	59 576 155,00		721 [illegible] 691,00	[illegible]	5 [illegible] 91..,00	29 [illegible]			851 951.344,00	
[illegible]	[illegible]	1 925 634,29		792.503 806,00	[illegible] 144.809,00	308.929 847,00	27 113 970,00				1
32	[illegible]	20 052 569,00		2 [illegible] 971.905,00	1 001 757 234,40	1 [illegible] 299.853,32	21 525 000,00				17
33	Cambai Subur	9 047 582,49		1 287 524 750,00	[illegible]	247 122 711,00	178.175 000,00			1 230 [illegible] 299,00	1
34	Margatani	38 [illegible] 595,50		[illegible]	617 [illegible] 630,00	521.461.004,50	3 [illegible] 2 900,00	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	BSLD Sukadana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48 [illegible] 486 603,00	962 062 435,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 [illegible] 896,50
	JUMLAH	3.331.992.932,46	147.[illegible] 258,00	96.892.9[illegible] 646,71	27.[illegible] 981.338,90	66.869.339.637,70	3.238.772.815,00	580.335.600,00	39.911.560,00	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KAS DI BENDAHARA BOS
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SMPN 1 Way Bungur	[illegible]	Merupakan saldo kas di Bendahara BOS Sekolah
JUMLAH		[illegible]	

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KAS DANA BOK PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	JUMLAH SALUR	TOTAL PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	ADIREJO	223.900.822,00	980.965.178,00	725.867.000,00	635.444.000,00	91.423.000,00
2	BATANGHARI	193.924.625,00	812.015.365,00	1.005.950.000,00	568.608.136,00	437.341.864,00
3	BRAJA CAKA	95.671.656,00	489.740.344,00	585.412.000,00	489.533.015,00	95.878.985,00
4	BRAJA HARJO SARI	246.209.125,00	540.294.875,00	776.504.000,00	596.504.159,00	179.999.841,00
5	BUMIDESAS	34.991.558,00	697.711.442,00	851.703.000,00	518.359.942,00	333.343.058,00
6	DONOMULYO	43.511.250,00	586.369.750,00	729.881.000,00	464.916.045,00	264.964.955,00
7	GANTIWARNO	92.598.350,00	443.349.650,00	540.948.000,00	449.129.122,00	191.718.878,00
8	JABUNG	168.233.258,00	727.185.742,00	895.422.000,00	808.874.251,00	86.547.749,00
9	KARYA TANI	114.348.006,00	617.623.994,00	731.972.000,00	661.355.082,00	70.616.918,00
10	LABUHAN MARINGGAI	179.784.794,00	815.925.206,00	995.710.000,00	805.615.266,00	190.094.734,00
11	MARGOTOTO	155.361.589,00	809.119.011,00	964.481.000,00	668.973.394,00	295.507.606,00
12	[redacted] BARU	116.543.926,00	777.842.074,00	894.386.000,00	709.861.195,00	184.524.805,00
13	PAKUAN AJI	250.921.500,00	670.375.500,00	921.297.000,00	550.577.235,00	370.719.765,00
14	PASIR SAKTI	29.394.914,00	1.037.769.086,00	1.067.164.000,00	1.022.532.325,00	44.631.675,00
15	PEKALONGAN	160.124.347,00	725.653.153,00	885.780.000,00	652.500.293,00	233.279.707,00
16	PENJANGAN	152.635.751,00	590.034.249,00	742.670.000,00	563.616.655,00	269.053.345,00
17	PUGUNG RAHARJO	139.320.660,00	868.594.140,00	1.007.914.800,00	792.169.661,00	215.745.139,00
18	PURBOLINGGO	223.222.200,00	740.111.800,00	963.334.000,00	550.345.516,00	272.010.484,00
19	[redacted]	91.765.500,00	940.179.500,00	1.024.935.000,00	813.621.140,00	211.313.860,00
20	RANAU UTARA	209.062.168,00	598.349.832,00	767.412.000,00	565.525.352,00	201.886.648,00
21	REJO KATON	185.951.500,00	599.661.500,00	785.613.000,00	690.756.521,00	195.856.479,00
22	SP.KAMPUNG	138.900.481,00	660.721.519,00	799.622.000,00	515.812.947,00	283.809.053,00
23	SIDOREJO	154.198.622,00	753.908.378,00	907.107.000,00	724.571.400,00	182.485.600,00
24	SRIBEAWONO	145.660.986,00	837.639.014,00	976.300.000,00	859.403.042,00	142.096.958,00
25	SUMBER REJO	984.159.717,00	769.262.283,00	1.069.422.000,00	752.292.137,00	317.129.862,00
26	SUKARAJA NUBAN	252.316.492,00	777.188.508,00	1.029.505.000,00	737.435.338,00	292.069.662,00
27	SUKARAJA TIGA	124.505.168,00	714.144.832,00	838.740.000,00	611.939.285,00	226.780.715,00
28	SUKADANA	349.112.441,00	677.292.159,00	1.026.405.000,00	840.647.350,00	185.757.650,00
29	TAMBAH SUBUR	258.861.561,00	676.567.439,00	935.429.000,00	494.567.192,00	440.861.808,00
30	TANJUNG HARAPAN	180.044.992,00	660.983.008,00	841.028.000,00	645.464.397,00	195.563.603,00
31	TRIMULYO	45.037.780,00	729.928.520,00	774.966.000,00	617.347.109,00	157.618.891,00
32	WANA	185.666.296,00	730.928.704,00	916.595.000,00	817.040.3[illegible],00	99.554.687,00
33	WAY MILI	127.563.823,00	676.622.17[illegible],00	804.186.000,00	689.567.745,00	114.618.252,00
34	WAY JEPARA	142.957.364,00	755.116.636,00	898.294.000,00	646.177.242,00	252.116.758,00
	JUMLAH	5.785.765.342,00	23.704.210.658,00	29.559.976.000,00	22.398.419.087,00	7.161.556.913,00

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun	Saldo Piutang Pajak (Rp)	Nomor Surat Keterangan Fiskal (SKF)	Jumlah Wajib Pajak	Penagihan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Piutang Pajak Setelah Koreksi (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah	Nilai Jaminan/Agunan (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah
1	Pajak Hotel	2018	2.000.000,00					2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00
		2019	3.200.000,00					3.200.000,00				3.200.000,00	3.200.000,00					3.200.000,00	3.200.000,00
		2020	6.750.000,00					6.750.000,00				6.750.000,00	6.750.000,00					6.750.000,00	6.750.000,00
		2021	7.500.000,00					7.500.000,00				7.500.000,00	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00
		2022	9.000.000,00					9.000.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00					9.000.000,00	9.000.000,00
		2023	11.000.000,00					11.000.000,00				11.000.000,00	11.000.000,00					11.000.000,00	11.000.000,00
		2024	12.000.000,00					12.000.000,00				12.000.000,00	12.000.000,00					12.000.000,00	12.000.000,00
2	[redacted]	2017	14.000.000,00					14.000.000,00				14.000.000,00	14.000.000,00					14.000.000,00	14.000.000,00
		2018	24.000.000,00					24.000.000,00				24.000.000,00	24.000.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00
		2019	28.125.000,00					28.125.000,00				28.125.000,00	28.125.000,00					28.125.000,00	28.125.000,00
		2020	11.000.000,00					11.000.000,00				11.000.000,00	11.000.000,00					11.000.000,00	11.000.000,00
		2021	13.750.000,00					13.750.000,00				13.750.000,00	13.750.000,00					13.750.000,00	13.750.000,00
		2022	16.875.000,00					16.875.000,00				16.875.000,00	16.875.000,00					16.875.000,00	16.875.000,00
		2023	17.500.000,00					17.500.000,00				17.500.000,00	17.500.000,00					17.500.000,00	17.500.000,00
		2024	24.000.000,00					24.000.000,00				24.000.000,00	24.000.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00
3	[redacted] Kuning	2017	5.000.000,00					5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00
		2018	7.500.000,00					7.500.000,00				7.500.000,00	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00
		2019	12.000.000,00					12.000.000,00				12.000.000,00	12.000.000,00					12.000.000,00	12.000.000,00
		2020	5.000.000,00					5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00
		2021	36.000.000,00					36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00
		2022	44.000.000,00					44.000.000,00				44.000.000,00	44.000.000,00					44.000.000,00	44.000.000,00
		2023	52.000.000,00					52.000.000,00				52.000.000,00	52.000.000,00					52.000.000,00	52.000.000,00
		2024	60.000.000,00					60.000.000,00				60.000.000,00	60.000.000,00					60.000.000,00	60.000.000,00
4	Pajak Makanan	2017	1.250.000,00					1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00	1.250.000,00
		2018	1.800.000,00					1.800.000,00				1.800.000,00	1.800.000,00					1.800.000,00	1.800.000,00
		2019	3.000.000,00					3.000.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00
		2020	4.500.000,00					4.500.000,00				4.500.000,00	4.500.000,00					4.500.000,00	4.500.000,00
		2021	6.000.000,00					6.000.000,00				6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00
		2022	7.500.000,00					7.500.000,00				7.500.000,00	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00
		2023	9.000.000,00					9.000.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00					9.000.000,00	9.000.000,00
		2024	10.000.000,00					10.000.000,00				10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5	[redacted] Hiburan	2017	45.000.000,00					45.000.000,00				45.000.000,00	45.000.000,00					45.000.000,00	45.000.000,00
		2018	24.000.000,00					24.000.000,00				24.000.000,00	24.000.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00
		2019	30.000.000,00					30.000.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00
		2020	45.000.000,00					45.000.000,00				45.000.000,00	45.000.000,00					45.000.000,00	45.000.000,00
		2021	37.500.000,00					37.500.000,00				37.500.000,00	37.500.000,00					37.500.000,00	37.500.000,00
		2022	25.000.000,00					25.000.000,00				25.000.000,00	25.000.000,00					25.000.000,00	25.000.000,00
		2023	31.000.000,00					31.000.000,00				31.000.000,00	31.000.000,00					31.000.000,00	31.000.000,00
		2024	39.000.000,00					39.000.000,00				39.000.000,00	39.000.000,00					39.000.000,00	39.000.000,00
6	[redacted] Reklame Kain	2017	3.500.000,00					3.500.000,00				3.500.000,00	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00
		2018	1.800.000,00					1.800.000,00				1.800.000,00	1.800.000,00					1.800.000,00	1.800.000,00
		2019	4.000.000,00					4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00
		2020	5.000.000,00					5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00
		2021	2.800.000,00					2.800.000,00				2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00	2.800.000,00
		2022	945.250,00					945.250,00				945.250,00	945.250,00					945.250,00	945.250,00
		2024	1.122.834,34					1.122.834,34				1.122.834,34	1.122.834,34					1.122.834,34	1.122.834,34
7	[redacted]	2017	525.500.500,00					525.500.500,00				525.500.500,00	525.500.500,00					525.500.500,00	525.500.500,00
		2023	4.191.265.442,00					4.191.265.442,00				[redacted]	[redacted]					[redacted]	[redacted]
		[redacted]	[redacted]					[redacted]				[redacted]	[redacted]					[redacted]	[redacted]
8	[redacted] Pajak	2024						15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00
9	Pajak Air Tanah	2018	450.000,00					450.000,00				450.000,00	450.000,00					450.000,00	450.000,00
		2019	250.000,00					250.000,00				250.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00
		2020	6.000.000,00					6.000.000,00				6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00
		2021	8.000.000,00					8.000.000,00				8.000.000,00	8.000.000,00					8.000.000,00	8.000.000,00
		2022	150.000,00					150.000,00				150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
		2023	500.000,00					500.000,00				500.000,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00
		2024	1.250.000,00					1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00	1.250.000,00
10	[redacted] Walet	2017	1.750.000,00					1.750.000,00				1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00	1.750.000,00
		2024																	



LAMPIRAN I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Jenis Piutang Retribusi	Tahun SKRD	Saldo Pelunasan Piutang 2023	Koreksi Catat Pelunasan Piutang 2025	SKRD 2024	Pembayaran 2024	Penghapusan Piutang	Saldo Piutang 31 Desember 2024	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang Tertentu				Jumlah
									Lancar (1 s.d 1 Bln)	Kurang Lancar (1 s.d 2 Bln)	Diragukan (2 s.d 12 Bln)	Macet (>12 Bln)	Lancar (1 s.d 1 Bln) 0,50%	Kurang Lancar (1 s.d 2 Bln) 10,00%	Diragukan (2 s.d 12 Bln) 50,00%	Macet (>12 Bln) 100,00%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lainnya Pelayanan Kesehatan	2021	16.227.200,00	4.169.050,00		4.169.050,00		7.558.800,00				7.558.800,00				1.511.760,00	7.558.000,00
	JUMLAH		16.227.200,00	4.169.050,00		4.169.050,00		7.558.800,00				7.558.800,00				1.511.760,00	7.558.000,00

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	PIUTANG TAHUN 2023					KLAIM TAHUN 2024					JUMLAH PIUTANG Per 31 Desember 2024
		SALDO 2023	KOREKSI	REALISASI	TUK DI ACC	SALDO PIUTANG	KLAIM	KOREKSI	REALISASI	TUK DI ACC	SALDO PIUTANG	
1	[illegible]	14.484.800,00		10.720.600,00		3.763.600,00	132.127.000,00		117.667.000,00		12.670.000,00	22.195.600,00
2	[illegible]	6.940.000,00		6.060.000,00			163.558.000,00		142.878.000,00		24.750.000,00	24.750.000,00
3	[illegible]	2.340.000,00		2.340.000,00			23.420.000,00		19.360.000,00		4.060.000,00	4.060.000,00
4	[illegible]	520.000,00		520.000,00			9.220.000,00		8.500.000,00		720.000,00	1.220.000,00
5	[illegible]	7.570.000,00		4.370.000,00		3.200.000,00	36.150.000,00		31.660.000,00		4.490.000,00	8.490.000,00
6	[illegible]	8.510.000,00		8.510.000,00			67.910.000,00		60.220.000,00	1.700.000,00	4.510.000,00	8.510.000,00
7	[illegible]	7.677.000,00	240.000,00	6.665.000,00	701.000,00	912.000,00	129.840.000,00		80.120.000,00	2.100.000,00	46.940.000,00	47.852.000,00
8	[illegible]	33.240.000,00		33.240.000,00			272.470.000,00		210.570.000,00	7.350.000,00	54.550.000,00	55.550.000,00
9	[illegible]	8.694.000,00		8.694.000,00			56.280.000,00		39.750.000,00		11.458.000,00	11.378.000,00
10	[illegible]	12.150.000,00		11.729.020,00	630.000,00		147.000.000,00		129.600.000,00	4.200.000,00	14.111.000,00	14.184.000,00
11	[illegible]	67.635.000,00		85.699.000,00	1.046.000,00		549.000.000,00		455.901.000,00	4.844.000,00	89.245.000,00	90.245.000,00
12	[illegible]	14.261.000,00		14.091.000,00	295.000,00		126.000.000,00		123.660.000,00	1.020.000,00	9.476.000,00	9.476.000,00
13	[illegible]	720.000,00		720.000,00			38.360.000,00		32.220.000,00	6.140.000,00		
14	[illegible]	36.424.000,00		36.424.000,00			241.200.000,00		210.900.000,00	8.940.000,00	22.329.000,00	22.329.000,00
15	[illegible]	58.570.000,00		46.014.000,00	733.000,00		334.000.000,00		248.400.000,00	5.031.000,00	41.340.000,00	44.340.000,00
16	[illegible]	21.625.000,00		21.625.000,00			129.000.000,00		120.585.000,00		8.415.000,00	8.515.000,00
17	[illegible]	62.975.000,00		62.041.000,00	934.000,00		946.917.000,00	56.641.000,00			126.218.000,00	126.218.000,00
18	[illegible]	9.940.000,00		9.940.000,00			81.450.000,00	1.490.000,00	91.140.000,00		8.450.000,00	8.850.000,00
19	[illegible]	9.240.000,00		9.240.000,00			84.900.000,00	26.072.000,00	50.865.000,00		7.925.000,00	7.925.000,00
20	[illegible]	15.145.000,00		15.145.000,00			861.535.000,00	7.425.000,00	325.730.000,00		63.420.000,00	63.420.000,00
21	[illegible]	9.962.000,00	280.000,00	9.962.000,00			141.742.000,00		129.107.000,00		12.635.000,00	12.635.000,00
22	[illegible]	24.750.000,00		11.870.000,00	960.000,00		285.715.000,00		215.655.000,00	2.160.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00
23	[illegible]	4.160.000,00		3.660.000,00	1.180.000,00		26.110.000,00	80.000,00	22.450.000,00		4.160.000,00	4.160.000,00
24	[illegible]	1.825.000,00		11.625.000,00			1.181.000,00				1.181.000,00	1.181.000,00
25	[illegible]	6.991.000,00		6.991.000,00			2.960.000,00				2.960.000,00	2.960.000,00
26	[illegible]	5.135.000,00		4.740.000,00	915.000,00		27.500.000,00	540.000,00	20.110.000,00		6.850.000,00	6.850.000,00
27	[illegible]	3.448.000,00		2.448.000,00			22.450.000,00		18.955.000,00		3.491.000,00	3.491.000,00
28	[illegible]	3.138.000,00		2.995.000,00		400.000,00	44.750.000,00		44.350.000,00			400.000,00
29	[illegible]	12.460.000,00		12.040.000,00	420.000,00		83.275.000,00		65.770.000,00	360.000,00	12.276.000,00	12.236.000,00
30	[illegible]	2.860.000,00	2.270.000,00	5.130.000,00			22.520.000,00		16.210.000,00		6.310.000,00	6.310.000,00
31	[illegible]	8.040.000,00		7.930.000,00	110.000,00		78.260.000,00		70.569.000,00	400.000,00	7.091.000,00	7.091.000,00
32	[illegible]	21.010.000,00		21.010.000,00			164.000.000,00		150.615.000,00		13.385.000,00	13.385.000,00
33	[illegible]	3.740.000,00		3.740.000,00			32.540.000,00		26.050.000,00	520.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
34	[illegible]						210.142.000,00		170.192.000,00	3.220.000,00	43.225.000,00	43.225.000,00
35	[illegible]	11.795.875.113,00	1.521.800.524,00	10.655.652.113,00		4.464.119.524,00	37.088.446.521,00		33.186.404.521,00		3.890.444.447,00	8.354.564.041,00
	JUMLAH	12.324.927.988,00	5.836.726.574,00	11.226.498.113,00	8.827.000,00	4.476.477.574,00	42.154.491.870,00		35.436.140.621,00	332.465.000,00	4.385.886.447,00	9.862.363.841,00

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	KUALITAS PIUTANG MENURUT UMUR PIUTANG					PENYISIHAN PIUTANG MENURUT KUALITAS PIUTANG				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH PIUTANG	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
		< 1 bln	1-3 bln	4-12 bln	> 12 bln		0,5%	10%	50%	100%	
1	Puskesmas Kuo Kuwo	5.551.650,00	3.140.000,00	2.887.000,00	2.703.350,00	12.991.800,00	32.765,00	314.000,00	1.443.500,00	2.703.350,00	[illegible]
2	[illegible]	2.866.350,00	[illegible]			24.750.500,00	14.700,00	2.189.000,00			[illegible]
3	Puskesmas Desa Enam	[illegible]	[illegible]			8.040.500,00	6.400,00	216.000,00			[illegible]
4	Puskesmas [illegible]	1.121.000,00				1.120.000,00	5.610,00				5.600,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	8.470.000,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
6	Puskesmas Aji Mas	4.511.000,00				45.510.000,00	22.550,00				22.550,00
7	Puskesmas Halangkuri	28.725.000,00	10.215.000,00		592.401,00	41.512.000,00	143.625,00	1.021.500,00		592.000,00	2.593.125,00
8	[illegible]	12.080.000,00	3.470.000,00			35.550.000,00	60.400,00	347.000,00			503.400,00
9	Puskesmas Tanjung	2.959.000,00	5.960.000,00			11.450.000,00	14.795,00	596.000,00			621.395,00
10	Puskesmas Adiluwih	8.234.000,00	4.910.000,00			36.210.000,00	41.170,00	491.000,00			632.170,00
11	Puskesmas Pekon Sidoharjo	3.880.000,00	85.385.000,00			89.245.000,00	19.400,00	8.538.500,00			8.632.800,00
12	Puskesmas Pugung Raharjo	5.763.000,00	4.194.000,00			9.470.000,00	28.625,00	419.400,00			484.825,00
13	Puskesmas Pasirsakti	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
14	Puskesmas Sumber Rejo	23.419.000,00	[illegible]			23.419.000,00	117.095,00	[illegible]			117.095,00
15	[illegible]	25.264.000,00	18.900.000,00			44.164.000,00	126.315,00	1.810.000,00			1.959.115,00
16	[illegible]	6.510.000,00	2.285.000,00			8.515.000,00	31.150,00	228.500,00			259.650,00
17	[illegible]	70.004.000,00	55.994.350,00			125.998.000,00	350.120,00	4.599.400,00			4.949.520,00
18	[illegible]	1.590.000,00	5.060.000,00			6.650.000,00	18.750,00	506.000,00			526.750,00
19	[illegible]	5.020.000,00	4.915.660,00			9.935.660,00	15.130,00	490.500,00			505.600,00
20	Puskesmas [illegible]	3.770.000,00	58.650.000,00			61.420.000,00	16.850,00	5.865.000,00			5.881.850,00
21	[illegible]	6.956.000,00	5.245.000,00			12.635.500,00	44.410,00	524.500,00			419.350,00
22	[illegible]	16.290.000,00	17.510.000,00			34.460.000,00	81.250,00	1.781.000,00			1.862.250,00
23	Puskesmas Desa Cuka	2.069.850,00	2.150.000,00			4.150.000,00	10.300,00	210.000,00			320.300,00
24	Puskesmas Sukadana	1.111.000,00				1.111.000,00	5.555,00				5.555,00
25	Puskesmas Sukomoro Mutiara	2.960.000,00				2.960.000,00	14.800,00				14.800,00
26	Puskesmas Sukamaju Tiga	2.031.350,00	4.780.000,00			6.850.000,00	10.250,00	478.000,00			488.150,00
27	Puskesmas [illegible]	2.467.000,00	2.995.000,00			5.491.000,00	12.480,00	299.500,00			311.980,00
28	Puskesmas Tanjung Harapan				400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
29	Puskesmas Pekuwon	5.487.000,00	5.751.000,00			12.238.000,00	12.435,00	575.100,00			607.535,00
30	Puskesmas Labuhan Ratu	2.950.000,00	3.450.000,00			6.310.000,00	14.700,00	345.000,00			359.700,00
31	Puskesmas Rantau Sabu	3.466.000,00	1.125.000,00			7.091.000,00	19.830,00	112.500,00			302.330,00
32	Puskesmas Perbaungan	5.725.000,00	3.720.000,00			13.475.000,00	26.225,00	372.000,00			610.725,00
33	Puskesmas Tambah Subur	[illegible]	[illegible]			3.970.000,00	18.850,00	[illegible]			4.850,00
34	[illegible]	[illegible]	20.999.000,00			45.025.000,00	110.500,00	2.066.500,00			2.266.700,00
35	BLUD Sukadana	1.098.800.760,00	575.500.481,00	26.076.000,00	4.484.113.554,00	8.754.964.041,00	15.494.011,80	57.751.448,10	63.236.700,00	4.484.113.554,00	4.600.468.718,90
JUMLAH		3.483.956.366,00	3.944.984.481,00	128.963.000,00	4.476.677.554,00	9.967.883.841,00	17.039.741,80	100.166.648,10	84.481.200,00	4.676.677.554,00	4.878.365.143,90

LAMPIRAN V

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR II
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PER PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO PIUTANG	REALISASI	KOREKSI	Tahun 2024			Total Piutang (Rp)	PIUTANG Per 31 Desember 2024	KUALITAS PIUTANG	Perhitungan Piutang Macet/Kadaluarsa	JENIS dan PENYISIHAN PIUTANG
					TARGET SESUAI PERDA 2024	REALISASI	KURANG/LEBIH REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH				57.064.801.000,00	57.064.801.000,00		57.064.801.000,00				
1	Pajak Daerah Provinsi (0001) PAJAK				35.819.216.000,00	35.819.216.000,00		35.819.216.000,00				
	0001 PBB Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan				22.228.821.000,00	22.228.821.000,00		22.228.821.000,00				
	0001 PBB Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan				2.000,00	2.000,00		2.000,00				
	0001 PBB Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Perikanan				5.177.965.000,00	5.177.965.000,00		5.177.965.000,00				
	0001 PBB Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Pertanian				512.408.000,00	512.408.000,00		512.408.000,00				
2	DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH (0001) PENERIMAAN DAERAH LAINNYA				21.245.585.000,00	21.245.585.000,00		21.245.585.000,00				
	0001 SDA Minyak Bumi				20.764.357.000,00	20.764.357.000,00		20.764.357.000,00				
	0001 SDA Gas Bumi				327.000,00	327.000,00		327.000,00				
	0001 SDA Panas Bumi - Sumber Daya Energi Lainnya				453.228.000,00	453.228.000,00		453.228.000,00				
	0001 SDA Panas Bumi - Iuran Tetap				12.941.000,00	12.941.000,00		12.941.000,00				
	0001 SDA Kehutanan - PSDH				48.475.000,00	48.475.000,00		48.475.000,00				
	0001 SDA Perikanan				1.561.394.000,00	1.561.394.000,00		1.561.394.000,00				
	0001 SDA Sawit				4.903.263.000,00	4.903.263.000,00		4.903.263.000,00				
1	DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH (0001) PENERIMAAN DAERAH LAINNYA	138.961.938,00	189.042.000,00	635.881.529,00	1.616.404.000,00	1.616.404.000,00		1.721.646.000,00				
	0001 Cukai Hasil Tembakau	138.961.938,00	189.042.000,00	635.881.529,00	1.616.404.000,00	1.616.404.000,00	0,00	1.721.646.000,00				

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG DBH PAJAK PEMERINTAH PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	SALDO PIUTANG TAHUN 2024	[illegible] CATAT PIUTANG [illegible]	PENETAPAN DBH PAJAK TAHUN 2024	REALISASI TRANSFER DBH 2024	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2024	KOLEKTIBILITAS PIUTANG					Penyisihan [illegible] Tak [illegible]				
							Lancar (≤1 thn)	Kng Lancar (>1 thn s/d 2 thn)	Diragukan (>2 thn s/d 5 thn)	Macet (>5 thn)	Jumlah	Lancar (≤1 thn)	Kng Lancar (>1 thn s/d 2 thn)	Diragukan (>2 thn s/d 5 thn)	Macet (>5 thn)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.682.428.997,07		17.818.141.999,00	17.541.643.063,00	21.782.927.934,07	21.782.927.934,07				21.782.927.934,07	182.919.062,42				182.919.062,42
2	[illegible] Kendaraan	11.111.378.142,00		13.493.175.080,00	12.321.337.467,00	11.957.175.814,00	11.957.175.814,00				11.957.175.814,00	82.795.877,00				82.795.877,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.508.757.784,05		53.794.761.483,00	48.541.187.204,00	43.764.341.363,05	43.764.341.363,05				43.764.341.363,05	219.911.801,44				219.911.801,44
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	268.564.801,00		270.321.736,00	206.118.993,00	268.564.801,00	268.564.801,00				268.564.801,00	1.342.824,12				1.342.824,12
5	Pajak Rokok	7.288.414.184,00	1.544.218.945,00	18.361.436.817,00	40.933.055.746,00	7.493.213.289,00	5.948.994.344,00			1.544.218.945,00	7.493.213.289,00	37.466.065,45			7.720.944.725,00	45.187.009,45
	Jumlah	88.859.543.908,12	1.544.218.945,00	103.738.436.815,00	119.543.342.473,00	85.266.223.201,12	83.721.004.256,12			1.544.218.945,00	85.266.223.201,12	426.295.330,23			7.720.944.725,00	433.716.330,23

LAMPIRAN II

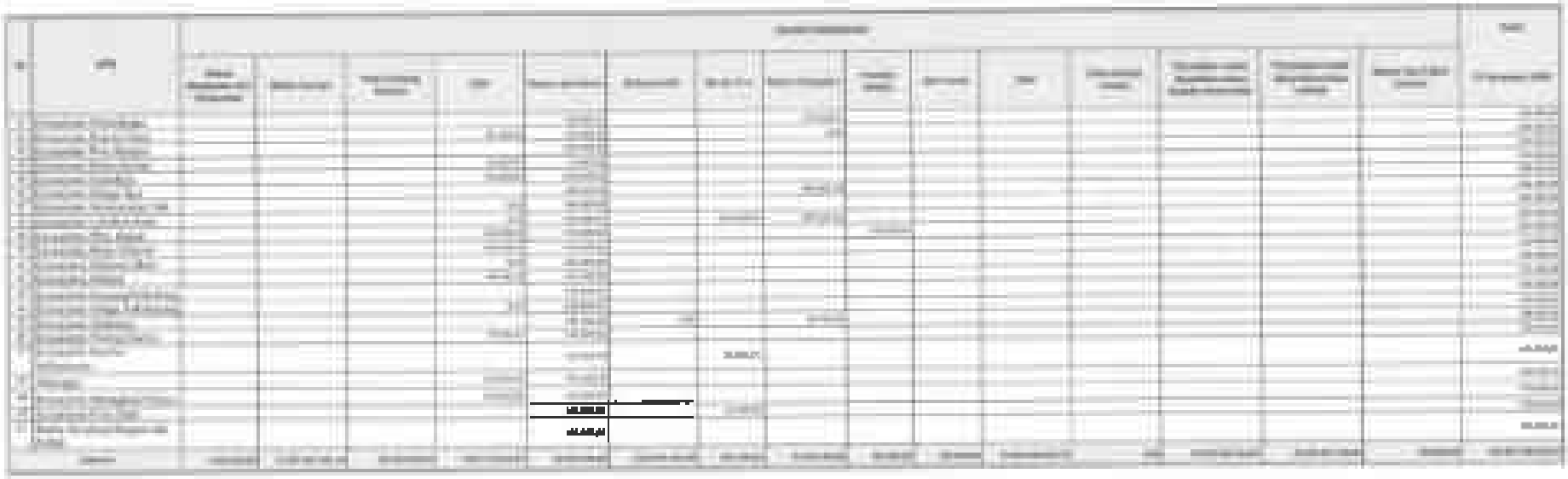
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

No	OPD	Uraian Beban Dibayar Dimuka	Data Kendaraan			Nilai	Jangka Waktu			
			Jenis/Tipe/merk kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BAPPEDA	Asuransi Kendaraan	Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T	BE 1032 NZ	2017	6 771.100,00	23/09/2024 s.d. 23/09/2025	1	1 691.075,00	5 079 225.00
2	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan	Toyota Fortuner 2.4 VRZ	BE 1435 NZ	2021					
			Toyota Prado TXL Land Cruiser	BE 1013 NZ	2016					
			Toyota Innova Venturer 2.4 A/T	BE 1412 NZ	2021					
			Toyota Fortuner 2.4 VRZ	BE 1476 NZ	2021					
			Toyota New Hiamer	BE 1014 NZ	2016					
			Pajero Sport Exceed 4x2 A/T	BE 1483 NZ	2022					
			Toyota Fortuner 2.4 VRZ	BE 1486 NZ	2023					
			Toyota Double Cabin Hilux 2.4 G	BE 8021 NZ	2021					
			Toyota Double Cabin Hilux 2.4 G	BE 8051 NZ	2021					
			Toyota Innova 2.4 V GUN 42 A/T	BE 11 N	2020	166 130 881,00	17/05/2024 s.d. 17/05/2025	7	97 259.682,92	69 471.202,08
			Toyota Innova 2.4 V GUN 42 A/T	BE 12 N	2020					
			Toyota Innova 2.4 V GUN 42 A/T	BE 13 N	2020					
			Toyota All New Innova 2.4 V A/T	BE 1035 NZ	2017					
			Toyota Avanza . 3 Valve M/T	BE 1430 NZ	2021					
			Isuzo Touring	BE 2252 NZ	2016					
			Toyota Pick Up Hilux 2.0 M/T	BE 8032 NZ	2021					
			Toyota Pick Up Hilux 2.0 M/T	BE 8027 NZ	2021					
			Mitsubishi Double Cabin Swrdp Triton SC GLX	BE 9114 NZ	2019					
			Toyota HI-ACE 2.8 M/T	BE 7024 NZ	2021					
			Toyota Innova Venturer 2.4 A/T	BE 1478 NZ	2021					
3	PkM Labuhan Meringgai	Kelebihan setor Pajak								141.518.251,00
			JUMLAH			173.583.185,00			98.953.757,92	217.068.678,00

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN [illegible]
[illegible]
PERIODE DESEMBER 2024

No	URAIAN	[illegible]														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																



LAMPIRAN 13

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH
TAHUN BUKU 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	MODAL [illegible]					[illegible]	METODE PENILAIAN
		Saldo Awal Per 31 Desember 2023	Koreksi	Saldo Awal setelah Koreksi	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	PT BANK LAMPUNG	6.860.780.000,00	-	6.860.780.000,00	1.000.000.000,00	-	7.860.780.000,00	METODE BIAYA
2	PT BPRS LAMPUNG TIMUR	23.642.867.778,25	-	23.642.867.778,25	2.032.012.158,97	-	25.674.895.938,22	METODE EKUITAS
3	PDAM WAY GURUH	4.701.283.216,00	-	4.701.283.216,00	4.308.992.310,00	-	9.010.275.526,00	METODE EKUITAS
	JUMLAH	**35.224.930.994,25**		**35.224.930.994,25**	**7.341.011.468,97**	-	**42.565.942.464,22**	

LAMPIRAN 14

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ASET KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	12/3/2018	Pembelian	49,550,000.00	Perencanaan APBDP Aparatur 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	12/3/2018	Pembelian	310,201,679.00	Perencanaan APBDP Aparatur 8
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	12/21/9	Pembelian	99,750,000.00	Perencanaan APBDP Aparatur 9
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	11/6/2019	Pembelian	99,550,000.00	perencanaan rumah dan perumahan dinas pemerintah APBDPI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	11/6/2019	Pembelian	99,440,000.00	Perencanaan gedung kantor APBDP 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	11/6/2019	Pembelian	59,370,000.00	Perencanaan Gedung Kantor APBDP 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	11/6/2019	Pembelian	49,692,000.00	Perencanaan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	12/3/2019	Pembelian	29,352,321.00	Perencanaan APBDP Aparatur 8
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	82/2019	Pembelian	3,046,592,674.00	[redacted] dan Pembangunan Kantor [redacted] Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Pembangunan Struktur Tahap 11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	10/14/2021	Pembelian	49,714,500.00	belanja modal perencanaan bangunan fasilitas public [redacted] Perencana [redacted] dan [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	10/14/2021	Pembelian	28,902,019.29	perencanaan [redacted] gedung kantor Pekerjaan Pemeliharaan [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	10/6/2021	Pembelian	28,902,019.28	perencanaan rehabilitasi gedung kantor dinas pekerjaan. keg. Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	11/9/2021	Pembelian	323,810,180.00	Perencanaan pembangunan gedung keg. Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	9/30/2022	Pembelian	2,120,935,328.63	[redacted] Dinas PUPR Tahap II Realisasi Fisik [redacted]nFui 1.822.686.907,712 Per 31 Desember 2022 +Adendum nilai 298.904.421,12 15.4% 153/C-PUPR-[redacted] 30 des 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	12/11/2023	Pembelian	229,671,943.89	[redacted] Pembangunan Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab.Lampung Timur 92,82% Per 31 Desember [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	9/11/2021	Pembelian	27,481,151.42	Pembangunan Gedung PLTU Kab.Lampung Timur pembangunan ruang pemeriksaan dan ruang hot kantor Inspektorat Kab. Lampung

Nama UPB	Nama Aset	No. Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
						Timur Pembangunan Sarana Prasarana Arboretum Lampung Timur di Bandar Lampung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	4/3/2023	Pembelian	595,517,750.00	Konsultansi Pemancangan Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Kantor DPRD Kab. Lampung Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	4/30/2023	Pembelian	46,514,793.82	Rehabilitasi gedung Balai Pertemuan Kantor kecamatan Anak Serbah. Rehabilitasi Pagar dan Rumah Dinas Kecamatan Batanghari Nuban. Rehabilitasi/Pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) Kec. Labuhan Ratu. Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Kecamatan melodang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	8/30/2024	Pembelian	39,253,530.00	Konsultansi pemancangan bangunan gedung. Dinas PUPR : Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja . Revisi Pemancangan Pembangunan Public Lumpur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	9/27/2024	Pembelian	98,849,940.00	Konsultansi pemancangan rehabilitasi gedung 2 Dinas PUPR : Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan. Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Camat Bandar Sribawono. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rehabilitasi Prasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	12-31-2016	Pembelian	179,307,010.00	Pemancangan Aparatur 2 Gedung Arsip DP2KAD dan DPRS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	2/21/2019	Pembelian	29,840,000.00	Pemancangan Aparatur 5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	9/26/2017	Pembelian	29,800,000.00	Pemancangan Aparatur 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	11/6/2015	Pembelian	98,107,000.00	Pembangunan public center
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	11/6/2015	Pembelian	98,245,000.00	Review Design Pembangunan public center
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	9/2/2019	Pembelian	4,098,376,000.00	Pembangunan dan stu Rehabilitasi Arsyngan Lampung Timur di Bandar Lampung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	10/15/2020	Pembelian	613,100,166.00	Pelanjj Model Gedung dan Bangunan -- Pengadaan Rehabilitasi Arsyngan Lampung Timur Tahap II
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	9/30/2022	Pembelian	2,935,349,264.00	Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Mal Pelayanan Publik Kab. Lampung Timur Realisasi Rp4 91 645, Per 31 Desember 2022 - 8,34% Per 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	10/9/2021	Pembelian	29,734,480.00	lanjut pembangunan rehabilitasi asrama putra dan ruang vip soal sukatana keg pembangunan bangunan dan lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (Mes)	1	12-31-2013	Pembelian	2,571,420,000.00	gedung Sholat center

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Fiberoptik/Kawasan Perguruan	1	12/3/2019	Pembelian	703,531,200.00	Pembangunan Landfill Kota Sukadana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Parkir Terbuka Perumahan	1	9/6/2020	Pembelian	97,451,340.00	Perencanaan penataan halaman pendopo kabupaten lamandau untuk Dinas PUPR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah Negara Golongan I Tipe A Pemanahan	1	10/12/2021	Pembelian	536,423,000.00	lanjutan pembangunan pembangunan gapura, lampu dan kolam, lapangan futsal, wc umum dan musholla rumah dinas pejabat, kapal lampung lamandau, pemasangan halaman dan lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tugu Kemerdekaan	1	12/31/2015	Pembelian	492,699,682.00	Pembangunan Monumen Tugu Perjuangan Arafin RI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tugu lainnya (dsl)	2	9/15/2022	Pembelian	464,715,000.00	Konsultansi Perencangan RTHEV Jalan Kota Sukadana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tugu lainnya (dsl)	1	9/30/2022	Pembelian	2,342,882,440.00	Pembangunan Tugu/RTH Desa Sukadana Kec Sukadana Realisasi Fisik 50,36% per 31 Desember 2022 s/d 16,62% per 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tugu Pintu Batas Administrasi Kabupaten	1	11/6/2018	Pembelian	99,726,600.00	Perencanaan Rehabilitasi / Pembangunan Tugu Batas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tugu/Pintu Batas Administrasi Kabupaten	1	9/9/2017	Pembelian	79,429,280.00	Konsultansi perencangan tugu batas kampung timur-kampung seranau di kecamatan kubang Dinas PUPR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tugu/Pintu Batas Administrasi Kabupaten	1	10/25/2024	Pembelian	861,048,500.32	Pembangunan / rehabilitasi dan lanjutan umur di desa gedung dalam kec.balangbaru. nomor realisasi fisik per 31 desember 91,02% pjlar 780,496,355.46 per 46 853,397.00 pjk s 54,418,152.86
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/31/2017	Pembelian	99,242,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Warungi Jaya - Wms (R.216) Kec. Pulau Sembesar CV. DWIKA KONSULTAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/31/2017	Pembelian	169,360,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Karya Bersuki - Lembasung (R.867) Kec. Velway Barat CV. TRIBUANA ARTHA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	6/31/2017	Pembelian	69,370,000.00	Perencanaan [redacted] Pelindung Jaya - Jatsung (R.196) Kec. Un. [redacted] CV. TRIBUANA ARTHA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	6/31/2017	Pembelian	199,020,000.00	Perencanaan [redacted] Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sekacana Tengah - Rajabasa Lama (1.0.906) Kec. Sukadana Lebuhan Ratu CV DWI ARTHA [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/31/2017	Pembelian	149,220,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pasir Ajo I Dempat Baru - Lebuh (Gn. Tempi) (R.114) Kec. Sukadana/Simpang Hilir CV. DWIKA KONSULTAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/31/2017	Pembelian	93,466,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bumi Jaya Pubelinggi (R.004) Kec Pubelinggi CV AZQA KREASI

Nama UPB	Nama Aset	No. Register	Tgl_pembukuan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/3/2017	Pembelian	99,397,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Mengandung Sari - Surya Makmur (R.027) Kec. Sesemotong Oleh: CV. JASA TEKNIK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/3/2017	Pembelian	69,316,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sripendowo - Sidar Sewaya (R.110) Kec. Bar Selatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/3/2017	Pembelian	128,677,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan - Bumi Agung
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/3/2017	Pembelian	79,216,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tegal Ombo - Tanjung Tebu (R.056) Kec. Way [redacted] CV. TRIBUANA ARTHA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	11/1/2019	Pembelian	194,952,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sumber Rejo - Pulau Aji Ex. Jembatan Batu (R.080) Kec. Way Jepara Oleh: CV. JASA TEKNIK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	9/25/2017	Pembelian	49,300,000.00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Jalan Taman Ciri - Kota Ratu (R.130) Kec. Bumi Ratu Nuban
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	-	1/31/2019	Pembelian	132,121,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/3/2018	Pembelian	237,470,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/3/2018	Pembelian	208,848,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	6/30/2019	Pembelian	308,282,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/3/2018	Pembelian	179,086,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/30/2019	Pembelian	134,152,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/21/2019	Pembelian	247,307,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 7
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/3/2018	Pembelian	247,900,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 8
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	10/30/2019	Pembelian	246,995,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 9
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/3/2018	Pembelian	231,063,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kabupaten 10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	11/7/2019	Pembelian	1,585,560,000.00	Perencanaan Peningkatan jalan (APBDP) [redacted] Kota TA 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	2/15/2022	Pembelian	99,063,000.00	1. Konsultansi konstruksi pekerjaan [redacted] (DAK) 1 Dinas PUPR (Penanganan Long Segment Ruas Jalan Dwimulyo - Simbaresan 12 Konsultansi konstruksi pekerjaan jalan (DAK) 4 Dinas PUPR (Penanganan Long Segment Ruas Jalan [redacted] Rokat - Batas [redacted] K

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	5/17/2023	Pembelian	99,130,570.00	Konsultansi Kontruksi Perencangan Jalan DAK 5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	5/17/2023	Pembelian	99,350,000.00	Konsultansi Konstruksi Perencangan Penghijauan Ruskab Jalan 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	5/17/2023	Pembelian	99,500,000.00	Konsultan Kontruksi Perencangan Pemeliharaan Rutin Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	5/24/2023	Pembelian	99,100,000.00	Study Kelayakan Rekonstruksi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lokal	1	12/31/2024	Pembelian	166,437,000.00	[redacted] jalan [redacted] Dinas [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	7/11/2019	Pembelian	1,252,826,253,641	pembangunan jalur perbatasan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kota Lokal	1	5/15/2023	Pembelian	84,548,963.77	[redacted] Pemeliharaan Berkala Jalan [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kota Lokal	1	5/17/2023	Pembelian	99,460,940.00	[redacted] Konsultasi Perencangan [redacted] 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kota Lokal	1	5/15/2023	Pembelian	595,995,337.28	Konsultansi Perencangan [redacted] 01 Konsultansi Perencangan Jalan Kabupaten 02 Konsultansi Perencangan Jalan Kabupaten 03 Konsultansi Perencangan Jalan Kabupaten 04 Konsultansi Perencangan Jalan Kabupaten 05 [redacted]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kota Lokal	1	8/18/2023	Pembelian	294,086,397.45	Konsultan [redacted] Rekonstruksi jalan [redacted] Konsultasi Kontruksi Perencanaan [redacted] 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,440,080.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,322,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,340,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,339,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,350,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 20
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,447,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 21
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,447,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 22
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,438,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 23
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,425,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,436,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	98,400,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 38
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,500,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	96,220,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 40
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	98,211,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 41

Nama_OPD	Nama_Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_Usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,140,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 42
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,500,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 43
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,600,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 44
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,721,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,721,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 46
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,721,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 47
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,569,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 49
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,468,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	69,337,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	69,410,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Ruas Jalan 52
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Khusus Kompleks	1	12/15/2021	Pembelian	1,748,000.00	belanja perencanaan teknis pembangunan/rehabilitasi/ saluran parkir jalan lingkungan di wilayah kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arden	1	11/8/2019	Pembelian	1,296,776,200.00	Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Atau Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (APBDP) TA 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	6/12/2020	Pembelian	3,353,396,000.00	Pembangunan Jembatan Jahap 1 Desa Tanjung Tarlo - Desa Ka
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	12/10/2021	Pembelian	7,351,736,628.65	belanja pembangunan Jalan II [illegible] per 31 des 2021 sebesar 37.23% sebesar Rp. 1,871,166,996.95 dan sisadum berdasarkan di juni 2022 sebesar 12,762 % sebesar Rp. [illegible]
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	9/30/2022	Pembelian	9,564,583,815.00	Pembangunan Jembatan Kali Pasa Tahap III Pembangunan 60% Per 3 - Desember 2022 Pembiayaan pembayaran APBD APBN tahun 2022 3,214,516,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	5/15/2023	Pembelian	297,062,000.00	Konsultansi Konstruksi Pembangunan Pembangunan Jembatan 1. Konsultansi Konstruksi Pembangunan Pembangunan Jembatan 2. Konsultansi Konstruksi Pembangunan Pembangunan Jembatan 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	1	12/31/2024	Pembelian	99,921,435.00	Konsultansi Konstruksi Pembangunan Pembangunan Jembatan 3 : Penggantian Jembatan Tanjung Muan Kec. Purbolinggo, Pembangunan Jembatan Desa Sukar Karya Kec. Wawary Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	1	12/12/2020	Pembelian	96,543,000.00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Desa Lain-lain	1	10/31/2017	Pembelian	110,640,000.00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Desa Bhakti Seka Kecamatan Batanghari I Tahap II CV. AMALIA BANGUN CONSULTANT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	88,702,539.60	Perencanaan Teknis APBDP Jembatan 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Desa Lain-lain	1	11/5/2018	Pembelian	99,207,000.00	Perencanaan Teknis APBDP Jembatan 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	1	12/31/2012	Pembelian	217,588,000.00	pembangunan bendungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Mikro (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	6/14/2023	Pembelian	99,200,000.00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pegunakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Mikro (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	6/24/2023	Pembelian	66,840,000.00	Perencanaan Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi Way Negara Batin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	12/3/2018	Pembelian	1,652,492,800.00	Perencanaan Bidang Irigasi untuk Kegiatan DAK 2019 : 1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Way Kandis 2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Way Hanu Negal 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Way Tambah Luhur 4. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Way Tambah Luhur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	1/7/2019	Pembelian	99,151,000.00	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Pet SPT Paket 1 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	1/7/2019	Pembelian	99,204,000.00	Perencanaan pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi SPT paket 2)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	1	12/29/2017	Pembelian	95,763,000.00	Perencanaan Normalisasi Saluran Embung Nuban sampai dengan angin way bekarang (Dibawah Bendung DI Way Bekarang)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	1	12-29-2017	Pembelian	48,720,000.00	Review Design Bending Mesin Kanan Kecamatan Wawey Kanye Kabupaten Lampung Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Saluran Air lain	1	12/3/2018	Pembelian	139,817,000.00	Perencanaan Pembangunan Kanal + Saluran drainase Kecamatan Melinting
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Mikro (Bangunan Penyadap Pemanfaatan Rawa)	1	11/7/2019	Pembelian	29,550,000.00	Perencanaan kegiatan DAK 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Drainase	1	11-23-2018	Pembelian	104,226,952.00	(Paket Kontrak) 70.0 % Pembangunan Drainase Desa Sukadana Jaya Dusun Gelung Kec. Sukadana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	11/5/2018	Pembelian	88,463,000.00	Perencanaan APBDP SPAM Wilayah 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	11/5/2018	Pembelian	88,520,000.00	Perencanaan APBDP SPAM Wilayah 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	11/25/2018	Pembelian	19,030,263.46	(Paket Kontrak) 59.06% Pembangunan Irigasi sungai bor pandak Al Barokah Desa sukadana Baru kec. margatiga

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Dangan Pompa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air\	1	1/12/2016	Pembelian	22,152,536.11	Pekerjaan Konstruksi 70.114\ Pembangunan Lanjutan Pembangunan Sumur Bor Masjid Al Tihad dusun 8 Desa Sukadana Baru Kec. Margo Tiga
Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	12/3/2016	Pembelian	10,422,036.00	Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Way Jepara
Dinas Kesehatan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	72,753,040.00	Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas baru Tanjung Enim
UPTD SD NEGERI 3 KIBANG	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 5 JAYA ASRI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 GUNDANG REJO	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI Negeri Tua	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	2,765,000.00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD DAN SMP
UPTD SD NEGERI 1 SUKARAJA TIGA	Pagar Permanen	1	2/2/2021	Pembelian	1,835,201.00	Jasa Konsultasi Perencanaan Pagar
UPTD SD NEGERI 2 Purwosari	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	2,871,500.00	REHAB RUANG KANTOR & PERPUS SD & SMP TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 Kedaton Ilmiah	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 Rejosari Lama	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	2,765,000.00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD DAN SMP
UPTD SD NEGERI Labuhan Rukoh Kepahiang	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	2,765,000.00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD DAN SMP
UPTD SD NEGERI 1 Labuhan Ratu Dapuh	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	2,131,250.00	REHAB RUANG KANTOR & PERPUS SD & SMP TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 Labuhan Ratu [illegible]	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 Sumber Hasil	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 SUKADANA PASAR	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	3/19/2020	Pembelian	8,302,000.00	Perencanaan
UPTD SD NEGERI 1 Bandar Agung	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	3/19/2020	Pembelian	6,200,400.00	Perencanaan SDN 1 Bandar Agung
UPTD SD NEGERI 2 Sri Pendowo	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	3,609,333.33	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SD
UPTD SD NEGERI 1 Way Mili	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	3,609,333.33	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SD
UPTD SMPN 1 Way ey Karya	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	3/19/2020	Pembelian	3,15[illegible]00	Perencanaan
UPTD SD NEGERI Sumber Jaya	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dsb)	1	12/31/2015	Pembelian	3,609,333.33	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SD
UPTD SD NEGERI Lubung Raya	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	2/2/2021	Pembelian	4,303,200.00	Jasa Konsultasi pembangunan Mushalla

Nama UPB	Nama Aset	Ko_Register	Tgl_perolehan	Asal_usul	Harga	Keterangan
UPTD SD NEGERI 1 MARGASARI	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	3/19/2020	Pembelian	2,156,876.00	Perencanaan
UPTD SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI BELIMBING SARI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	12/31/2015	Pembelian	3,036,135.00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SD
UPTD SD NEGERI BETENG SARI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI LADI WARNO	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
UPTD SD NEGERI 1 BUANA SAKTI	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1	12/31/2015	Pembelian	4,432,000.00	PERENCANAAN REHAB SD TA. 2016
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1/1/2020	Pembelian	25,420,000.00	Konsultan Perencanaan Gedung Alsintan Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Perencanaan Fisik, Pertanian dll	1	10/5/2020	Pembelian	21,570,000.00	Konsultan Perencanaan Rehab BPP (DAK) Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DAK)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	12/31/2016	Pembelian	89,999,994.00	Pembangunan UPTD Kebakogan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1/1/2015	Pembelian	47,150,000.00	perencanaan pembangunan pagar fisik gedung Sekret DKM ,Belanja jasa konsultasi perencanaan, teknis pembangunan Vaping blok Pasar Rajabasa Lama kegiatan pembangunan & pengembangan sarana distribusi ,Sekampung Rp 21.150.000,Rajabasa Rp. 20.500.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung Perkantor/Koperasi/Pasar Permanen	1	8/19/2016	Pembelian	127,500,000.00	Perencanaan Pembangunan Pasar Way Jepara (Fisik Dan Pasar, Perencanaan yang di anggarkan di Daerah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung Perkantor/Koperasi/Pasar Permanen	1	9/23/2015	Pembelian	86,139,000.00	Perencanaan Pembangunan Pasar Pekalongan (Fisik Dan Pasar, Perencanaan yang di anggarkan di Daerah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Gedung Perkantor/Koperasi/Pasar Permanen	1	3/13/2015	Pembelian	99,000,000.00	Belanja jasa konsultasi perencanaan teknis pembangunan pasar Way Jepara II Kegiatan pembangunan & pengembangan sarana distribusi TA 2015
Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1/6/2014	Pembelian	297,058,200.00	Belanja Perencanaan Gedung Bapenda
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanahan	Tanah Persil Lainnya	1	12/21/2012	Pembelian	49,400,000.00	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Belanja jasa konsultasi perencanaan modal untuk persil lainnya pembangunan Ruang Terbuka Publik Ikon Sukarame Lampung Timur 15
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanahan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	12/31/2016	Pembelian	24,990,000.00	Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan pemukiman kota Sehat Adi Pura KV.UT JEKNIK KONSULTAN
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemanahan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	12/31/2015	Pembelian	24,995,000.00	Jasa Konsultasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan pemukiman kota Sehat Adi Pura KV.RAJA WALI KONSULTAN

Nama UPB	Nama Aset	No_Register	Tgl_pembelian	Asal_usul	Harga	Keterangan
Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sewage Distribusi Lain-lain	1	10/12/2021	Pembelian	59,750,000.00	belanja kecukupan perencanaan lampu lras
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	6	12/27/2021	Pembelian	89,000,000.00	Jasa Konsultasi Mendirikan
JUMLAH					59,505,754,588.28	

LAMPIRAN 15

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR MASA MANFAAT ASET

KODE	URAIAN KELOMPOK BARANG	KAPITALISASI		
		JENIS	BATAS (%)	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
1.3.3	**Gedung dan Bangunan**			
1.3.3.01	**Bangunan Gedung**			
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			>75	20
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			>75	20
1.3.3.02	**Monumen**			
1.3.3.02.01	Candi/Patung Peringatan/Prasasti Lainnya	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			>75	20
1.3.3.03	**Bangunan Menara**			
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Pemancar	Renovasi	>30% s.d 45%	6
			>45% s.d 75%	10
			>75	15
1.3.3.04	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**			
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>30% s.d 45%	9
			>45% s.d 75%	15
1.3.4	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**			
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan			
1.3.4.01.01	Jalan	Renovasi	>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 75%	2
			> 75	3
1.3.4.01.02	Jembatan	Renovasi	>30% s.d 45%	6
			>45% s.d 75%	10
			> 75	15
1.3.4.02	**Bangunan Air**			
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1.3.4.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20

KODE	URAIAN KELOMPOK BARANG	KAPITALISASI		
		JENIS	NILAI (%)	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
1 . 3 . 4 . 02 . D3	Bangunan Pengembang, Rawa dan Polder	Renovasi	>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 75%	5
			> 75	7
1 . 3 . 4 . 02 . D4	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 02 . D5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 02 . D6	Bangunan Air Bersih / Baku	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 02 . D7	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . D3	Instalasi			
1 . 3 . 4 . 03 . D1	Instalasi Air Baku	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . D2	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>30% s.d 45%	9
			>45% s.d 75%	17
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . D3	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 75%	5
			> 75	7
1 . 3 . 4 . 03 . D4	Instalasi Pengolahan Bahan Berguna	Renovasi	>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 75%	5
			> 75	7
1 . 3 . 4 . 03 . D5	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . D6	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20

KODE	URAIAN KELOMPOK BARANG	KAPITALISASI		
		JENIS	NILAI (%)	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
1 . 3 . 4 . 03 . 07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . 09	Instalasi Gas	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . 09	Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 03 . 10	Instalasi Lain	Renovasi	>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 75%	5
			> 75	7
1 . 3 . 4 . 04	**Jaringan**			
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Jaringan Air Minum	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Jaringan Listrik	Renovasi	>30% s.d 45%	12
			>45% s.d 75%	20
			> 75	30
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Jaringan Telepon	Renovasi	>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 75%	8
			> 75	12
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Jaringan Gas	Renovasi	>30% s.d 45%	8
			>45% s.d 75%	15
			> 75	20

LAMPIRAN 16

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
RINCIAN MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

Kode Aset	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	SALDO PER 31/12/2023	KOREKSI	SALDO AWAL 1/1/2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		SALDO PER 31/12/2024
						BEBAN PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN	RECLASIFIKASI	
	Peralatan dan mesin	625,812,172,055.94	482,997,232,081.95	0.00	457,735,482,651.34	49,272,032,754.25	0.00	29,170,749,409.69	507,836,515,995.59
1321	ALAT BESAR	13,767,930,217.00	11,607,756,709.00	0.00	11,521,045,907.00	853,903,948.00	0.00	196,710,832.00	12,154,979,865.00
1322	ALAT ANGKUTAN	126,902,796,100.00	96,270,540,802.67	0.00	98,865,717,445.00	7,019,432,263.00	0.00	7,494,832,257.67	105,486,149,790.00
1323	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3,631,850,731.20	2,912,696,391.87	0.00	2,907,232,815.20	149,622,102.00	0.00	25,361,576.67	3,030,354,907.20
1324	ALAT PERTANIAN	7,056,035,612.00	6,969,896,793.00	0.00	6,935,139,759.00	39,118,206.00	0.00	36,758,000.00	6,974,256,965.00
1325	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	152,574,773,508.68	121,593,979,880.08	197,292.00	118,580,893,488.15	9,437,181,957.35	0.00	3,115,281,655.68	125,018,075,437.58
1326	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	14,981,916,292.00	12,100,857,741.00	0.00	11,845,805,074.00	1,524,406,043.00	0.00	257,152,067.00	13,348,211,117.00
1327	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	110,364,502,792.63	79,408,982,279.13	0.00	80,121,523,034.77	12,996,526,597.86	0.00	10,287,459,244.33	82,830,592,632.63
1328	ALAT LABORATORIUM	60,996,821,302.77	51,485,365,771.53	0.00	50,499,825,661.53	2,408,610,050.00	0.00	971,529,910.00	51,902,405,801.53
1329	ALAT PERSENJATAAN	336,854,300.00	122,894,122.00	0.00	122,894,122.00	42,504,266.00	0.00	0.00	165,398,388.00
1321 0	KOMPUTER	121,434,516,496.88	80,967,377,943.20	0.00	76,009,388,787.87	10,618,984,234.00	0.00	2,868,059,155.33	83,760,313,866.54
1321 1	ALAT PRODUKSI,PENGOLAHAN DAN PENURN	311,300.00	305,450.00	0.00	1,685,450.00	1,555,800.00	0.00	0.00	3,241,250.00
1321 5	ALAT KESELAMATAN KERJA	2,297,539,392.00	1,277,673,836.00	197,292.00	1,276,870,544.00	228,911,430.00	0.00	0.00	1,505,781,974.00
1321 7	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	30,825,300.00	1,556,667.00	0.00	1,656,667.00	1,675,208.00	0.00	0.00	3,331,875.00
1321 8	RAMBU - RAMBU	4,693,529,879.00	4,764,511,367.20	0.00	4,692,111,367.00	84,447,475.20	0.00	92,400,300.00	4,776,558,842.00
1321 9	PERALATAN OLAH RAGA	3,516,857,100.78	3,301,860,330.78	0.00	3,294,610,330.78	66,120,681.20	0.00	7,250,000.00	3,353,731,011.78
	Gedung dan Bangunan	916,734,465,480.89	180,078,812,387.02	(767,843,756.00)	180,845,956,153.02	19,691,149,836.97	0.00	0.00	200,727,105,989.99
1331	BANGUNAN GEDUNG	698,227,291,082.89	176,599,092,628.02	2,746,535,193.00	175,772,557,429.02	9,464,458,769.97	0.00	0.00	196,237,016,196.99
1332	MONUMEN	5,000,565,945.24	590,845,820.00	0.00	590,845,820.00	409,013,393.00	0.00	0.00	1,000,859,213.00
1333	BANGUNAN MENARA	134,671,850.00	30,948,516.00	0.00	33,948,516.00	3,366,795.00	0.00	0.00	37,315,311.00
1334	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	13,371,831,052.76	494,966,413.00	(3,513,578,965.00)	4,048,564,388.50	313,252,873.03	0.00	0.00	4,361,815,261.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,812,272,296,097.67	1,423,994,611,344.72	372,243,567,243.33	612,056,449,649.32	503,468,836,179.87	0.00	218,894,795,052.87	1,315,525,296,829.19
1341	JALAN DAN JEMBATAN	1,505,160,089,895.35	1,127,256,958,626.72	372,243,567,243.33	719,439,160,116.32	494,759,416,592.55	0.00	215,534,261,267.07	1,214,248,577,108.87
1342	BANGUNAN AIR	199,552,485,903.67	47,319,634,731.00	0.00	44,159,070,996.00	4,985,074,914.00	0.00	3,160,533,735.00	46,144,746,912.00
1343	INSTALASI	46,158,338,745.19	17,752,580,894.00	0.00	17,752,840,894.00	1,637,921,611.32	0.00	0.00	19,390,802,505.32
1344	JARINGAN	61,360,321,523.26	30,665,337,743.00	0.00	30,656,337,743.00	2,085,823,262.00	0.00	0.00	32,741,166,503.00
	Aset Tetap Lainnya	14,611,376,590.11	2,474,387,312.00	0.00	2,474,387,312.00	215,725,791.00	0.00	0.00	2,690,113,103.00
1351	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	6,454,745,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1352	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	2,086,356,500.00	1,984,387,112.00	0.00	1,984,387,112.00	215,725,791.00	0.00	0.00	2,180,113,103.01
1353	TERNAK	420,000,000.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000,000.00
1355	TANAMAN	4,568,274,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1357	ASET TETAP DALAM RENOVASI	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
	JUMLAH	3,369,930,250,624.68	2,088,455,343,114.77	371,476,523,487.33	1,453,113,275,165.68	572,837,785,362.68	0.00	263,965,544,461.76	2,025,961,060,527.77

LAMPIRAN 17

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

JENIS PAJAK [illegible]

NO	NO REGISTER	TANGGAL PELAPORAN	TANGGAL PEMBAYARAN	MASA PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK	KETETAPAN	DENDA	PENERIMAAN	SISA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	2024.0227.010	24/02/2024	29/02/2024	[illegible]	PT Abadi MITRA	1.065.928,00		1.065.928,00		[illegible]
2	2024.0226.107	26/02/2024	1/03/2024	[illegible]	PT ANGGI MITRA	2.655.238,00		2.655.238,00		221.269,83
3	2024.0227.112	26/02/2024	27/02/2024	1 Februari 2024 s.d 1 Februari 2025	PT DAYA INDAH YASA	2.095.765,00		2.095.765,00		174.648,75
4	2024.0228.161	26/02/2024	12/03/2024	[illegible]	PT SAWIT ASIA MAKMUR SEJAHTERA	2.151.225,00		2.151.225,00		179.281,25
5	2024.0229.006	29/02/2024	22/03/2024	[illegible]	[illegible] MITRA TARUNG	945.000,00		945.000,00		78.750,00
6	2024.0304.006	04/03/2024	26/03/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT [illegible]	1.411.000,00		1.411.000,00		468.900,01
7	2024.0305.019	05/03/2024	07/03/2024	1 April 2024 s.d 1 April 2025	[illegible]	3.435.000,00		3.435.000,00		858.750,00
8	2024.0307.027	07/03/2024	22/03/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	CV [illegible]	2.362.500,00		2.362.500,00		393.750,00
9	2024.0306.009	07/03/2024	18/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT PERSADA LABUHAN AYA	3.855.000,00		3.855.000,00		642.500,00
10	2024.0309.003	19/03/2024	26/03/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT [illegible]	1.991.894,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
11	2024.0319.006	19/03/2024	26/03/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT LANGGA MITRA	975.000,00		975.000,00		162.500,00
12	2024.0319.007	19/03/2024	26/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT DUA LIMA TUNGGAL	1.950.000,00		1.950.000,00		325.000,00
13	2024.0319.008	19/03/2024	26/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT ASAR [illegible]	1.960.000		1.960.000,00		280.000,00
14	2024.0320.031	19/03/2024	19/03/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	1.960.890	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
15	2024.0320.044	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.149.660	85.947,00	2.234.607,00		358.130,83
16	2024.0320.051	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.149.660	85.947,00	2.234.607,00		358.130,80
17	2024.0320.052	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.149.660	85.947,00	2.234.607,00		358.130,80
18	2024.0320.053	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.960.890	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
19	2024.0320.054	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.960.890,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
20	2024.0320.055	20/03/2024	06/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.960.890,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
21	2024.0321.010	21/03/2024	26/04/2024	21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2025	[illegible]	2.051.963,00	83.761,00	2.135.424,00		335.141,83
22	2024.0327.014	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.960.890	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
23	2024.0327.025	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.148.510,00	85.947,00	2.234.607,00		358.130,00
24	2024.0327.026	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.351.450,00	84.458,00	2.435.908,00		383.575,00
25	2024.0327.029	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.351.450,00	84.458,00	2.435.908,00		383.575,00
26	2024.0327.030	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.980.830,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
27	2024.0327.017	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.351.450,00	84.458,00	2.435.908,00		383.575,00
28	2024.0327.051	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.351.450,00	84.458,00	2.435.908,00		383.575,00
29	2024.0327.052	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.351.450,00	84.458,00	2.435.908,00		383.575,00
30	2024.0327.054	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.148.660,00	85.947,00	2.234.607,00		358.130,00
31	2024.0327.064	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.980.830,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
32	2024.0327.069	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.980.830,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
33	2024.0327.069	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.980.830,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
34	2024.0327.070	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	1.980.830,00	79.234,00	2.060.064,00		330.141,67
35	2024.0327.071	19/03/2024	06/06/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk	2.148.660,00	85.947,00	2.234.607,00		358.130,00
36	2024.0327.072	19/03/2024	18/04/2024	1 Maret 2024 s.d 1 Maret 2025	PT [illegible]	1.911.000		1.911.000,00		318.500,00

47	2024.0425.074	27.05.2024	28.06.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Μαρ 2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	2.062.032,30		2.062.032,30	142.140,63
48	2024.0431.007	10.04.2024	04.06.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Μαρ 2025	ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	572.500,00		572.500,00	165.125,00
49	2024.0431.067	10.04.2024	15.04.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Μαρ 2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ	858.000,00		858.000,00	214.200,00
50	2024.0431.092	10.04.2024	07.06.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Μαρ 2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	1.474.500,00	56.700,00	1.474.500,00	354.375,00
51	2024.0431.093	10.04.2024	24.04.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Μαρ 2025	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3.435.000,00		3.435.000,00	828.750,00
52	2024.0431.102	10.04.2024	05.04.2024	1 Ιανουαρ 2024 έως 31 Δεκεμ 2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.369.336,00		2.369.336,00	196.944,17
53	2024.0431.103	10.04.2024	05.04.2024	1 Ιανουαρ 2024 έως 31 Δεκεμ 2025	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΑΚΗΣ	1.465.936,50		1.465.936,50	122.161,38
54	2024.0432.060	22.04.2024	24.04.2024	22 Απρ 2024 έως 21 Απρ 2025	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.780.000,00		5.780.000,00	964.000,00
55	2024.0434.003	24.04.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 31 Μαϊ 2025	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	5.700.250,00		5.700.250,00	1.426.750,00
56	2024.0434.008	24.04.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 31 Μαϊ 2025	ΓΕΩΡΓΟΔΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	1.113.250,00		1.113.250,00	332.370,00
57	2024.0438.003	25.04.2024	27.05.2024	2 Απρ 2024 έως 1 Απρ 2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	54.250,00		54.250,00	13.562,50
58	2024.0514.002	13.05.2024	14.05.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ	927.812,00		927.812,00	197.953,62
59	2024.0517.018	13.05.2024	7.06.2024	2 Απρ 2024 έως 1 Απρ 2025	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	343.200,00		343.200,00	57.200,00
60	2024.0514.001	14.05.2024	03.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	284.250,00		284.250,00	94.150,00
61	2024.0514.004	14.05.2024	1.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	315.600,00		315.600,00	105.000,00
62	2024.0517.029	17.05.2024	31.05.2024	2 Απρ 2024 έως 2 Απρ 2025	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	2.940.681,00		2.940.681,00	847.500,13
63	2024.0517.030	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
64	2024.0517.032	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
65	2024.0517.033	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
66	2024.0517.034	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
67	2024.0517.035	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
68	2024.0517.036	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
69	2024.0517.037	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
70	2024.0517.038	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
71	2024.0517.039	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
72	2024.0517.040	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.600,00		945.600,00	315.000,00
73	2024.0517.041	17.05.2024	17.06.2024	2 Μαϊ 2024 έως 1 Μαϊ 2025	ΚΑΝΤΣΙΚΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ	945.000,00		945.000,00	315.000,00
74	2024.0521.011	21.05.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 30 Απρ 2025	ΚΑΝΤΙ ΥΟΓΑ	567.000,00		567.000,00	189.000,00
75	2024.0521.012	21.05.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 30 Απρ 2025	ΚΑΝΤΙ ΥΟΓΑ	567.000,00		567.000,00	189.000,00
76	2024.0521.013	21.05.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 30 Απρ 2025	ΚΑΝΤΙ ΥΟΓΑ	567.000,00		567.000,00	189.000,00
77	2024.0521.034	21.05.2024	24.05.2024	1 Μαϊ 2024 έως 30 Απρ 2025	ΚΑΝΤΙ ΥΟΓΑ	567.000,00		567.000,00	189.000,00
78	2024.0521.039	21.05.2024	14.06.2024	1 Απρ 2024 έως 31 Απρ 2025	ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ	1.411.000,00		1.411.000,00	1.117.000,00
79	2024.0522.011	22.05.2024	26.06.2024	22 Μαϊ 2024 έως 21 Μαϊ 2025	ΑΒΑΝΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΤΡΟΛΟΥΤΡΑ	1.900.000,00	11.250,00	1.911.250,00	500.000,00
80	2024.0522.015	22.05.2024	14.06.2024	22 Μαϊ 2024 έως 21 Μαϊ 2025	ΤΣΕΛΕΓΚΑΣ	3.780.000,00		3.780.000,00	1.260.000,00
81	2024.0524.029	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
82	2024.0524.014	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
83	2024.0524.015	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
84	2024.0524.016	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
85	2024.0524.017	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
86	2024.0524.018	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	1.872.315,00		1.872.315,00	780.131,25
87	2024.0524.051	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
88	2024.0524.052	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.822.445,00		2.822.445,00	1.176.018,75
89	2024.0524.053	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	1.872.315,00		1.872.315,00	780.131,25
90	2024.0524.054	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.181.588,00		2.181.588,00	909.474,31
91	2024.0524.055	28.05.2024	05.07.2024	1 Ιαν 2024 έως 1 Ιαν 2025	ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΜΑΤΣΑΣ	2.502.111,00		2.502.111,00	1.094.112,08

84	2024.0528.084	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.432.115,00		1.822.115,00		960.131,25
85	2024.0528.085	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.726.088,50		1.726.088,50		1.392.484,50
86	2024.0528.086	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.432.115,00		1.822.115,00		960.131,25
87	2024.0528.087	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.432.115,00		1.822.115,00		960.131,25
88	2024.0528.088	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
89	2024.0528.089	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.111.503,00		2.111.503,00		1.392.484,50
90	2024.0528.090	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
91	2024.0528.091	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
92	2024.0528.092	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
93	2024.0528.093	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
94	2024.0528.094	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
95	2024.0528.095	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
96	2024.0528.096	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
97	2024.0528.097	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
98	2024.0528.098	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
99	2024.0528.099	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
100	2024.0528.100	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
[illegible]	2024.0528.101	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
102	2024.0528.102	24-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
103	2024.0528.103	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
104	2024.0528.104	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
105	2024.0528.105	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00	$6,449.00	2.878.894,00		1.176.018,75
106	2024.0528.106	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
107	2024.0528.107	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
108	2024.0528.108	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
109	2024.0528.109	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
110	2024.0528.110	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
111	2024.0528.111	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
112	2024.0528.112	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
113	2024.0528.113	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
114	2024.0528.114	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
115	2024.0528.115	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
116	2024.0528.116	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
117	2024.0528.117	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
118	2024.0528.118	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.432.115,00		1.822.115,00		960.131,25
119	2024.0528.119	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	1.432.115,00		1.822.115,00		960.131,25
120	2024.0528.120	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
121	2024.0528.121	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.402.011,00		2.402.011,00		1.058.172,08
122	2024.0528.122	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
123	2024.0528.123	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.402.011,00		2.402.011,00		1.058.172,08
124	2024.0528.124	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.402.011,00		2.402.011,00		1.058.172,08
125	2024.0528.125	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75
126	2024.0528.126	28-05-2024	05-07-2024	[illegible]	[illegible]	2.822.445,00		2.822.445,00		1.176.018,75

127	2024.3574.127	28/05/2024	24/06/2024	[illegible]	[illegible]	2.758.063,00		2.758.063,00		840.631,50
128	2024.3601.024	04/06/2024	19/07/2024	[illegible]	PLELANCA APLICADA TYRE [illegible]	1.140.000,00	20.007,07	1.260.007,07		140.560,63
129	2024.3601.030	04/06/2024	19/07/2024	[illegible]	PLELANCA APLICADA TYRE [illegible]	1.137.000,00	22.741,05	1.159.741,05		139.000,05
130	2024.3603.059	24/05/2024	05/07/2024	[illegible]	[illegible]	2.701.963,00		2.701.963,00		1.297.484,50
131	2024.3605.013	05/06/2024	24/06/2024	[illegible]	C.V. CANAL CHOLP	12.120.000,00	104.500,00	12.224.500,00		6.013.000,00
132	2024.3605.013	05/06/2024	24/06/2024	[illegible]	[illegible]	2.750.000,00		2.750.000,00		1.552.500,00
133	2024.3605.014	05/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	2.750.000,00		2.750.000,00		1.552.500,00
134	2024.3607.017	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
135	2024.3607.018	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
136	2024.3607.019	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
137	2024.3607.020	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
138	2024.3611.021	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
139	2024.3611.022	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
140	2024.3611.023	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
141	2024.3611.024	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	787.500,00		787.500,00		328.125,00
142	2024.3611.025	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	787.500,00		787.500,00		328.125,00
143	2024.3611.026	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	787.500,00		787.500,00		328.125,00
144	2024.3611.027	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	787.500,00		787.500,00		328.125,00
145	2024.3611.028	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
146	2024.3611.029	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
147	2024.3611.030	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
148	2024.3611.031	10/06/2024	05/07/2024	[illegible]	PLELANCA SUSPENSIONADA	2.103.000,00		2.103.000,00		729.375,00
149	2024.3611.034	10/06/2024	24/06/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	630.000,00		630.000,00		262.500,00
150	2024.3624.035	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	525.000,00		525.000,00		412.256,25
151	2024.3624.040	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
152	2024.3624.041	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
153	2024.3624.042	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
154	2024.3624.043	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
155	2024.3624.044	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
156	2024.3624.045	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
157	2024.3624.046	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
158	2024.3624.047	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
159	2024.3624.048	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
160	2024.3624.049	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
161	2024.3624.050	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
162	2024.3624.051	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
163	2024.3624.052	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
164	2024.3624.053	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
165	2024.3624.054	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
166	2024.3624.055	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	568.500,00		568.500,00		121.875,00
167	2024.3624.056	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
168	2024.3624.057	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
169	2024.3624.058	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
170	2024.3624.059	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
171	2024.3624.060	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
172	2024.3624.061	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33
173	2024.3624.062	24/06/2024	10/07/2024	[illegible]	PLELANCA MITRA	520.000,00		520.000,00		103.333,33

172	2024 0624 063	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
173	2024 0624 064	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
174	2024 0624 065	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
175	2024 0624 066	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
176	2024 0624 067	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
177	2024 0624 068	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
178	2024 0624 069	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
179	2024 0624 070	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
180	2024 0624 071	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
181	2024 0624 072	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
182	2024 0624 080	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
183	2024 0624 081	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	568.500,00		568.500,00	526.625,00
184	2024 0624 082	24/06/2024	10/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] MITRA	520.000,00		520.000,00	481.111,11
185	2024 0701 001	01/07/2024	17/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juni 2025	PEMDA KAB. PENAJAM	2.622.445,00		2.622.445,00	2.116.018,75
186	2024 0705 002	05/07/2024	19/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juni 2025	PT. [illegible] MITRA	2.520.000,00		2.520.000,00	2.250.000,00
187	2024 0705 014	05/07/2024	19/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juni 2025	PT. [illegible] MITRA LESTARI JAYA	3.276.000,00		3.276.000,00	2.925.000,00
188	2024 0710 044	05/07/2024	12/08/2024	5 Juli 2024 s/d 5 Juni 2025	PT. [illegible] JAYA	1.197.000,00	22.740,00	1.459.740,00	1.303.330,60
189	2024 0717 027	17/07/2024	25/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.317.500,00		1.317.500,00	1.175.669,00
190	2024 0717 028	17/07/2024	01/08/2024	1 September 2024 s/d 1 September 2025	CV. [illegible] TAK	2.111.400,00		2.111.400,00	1.884.650,00
191	2024 0717 029	17/07/2024	25/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	2.047.500,00		2.047.500,00	1.827.232,00
192	2024 0717 030	17/07/2024	29/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.317.500,00		1.317.500,00	1.175.669,00
193	2024 0717 031	17/07/2024	01/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	CV. [illegible] TAK	2.111.400,00		2.111.400,00	1.884.650,00
194	2024 0717 032	17/07/2024	29/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.274.500,00		1.274.500,00	1.137.277,00
195	2024 0717 033	17/07/2024	25/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.317.500,00		1.317.500,00	1.175.669,00
196	2024 0717 034	17/07/2024	25/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.861.000,00		1.861.000,00	1.660.230,00
197	2024 0717 035	17/07/2024	25/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juli 2025	CV. [illegible] TAK	1.274.200,00		1.274.200,00	1.137.280,80
198	2024 0717 036	17/07/2024	29/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juni 2025	CV. [illegible] TAK	1.653.756,00		1.653.756,00	1.475.359,35
199	2024 0717 037	17/07/2024	25/07/2024	1 Juni 2024 s/d 1 Juli 2025	CV. [illegible] TAK	1.653.756,00		1.653.756,00	1.475.359,35
200	2024 0717 038	17/07/2024	02/08/2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV. [illegible] TAK	2.111.400,00		2.111.400,00	1.884.650,00
201	2024 0718 001	18/07/2024	22/07/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	[illegible]	995.000,00		995.000,00	941.250,00
202	2024 0719 040	22/07/2024	24/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juli 2025	PT. [illegible] MANDIRI PUTRA JAYA	3.411.000,00		3.411.000,00	1.705.500,00
203	2024 0719 041	22/07/2024	24/07/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juli 2025	PT. [illegible] MANDIRI PUTRA JAYA	3.780.000,00		3.780.000,00	1.890.000,00
204	2024 0726 003	26/07/2024	12/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	[illegible]	276.250,00		276.250,00	452.812,50
205	2024 0726 004	26/07/2024	16/08/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juni 2025	PT. [illegible] MITRA	1.411.000,00		1.411.000,00	1.421.250,00
206	2024 0729 069	29/07/2024	30/08/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juli 2025	PT. KEY [illegible] JEMBRANA	3.537.375,20	151.452,20	3.840.827,40	1.918.682,20
207	2024 0731 002	31/07/2024	20/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] METAL SINERGI	630.000,00		630.000,00	367.500,00
208	2024 0731 003	31/07/2024	20/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	PT. [illegible] METAL SINERGI	472.500,00		472.500,00	275.625,00
209	2024 0731 045	31/07/2024	09/08/2024	1 Juli 2024 s/d 1 Juli 2025	PT. DIPENTA MITRA GRUP [illegible]	787.500,00	13.750,00	801.250,00	361.130,10
210	2024 0801 001	01/08/2024	09/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	CV. [illegible] PUTRA	2.484.000,00	47.640,30	2.531.640,30	1.349.440,10
211	2024 0805 126	06/08/2024	16/08/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	CV. [illegible] TEKNIK	1.934.250,00		1.934.250,00	1.011.253,50
212	2024 0805 125	05/08/2024	05/11/2024	1 Agustus 2024 s/d 1 Agustus 2025	CV. [illegible] [illegible]	897.750,00	54.119,50	306.869,00	497.411,50
213	2024 0829 010	29/08/2024	12/09/2024	29 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2025	PT. [illegible] [illegible]	5.372.125,00		5.372.125,00	4.151.456,25
214	2024 0813 002	13/08/2024	26/08/2024	13 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2025	PT. [illegible] [illegible]	3.780.000,00		3.780.000,00	2.705.000,00
215	2024 0813 003	13/08/2024	26/08/2024	13 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2025	PT. [illegible] [illegible]	3.780.000,00		3.780.000,00	2.705.000,00
216	2024 0813 004	13/08/2024	26/08/2024	13 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2025	PT. [illegible] [illegible]	5.500.000,00		5.500.000,00	4.410.000,00

217	2024.0625.042	20.08.2024	25.09.2024	1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025	[illegible]	2.524.237,00	54.435,00	2.118.718,00		2.340.74,75
218	2024.0625.042	20.08.2024	25.09.2024	1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025	[illegible]	2.524.237,00	54.435,00	2.118.718,00		2.340.74,75
219	2024.0625.036	20.08.2024	25.09.2024	1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025	[illegible]	2.524.237,00	54.435,00	2.118.718,00		2.340.74,75
220	2024.0625.050	20.08.2024	25.09.2024	1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2025	[illegible]	2.524.237,00	54.435,00	2.118.718,00		2.340.74,75
221	2024.0625.035	22.08.2024	01.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	802.966,00		802.966,00		489.580,60
222	2024.0625.061	26.08.2024	30.08.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	1.637.280,00		1.637.280,00		935.040,00
223	2024.0625.055	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	3.680.000,00		3.680.000,00		2.526.040,00
224	2024.0625.040	26.08.2024	05.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	3.680.000,00		3.680.000,00		2.280.040,00
225	2024.0625.064	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	3.411.000,00		3.411.000,00		2.274.000,00
226	2024.0625.060	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	3.780.000,00		3.780.000,00		2.520.000,00
227	2024.0625.060	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	4.095.000,00		4.095.000,00		2.730.000,00
228	2024.0625.056	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	3.411.000,00		3.411.000,00		2.274.000,00
229	2024.0625.059	26.08.2024	05.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	4.780.000,00		4.780.000,00		3.520.000,00
230	2024.0625.036	26.08.2024	10.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	4.815.011,00		4.815.011,00		2.742.106,43
231	2024.0625.039	26.08.2024	12.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	5.265.000,00		5.265.000,00		3.071.250,00
232	2024.0627.049	27.08.2024	04.09.2024	1 Eylül 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	1.150.000,00		1.150.000,00		760.360,00
233	2024.0627.041	27.08.2024	18.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	662.025,30		662.025,00		386.181,25
234	2024.0627.051	27.08.2024	26.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	852.750,30		852.750,00		497.437,55
235	2024.0627.051	27.08.2024	26.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	852.750,30		852.750,00		497.437,55
236	2024.0901.004	01.09.2024	20.12.2024	1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025	[illegible]	5.725.000,00	376.961,01	5.348.961,00		1.552.500,00
237	2024.0905.001	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	426.975,30		426.975,00		284.250,00
238	2024.0905.002	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	426.975,30		426.975,00		284.250,00
239	2024.0905.003	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	426.975,30		426.975,00		284.250,00
240	2024.0905.004	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	426.975,30		426.975,00		284.250,00
241	2024.0905.005	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	432.550,30		432.550,00		288.800,00
242	2024.0905.006	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	568.500,30		568.500,00		378.000,00
243	2024.0905.007	05.09.2024	18.09.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	710.625,00		710.625,00		473.750,00
244	2024.0910.030	10.09.2024	27.09.2024	1 September 2024 - 31 November 2025	[illegible]	1.305.500,00		1.305.500,00		1.020.250,00
245	2024.0910.031	10.09.2024	27.09.2024	1 September 2024 - 31 November 2025	[illegible]	2.037.500,00		2.037.500,00		1.296.250,00
246	2024.0911.030	12.09.2024	27.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	5.265.000,00		5.265.000,00		1.971.250,00
247	2024.0911.030	12.09.2024	27.09.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	6.425.000,00		5.425.000,00		1.348.500,00
248	2024.0911.032	12.09.2024	03.10.2024	1 September 2024 - 31 November 2025	[illegible]	3.525.000,00		1.525.000,00		1.103.000,00
249	2024.0914.042	14.09.2024	11.10.2024	1 September 2024 - 31 November 2025	[illegible]	6.161.000,00		5.161.000,00		3.151.610,33
250	2024.0919.034	19.09.2024	06.10.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	1.612.500,00		1.512.500,00		1.075.000,00
251	2024.0919.037	19.09.2024	15.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	8.022.000,00		8.122.015,00		4.473.555,33
252	2024.0919.045	19.09.2024	15.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	11.722.250,00		11.357.364,00		6.850.033,00
253	2024.0919.053	19.09.2024	14.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	2.661.499,00	53.000,00	2.376.724,00		1.553.682,08
254	2024.0919.054	19.09.2024	15.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	1.196.244,00		1.196.244,00		814.263,33
255	2024.0919.054	19.09.2024	15.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	239.00		239.00		159.60,02
256	2024.0925.056	25.09.2024	17.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	22.124.288,00		22.124.288,00		12.936.126,30
257	2024.0919.047	19.09.2024	07.10.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	2.090.325,00		2.090.325,00		1.544.250,00
258	2024.0919.055	19.09.2024	09.10.2024	1 September 2024 - 31 September 2025	[illegible]	18.181.300,00		18.181.314,00		12.120.875,41
259	2024.0930.009	30.09.2024	14.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	10.827.016,00		10.827.016,00		6.315.750,00
260	2024.0919.044	19.09.2024	14.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	5.620.250,00		5.620.250,00		3.444.631,67
261	2024.0919.055	19.09.2024	15.10.2024	1 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2025	[illegible]	25.676.954,00		25.676.954,00		14.966.400,00

262	2024 [illegible]	[illegible] 2024	15-10-2024	[illegible]	PT BIAKIM	6 015 512,00		6 016 512,00	1 503 512,00
263	2024 [illegible]	[illegible] 2024	15-10-2024	[illegible]	PT BIAKIM	8 507 205,00		8 507 205,00	1 503 896,58
264	2024 100 025	04-10-2024	25-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 153 410,00		2 153 410,00	1 205 516,67
265	2024 100 026	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	521 431,00		521 431,00	347 620,67
266	2024 100 027	04-10-2024	25-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 421 406,00	99 457	2 514 156,00	1 514 204,00
267	2024 100 028	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 201 181,00		2 201 181,00	1 412 206,67
268	2024 100 029	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 421 406,00		2 421 406,00	1 614 264,00
269	2024 100 030	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 404 039,00		2 404 039,00	1 202 [illegible]
270	2024 100 031	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 421 406,00		2 421 406,00	1 614 264,00
271	2024 100 032	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 404 039,00		2 404 039,00	1 602 692,00
272	2024 100 033	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 989 056,00		2 989 056,00	1 992 037,33
273	2024 100 034	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 153 410,00		2 153 410,00	1 435 606,67
274	2024 100 035	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 404 039,00		2 404 039,00	1 602 692,00
275	2024 100 036	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 989 056,00		2 989 056,00	1 992 037,33
276	2024 100 040	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 703 181,00		2 703 181,00	1 802 120,67
277	2024 100 041	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 818 750,00		2 818 750,00	1 879 166,67
278	2024 100 042	04-10-2024	15-10-2024	[illegible]	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	2 404 068,00		2 404 068,00	1 602 712,00
279	2024 100 043	04-10-2024	25-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	1 043 [illegible]	97 [illegible]	1 043 [illegible]	695 [illegible]
280	2024 100 044	04-10-2024	30-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	1 754 816,00		1 754 816,00	1 316 [illegible]
281	2024 100 049	04-10-2024	30-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	561 750,00		561 750,00	421 312,50
282	2024 100 050	04-10-2024	30-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	1 062 352,00		1 062 352,00	797 064,00
283	2024 100 052	04-10-2024	25-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	1 754 816,00	35 857,00	1 789 813,00	1 192 875,33
284	2024 100 056	04-10-2024	30-10-2024	[illegible]	PT ANASTASIA INDUSTRINDO	2 010 512,00		6 012 512,00	4 512 384,00
285	2024 100 057	04-10-2024	29-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	561 750,00		6 012 512,00	4 511 064,00
286	2024 100 060	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	PT [illegible]	5 761 512,00		5 761 512,00	2 401 048,00
287	2024 100 061	04-10-2024	24-10-2024	[illegible]	SUKSES [illegible]	2 138 [illegible]		2 138 [illegible]	1 247 205,25
288	2024 100 062	04-10-2024	16-12-2024	[illegible]	PT [illegible]	5 701 512,00	228 061,00	5 929 573,00	3 801 048,00
289	2024 100 063	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	PT [illegible]	5 701 512,00	228 061,00	5 929 573,00	3 801 609,00
290	2024 100 064	04-10-2024	24-10-2024	[illegible]	SUKSES [illegible]	2 112 500,00		2 112 500,00	1 232 291,67
291	2024 100 065	04-10-2024	11-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	6 016 512,00		6 016 512,00	4 511 064,00
292	2024 100 066	04-10-2024	11-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	6 016 512,00		6 016 512,00	4 511 064,00
293	2024 100 067	04-10-2024	16-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	6 016 512,00		6 016 512,00	4 511 064,00
294	2024 100 068	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	PT [illegible]	5 701 512,00	228 061,00	5 929 573,00	3 801 048,00
295	2024 100 069	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	PT [illegible]	5 701 512,00	228 061,00	5 929 573,00	3 801 048,00
296	2024 100 074	04-10-2024	23-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	8 077 162,00		8 077 162,00	2 [illegible]
297	2024 100 075	04-10-2024	29-10-2024	[illegible]	PT [illegible]	8 077 162,00		8 077 162,00	6 [illegible]
298	2024 100 076	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	[illegible]	4 225 000,00		4 225 000,00	2 [illegible]
299	2024 100 077	04-10-2024	17-12-2024	[illegible]	[illegible]	1 269 [illegible]		1 269 [illegible]	801 [illegible]
300	2024 100 078	04-10-2024	29-10-2024	[illegible]	[illegible]	470 [illegible]		470 [illegible]	313 [illegible]
301	2024 100 079	04-10-2024	24-10-2024	[illegible]	[illegible]	1 187 815,00		1 187 815,00	890 861,25
302	2024 100 080	04-10-2024	29-10-2024	[illegible]	[illegible]	1 862 [illegible]		1 862 [illegible]	1 241 [illegible]
303	2024 100 [illegible]	[illegible] 2024	24-10-2024	[illegible]	[illegible]	2 150 000,00		2 150 000,00	1 612 500,00
304	2024 [illegible]	15-10-2024	24-12-2024	[illegible]	[illegible]	5 [illegible]	256 [illegible]	5 443 [illegible]	3 [illegible]
305	2024 [illegible]	15-10-2024	18-11-2024	[illegible]	PT [illegible]	6 [illegible]		6 [illegible]	5 [illegible]
306	2024 [illegible]	[illegible] 2024	04-11-2024	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]		1 [illegible]	1 [illegible]

107	2024-1027-013	23-10-2024	23-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	DINARIS MEKAR PRATAMA	5.701.512,00		5.701.512,00		4.259.154,00
108	2024-1027-027	27-10-2024	27-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.612.500,00		1.612.500,00		1.299.375,00
109	2024-1023-028	23-10-2024	23-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.425.938,00		1.425.938,00		1.069.015,00
110	2024-1021-029	21-10-2024	30-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.425.938,00		1.425.938,00		1.069.015,00
111	2024-1021-030	21-10-2024	30-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.425.938,00		1.425.938,00		1.069.015,00
112	2024-1021-031	21-10-2024	30-10-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.425.938,00		1.425.938,00		1.069.015,00
113	2024-1030-032	30-10-2024	30-10-2024	1 November 2024 s/d 1 November 2025	PT [illegible]	1.575.000,00		1.575.000,00		894.811,25
114	2024-1029-001	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
115	2024-1029-002	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
116	2024-1029-003	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
117	2024-1029-004	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	1.425.378,00		1.425.378,00		1.069.033,50
118	2024-1029-005	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
119	2024-1029-006	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
120	2024-1029-007	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
121	2024-1029-008	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
122	2024-1029-009	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
123	2024-1029-010	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	926.250,00		926.250,00		694.687,50
124	2024-1029-011	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	926.250,00		926.250,00		694.687,50
125	2024-1029-012	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	926.250,00		926.250,00		694.687,50
126	2024-1029-013	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
127	2024-1024-014	24-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
128	2024-1029-015	29-10-2024	22-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT DIAMOND FORTUNE RAYA	712.689,00		712.689,00		534.516,75
129	2024-1104-016	04-11-2024	18-11-2024	01 November 2024 s/d 31 November 2025	CV JAYA PRATAMA	4.271.724,00		4.271.724,00		3.629.965,40
130	2024-1104-017	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	3.158.659,00		3.158.659,00		2.805.436,98
131	2024-1104-018	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	4.271.724,00		4.271.724,00		1.815.267,00
132	2024-1101-019	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	6.158.941,00		6.158.941,00		3.825.162,98
133	2024-1104-020	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	6.176.153,00		6.176.153,00		5.641.137,70
134	2024-1104-021	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	5.475.026,00		5.475.026,00		5.018.774,83
135	2024-1104-022	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	4.991.358,00		4.991.358,00		4.491.187,20
136	2024-1104-023	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	5.475.026,00		5.475.026,00		5.018.772,83
137	2024-1104-024	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	5.475.026,00		5.475.026,00		5.018.772,83
138	2024-1104-025	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	4.991.358,00		4.991.358,00		4.491.187,20
139	2024-1104-026	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	3.827.129,00		3.827.129,00		3.561.531,25
140	2024-1104-027	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	5.344.000,00		5.344.000,00		5.265.333,33
141	2024-1104-028	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	5.114.615,00		5.114.615,00		4.603.415,42
142	2024-1104-029	04-11-2024	18-11-2024	2 November 2024 s/d 2 November 2025	CV JAYA PRATAMA	4.329.600,00		4.329.600,00		3.964.886,00
143	2024-1105-030	04-11-2024	20-11-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	CV DIDIK SUKSES MANDIRI	1.187.815,00		1.187.815,00		890.861,25
144	2024-1111-031	11-11-2024	21-11-2024	14 September 2024 s/d 14 September 2025	BANK [illegible]	87.815,00		1.187.815,00		191.575,61
145	2024-1111-032	11-11-2024	9-12-2024	1 [illegible]	CV [illegible]	3.450.344,00	57.000,00	2.967.772,00		2.159.087,00
146	2024-1114-033	14-11-2024	5-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	926.250,00		926.250,00		694.687,50
147	2024-1114-040	14-11-2024	5-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	926.250,00		926.250,00		694.687,50
148	2024-1114-041	14-11-2024	5-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	633.750,00		633.750,00		475.312,50
149	2024-1114-042	14-11-2024	5-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	712.689,00		712.689,00		534.516,75
150	2024-1114-043	14-11-2024	5-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	712.689,00		712.689,00		534.516,75
151	2024-1[illegible]	20[illegible]-2024	29-11-2024	18 November 2024 s/d 18 November 2025	[illegible]	1.980.364,00		1.980.364,00		1.584.291,33

342	2024112170[illegible]	21/11/2024	22/11/2024	1 November 2024 s/d 1 November 2025	PT GAPAI ADAR BINTANG	951.252,00		951.252,00		761.810,67
343	2024112170[illegible]	21/11/2024	22/11/2024	20 November 2024 s/d 20 November 2025	ASTRA DERIBS GRAHA BA	2.346.220,00		2.346.220,00		1.876.976,62
344	2024112170[illegible]	21/11/2024	22/11/2024	20 November 2024 s/d 20 November 2025	ASTRA DERIBS GRAHA BA	2.346.220,00		2.346.220,00		1.876.976,62
345	2024112[illegible]	25/11/2024	26/11/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	DINAMIS MEDIA INDONESIA	12.900.000,00		12.900.000,00		10.320.000,00
346	2024112[illegible]	25/11/2024	27/11/2024	1 November 2024 s/d 1 November 2025	PT. [illegible]	2.072.028,00		2.072.028,00		1.657.640,00
347	2024112[illegible]	26/11/2024	28/11/2024	5 September 2024 s/d 5 September 2025	[illegible]	990.252,00		990.252,00		792.201,60
348	2024112[illegible]	26/11/2024	27/11/2024	7 September 2024 s/d 7 September 2025	TOKO [illegible]	712.669,00		712.669,00		570.135,20
349	2024112[illegible]	26/11/2024	28/11/2024	7 September 2024 s/d 7 September 2025	[illegible]	505.909,00	11.859,00	605.787,00		484.629,60
350	2024112[illegible]	26/11/2024	1-12-2024	20 September 2024 s/d 20 September 2025	KUTU ASSA LAKSANA ARSIPA KIRANA	343.625,00		443.625,00		354.900,00
351	2024112[illegible]	26/11/2024	9-12-2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	ANIBA	760.500,00		760.500,00		608.400,00
352	2024112[illegible]	26/11/2024	27/11/2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	GATAYUH NAWASENA [illegible]	16.236.640,00		17.318.944,00		13.855.155,20
353	2024112[illegible]	26/11/2024	24/12/2024	1 November 2024 s/d 1 November 2025	PT [illegible]	5.760.508,00		7.200.908,00		5.760.726,40
354	2024112[illegible]	26/11/2024	30/12/2024	1 November 2024 s/d 1 November 2025	KLINIK [illegible]	1.612.500,00		1.612.500,00		1.290.000,00
355	2024120[illegible]	03/12/2024	21/12/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	[illegible]	4.557.518,00		4.557.518,00		3.646.014,40
356	2024120[illegible]	06/12/2024	13/12/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	[illegible]	10.292.000,00		10.292.000,00		8.233.600,00
357	2024120[illegible]	06/12/2024	27/12/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	[illegible]	1.914.126,00		1.914.126,00		1.531.300,80
358	2024121[illegible]	10/12/2024	19/12/2024	1 Februari 2024 s/d 1 Februari 2025	[illegible]	1.612.969,00		1.612.969,00		1.290.375,20
359	2024121[illegible]	11/12/2024	12/12/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	PT [illegible]	4.961.625,00		4.961.625,00		3.969.300,00
360	2024121[illegible]	11/12/2024	27/12/2024	11 Januari 2025 s/d 11 Januari 2026	ASTRA DERIBS GRAHA BA	9.871.623,00		9.871.623,00		7.897.298,40
361	2024121[illegible]	11/12/2024	23/12/2024	11 Januari 2025 s/d 11 Januari 2026	ASTRA DERIBS GRAHA BA	9.871.623,00		9.871.623,00		7.897.298,40
362	2024121[illegible]	12/12/2024	26/12/2024	1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025	ADIPATIRTA PRIMA [illegible]	336.561,00		336.561,00		269.449,17
363	2024121[illegible]	12/12/2024	26/12/2024	17 Desember 2024 s/d 17 Desember 2025	ADIPATIRTA PRIMA [illegible]	336.561,00		336.561,00		269.449,17
				JUMLAH PER 31 [illegible] 2024		944.778	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]										
1	2024 [illegible]	22/03/2024	08/03/2024	1 April 2024 s/d 1 [illegible] 2025	[illegible] GRAHA TRK	7.421.000,00		12.423.140,00		4.455.792,30
2	2024 [illegible]	08/03/2024	06/06/2024	1 Mare 2024 s/d 8 Mare 2025	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	69.014,00	2.493,00	69.467,00		10.106,76
3	2024 [illegible]	04/04/2024	18/04/2024	1 Mare 2024 s/d 1 Mare 2025	PT ASSAR DAYA	8.105.000,00		8.515.000,00		1.412.909,30
4	2024 [illegible]	01/10/2024	30/10/2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH [illegible]	67.375,00		183.375,00		120.041,25
5	2024 [illegible]	26/11/2024	15/12/2024	1 Oktober 2024 s/d 1 Oktober 2025	PT [illegible]	546.000,00		546.000,00		409.500,00
				JUMLAH PER 31 DESEMBER 2024		26.701.191,00	2.493,00	26.701.972,00		6.317.115,25
				JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024		976.473.551,00	3.318.981,00	977.903.433,00		546.338.693,20

LAMPIRAN [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
[illegible]
PER 31 DESEMBER 20[illegible]

No	SKPD	Jumlah
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]

1	[illegible]				[illegible]												[illegible]
2	[illegible]				[illegible]												[illegible]
3	[illegible]				[illegible]												[illegible]
4	[illegible]				[illegible]												[illegible]
5	[illegible]				[illegible]												[illegible]
6	[illegible]				[illegible]												[illegible]
7	[illegible]				[illegible]												[illegible]
8	[illegible]				[illegible]												[illegible]
9	[illegible]				[illegible]												[illegible]
10	[illegible]				[illegible]												[illegible]
11	[illegible]				[illegible]												[illegible]
12	[illegible]				[illegible]												[illegible]
13	[illegible]				[illegible]												[illegible]
14	[illegible]				[illegible]												[illegible]
15	[illegible]				[illegible]												[illegible]
16	[illegible]				[illegible]												[illegible]
17	[illegible]				[illegible]												[illegible]
18	[illegible]				[illegible]												[illegible]
19	[illegible]				[illegible]												[illegible]
20	[illegible]				[illegible]												[illegible]
21	[illegible]				[illegible]												[illegible]
22	[illegible]				[illegible]												[illegible]
23	[illegible]				[illegible]												[illegible]
24	[illegible]				[illegible]												[illegible]
25	[illegible]				[illegible]												[illegible]
26	[illegible]				[illegible]												[illegible]
27	[illegible]				[illegible]												[illegible]
28	[illegible]				[illegible]												[illegible]
29	[illegible]				[illegible]												[illegible]
30	[illegible]				[illegible]												[illegible]
31	[illegible]				[illegible]												[illegible]
32	[illegible]				[illegible]												[illegible]
33	[illegible]				[illegible]												[illegible]
34	[illegible]				[illegible]												[illegible]
35	[illegible]				[illegible]												[illegible]
36	[illegible]				[illegible]												[illegible]
37	[illegible]				[illegible]												[illegible]
38	[illegible]				[illegible]												[illegible]
39	[illegible]				[illegible]												[illegible]
40	[illegible]				[illegible]												[illegible]
41	[illegible]				[illegible]												[illegible]
42	[illegible]				[illegible]												[illegible]
43	[illegible]				[illegible]												[illegible]
44	[illegible]				[illegible]												[illegible]
45	[illegible]				[illegible]												[illegible]
46	[illegible]				[illegible]												[illegible]
47	[illegible]				[illegible]												[illegible]
48	[illegible]				[illegible]												[illegible]
49	[illegible]				[illegible]												[illegible]
50	[illegible]				[illegible]												[illegible]
51	[illegible]				[illegible]												[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN 19

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
REALISASI PENYALURAN DANA DESA
TAHUN 2024

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
1	1807032020	Adi Luhur	Jabung	MAJU	1.136.341.000	138.495.000	255.869.600	398 534 400	283 270.200	188.846 800	138 495.000	1.274.836.000	112.19
2	1807042012	Adijaya	Pekalongan	BERKEMBANG	955 411 000	139 495 000	711 434.830	317.152 200	256.094.400	170.729.600	138.495 000	1 093 906 000	114.50
3	1807042002	Adirejo	Pekalongan	MAJU	1 216 985.000	0	191.272.400	286.908 600	443 282 400	295 521.600	0	1.216.985.000	100.00
4	1807032003	Adirejo	Jabung	MAJU	884 250 000	138 495 000	171 831.600	257.747 400	272.802 800	181 668.400	138 495 000	1 022 745 000	115.66
5	1807062005	Adiwarno	Batanghari	BERKEMBANG	690.291 000	0	180 142.200	270.214.800	263.955 600	175 968.200	0	890.291 000	100.00
6	1807032002	Asahan	Jabung	BERKEMBANG	1 305.619.000	138.495 000	157 186 400	235 779 600	547.591 800	365 061.200	138.495 000	1 449.114 000	110.61
7	1807062003	Banarejoyoso	Batanghari	BERKEMBANG	937.352 000	0	184 810.800	277.215.000	285.186 200	190 130.800	0	937 352 000	100.00
8	1807062010	Batanghari	Batanghari	BERKEMBANG	963.403 000	0	150 850.400	230 475 600	347.566 200	231.710.800	0	963.403 000	100.00
9	1807062001	Bandarjaya	Batanghari	MAJU	896.084 000	0	193 194 800	289 792.200	247.958 200	165.2 38.800	0	896.084 000	100.00
10	1807152006	Bandar Agung	Bandar Sribhawono	MAJU	1 272 147 000	138.495.000	244 720.400	367.080.600	396 207 600	264 138 400	138.495 000	1 410.642 000	110.89
11	1807022004	Bandar Negeri	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.023.040.000	0	134 134 000	201 201.000	412 623 000	275.082.000	0	1 023.040 000	100.00
12	1807122004	Banjar Agung	Sekampung Udik	MANDIRI	832.757 000	0	165 592 800	110 395.200	334 081 400	222.787 600	0	832.757.000	100.00
13	1807062009	Banjarejo	Batanghari	MAJU	1 138.730.000	0	240.222 600	372 334 200	310 885 800	207.257 200	0	1.130.700.000	100.00
14	1807062011	Batanghari	Batanghari	MAJU	972.187 000	0	209 393 200	314 074.800	269 237.400	179.491 600	0	972 187.000	100.00
15	1807242002	Batu Badak	Marga Sekampung	BERKEMBANG	1 105.286.000	138.495.000	125.819 800	188.729.400	492 448 400	328.289 600	138 495 000	1 273.793 000	112.20
16	1807122008	Bauh Gunung Sari	Sekampung Udik	MAJU	1 242.784 000	0	287 291 200	430 946 800	315 423 600	210.282 400	0	1.243.784.000	100.00
17	1807032015	Belimbing Sari	Jabung	MAJU	799 850 000	138 495 000	164 334 800	246.502.200	233 407.800	155.605 200	138 495 000	938 345 000	117.32
18	1807032014	Berangsari	Jabung	BERKEMBANG	1.033.394 000	0	234 739 400	352 107 600	267 926.800	178.619 200	0	1033.394 000	100.00
19	1807122005	Bojong	Sekampung Udik	MAJU	1.003.762.000	0	208.950.600	313.426 200	288 831.000	192.554.000	0	1.003 762.000	100.00
20	1807072011	Braja Asri	Way Jepara	BERKEMBANG	1.049.167.000	138 495.000	266 278.800	382.013 200	245.579.000	164.086.000	138 495.000	1.167 662 000	111.20
21	1807072005	Braja Catur	Way Jepara	BERKEMBANG	789 010 000	138 495 000	191.951.800	287.927 400	185 478.600	123.652 400	138 495.000	927 505.000	117.55
22	1807072004	Braja Dewa	Way Jepara	BERKEMBANG	807 525.000	0	177.892.000	266.478.000	218 277.000	145.318.000	0	807 925.000	100.00
23	1807072003	Braja Emas	Way Jepara	BERKEMBANG	805.681.000	138 495.000	163 198 400	244 797 600	238.611.000	159.074.000	138 495.000	944 176 000	117.19

Tanggal : 10-12-24 12:55:27

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	[illegible]		BARMADA		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
24	1807072002	Braja Fajar	Way Jepara	BERKEMBANG	8 [illegible] 790.000	0	202.459.800	302 680 400	185.157 600	123 438 400	0	844.736.000	100 00
25	1807222002	Braja Gemilang	Braja Selebah	BERKEMBANG	897 728.000	0	179.699.600	269.849 400	262.457 400	174 997 600	0	897.228.000	100 00
26	1807222001	Braja Harjosari	Braja Selebah	MAJU	1 058.883.000	139 495 000	213.528.000	320.293 200	213.104 800	208 736.400	139 495 000	1 194.153.000	113 12
27	1807222003	Braja Indah	Braja Selebah	MAJU	952 002 000	0	182 208.400	243 358 600	270.991.800	182 594.400	0	952.002.000	100.00
28	1807222005	Braja Kencana	Braja Selebah	MAJU	947.782.000	0	233.531.000	350 297.400	216.371 800	145.581.200	0	947 782 000	100.00
29	1807222006	Braja Luhur	Braja Selebah	BERKEMBANG	1 041 808 000	139.495.000	227.956 800	341 785.200	284.895 400	169 997 800	139 495 000	1.183 931 000	113 26
30	1807222007	Braja Mulya	Braja Selebah	BERKEMBANG	1.057.458.000	139 495 000	187 132 000	280.698.000	353 776 800	235.051.200	139.495 000	1.195 963 000	113.10
31	1807072001	Braja Sakti	Way Jepara	MAJU	1.306.395.000	139 495 000	241.905 200	362.857.800	241 905.200	160.072 800	139 495 000	1.144 890.000	113.76
32	1807222004	Braja Yekti	Braja Selebah	BERKEMBANG	1.112 651.000	139 495 000	292 179 200	438.268 800	229 045 800	152 897 200	139 495 000	1.251 188.000	112 45
33	1807122012	Brawijaya	Sekampung Udik	MANDIRI	1.407.336.000	0	513.817 200	342.544 800	330.564.400	220.309.600	0	1 407 336 000	100.00
34	1807062002	Bulana Sakti	Batanghari	BERKEMBANG	834 028.000	0	150 770 800	226.156 200	270 340 800	180 260 400	0	834 976.000	100 00
35	1807242005	Bukit Raya	Marga Sekampung	MAJU	703.370.000	0	113.294 800	169.941.000	252 081 000	168 054.000	0	703 370 000	100.00
36	1807012013	Bumi Ayu	Sukadana	BERKEMBANG	807.093.000	139 495 000	166.128.400	249 192 600	235.053 200	156 706.800	139 495.000	945.588.000	117 16
37	1807062012	Bumi Harjo	Batanghari	BERKEMBANG	1 118 232 000	0	173 220 000	259 830.000	411 109 200	274 072 800	0	1.118.232.000	100 00
38	1807132010	Bumi Jawa	Batanghari Nuban	MAJU	1.043.578.000	0	244.851.800	367 277.400	258.989 400	172.579.800	0	1 043.578.000	100 00
39	1807062013	Bumi Mas	Batanghari	BERKEMBANG	844 309 000	0	178 726 800	268 199 400	238.388.400	158 926 800	0	844.309 000	100 00
40	1807122014	Bumi Mulyo	Sekampung Udik	MAJU	841.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0 00
41	1807072003	Bumi Nabung [illegible]	Sukadana	BERKEMBANG	679.820.000	0	145.780 800	218.671 200	180 220.800	120.147 200	0	679.820 000	100.00
42	1807142003	Bumi Tinggi	Bumi Agung	BERKEMBANG	864 348.000	0	128 800 800	193.201 200	325 047.600	216 898 400	0	864.348 000	100 00
43	1807242004	Bungkuk	Marga Sekampung	MAJU	1.298.221.000	0	166.783 600	250.175 400	310 757.200	340.504.800	0	1.298 221 000	100.00
44	1807142008	Catur Swako	Bumi Agung	BERKEMBANG	859 657.000	0	171.106 400	256.770 600	319.014.000	212.676.400	0	959 657 000	100.00
45	1807132009	Cempaka Nuban	Batanghari Nuban	BERKEMBANG	973 750 000	0	186.388 800	279.583 200	304 699.800	203 113.200	0	973.750.000	100 00
46	1807142001	Donomulyo	Bumi Agung	MAJU	938.374.000	0	145 829.200	218.443.800	349.380 600	228 920.400	0	938.374 000	100.00
47	1807042006	Gedi Wetan	Pekalongan	MAJU	854.782.000	0	165 250.000	247 875 000	264.994 200	176 662 800	0	854 782.000	100.00
48	1807042011	Ganimulyo	Pekalongan	MAJU	832 184 000	0	160 251.600	240.377.400	258 933 000	172 622 000	0	832.184.000	100 00
49	1807132005	Gedung Dalem	Batanghari Nuban	MAJU	834.046 000	0	139 025.200	192 007.800	306 389.800	205.593.200	0	834 046 000	100 00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
50	1807112007	Gedung Wani	Marga Tiga	MAJU	1.229.174.000	0	239.353.200	358.594.800	336.905.600	252.606.400	0	1.229.174.000	100.00
51	1807112012	Gedungwani Timur	Marga Tiga	MAJU	765.498.000	0	167.709.600	281.552.400	177.746.400	118.497.600	0	765.498.000	100.00
52	1807242005	Giri Mulyo	Marga Sekampung	BERKEMBANG	1.489.835.000	0	267.568.800	401.351.200	492.547.800	328.385.200	0	1.489.835.000	100.00
53	1807032005	Gotong	Sekampung	MAJU	1.107.834.000	0	290.932.800	421.398.000	249.302.400	162.201.600	0	1.107.834.000	100.00
54	1807052009	Gotongpomulyo	Sekampung	BERKEMBANG	1.121.826.000	0	267.710.400	401.577.600	271.516.000	181.012.000	0	1.121.826.000	100.00
55	1807042004	Gondangrejo	Pekalongan	MAJU	1.118.845.000	0	194.568.400	291.852.600	349.454.400	282.969.600	0	1.118.845.000	100.00
56	1807122008	Gunung Agung	Sekampung Udik	MAJU	944.559.000	0	185.145.600	282.218.400	284.517.000	189.678.000	0	944.559.000	100.00
57	1807242006	Gunung Mas	Marga Sekampung	MAJU	864.654.000	138.495.000	139.161.000	207.695.000	329.096.400	219.397.600	138.495.000	1.003.149.000	115.48
58	1807032004	Gunung Makar	Jabung	MAJU	897.111.000	138.495.000	195.465.200	278.197.800	260.068.800	173.379.200	138.495.000	1.035.605.000	115.44
59	1807122013	Gunung Mulyo	Sekampung Udik	MAJU	681.967.000	0	156.200.600	234.301.200	174.979.000	116.586.000	0	681.967.000	100.00
60	1807122009	Gunung Pasir Jaya	Sekampung Udik	MANDIRI	1.274.215.000	0	409.821.600	737.281.200	317.737.200	211.604.800	0	1.274.215.000	100.00
61	1807242004	Gunung Raya	Marga Sekampung	BERKEMBANG	830.107.000	138.495.000	186.454.000	159.681.000	338.383.200	225.588.800	138.495.000	968.602.000	116.68
62	1807122010	Gunung Sugih Besar	Sekampung Udik	MAJU	1.222.401.000	0	282.217.200	423.325.800	310.414.800	206.743.200	0	1.222.401.000	100.00
63	1807032005	Gunung Sugih Kecil	Jabung	MAJU	853.232.000	0	180.232.800	270.349.200	241.560.000	161.090.000	0	853.232.000	100.00
64	1807132011	Gunung Tiga	Bandungrejo Nuban	MAJU	975.068.000	0	234.353.200	351.694.800	230.946.000	155.964.000	0	975.068.000	100.00
65	1807052006	Hargomulyo	Sekampung	MANDIRI	1.203.738.000	0	325.984.400	243.909.600	356.378.400	237.585.600	0	1.203.738.000	100.00
66	1807172005	Ilir Rendey	Melinting	BERKEMBANG	937.025.000	0	154.056.000	231.084.000	271.101.000	180.784.000	0	937.025.000	100.00
67	1807032007	Jabung	Melinting	BERKEMBANG	1.735.668.000	0	316.936.400	475.404.600	547.996.200	365.330.800	0	1.735.668.000	100.00
68	1807052015	Jadi Mulya	Sekampung	MAJU	747.585.000	0	109.350.800	164.026.200	284.524.800	189.683.200	0	747.585.000	100.00
69	1807102007	Jaya Asri	Metro Kibang	MAJU	820.551.000	0	159.129.200	238.693.800	253.636.800	169.091.200	0	820.551.000	100.00
70	1807112008	Jaya Guna	Marga Tiga	MAJU	807.620.000	0	174.352.000	261.528.000	223.044.000	148.696.000	0	807.620.000	100.00
71	1807202005	Jembrana	Wawasan Karya	MAJU	965.776.000	0	192.456.400	288.744.600	290.721.000	193.814.000	0	965.776.000	100.00
72	1807072007	Jepara	Way Jepara	BERKEMBANG	903.666.000	138.495.000	207.040.800	310.560.000	231.639.600	154.426.400	138.495.000	1.042.161.000	115.33
73	1807042007	Jojog	Pekalongan	BERKEMBANG	1.047.238.000	0	246.283.600	369.425.400	258.917.400	172.611.600	0	1.047.238.000	100.00
74	1807202008	Kali Pasir	Way Bungur	BERKEMBANG	917.508.000	0	186.507.200	279.760.800	330.444.000	220.296.000	0	917.508.000	100.00
75	1807042009	Kalibening	Pekalongan	MAJU	773.545.000	0	107.847.200	161.770.800	302.306.200	201.570.800	0	773.545.000	100.00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
76	1807202010	Karang Anom	Wawary Karya	MAJU	921.089.000	0	116.100.800	172.651.200	360.001.600	251.934.400	0	921.088.000	100.00
77	1807022010	Karang Anyar	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.404.540.000	0	346.907.600	520.361.400	327.357.600	214.008.400	0	1.404.540.000	100.00
78	1807202011	Karya Bakti	Wawary Karya	MAJU	889.272.000	0	109.440.400	209.160.600	324.602.800	216.268.400	0	889.272.000	100.00
79	1807022005	Karya Makmur	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	854.389.000	0	135.094.000	202.641.000	308.002.400	208.661.600	0	854.389.000	100.00
80	1807052013	Karya Mukti	Sekampung	BERKEMBANG	843.113.000	0	166.905.400	279.429.600	226.408.200	150.968.800	0	843.113.000	100.00
81	1807022008	Karya Tani	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	902.848.000	0	153.640.000	230.460.000	311.128.800	207.419.200	0	902.648.000	100.00
82	1807162007	Kebon Dalem	Mataram Baru	BERKEMBANG	913.325.000	0	216.796.000	325.194.000	222.801.000	148.534.000	0	913.325.000	100.00
83	1807132004	Kedaton	Batanghari Nuban	MAJU	1.380.248.000	0	306.357.000	459.581.400	368.557.400	245.711.600	0	1.380.248.000	100.00
84	1807132005	Kedaton I	Batanghari Nuban	MAJU	1.140.633.000	0	240.021.200	361.381.800	322.926.000	215.332.000	0	1.140.659.000	100.00
85	1807132006	Kedaton II	Batanghari Nuban	BERKEMBANG	790.162.000	0	165.696.400	248.044.600	225.252.600	150.168.400	0	790.162.000	100.00
86	1807192005	Kedung Ringin	Pasir Sakti	BERKEMBANG	991.594.000	0	160.508.000	240.762.000	364.194.400	236.129.600	0	991.594.000	100.00
87	1807102001	Kibang	Metro Kibang	MAJU	1.168.684.000	0	206.570.800	309.556.200	351.660.200	301.106.800	0	1.168.684.000	100.00
88	1807062001	Kota Raman	Raman Utara	MAJU	680.490.000	0	150.600.800	220.401.200	177.092.800	130.395.200	0	680.490.000	100.00
89	1807022001	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.780.170.000	0	381.254.800	566.881.000	481.221.000	320.814.200	0	1.780.170.000	100.00
90	1807192006	Labuhan Ratu	Pasir Sakti	BERKEMBANG	907.259.000	0	421.541.200	182.311.600	302.043.600	241.362.600	0	907.259.000	100.00
91	1807212001	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	MAJU	992.238.000	0	217.316.800	325.975.200	269.367.600	179.578.400	0	992.238.000	100.00
92	1807072010	Labuhan Ratu Baru	Way Jepara	MAJU	1.141.183.000	138.495.000	261.372.400	392.058.600	292.651.200	195.100.800	139.495.000	1.279.676.000	112.14
93	1807072015	Labuhan Ratu Danau	Way Jepara	BERKEMBANG	881.122.000	0	145.250.400	217.875.600	310.797.000	207.198.400	0	881.122.000	100.00
94	1807072012	Labuhan Ratu	Way Jepara	MAJU	1.299.614.000	139.495.000	286.440.000	390.660.000	380.106.400	253.405.600	139.495.000	1.430.106.000	110.00
95	1807072010	Labuhan Ratu II	Way Jepara	MAJU	1.167.719.000	0	241.417.200	362.125.800	326.505.600	217.670.400	0	1.167.719.000	100.00
96	1807212002	Labuhan Ratu III	Labuhan Ratu	BERKEMBANG	800.823.000	0	125.666.000	188.526.400	281.965.400	194.643.000	0	800.823.000	100.00
97	1807212003	Labuhan Ratu IV	Labuhan Ratu	BERKEMBANG	924.249.000	0	295.620.000	369.450.000	201.116.000	134.079.000	0	924.249.000	100.00
98	1807212011	Labuhan Ratu IX	Labuhan Ratu	MAJU	1.018.896.000	0	175.819.200	263.728.800	347.608.800	231.739.200	0	1.018.896.000	100.00
99	1807212004	Labuhan Ratu V	Labuhan Ratu	BERKEMBANG	952.284.000	0	140.835.200	223.252.800	345.117.600	232.079.400	0	952.284.000	100.00
100	1807212005	Labuhan Ratu VI	Labuhan Ratu	MAJU	972.743.000	0	133.966.600	200.953.200	283.282.600	195.508.400	0	972.743.000	100.00
101	1807212009	Labuhan Ratu VII	Labuhan Ratu	BERKEMBANG	933.030.000	0	212.288.800	318.433.200	241.384.800	160.923.200	0	933.030.000	100.00

Tanggal 30-12-24 07:04:27

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
102	1807212010	Labuhan Baru VII	Labuhan Baru	BERKEMBANG	757.763.000	0	166.349.800	254.774.400	139.883.400	100.255.600	0	757.763.000	100.00
103	1807142004	Lehan	Bumi Agung	BERKEMBANG	693.778.000	0	182.528.000	273.792.000	262.474.800	174.993.200	0	893.778.000	100.00
104	1807162006	Mandala Sari	Mataram Baru	BERKEMBANG	760.059.000	0	84.681.600	127.022.400	341.013.000	227.342.000	0	760.059.000	100.00
105	1807202007	Marga Bakti	Waway Karya	BERKEMBANG	1.272.972.000	0	198.870.800	0	462.477.000	312.316.000	0	977.685.800	76.80
106	1807102002	Marga Jaya	Metro Kibang	MAJU	1.220.521.000	0	275.234.400	412.851.600	319.461.000	212.974.000	0	1.220.521.000	100.00
107	1807142005	Marga Mulya	Bumi Agung	BERKEMBANG	764.016.000	0	143.215.600	214.823.400	243.586.200	162.390.800	0	764.016.000	100.00
108	1807202007	Margasari	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.037.736.000	0	235.243.600	364.365.400	268.276.200	179.850.800	0	1.037.736.000	100.00
109	1807102008	Margasari	Metro Kibang	MAJU	1.038.832.000	0	141.778.400	212.684.600	410.634.600	273.756.400	0	1.038.832.000	100.00
110	1807102003	Margosono	Metro Kibang	MAJU	1.038.425.000	109.496.000	205.385.200	308.077.600	314.977.200	209.984.800	109.496.000	1.170.920.000	112.84
111	1807022011	Maringgai	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	869.179.000	0	179.400.000	269.100.000	269.807.400	179.871.600	0	898.179.000	100.00
112	1807162001	Mataram Baru	Mataram Baru	MAJU	1.313.359.000	0	111.500.000	167.250.000	620.765.400	413.843.600	0	1.313.359.000	100.00
113	1807012007	Mataram Marga	Suradana	BERKEMBANG	792.285.000	0	196.199.200	294.298.800	181.072.200	120.714.800	0	792.285.000	100.00
114	1807032010	Mekar Jaya	Jabung	BERKEMBANG	879.256.000	138.495.000	135.393.200	203.089.800	324.463.500	216.309.200	138.495.000	1.017.751.000	115.75
115	1807152007	Mekar Jaya	Bandar Sukaraeno	BERKEMBANG	764.068.000	0	178.649.200	265.048.800	503.752.000	129.168.000	0	764.668.000	100.00
116	1807202008	Mekar Karya	Waway Karya	BERKEMBANG	1.136.384.000	0	143.187.200	214.780.800	456.249.600	312.166.400	0	1.136.384.000	100.00
117	1807052015	Mekar Maju	Sekampung	BERKEMBANG	969.965.000	0	180.591.200	240.086.800	781.092.200	167.594.000	0	869.965.000	100.00
118	1807052014	Mekar Mulya	Sekampung	BERKEMBANG	804.041.000	0	192.733.200	289.099.800	241.324.800	160.883.200	0	804.041.000	100.00
119	1807052017	Mekar Sari	Sekampung	BERKEMBANG	798.633.000	0	196.912.000	295.368.200	170.810.800	122.540.400	0	798.633.000	100.00
120	1807182008	Mekar Sari	Pasir Sakti	BERKEMBANG	1.084.849.000	0	232.627.200	348.940.800	301.968.600	201.312.400	0	1.084.849.000	100.00
121	1807122002	Mengandung Sari	Sekampung Udik	MAJU	890.587.000	0	151.137.600	226.706.400	307.645.800	205.097.200	0	890.587.000	100.00
122	1807022002	Muara Gading Mas	Labuhan Maringgai	MAJU	1.686.017.000	0	342.018.400	513.024.600	498.585.600	332.390.400	0	1.686.017.000	100.00
123	1807012011	Mulya Jaya	Sukadana	BERKEMBANG	1.035.751.000	0	225.607.600	338.321.400	283.129.200	188.752.800	0	1.035.751.000	100.00
124	1807142007	Mulyo Asri	Bumi Agung	MAJU	701.376.000	0	173.246.800	259.870.200	102.555.400	167.303.600	0	701.376.000	100.00
125	1807192002	Mulyo Sari	Pasir Sakti	MAJU	1.135.631.000	0	194.018.400	292.227.600	369.271.000	259.514.000	0	1.135.631.000	100.00
126	1807032015	Mumbang Jaya	Jabung	BERKEMBANG	1.072.196.000	0	270.356.000	345.064.000	296.233.600	160.622.400	0	1.072.196.000	100.00
127	1807112010	Nabang Baru	Margo Tiga	MAJU	856.824.000	0	202.012.400	313.618.600	200.575.800	133.717.200	0	856.824.000	100.00

Tanggal: 30-12-24 12:59:27

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
129	1807062007	Nampiseo	Batanghari	BERKEMBANG	876 241 000	0	133.758.800	200 636 200	325.105.400	218.737 600	0	876 241.000	100.00
130	1807032001	Negara Batin	Jabung	BERKEMBANG	1.825.451.000	138 495.000	359 534 800	552.802.200	542.465.400	361,645 600	138.495.000	1.963.546 000	107.59
131	1807062005	Negara Kelang	Sukadana	BERKEMBANG	988.121.000	0	199 239 600	279 356.400	313.513.200	209.008 800	0	988 121.000	100.00
132	1807132012	Negara Ratu	Batanghari Nuban	MAJU	960 740 000	0	199.005.600	283 308.400	292 935.600	185.290.400	0	960.740 000	100 00
133	1807032008	Negara Sake	Jabung	BERKEMBANG	886.304 000	138.495 000	173 508.200	260 254.800	271.527.000	181.018 400	138.495 000	1 024.799 000	115 63
134	1807112004	Negeri Agung	Marga Tiga	BERKEMBANG	965 564.000	0	94 642.400	141 613 600	431.524.800	297.663.200	0	965.564 000	100 00
135	1807162001	Negeri Agung	Gunung Pelindung	BERKEMBANG	1.088 062.000	0	238.644.000	351 868 000	301 411.200	200 940 800	0	1 088.962.000	100 00
136	1807112005	Negeri Jemerlang	Marga Tiga	MAJU	1.256 256.000	0	241.422.400	362 133 600	391.620.000	261 080 000	0	1 256.256.000	100.00
137	1807112003	Negeri Kalon	Marga Tiga	MAJU	1.433 223 000	0	247.426.400	371 139 600	489 794 200	325 862.800	0	1 433.222.000	100 00
138	1807112002	Negeri Tua	Marga Tiga	BERKEMBANG	864 873.000	138 495 000	190.550.400	285.825 600	233 098.200	155 398 800	138 495.000	1 003 368.000	116 01
139	1807202002	Ngesti Karya	Wiawai Karya	MAJU	1 093 960.000	0	175.556.000	263.334 000	303 042.600	202.028.000	0	1 093 960 000	100.00
140	1807162005	Nibung	Gunung Pelindung	MAJU	1.671 664.000	138 495 000	387.055.600	580.583 400	422 415 000	281 610 000	138 495.000	1.810 159 000	108 28
141	1807142002	Nyampir	Bumi Agung	BERKEMBANG	739.035.000	0	76 416 000	114.624 000	328.784.000	219.190.000	0	739 030.000	100.00
142	1807012002	Pakuan Ali	Sukadana	BERKEMBANG	1 635 689 000	0	406.180.800	609.271 200	372 102 200	248.094 800	0	1.635 689 000	100 00
143	1807012008	Pasar Sukadana	Sukadana	BERKEMBANG	1.264.681.000	0	249 047 200	373.570.800	385.237 800	256.825 200	0	1.264.681 000	100.00
144	1807132001	Pasar Sakti	Pasar Sakti	MAJU	1 178.058.000	138 495.000	208 563 600	312 845 400	362 689 400	242.559 600	138.495 000	1 266 553 000	112.25
145	1807042001	Pekalongan	Pekalongan	MANDIRI	1 083.720.000	0	312 295 200	208.196.800	337.936 800	225 291 200	0	1.083.720.000	100.00
146	1807162004	Pelindung Jaya	Gunung Pelindung	MAJU	1 004.660.000	0	163 488 000	245 232 000	357.564.000	238.376 000	0	1 004.660.000	100.00
147	1807032006	Pematang Tahan	Jabung	MAJU	1 456.220.000	138.495.000	254 249 200	531 373 800	341 756 200	227.630 800	138.495 000	1 593 715 000	109 52
148	1807162002	Pempen	Gunung Pelindung	BERKEMBANG	1 315.649 000	0	333 131 600	454 697.400	337.091.400	224 727 600	0	1 349.648.000	100 00
149	1807042003	Petungan	Marga Sekampung	BERKEMBANG	1 006.216.000	0	150 669 600	226 004 400	377 726.200	251 816 800	0	1 006 216.000	100 00
150	1807122001	Pugung Kahuripan	Sekampung Udik	MAJU	1 035.715.000	0	216 726.000	328 089 000	259 340.000	185 560.000	0	1 035 715.000	100 00
151	1807102004	Purbosembodo	Melinting Kibang	MAJU	912.289 000	0	162 111 600	243 167.400	244.236.000	162 804.000	0	912.289.000	100.00
152	1807062017	Purwobakti Mekar	Batanghari	BERKEMBANG	818.121.000	138.495 000	165.164 000	247 791 000	249 681.600	162 454.400	138 495 000	957 616.000	116 9
153	1807122015	Purwokarsono	Sekampung Udik	MAJU	918 517.000	0	172.124.000	258 189 000	201 724.200	134.482.800	0	918 517.000	100.00
154	1807192003	Purwurejo	Pasar Sakti	BERKEMBANG	859.016.000	138 495 000	141.963.600	212.945 400	282 464.200	201 642 800	138 495.000	997 511.000	116.12

Tanggal : 30-12-24 12:09:27

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
154	1807132002	Purwosari	Batanghari Nuban	MANDIRI	1.348.043.000	0	467.268.800	311.512.400	341.557.200	227.704.800	0	1.348.043.000	100.00
155	1807242007	Purwosari	Marga Sekampung	MAJU	797.925.000	0	112.756.800	169.138.200	309.616.800	206.411.200	0	797.925.000	100.00
150	1807012017	Putra Ajil	Sukadana	BERKEMBANG	744.441.000	0	152.620.400	229.380.600	217.284.000	144.856.000	0	744.441.000	100.00
157	1807012016	Putra Ajil II	Sukadana	BERKEMBANG	816.089.000	0	150.858.800	254.788.200	234.865.200	156.576.800	0	816.089.000	100.00
158	1807162002	Rajabasa Baru	Mataram Baru	BERKEMBANG	874.249.000	0	129.626.000	194.439.000	330.110.400	220.073.600	0	874.249.000	100.00
159	1807012004	Rajabasa Branghaal	Sukadana	BERKEMBANG	911.221.000	0	151.067.800	151.631.400	305.101.200	203.400.600	0	911.221.000	100.00
160	1807212006	Rajabasa Lama	Labuhan Ratu	MAJU	1.467.653.000	0	233.766.600	350.650.200	526.911.600	351.274.400	0	1.467.653.000	100.00
161	1807212007	Rajabasa Lama I	Labuhan Ratu	MAJU	951.150.000	0	237.684.400	356.526.600	213.963.400	142.575.600	0	951.150.000	100.00
162	1807212008	Rajabasa Lama II	Labuhan Ratu	MAJU	1.125.093.000	0	239.453.200	359.179.800	315.876.000	210.584.000	0	1.125.093.000	100.00
163	1807082011	Rama Puja	Raman Utara	BERKEMBANG	951.547.000	138.495.000	106.384.600	201.577.200	327.351.000	218.234.000	138.495.000	1.030.042.000	115.71
164	1807082002	Raman Aji	Raman Utara	BERKEMBANG	833.108.000	138.495.000	201.106.400	301.659.600	258.223.200	172.148.800	138.495.000	1.071.633.000	111.84
165	1807082007	Raman Endra	Raman Utara	BERKEMBANG	838.716.000	138.495.000	197.054.800	295.582.200	207.647.400	138.431.600	138.495.000	977.211.000	118.51
166	1807082008	Raman Fajar	Raman Utara	BERKEMBANG	868.830.000	138.495.000	166.299.600	247.949.400	272.220.600	182.152.400	138.495.000	1.007.125.000	115.94
167	1807082006	Ramau Fajar	Raman Utara	BERKEMBANG	902.067.000	0	193.236.400	289.854.600	251.085.600	167.590.400	0	902.067.000	100.00
168	1807012010	Ramau Jaya Udik	Sukadana	BERKEMBANG	782.347.000	0	131.334.400	197.001.600	272.436.600	181.604.400	0	782.347.000	100.00
169	1807012015	Ramau Jaya Udik	Sukadana	MAJU	1.191.835.000	0	250.059.200	375.088.800	340.012.200	226.674.800	0	1.191.835.000	100.00
170	1807082004	Raina Daya	Raman Utara	BERKEMBANG	850.423.000	138.495.000	182.416.000	273.624.000	236.629.800	157.753.200	138.495.000	969.918.000	114.09
171	1807062004	Rejo Agung	Batanghari	BERKEMBANG	806.679.000	0	150.057.600	225.086.400	259.041.000	172.854.000	0	806.679.000	100.00
172	1807082005	Rejo Binangun	Raman Utara	BERKEMBANG	847.950.000	0	182.041.200	273.061.800	235.708.200	157.138.800	0	847.950.000	100.00
173	1807082010	Rejo Kalen	Raman Utara	BERKEMBANG	846.920.000	138.495.000	191.559.800	287.339.400	220.847.600	147.208.400	138.495.000	965.415.000	114.00
174	1807152004	Rejo Mulyo	Pasir Sakti	MAJU	1.035.314.000	0	191.853.200	287.479.800	333.700.800	222.472.400	0	1.035.314.000	100.00
175	1807082009	Resco Rahayu	Raman Utara	BERKEMBANG	807.045.000	138.495.000	185.386.800	278.080.200	235.148.800	157.031.200	138.495.000	945.540.000	117.16
176	1807082003	Ruuli Setyo	Raman Utara	BERKEMBANG	844.199.000	138.495.000	181.778.400	272.667.600	230.851.800	153.901.200	138.495.000	982.694.000	116.41
177	1807132002	Sadar Sitiwaryo	Bandar Sribhawono	MAJU	1.140.977.000	138.495.000	251.192.400	376.788.600	357.787.800	205.198.400	138.495.000	1.270.472.000	112.14
178	1807052041	Sambikerto	Sekampung	BERKEMBANG	906.965.000	0	189.114.400	283.671.600	260.507.400	173.671.600	0	906.965.000	100.00
179	1807012071	Sanderejo	Jabung	BERKEMBANG	912.930.000	138.495.000	189.263.900	283.895.400	293.662.800	175.908.400	138.495.000	1.051.425.000	115.17

tanggal 30-12-24

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
180	1807062014	Selorejo	Batanghari	BERKEMBANG	861.371.000	0	133.759.600	200.639.400	316.160.200	210.788.800	0	861.371.000	100.00
181	1807172004	Sido Mukmur	Melinting	BERKEMBANG	1.330.659.000	0	318.868.800	478.303.200	320.042.200	213.994.800	0	1.330.659.000	100.00
182	1807042003	Sidodadi	Pekalongan	MAJU	1.075.523.000	0	328.001.200	493.351.000	331.952.000	221.008.000	0	1.075.523.000	100.00
183	1807052010	Sidodadi	Sekampung	BERKEMBANG	941.532.000	0	214.318.000	321.478.200	243.501.000	162.334.000	0	941.532.000	100.00
184	1807052002	Sidomukti	Sekampung	BERKEMBANG	786.036.000	0	102.925.200	154.393.000	317.228.000	211.486.000	0	786.036.000	100.00
185	1807052003	Sidomulyo	Sekampung	MAJU	935.403.000	0	206.806.800	310.345.200	250.696.800	167.264.400	0	935.403.000	100.00
186	1807202001	Sidorahayu	Waway Karya	BERKEMBANG	1.254.743.000	0	214.026.800	321.640.200	431.205.000	287.470.400	0	1.254.743.000	100.00
187	1807122011	Sidorejo	Sekampung Utik	MANDIRI	1.528.990.000	138.495.000	401.213.400	327.475.600	425.660.600	283.920.400	138.495.000	1.668.285.000	109.06
188	1807122007	Sindang Anom	Sekampung Utik	MAJU	1.514.846.000	0	324.103.200	486.189.800	422.707.800	281.805.200	0	1.514.846.000	100.00
189	1807042005	Sriman	Pekalongan	MAJU	1.156.128.000	0	246.574.800	369.862.200	323.814.600	215.876.400	0	1.156.128.000	100.00
190	1807052015	Sri Basuki	Batanghari	BERKEMBANG	805.522.000	0	101.544.600	272.017.200	210.806.000	140.664.000	0	805.522.000	100.00
191	1807072008	Sri Rejeki	Way Jepara	BERKEMBANG	905.257.000	0	219.444.000	329.166.000	213.386.200	142.650.800	0	905.257.000	100.00
192	1807072006	Sri Wangi	Way Jepara	BERKEMBANG	636.905.000	0	139.778.000	209.667.000	172.476.000	114.984.000	0	636.905.000	100.00
193	1807152001	Srikaweno	Bandar Sribhawono	MANDIRI	1.117.760.000	0	320.016.000	213.344.000	350.640.000	233.760.000	0	1.117.760.000	100.00
194	1807022009	Srigading	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.238.172.000	0	281.422.400	422.133.600	326.789.600	217.826.400	0	1.238.172.000	100.00
195	1807152003	Srimenanti	Bandar Sribhawono	MANDIRI	921.247.000	0	235.545.600	157.030.400	317.232.600	211.438.400	0	921.247.000	100.00
196	1807022003	Srimulyani	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	1.095.637.000	0	227.857.600	341.786.400	297.715.600	198.477.200	0	1.095.637.000	100.00
197	1807152004	Sripendowo	Bandar Sribhawono	MAJU	890.076.000	0	175.548.400	263.322.600	330.723.000	220.482.000	0	890.076.000	100.00
198	1807132013	Sukaberi	Batanghari Nuban	MAJU	810.132.000	0	116.043.200	174.064.800	312.014.400	208.009.600	0	810.132.000	100.00
199	1807012001	Sukadana	Sukadana	BERKEMBANG	1.167.973.000	0	279.438.800	419.113.200	281.670.600	187.760.400	0	1.167.973.000	100.00
200	1807112009	Sukadana Baru	Waway Tiga	MAJU	1.402.682.000	0	293.428.000	440.142.000	401.467.200	267.644.800	0	1.402.682.000	100.00
201	1807012012	Sukadana Ilir	Sukadana	MANDIRI	992.501.000	0	278.300.400	185.573.600	317.140.200	211.426.800	0	992.501.000	100.00
202	1807012019	Sukadana Jaya	Sukadana	BERKEMBANG	1.061.267.000	0	251.830.000	422.545.000	214.015.200	142.676.800	0	1.061.267.000	100.00
203	1807012018	Sukadana Selatan	Sukadana	BERKEMBANG	786.985.000	0	209.980.000	314.970.000	163.161.000	108.774.000	0	786.985.000	100.00
204	1807012020	Sukadana Tengah	Sukadana	BERKEMBANG	910.691.000	0	201.879.200	302.968.800	243.447.600	162.295.400	0	910.691.000	100.00
205	1807012014	Sukadana Timur	Sukadana	BERKEMBANG	979.694.000	0	224.796.000	337.194.000	250.681.800	167.121.200	0	979.694.000	100.00

hal 8 dari 11 halaman

Dicetak : 30-12-2019 21:21:1

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
206	1807132001	Sukaraja Nuban	Barangher Nuban	MAJU	853.232.000	0	182.785.600	274.178.400	237.760.800	158.507.200	0	853.232.000	100.00
207	1807112000	Sukaraja Tiga	Mesgo Tiga	MAJU	1.237.936.000	0	184.796.800	277.199.400	466.562.200	310.374.800	0	1.237.936.000	100.00
208	1807052008	Sukoharjo	Sekampung	BERKEMBANG	911.965.000	0	197.097.600	295.646.400	251.472.600	167.648.400	0	911.865.000	100.00
209	1807022000	Sukorahayu	Labuhan Maringgai	BERKEMBANG	889.703.000	0	158.994.400	238.491.600	295.330.200	196.886.800	0	889.703.000	100.00
210	1807102005	Sumber Agung	Metro Kibang	MAJU	1.117.567.000	0	291.689.200	302.503.600	280.006.400	243.327.600	0	1.117.567.000	100.00
211	1807062016	Sumber Agung	Batanghari	BERKEMBANG	912.620.000	0	244.466.400	366.699.600	160.872.400	120.581.600	0	912.620.000	100.00
212	1807052001	Sumber Gede	Sekampung	MANDIRI	1.075.387.000	0	256.567.000	224.391.600	308.630.800	285.767.200	0	1.075.387.000	100.00
213	1807172006	Sumber Hadi	Melinting	BERKEMBANG	973.388.000	0	208.893.200	313.489.800	270.540.000	180.367.000	0	973.388.000	100.00
214	1807232009	Sumber Jaya	Waway Karya	BERKEMBANG	1.133.904.000	0	220.256.000	330.384.000	379.968.400	253.305.600	0	1.133.904.000	100.00
215	1807072014	Sumber Mega	Way Jepara	BERKEMBANG	974.486.000	138.495.000	172.185.600	258.248.400	376.431.200	217.670.800	138.495.000	1.112.981.000	114.21
216	1807052012	Sumber Sari	Sekampung	MAJU	881.692.000	0	218.020.400	327.030.600	201.984.600	134.656.400	0	881.692.000	100.00
217	1807072019	Sumberejo	Way Jepara	BERKEMBANG	1.136.256.000	138.495.000	203.159.600	349.739.400	332.014.200	221.342.800	138.495.000	1.274.751.000	112.19
218	1807062008	Sumberejo	Batanghari	BERKEMBANG	897.800.000	0	160.717.200	241.075.800	297.804.200	198.402.800	0	897.800.000	100.00
219	1807202001	Sumberejo	Waway Karya	MAJU	1.230.297.000	0	202.631.600	303.952.400	434.275.800	289.517.200	0	1.230.297.000	100.00
220	1807072013	Sumur Bandung	Way Jepara	BERKEMBANG	829.286.000	0	178.171.600	267.257.400	230.302.200	153.534.800	0	829.286.000	100.00
221	1807192007	Sumur Kucing	Pasir Sakti	BERKEMBANG	985.921.000	0	180.242.000	270.363.000	321.189.800	214.126.400	0	985.921.000	100.00
222	1807012009	Surabaya Udik	Sukadana	BERKEMBANG	969.908.000	0	211.576.400	317.517.600	264.427.200	176.264.800	0	969.908.000	100.00
223	1807112011	Surya Mataram	Mesgo Tiga	MAJU	1.340.827.000	0	208.270.000	312.405.000	491.971.200	327.980.800	0	1.340.827.000	100.00
224	1807062002	Taman Asri	Purbolinggo	MANDIRI	1.161.708.000	0	408.947.400	272.631.600	288.077.400	192.051.600	0	1.161.708.000	100.00
225	1807062003	Taman Bogo	Purbolinggo	BERKEMBANG	905.432.000	0	161.188.400	241.782.000	361.470.000	240.984.400	0	905.432.000	100.00
226	1807062005	Taman Cari	Purbolinggo	MAJU	1.119.253.000	0	207.510.400	311.265.600	380.286.200	240.190.800	0	1.119.253.000	100.00
227	1807062006	Taman Endah	Purbolinggo	MAJU	1.217.970.000	138.495.000	243.342.400	365.013.600	367.768.400	243.845.600	138.495.000	1.356.465.000	111.37
228	1807062007	Taman Fajar	Purbolinggo	MAJU	1.210.578.000	138.495.000	256.145.200	384.217.800	342.129.000	228.088.000	138.495.000	1.349.073.000	111.44
229	1807252006	Taman Negeri	Way Bungur	MAJU	862.333.000	0	160.010.000	240.015.000	277.380.800	184.923.200	0	862.333.000	100.00
230	1807062004	Tambah Dadi	Purbolinggo	BERKEMBANG	924.979.000	138.495.000	150.288.400	225.432.600	329.464.800	219.643.200	138.495.000	1.063.374.000	114.93
231	1807062011	Tambah Luhur	Purbolinggo	BERKEMBANG	769.179.000	0	137.297.600	205.946.400	255.561.000	170.374.000	0	769.179.000	100.00

Tanggal 30-12-24 Pukul 07:

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NOMEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
232	1907232001	Tambah Subur	Way Bungur	MAJU	1.021.937.000	0	201.430.000	302.145.000	311.053.200	207.368.800	0	1.021.997.000	100.00
233	1907172002	Tanjung Aji	Melinting	BERKEMBANG	1.345.780.000	0	249.021.600	372.032.400	435.635.800	290.290.400	0	1.345.780.000	100.00
234	1907112001	Tanjung Harapan	Marga Tiga	MAJU	1.088.835.000	0	210.180.200	315.208.800	336.813.000	224.542.000	0	1.088.835.000	100.00
235	1907062009	Tanjung Iman	Purbolinggo	MAJU	964.921.000	0	170.840.000	256.260.000	322.692.600	215.128.400	0	964.921.000	100.00
236	1907062012	Tanjung Kesuma	Purbolinggo	BERKEMBANG	960.129.000	0	170.124.000	255.185.000	320.891.400	213.927.600	0	960.129.000	100.00
237	1907232002	Tanjung Rencong	Way Bungur	MAJU	874.872.000	0	134.472.000	201.708.000	323.215.200	215.476.800	0	874.872.000	100.00
238	1907032018	Tanjung Sari	Jabung	BERKEMBANG	969.499.000	138.495.000	140.005.200	210.007.600	368.991.800	245.994.400	138.495.000	1.104.994.000	114.33
239	1907232003	Tanjung Tiga	Way Bungur	MAJU	970.466.000	0	178.668.800	268.303.200	313.975.800	209.317.200	0	970.466.000	100.00
240	1907202006	Tanjung Wang	Waway Karya	MAJU	1.189.474.000	0	225.450.400	338.175.600	374.909.800	249.938.200	0	1.189.474.000	100.00
241	1907172003	Tebing	Melinting	BERKEMBANG	1.256.629.000	0	235.918.400	353.876.000	400.000.800	266.667.200	0	1.256.629.000	100.00
242	1907062007	Tegal Gondo	Purbolinggo	BERKEMBANG	749.911.000	0	130.765.200	200.977.800	249.268.800	166.179.200	0	749.911.000	100.00
243	1907202007	TegalOmbo	Way Bungur	MAJU	851.642.000	0	122.379.600	185.388.200	325.917.000	217.278.000	0	851.642.000	100.00
244	1907062010	Tegal Yoso	Purbolinggo	MAJU	1.196.220.000	138.495.000	126.897.200	280.345.800	436.788.200	291.193.800	138.495.000	1.333.715.000	111.58
245	1907062008	Telogorejo	Bolanghar	BERKEMBANG	779.882.000	0	176.272.400	264.408.600	292.920.600	195.200.400	0	779.882.000	100.00
246	1907162002	Teluk Dalam	Malahan Baru	MAJU	1.034.136.000	0	69.884.400	104.826.600	515.966.200	343.978.800	0	1.034.136.000	100.00
247	1907042006	Terbanga Marga	Sukadana	BERKEMBANG	826.645.000	0	176.814.800	265.722.200	232.264.600	154.843.200	0	826.645.000	100.00
248	1907122003	Toba	Sekampung Udik	MAJU	801.835.000	0	117.431.200	175.146.800	304.964.200	203.292.800	0	801.835.000	100.00
249	1907062008	Tolo Harjo	Purbolinggo	MAJU	1.177.769.000	138.495.000	226.954.000	340.431.000	363.230.400	242.153.600	138.495.000	1.316.264.000	111.76
250	1907232004	Tolo Mulyo	Way Bungur	MAJU	1.069.365.000	0	135.826.800	203.740.200	437.678.200	291.919.200	0	1.069.365.000	100.00
251	1907232005	Tom Projo	Way Bungur	BERKEMBANG	784.801.000	0	122.154.800	183.232.200	297.649.400	191.765.600	0	784.801.000	100.00
252	1907202003	Tri Tunggal	Waway Karya	MAJU	1.142.748.000	0	120.090.000	180.135.000	535.513.600	357.009.200	0	1.142.748.000	100.00
253	1907062004	Tromuyo	Sekampung	BERKEMBANG	971.327.000	0	185.316.000	277.974.000	248.622.200	163.214.800	0	875.327.000	100.00
254	1907112010	Trigiyo	Marga Tiga	MAJU	956.595.000	0	193.678.000	290.517.000	322.840.000	148.560.000	0	956.595.000	100.00
255	1907132007	Trimomulyo	Bolanghari Nutan	MAJU	798.633.000	0	165.171.200	247.756.800	226.429.000	159.282.000	0	798.633.000	100.00
256	1907132003	Tuking Baru	Bolanghari Nutan	MAJU	908.767.000	0	214.636.800	321.955.200	220.305.000	148.670.000	0	908.767.000	100.00
257	1907162005	Tuking Pasir	Malahan Baru	MAJU	842.352.000	0	124.621.600	187.022.400	318.178.000	212.119.200	0	842.352.000	100.00

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NONEARMARK		EARMARK		TAMBAHAN DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	%
							TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2			
259	1807042006	Tukusrejo	Pekalongan	MANDIRI	1.085.071.000	0	327.048.800	216.031.200	329.995.800	215.997.200	0	1.085.071.000	100.00
259	1807172001	Wana	Melinting	BERKEMBANG	1.491.939.000	0	258.859.500	398.280.400	508.874.000	327.916.000	0	1.491.939.000	100.00
260	1807152005	Waringin Jaya	Bandar Sribhawono	BERKEMBANG	784.715.000	0	116.618.000	178.227.000	292.602.000	195.068.000	0	784.715.000	100.00
261	1807162004	Way Abung	Mataram Baru	MAJU	787.916.000	0	162.093.700	243.004.800	229.744.800	153.160.200	0	787.916.000	100.00
262	1807102003	Way Mili	Gunung Pelindung	MAJU	843.365.000	0	146.090.000	219.735.000	286.264.000	190.856.000	0	843.365.000	100.00
263	1807052007	Wonokaro	Sekampung	BERKEMBANG	889.303.000	0	179.800.000	269.850.000	284.091.800	176.061.200	0	889.303.000	100.00
264	1807042010	Wonosari	Pekalongan	MAJU	858.148.000	0	175.894.000	263.841.000	251.346.000	167.564.000	0	858.148.000	100.00
Total					265.835.456.000	7.063.245.000	53.281.937.000	79.736.451.800	81.280.264.000	54.192.177.200	7.063.245.000	271.582.076.800	102.23